BUKU REFERENSI

MANAJEMEN PARIWISATA BERKELANJUTAN

KONSEP, STRATEGI, DAN IMPLEMENTASI



- Dr. Ir. Agustina Nurul Hidayati, M.T.
- Bukhari Muslim, S.E., M.M., M.Si., C.TL., C.BC., C.SM., C.ME., C.LI.
- Dr. Ir. Ardiyanto Maksimilianus Gai, S.T., M.Si., M.M.
- I Nyoman Tri Sutaguna, S.ST.Par., M.Par.

BUKU REFERENSI

MANAJEMEN PARIWISATA BERKELANJUTAN

KONSEP, STRATEGI, DAN IMPLEMENTASI

Dr. Ir. Agustina Nurul Hidayati, M.T.
Bukhari Muslim, S.E., M.M., M.Si., C.TL., C.BC., C.SM., C.ME., C.LI.
Dr. Ir. Ardiyanto Maksimilianus Gai, S.T., M.Si., M.M.
I Nyoman Tri Sutaguna, S.ST.Par., M.Par.

MANAJEMEN PARIWISATA BERKELANJUTAN
KONSEP, STRATEGI, DAN IMPLEMENTASI

Ditulis oleh:

Dr. Ir. Agustina Nurul Hidayati, M.T.
Bukhari Muslim, S.E., M.M., M.Si., C.TL., C.BC., C.SM., C.ME., C.LI.
Dr. Ir. Ardiyanto Maksimilianus Gai, S.T., M.Si., M.M.
I Nyoman Tri Sutaguna, S.ST.Par., M.Par.

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang keras memperbanyak, menerjemahkan atau mengutip baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku tanpa izin tertulis dari penerbit.

ISBN: 978-634-316-087-8
IV + 241 hlm; 18,2 x 25,7 cm.
Cetakan I, Oktober 2026

Desain Cover dan Tata Letak:
Melvin Mirsal

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh
PT Media Penerbit Indonesia
Royal Suite No. 6C, Jalan Sedap Malam IX, Sempakata
Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan 20131
Telp: 081362150605
Email: ptmediapenerbitindonesia@gmail.com
Web: https://mediapenerbitindonesia.com
Anggota IKAPI No.088/SUT/2024

KATA PENGANTAR

Pariwisata merupakan sektor strategis yang memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, serta memperkuat identitas budaya suatu daerah. Namun, perkembangan pariwisata yang tidak terkelola dengan baik dapat menimbulkan berbagai permasalahan, seperti kerusakan lingkungan, degradasi budaya lokal, serta ketimpangan sosial ekonomi. Oleh karena itu, pendekatan pariwisata berkelanjutan menjadi suatu kebutuhan yang mendesak agar aktivitas pariwisata dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi generasi saat ini maupun yang akan datang.

Buku referensi ini membahas secara komprehensif mengenai konsep dan praktik manajemen pariwisata berkelanjutan, mulai dari pengantar pariwisata dan pembangunan berkelanjutan, landasan teoretis seperti *triple bottom line* dan teori stakeholder, hingga perencanaan dan strategi pengelolaan destinasi wisata. Selain itu, buku referensi ini membahas aspek tata kelola dan kebijakan, ekonomi pariwisata, dimensi sosial budaya, serta manajemen lingkungan yang mencakup konservasi, pengelolaan limbah, dan mitigasi perubahan iklim. Buku referensi ini juga membahas inovasi dan digitalisasi pariwisata, serta sistem monitoring dan evaluasi untuk memastikan keberlanjutan destinasi, sehingga memberikan pemahaman yang utuh bagi pembaca dalam mengembangkan pariwisata yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Semoga buku referensi ini dapat memberikan manfaat dalam mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan.

Salam Hangat,

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **ii**
BAB I PENGANTAR PARIWISATA DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN **1**
A. Konsep Dasar Pariwisata 1
B. Evolusi Pembangunan Pariwisata 9
C. Prinsip Pembangunan Berkelanjutan 14
D. Urgensi Pariwisata Berkelanjutan 18
BAB II LANDASAN TEORETIS PARIWISATA BERKELANJUTAN **23**
A. *Triple Bottom Line* (Ekonomi, Sosial, Lingkungan) 23
B. Teori *Stakeholder* dalam Pariwisata 33
C. Community-Based Tourism 40
D. *Carrying Capacity* dan Daya Dukung Destinasi 45
BAB III PERENCANAAN PARIWISATA BERKELANJUTAN **51**
A. Perencanaan Destinasi Wisata 51
B. Analisis Potensi dan Dampak Pariwisata 55
C. Zonasi dan Tata Ruang Pariwisata 62
D. Perencanaan Berbasis Partisipasi Masyarakat 67
BAB IV STRATEGI PENGELOLAAN DESTINASI **71**
A. Manajemen Daya Tarik Wisata 71
B. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Budaya 75
C. Pengembangan Produk Wisata Berkelanjutan 81
D. Pengendalian Dampak Lingkungan 85
BAB V TATA KELOLA DAN KEBIJAKAN PARIWISATA **91**
A. Regulasi dan Kebijakan Pariwisata 91
B. Peran Pemerintah dan Swasta 96
C. Kemitraan Publik–Swasta 102
D. Good Tourism Governance 105
BAB VI EKONOMI PARIWISATA BERKELANJUTAN **109**
A. Kontribusi Pariwisata terhadap Perekonomian 109
B. Analisis Dampak Ekonomi Lokal 113
C. Model Bisnis Pariwisata Berkelanjutan 116

D. Pemberdayaan UMKM Pariwisata 121
BAB VII DIMENSI SOSIAL DAN BUDAYA 127
A. Dampak Sosial Pariwisata 127
B. Pelestarian Budaya Lokal 130
C. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat 134
D. Pariwisata Inklusif dan Berkeadilan 138
BAB VIII MANAJEMEN LINGKUNGAN DALAM PARIWISATA 143
A. Konservasi dan Keanekaragaman Hayati 143
B. Pengelolaan Limbah dan Energi 149
C. Sertifikasi dan Standar Lingkungan 156
D. Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 162
BAB IX INOVASI DAN DIGITALISASI PARIWISATA 173
A. Smart Tourism dan Digital Marketing 173
B. Teknologi dalam Pengelolaan Destinasi 184
C. *Big Data* dan Analisis Pengunjung 189
D. Tantangan Digitalisasi Pariwisata 192
BAB X MONITORING DAN EVALUASI PARIWISATA BERKELANJUTAN 199
A. Indikator Kinerja Keberlanjutan 199
B. Sistem Monitoring dan Pelaporan 203
C. Audit dan Evaluasi Dampak 206
D. Continuous Improvement dalam Destinasi 209
BAB XI PENUTUP 217
DAFTAR PUSTAKA 219
GLOSARIUM 231
INDEKS 233
BIOGRAFI PENULIS 237
SINOPSIS 241

BAB I
PENGANTAR PARIWISATA DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Pariwisata merupakan sektor strategis yang memiliki kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan identitas budaya suatu daerah. Dalam konteks pembangunan global, pariwisata tidak lagi dipandang semata sebagai aktivitas rekreasi, melainkan sebagai instrumen transformasi sosial dan ekonomi yang menuntut pengelolaan secara terencana, terpadu, dan bertanggung jawab.

Pembangunan berkelanjutan dalam sektor pariwisata menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan keberlanjutan sosial budaya agar manfaatnya dapat dirasakan oleh generasi kini dan mendatang. Oleh karena itu, pengantar pariwisata dan pembangunan berkelanjutan menjadi landasan penting untuk memahami bagaimana kebijakan, perencanaan, serta partisipasi masyarakat dapat disinergikan guna menciptakan sistem pariwisata yang inklusif, berdaya saing, dan ramah lingkungan.

A. Konsep Dasar Pariwisata

Konsep dasar pariwisata merujuk pada pemahaman fundamental mengenai aktivitas perjalanan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang ke suatu destinasi di luar tempat tinggalnya untuk sementara waktu, dengan tujuan non-permanen seperti rekreasi, bisnis, pendidikan, atau kepentingan lainnya. Pariwisata tidak hanya menyangkut perpindahan wisatawan, tetapi juga melibatkan sistem yang terdiri atas destinasi, pelaku usaha, masyarakat lokal, pemerintah, serta interaksi sosial, ekonomi, dan budaya yang terjadi di dalamnya.

1. Pengertian dan Hakikat Pariwisata

Pariwisata dipahami sebagai aktivitas perjalanan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang ke suatu tempat di luar lingkungan tempat tinggalnya untuk jangka waktu sementara dengan tujuan non-permanen, seperti rekreasi, bisnis, pendidikan, maupun kepentingan sosial budaya lainnya, yang dalam pelaksanaannya melibatkan interaksi kompleks antara wisatawan, destinasi, industri pendukung, serta masyarakat lokal. Organisasi Pariwisata Dunia menyatakan bahwa pariwisata mencakup aktivitas orang-orang yang melakukan perjalanan dan tinggal di tempat di luar lingkungan biasanya tidak lebih dari satu tahun berturut-turut untuk tujuan liburan, bisnis, dan tujuan lainnya (UNWTO, 2020). Pengertian tersebut menegaskan bahwa pariwisata bukan sekadar perpindahan fisik, melainkan suatu sistem kegiatan yang terstruktur dan memiliki dimensi ekonomi, sosial, budaya, serta lingkungan yang saling berkaitan.

Hakikat pariwisata terletak pada penciptaan pengalaman (*experience*) yang bernilai dan bermakna bagi wisatawan melalui pemanfaatan potensi daya tarik alam, budaya, maupun buatan secara terencana dan bertanggung jawab. Esensi ini menempatkan pariwisata sebagai instrumen pembangunan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, memperkuat identitas budaya, serta mendorong pelestarian lingkungan apabila dikelola secara berkelanjutan. Pemahaman terhadap hakikat tersebut menjadi landasan konseptual dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengembangan pariwisata agar tidak hanya berorientasi pada jumlah kunjungan, tetapi juga pada kualitas pengalaman, kesejahteraan masyarakat lokal, dan keberlanjutan jangka panjang.

2. Unsur dan Komponen Utama Pariwisata

Pariwisata terbentuk dari sejumlah unsur yang saling terintegrasi dalam satu sistem. Unsur-unsur tersebut meliputi:

a. Wisatawan (*Tourist*)

Wisatawan (*tourist*) merupakan elemen sentral dalam sistem pariwisata karena keberadaan dan pergerakannya menjadi pemicu utama berlangsungnya aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya di destinasi tujuan, sekaligus menentukan arah pengembangan produk dan layanan wisata. Menurut Weaver dan Lawton (2021), wisatawan adalah individu yang melakukan

perjalanan sementara ke luar lingkungan tempat tinggalnya untuk berbagai tujuan non-permanen yang menghasilkan pola konsumsi khas dan interaksi tertentu dengan destinasi yang dikunjungi, sehingga definisi ini menekankan aspek perilaku, motivasi, serta dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas perjalanan tersebut.

Karakteristik wisatawan sangat beragam dan dapat dilihat dari aspek demografis, psikografis, tujuan perjalanan, serta pola pengeluaran, yang seluruhnya berpengaruh terhadap segmentasi pasar dan strategi pemasaran destinasi. Perbedaan preferensi antara wisatawan rekreasi, bisnis, pendidikan, maupun minat khusus menuntut penyedia jasa untuk menyesuaikan kualitas pelayanan, fasilitas, serta pengalaman yang ditawarkan agar sesuai dengan kebutuhan dan harapan masing-masing segmen.

b. Daya Tarik Wisata (*Attraction*)

Daya tarik wisata (*attraction*) merupakan komponen fundamental dalam sistem pariwisata karena menjadi alasan utama yang mendorong wisatawan untuk melakukan perjalanan ke suatu destinasi tertentu, baik dalam bentuk keindahan alam, kekayaan budaya, maupun hasil kreasi manusia yang memiliki nilai keunikan dan diferensiasi. Menurut Fyall, Garrod, dan Wang (2022), *attraction* dipahami sebagai sumber daya atau fitur destinasi yang memiliki kemampuan untuk menarik kunjungan wisatawan melalui kombinasi nilai simbolik, pengalaman, dan manfaat yang dirasakan pengunjung, sehingga konsep ini menekankan bahwa daya tarik tidak hanya bersifat fisik tetapi juga berkaitan dengan persepsi dan makna yang dibangun di benak wisatawan.

Keberadaan daya tarik wisata menentukan citra dan posisi kompetitif suatu destinasi dalam pasar pariwisata yang semakin dinamis dan kompetitif, karena kualitas, keaslian, serta pengelolaannya akan memengaruhi tingkat kepuasan dan loyalitas wisatawan. Daya tarik tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam kategori alam, budaya, dan buatan, yang masing-masing memerlukan pendekatan pengelolaan berbeda agar tetap lestari, autentik, serta mampu memberikan pengalaman yang bernilai bagi pengunjung.

c. Aksesibilitas (*Accessibility*)

Aksesibilitas (*accessibility*) merupakan unsur penting dalam sistem pariwisata karena menentukan tingkat kemudahan wisatawan dalam menjangkau destinasi melalui jaringan transportasi, infrastruktur, serta sistem informasi yang tersedia. Menurut Buhalis dan Amaranggana (2022), *accessibility* dalam konteks pariwisata merujuk pada tingkat kemudahan dan kenyamanan wisatawan dalam mencapai, memasuki, dan bergerak di dalam destinasi melalui dukungan transportasi fisik maupun akses digital yang terintegrasi, sehingga konsep ini tidak hanya terbatas pada infrastruktur jalan dan moda transportasi, tetapi juga mencakup kemudahan memperoleh informasi dan layanan secara daring.

Ketersediaan aksesibilitas yang baik berpengaruh langsung terhadap daya saing destinasi karena kemudahan akses akan meningkatkan minat kunjungan, memperluas jangkauan pasar, serta memperkuat konektivitas antarwilayah. Infrastruktur seperti bandara, pelabuhan, jalan raya, transportasi publik, serta sistem penunjuk arah yang jelas menjadi faktor krusial dalam menciptakan pengalaman perjalanan yang efisien dan nyaman bagi wisatawan.

d. Amenitas (*Amenities*)

Amenitas (*amenities*) merupakan komponen penting dalam sistem pariwisata karena mencakup berbagai fasilitas dan layanan pendukung yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan wisatawan selama berada di destinasi, mulai dari akomodasi, restoran, pusat perbelanjaan, hingga fasilitas kesehatan dan hiburan. Menurut Morrison (2022), *amenities* dalam pariwisata merujuk pada fasilitas dan layanan yang tersedia di destinasi untuk mendukung kenyamanan, keamanan, serta kepuasan wisatawan selama masa tinggal, sehingga amenitas dipahami sebagai elemen yang secara langsung memengaruhi kualitas pengalaman dan persepsi wisatawan terhadap suatu tempat.

Ketersediaan amenitas yang memadai dan berkualitas akan meningkatkan daya saing destinasi karena wisatawan cenderung memilih lokasi yang menawarkan kenyamanan, kemudahan akses layanan, serta standar kebersihan dan keamanan yang tinggi. Variasi amenitas yang sesuai dengan segmentasi pasar,

seperti hotel berbintang, *homestay*, restoran lokal maupun internasional, serta fasilitas rekreasi keluarga, menjadi faktor strategis dalam memperpanjang lama tinggal dan meningkatkan pengeluaran wisatawan.

e. Kelembagaan (*Ancillary Services*)

Kelembagaan (*ancillary services*) dalam pariwisata merujuk pada struktur organisasi dan institusi pendukung yang berperan dalam merencanakan, mengatur, memfasilitasi, serta mengawasi penyelenggaraan kegiatan pariwisata di suatu destinasi agar berjalan secara terkoordinasi dan berkelanjutan. Menurut Dredge dan Jamal (2022), tata kelola dan kelembagaan pariwisata mencakup jaringan aktor publik dan privat beserta aturan formal maupun informal yang mengatur interaksi, pengambilan keputusan, serta distribusi sumber daya dalam sistem pariwisata, sehingga keberadaan kelembagaan menjadi fondasi bagi efektivitas kebijakan dan kolaborasi lintas sektor.

Peran kelembagaan terlihat melalui fungsi pemerintah sebagai regulator dan fasilitator, asosiasi industri sebagai penghubung kepentingan pelaku usaha, serta lembaga promosi destinasi yang membangun citra dan strategi pemasaran secara terpadu. Koordinasi yang sinergis antaraktor tersebut akan memperkuat daya saing destinasi karena mampu menciptakan standar pelayanan, kepastian hukum, serta iklim investasi yang kondusif bagi perkembangan industri pariwisata.

3. Karakteristik Dasar Pariwisata

Pariwisata memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari sektor ekonomi lainnya. Beberapa karakteristik tersebut antara lain:

a. Tidak berwujud (*intangible*) karena yang dikonsumsi adalah pengalaman dan layanan.
b. Tidak dapat disimpan (*perishable*), artinya kapasitas layanan yang tidak terpakai tidak bisa disimpan untuk waktu berikutnya.
c. Bergantung pada kualitas pelayanan, karena kepuasan wisatawan sangat ditentukan oleh interaksi langsung dengan penyedia jasa.
d. Multisektor dan multidisipliner, melibatkan berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, dan teknologi.

4. Jenis dan Bentuk Pariwisata

Pariwisata dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuan dan motivasi perjalanan. Beberapa bentuk pariwisata yang umum berkembang antara lain:

a. Pariwisata Rekreasi

Pariwisata rekreasi merupakan salah satu bentuk pariwisata yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan hiburan, relaksasi, dan penyegaran fisik maupun psikologis melalui aktivitas perjalanan sementara ke destinasi tertentu yang menawarkan suasana berbeda dari rutinitas sehari-hari. Menurut Hall dan Page (2021), *leisure tourism* atau pariwisata rekreasi merujuk pada perjalanan yang dilakukan secara sukarela untuk tujuan kesenangan, relaksasi, dan pemanfaatan waktu luang di luar kewajiban pekerjaan atau aktivitas rutin lainnya. Definisi tersebut menegaskan bahwa inti dari pariwisata rekreasi terletak pada penggunaan waktu senggang secara sadar untuk memperoleh pengalaman menyenangkan yang mampu meningkatkan kualitas hidup individu.

Aktivitas dalam pariwisata rekreasi sangat beragam, mulai dari menikmati keindahan alam seperti pantai dan pegunungan, mengunjungi taman hiburan, hingga melakukan kegiatan santai seperti berbelanja atau menikmati kuliner khas daerah tertentu. Keberagaman pilihan aktivitas ini menunjukkan bahwa pariwisata rekreasi bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan preferensi, usia, kondisi ekonomi, serta latar belakang sosial budaya wisatawan. Karakteristik tersebut menjadikan pariwisata rekreasi sebagai segmen pasar terbesar dalam industri pariwisata karena mampu menjangkau berbagai kelompok masyarakat dengan motivasi utama mencari kesenangan dan keseimbangan hidup.

b. Pariwisata Budaya

Pariwisata budaya merupakan bentuk perjalanan yang berfokus pada pengalaman dan pemahaman terhadap warisan budaya, tradisi, seni, sejarah, serta pola kehidupan masyarakat di suatu destinasi yang memiliki kekhasan tertentu. Menurut Richards (2021), *cultural tourism* berkaitan dengan perjalanan yang dimotivasi oleh keinginan untuk belajar, mengalami, dan

mengonsumsi produk serta praktik budaya yang merepresentasikan identitas suatu tempat. Penegasan ini menunjukkan bahwa pariwisata budaya tidak hanya bersifat observasional, tetapi juga melibatkan proses interpretasi dan interaksi yang memperkaya wawasan wisatawan terhadap nilai dan makna budaya lokal.

Aktivitas dalam pariwisata budaya mencakup kunjungan ke situs sejarah, museum, cagar budaya, pertunjukan seni tradisional, festival adat, hingga partisipasi langsung dalam praktik budaya masyarakat setempat. Keaslian (*authenticity*) menjadi elemen penting karena wisatawan cenderung mencari pengalaman yang merefleksikan identitas asli suatu komunitas tanpa rekayasa berlebihan yang dapat mengurangi nilai historis dan simboliknya. Oleh karena itu, pengelolaan pariwisata budaya harus mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan komersial dan pelestarian nilai-nilai budaya agar tidak terjadi komodifikasi yang berlebihan.

c. Pariwisata Bisnis

Pariwisata bisnis merupakan bentuk perjalanan yang dilakukan individu atau kelompok dengan tujuan utama terkait kegiatan profesional, komersial, atau institusional, seperti menghadiri rapat, konferensi, pameran, maupun negosiasi kerja sama di luar tempat tinggal atau domisili kerjanya. Menurut Davidson dan Cope (2022), *business tourism* mencakup perjalanan yang dilakukan untuk tujuan pekerjaan di luar rutinitas tempat kerja tetap, termasuk kegiatan *meetings, incentives, conferences, and exhibitions* (MICE) yang memiliki karakteristik perencanaan terstruktur dan kebutuhan layanan khusus. Pengertian ini menegaskan bahwa pariwisata bisnis memiliki orientasi produktivitas dan efisiensi waktu, meskipun tetap memanfaatkan fasilitas dan infrastruktur pariwisata di destinasi tujuan.

Karakteristik pariwisata bisnis berbeda dari pariwisata rekreasi karena biasanya memiliki jadwal kegiatan yang padat, durasi tinggal yang relatif singkat, serta standar layanan yang tinggi terutama dalam aspek teknologi, konektivitas, dan fasilitas pertemuan. Permintaan terhadap hotel berbintang, pusat konvensi, layanan transportasi premium, serta dukungan

teknologi komunikasi menjadi ciri dominan dalam segmen ini, karena keberhasilan kegiatan bisnis sangat bergantung pada kelancaran fasilitas pendukung yang tersedia. Kontribusi ekonomi dari pariwisata bisnis cenderung signifikan karena tingkat pengeluaran wisatawan bisnis umumnya lebih tinggi dibandingkan wisatawan rekreasi, terutama dalam penggunaan akomodasi, konsumsi, dan jasa profesional.

d. Pariwisata Pendidikan

Pariwisata pendidikan merupakan bentuk perjalanan yang dilakukan dengan tujuan utama memperoleh pengalaman belajar, pengetahuan, dan pengembangan keterampilan melalui kunjungan ke destinasi tertentu yang memiliki nilai akademik, ilmiah, atau edukatif. Menurut Ritchie (2021), *educational tourism* merujuk pada perjalanan yang dirancang secara sadar untuk tujuan pembelajaran formal maupun informal yang memberikan pengalaman langsung sebagai bagian dari proses pendidikan. Penjelasan tersebut menegaskan bahwa pariwisata pendidikan tidak sekadar berpindah tempat, tetapi mengintegrasikan unsur kurikulum, observasi lapangan, serta interaksi kontekstual sebagai bagian dari aktivitas belajar.

Aktivitas dalam pariwisata pendidikan dapat berupa studi banding, program pertukaran pelajar, kunjungan ke situs sejarah dan budaya, penelitian lapangan, hingga pelatihan dan *workshop* yang diselenggarakan di luar institusi asal peserta. Karakteristik utama dari jenis pariwisata ini adalah adanya tujuan pembelajaran yang terstruktur, pendampingan akademik atau profesional, serta evaluasi hasil yang menjadi bagian dari proses pendidikan itu sendiri. Interaksi langsung dengan lingkungan sosial, budaya, dan alam di destinasi tujuan memberikan pengalaman empiris yang memperkaya pemahaman teoritis yang sebelumnya diperoleh di ruang kelas.

5. Sistem Pariwisata sebagai Suatu Kesatuan

Sistem pariwisata sebagai suatu kesatuan menggambarkan bahwa aktivitas pariwisata tidak berdiri sendiri, melainkan terbentuk dari rangkaian elemen yang saling terhubung dan berinteraksi secara dinamis dalam satu struktur yang terpadu. Menurut Leiper (2021), sistem pariwisata terdiri atas tiga elemen utama yaitu daerah asal wisatawan,

rute perjalanan, dan daerah tujuan wisata yang dihubungkan oleh arus wisatawan serta didukung oleh industri dan lingkungan eksternal yang memengaruhi kinerjanya. Konsep ini menegaskan bahwa keberhasilan pariwisata sangat bergantung pada keterpaduan fungsi antar komponen, bukan hanya pada kekuatan satu unsur secara terpisah.

Interaksi antara wisatawan sebagai pelaku perjalanan, destinasi sebagai pusat aktivitas, serta industri pendukung seperti transportasi, akomodasi, dan jasa lainnya membentuk suatu jaringan yang menciptakan nilai ekonomi dan pengalaman sosial budaya. Hubungan timbal balik ini menunjukkan bahwa perubahan pada satu komponen, seperti gangguan akses transportasi atau penurunan kualitas layanan, akan berdampak langsung pada keseluruhan sistem. Pendekatan sistem memungkinkan pengelola destinasi untuk memahami pola keterkaitan tersebut sehingga kebijakan yang dirumuskan lebih komprehensif dan terintegrasi.

B. Evolusi Pembangunan Pariwisata

Evolusi pembangunan pariwisata menggambarkan perubahan paradigma, strategi, serta pendekatan dalam mengelola sektor pariwisata dari waktu ke waktu seiring dengan dinamika ekonomi global, perkembangan teknologi, serta meningkatnya kesadaran terhadap dampak sosial dan lingkungan. Perjalanan historis ini menunjukkan bahwa pembangunan pariwisata tidak bersifat statis, melainkan terus bertransformasi dari orientasi pertumbuhan kuantitatif menuju pendekatan yang lebih berkelanjutan dan berbasis kualitas pengalaman. Berikut penjelasan rinci mengenai tahapan evolusi pembangunan pariwisata:

1. Tahap Eksplorasi dan Perintisan

Tahap eksplorasi dan perintisan merupakan fase awal dalam siklus perkembangan destinasi pariwisata ketika suatu wilayah mulai dikunjungi oleh sejumlah kecil wisatawan yang tertarik pada keaslian alam, budaya, atau karakter unik yang belum banyak tersentuh pembangunan komersial. Pada fase ini, kunjungan wisatawan biasanya bersifat terbatas dan didominasi oleh pelancong yang memiliki minat khusus atau kecenderungan petualangan, sehingga interaksi dengan masyarakat lokal berlangsung secara langsung dan relatif sederhana

tanpa dukungan fasilitas modern yang memadai. Butler (2020) menjelaskan bahwa tahap eksplorasi ditandai oleh jumlah wisatawan yang masih sedikit, minimnya infrastruktur khusus pariwisata, serta tingkat keterlibatan masyarakat yang masih rendah dalam penyediaan layanan formal, sehingga destinasi mempertahankan tingkat keaslian yang tinggi.

Kondisi infrastruktur pada tahap ini umumnya masih terbatas pada fasilitas dasar yang digunakan oleh masyarakat setempat, seperti jalan lokal, penginapan sederhana, atau rumah tinggal yang difungsikan sebagai tempat singgah. Aktivitas wisata berkembang secara spontan tanpa perencanaan terpadu, sehingga dampak ekonomi yang muncul masih relatif kecil dan belum menjadi sektor utama dalam struktur perekonomian daerah. Keterlibatan pemerintah dan investor eksternal juga masih minim karena destinasi belum dipandang sebagai kawasan dengan potensi komersial yang signifikan.

2. Tahap Keterlibatan (*Involvement*)

Tahap keterlibatan (*involvement*) merupakan fase perkembangan destinasi ketika masyarakat lokal mulai berperan aktif dalam aktivitas pariwisata dengan menyediakan layanan dasar seperti akomodasi sederhana, warung makan, jasa pemandu, serta transportasi lokal sebagai respons terhadap meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan. Pada fase ini, pertumbuhan kunjungan mulai menunjukkan pola musiman yang lebih jelas sehingga komunitas setempat dan pemerintah daerah mulai menyadari perlunya pengelolaan yang lebih terarah untuk mengoptimalkan manfaat ekonomi. Menurut Weaver dan Lawton (2021), tahap *involvement* ditandai oleh meningkatnya partisipasi masyarakat lokal dalam penyediaan fasilitas wisata serta mulai adanya intervensi pemerintah dalam bentuk promosi dan pengembangan infrastruktur pendukung, sehingga destinasi bergerak dari perkembangan spontan menuju arah yang lebih terencana.

Keterlibatan masyarakat dalam tahap ini menunjukkan adanya pergeseran struktur ekonomi lokal, di mana sektor pariwisata mulai menjadi sumber pendapatan tambahan yang signifikan dan memicu munculnya usaha kecil berbasis komunitas. Pemerintah daerah biasanya mulai menyusun kebijakan awal, memperbaiki aksesibilitas, serta memperkenalkan regulasi sederhana untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan wisatawan. Walaupun perkembangan ini memberikan

dampak positif terhadap pendapatan masyarakat, kapasitas pengelolaan yang masih terbatas sering kali menjadi tantangan dalam mengendalikan pertumbuhan yang semakin cepat.

3. Tahap Pengembangan (*Development*)

Tahap pengembangan (*development*) dalam siklus hidup pariwisata merupakan fase ketika destinasi mulai mengalami percepatan pertumbuhan kunjungan wisatawan yang signifikan karena masuknya investasi besar dari sektor swasta, peningkatan fasilitas, serta strategi promosi yang lebih agresif untuk menarik pasar yang lebih luas. Pada tahap ini, infrastruktur pariwisata seperti hotel, restoran, sarana transportasi, dan atraksi buatan mengalami perluasan dan modernisasi sehingga destinasi tidak lagi hanya dilihat sebagai tempat kunjungan lokal, tetapi mulai dikenal secara nasional atau internasional, sehingga peran serta pemerintah, investor, dan pelaku usaha menjadi semakin dominan dalam dinamika perkembangan destinasi. Butler (1980) menjelaskan bahwa pada fase *development*, destinasi mengalami pertumbuhan yang cepat dalam jumlah wisatawan dan fasilitas pendukung, pengaruh pasar eksternal meningkat, serta kontrol dan pengelolaan pariwisata mulai bergeser dari masyarakat lokal kepada aktor eksternal seperti perusahaan dan investor besar dalam industri pariwisata.

Pertumbuhan destinasi pada tahap pengembangan ini juga ditandai dengan semakin terintegrasinya elemen pariwisata seperti aksesibilitas yang lebih baik, pemanfaatan teknologi informasi untuk pemasaran, serta munculnya produk dan layanan kreatif yang dikemas untuk memenuhi kebutuhan segmen wisatawan yang beragam. Fenomena ini tidak hanya meningkatkan jumlah kunjungan, tetapi juga potensi pendapatan daerah, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan citra destinasi sebagai tujuan wisata yang kompetitif di pasar global. Namun, perkembangan yang cepat ini juga memerlukan perencanaan yang cermat agar dampak sosial budaya dan lingkungan dapat dikendalikan secara bijak.

4. Tahap Konsolidasi dan Pertumbuhan Massal

Tahap konsolidasi dan pertumbuhan massal merupakan fase dalam siklus perkembangan destinasi ketika jumlah kunjungan wisatawan mencapai tingkat tinggi dan relatif stabil, sehingga sektor pariwisata menjadi salah satu penopang utama perekonomian daerah.

Pada tahap ini, struktur industri pariwisata telah berkembang secara matang dengan dominasi perusahaan besar, jaringan hotel nasional maupun internasional, serta sistem pemasaran yang terintegrasi secara luas di pasar domestik dan global. Menurut Hall dan Page (2021), fase konsolidasi dalam perkembangan destinasi ditandai oleh pertumbuhan yang melambat dibandingkan tahap sebelumnya, namun volume wisatawan tetap besar dan pariwisata telah menjadi bagian penting dari struktur ekonomi lokal sehingga memerlukan manajemen yang lebih strategis dan berorientasi pada keberlanjutan.

Karakteristik utama tahap ini adalah tingginya tingkat ketergantungan ekonomi terhadap sektor pariwisata, di mana sebagian besar tenaga kerja dan pendapatan daerah bersumber dari aktivitas yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan kunjungan wisatawan. Infrastruktur dan fasilitas pendukung telah lengkap dan modern, tetapi tekanan terhadap daya dukung lingkungan, kemacetan, peningkatan harga lahan, serta perubahan sosial budaya mulai terlihat sebagai konsekuensi dari intensitas aktivitas wisata yang masif. Situasi tersebut menuntut adanya kebijakan pengendalian pertumbuhan, diversifikasi produk wisata, serta peningkatan kualitas layanan agar destinasi tetap kompetitif tanpa mengorbankan keseimbangan sosial dan ekologis.

5. Tahap Stagnasi dan Tantangan

Tahap stagnasi dan tantangan merupakan fase dalam siklus perkembangan destinasi ketika tingkat kunjungan wisatawan mencapai titik jenuh dan tidak lagi menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, bahkan cenderung mengalami penurunan secara perlahan akibat berkurangnya daya tarik dan meningkatnya persaingan dengan destinasi lain yang lebih inovatif. Pada fase ini, kapasitas fisik dan sosial destinasi sering kali telah melampaui daya dukung optimalnya, sehingga muncul berbagai persoalan seperti penurunan kualitas lingkungan, kemacetan, konflik kepentingan antara pelaku usaha dan masyarakat lokal, serta berkurangnya kepuasan wisatawan karena pengalaman yang dianggap kurang autentik. Butler (2020) menjelaskan bahwa tahap stagnasi dalam siklus hidup destinasi ditandai oleh puncak kunjungan yang telah terlampaui, ketergantungan tinggi pada pasar lama, serta meningkatnya kebutuhan akan strategi peremajaan agar destinasi tidak memasuki fase kemunduran yang lebih dalam.

Fenomena stagnasi juga berkaitan erat dengan perubahan preferensi wisatawan yang semakin dinamis, di mana tren pariwisata berbasis pengalaman, keberlanjutan, dan keaslian budaya menjadi tuntutan utama yang tidak selalu mampu dipenuhi oleh destinasi yang telah berkembang secara massal. Ketika inovasi produk dan diversifikasi atraksi tidak dilakukan secara konsisten, citra destinasi cenderung menurun dan hanya menarik segmen pasar tertentu yang sensitif terhadap harga, sehingga berdampak pada turunnya kualitas layanan akibat tekanan biaya dan persaingan tarif. Tantangan manajerial pada tahap ini meliputi kebutuhan untuk melakukan restrukturisasi tata kelola, pembaruan infrastruktur, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta penataan ulang zonasi agar distribusi manfaat ekonomi lebih merata dan tidak menimbulkan kesenjangan sosial.

6. Tahap Rejuvenasi atau Penurunan

Tahap rejuvenasi atau penurunan merupakan fase dalam siklus hidup destinasi ketika destinasi menghadapi dua kemungkinan arah perkembangan: kebangkitan kembali melalui inovasi dan restrukturisasi, atau kemerosotan akibat kehilangan daya tarik dan ketidakmampuan beradaptasi dengan perubahan pasar serta lingkungan. Pada fase ini, jumlah wisatawan bisa menurun drastis jika destinasi gagal memperbarui produk dan layanan, sementara fasilitas yang tidak lagi relevan mulai ditinggalkan atau dialihfungsikan, sehingga berdampak pada ekonomi lokal dan struktur sosial masyarakat. Menurut Hall dan Page (2021), fase rejuvenasi ditandai oleh implementasi strategi peremajaan yang mencakup inovasi atraksi, diversifikasi pasar, dan penguatan citra destinasi, sedangkan kegagalan intervensi dapat mengarah pada tahap penurunan permanen, sehingga keberhasilan fase ini sangat bergantung pada kapasitas manajerial dan kolaborasi antar pemangku kepentingan.

Rejuvenasi biasanya melibatkan *rebranding* destinasi, pengembangan atraksi baru yang relevan dengan tren wisatawan modern, serta penerapan teknologi digital untuk meningkatkan pengalaman dan kenyamanan pengunjung. Investasi infrastruktur yang strategis, revitalisasi kawasan lama, dan penguatan nilai budaya lokal menjadi fokus utama agar destinasi mampu menarik segmen pasar baru yang lebih kritis dan sadar keberlanjutan. Pendekatan ini tidak hanya menekankan pertumbuhan kuantitatif, tetapi juga kualitas pengalaman

wisatawan, pemerataan manfaat ekonomi, dan pelestarian lingkungan serta budaya agar destinasi tetap kompetitif dan berkelanjutan.

7. Pergeseran Menuju Pembangunan Berkelanjutan

Pergeseran menuju pembangunan berkelanjutan dalam pariwisata mencerminkan perubahan paradigma dari fokus semata pada pertumbuhan jumlah wisatawan dan pendapatan ekonomi menjadi pendekatan yang lebih holistik, yakni mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan secara seimbang dalam setiap kebijakan dan praktik pengembangan destinasi. Model pembangunan ini menekankan bahwa kegiatan pariwisata harus dirancang dan dikelola sedemikian rupa sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, termasuk pelestarian sumber daya alam dan budaya. Menurut Bramwell dan Lane (2021), pembangunan berkelanjutan dalam pariwisata adalah sebuah pendekatan yang melibatkan keterlibatan aktif pemangku kepentingan lokal dalam perencanaan dan pengelolaan destinasi untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mengorbankan kualitas lingkungan dan kesejahteraan sosial.

Implementasi prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pariwisata mendorong praktik seperti konservasi ekosistem, penggunaan sumber daya secara efisien, serta promosi budaya lokal yang autentik agar dapat mempertahankan identitas dan nilai-nilai tradisional suatu komunitas. Partisipasi masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan menjadi sangat penting karena ia adalah pihak yang paling langsung merasakan dampak dari aktivitas pariwisata, baik positif maupun negatif. Selain itu, keterlibatan sektor swasta dan lembaga pemerintah dalam menyusun kebijakan yang berpihak pada keseimbangan antara kebutuhan pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan akan memperkuat fondasi ekonomi lokal serta menciptakan destinasi yang tangguh terhadap perubahan global seperti perubahan iklim dan pergeseran tren wisatawan.

C. Prinsip Pembangunan Berkelanjutan

Prinsip pembangunan berkelanjutan menekankan pentingnya memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan

generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Pendekatan ini tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan keseimbangan ekologis dan kesejahteraan sosial. Berikut adalah beberapa prinsip utama pembangunan berkelanjutan:

1. Keadilan Antar-Generasi

Keadilan antar-generasi menekankan bahwa pembangunan saat ini harus dirancang sedemikian rupa agar kebutuhan generasi masa depan tidak dikompromikan, termasuk dalam pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Konsep ini mengharuskan pengambil kebijakan untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang dari setiap proyek pembangunan, sehingga pertumbuhan ekonomi yang dicapai tetap selaras dengan keberlanjutan ekosistem. Menurut Sachs (2021), pembangunan yang berkelanjutan harus menyeimbangkan kepentingan generasi saat ini dan mendatang agar tercipta harmoni antara ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Implementasi keadilan antar-generasi memerlukan strategi konservasi sumber daya alam yang sistematis, termasuk pemanfaatan energi terbarukan, pengelolaan hutan berkelanjutan, dan perlindungan keanekaragaman hayati. Hal ini juga mencakup pendidikan dan kesadaran masyarakat agar perilaku konsumsi tidak menimbulkan tekanan berlebihan pada sumber daya alam. Dengan demikian, upaya pembangunan tidak hanya menguntungkan masyarakat saat ini tetapi juga memastikan ketersediaan sumber daya yang memadai untuk generasi mendatang.

2. Keseimbangan Ekologis

Keseimbangan ekologis menjadi landasan penting dalam pembangunan berkelanjutan karena menjamin bahwa aktivitas manusia tidak merusak struktur dan fungsi ekosistem secara permanen. Pengelolaan lingkungan yang cermat mencakup perlindungan keanekaragaman hayati, pengendalian polusi, dan pemanfaatan sumber daya alam secara bertanggung jawab agar siklus alami tetap terjaga. Menurut Rockström *et al*. (2021), menjaga keseimbangan ekologis adalah kunci untuk mencegah keruntuhan sistem bumi dan memastikan keberlanjutan kehidupan manusia di masa depan.

Penerapan prinsip keseimbangan ekologis menuntut perencanaan pembangunan yang memperhatikan kapasitas dukung lingkungan,

termasuk pengelolaan air, tanah, dan hutan secara berkelanjutan. Hal ini juga menekankan pentingnya penggunaan teknologi ramah lingkungan dan praktik produksi yang minim dampak negatif terhadap alam. Dengan pendekatan ini, pertumbuhan ekonomi dapat dicapai tanpa menimbulkan kerusakan jangka panjang pada ekosistem dan sumber daya alam.

3. Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif

Pertumbuhan ekonomi yang inklusif menekankan pentingnya pemerataan kesempatan dan manfaat pembangunan bagi seluruh lapisan masyarakat, sehingga tidak hanya kelompok tertentu yang merasakan keuntungan ekonomi. Strategi ini mencakup peningkatan akses terhadap pendidikan, lapangan kerja, layanan kesehatan, dan dukungan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah untuk memastikan partisipasi aktif semua pihak dalam pembangunan ekonomi. Menurut Stiglitz *et al*. (2022), pertumbuhan yang inklusif berkontribusi pada stabilitas sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, sekaligus meminimalkan kesenjangan ekonomi.

Implementasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif memerlukan kebijakan fiskal dan sosial yang pro-rakyat, termasuk redistribusi sumber daya, subsidi strategis, serta dukungan terhadap inovasi dan kewirausahaan lokal. Hal ini juga menuntut integrasi antara pembangunan ekonomi dan perlindungan sosial agar kelompok rentan dapat terangkat dari kemiskinan dan marginalisasi. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang inklusif tidak hanya mendorong peningkatan PDB, tetapi juga memperkuat kohesi sosial dan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

4. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat menjadi elemen penting dalam pembangunan berkelanjutan karena memastikan keputusan pembangunan mencerminkan kebutuhan, aspirasi, dan kepentingan warga lokal. Keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi program pembangunan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas kebijakan publik. Menurut Arnstein (2021), partisipasi yang bermakna memungkinkan masyarakat bukan hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga berperan sebagai penggerak dan pengawas proses pembangunan.

Pelibatan masyarakat dalam pembangunan mencakup forum konsultasi, musyawarah desa, dan mekanisme *feedback* yang sistematis untuk menangkap masukan warga. Hal ini juga menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat agar kelompok rentan dan marginal memiliki suara dalam pengambilan keputusan. Dengan cara ini, pembangunan menjadi lebih adil, inklusif, dan relevan dengan konteks sosial dan budaya setempat, sehingga dampak positifnya dapat dirasakan oleh semua pihak.

5. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya menjadi prinsip penting dalam pembangunan berkelanjutan karena berfokus pada pemanfaatan energi, air, dan bahan baku secara optimal untuk meminimalkan limbah dan degradasi lingkungan. Strategi ini mencakup penerapan teknologi ramah lingkungan, praktik produksi berkelanjutan, dan pengelolaan rantai pasok yang cermat agar setiap sumber daya dapat dimanfaatkan seefisien mungkin. Menurut UNEP (2022), efisiensi sumber daya tidak hanya mengurangi tekanan terhadap lingkungan, tetapi juga mendorong inovasi ekonomi dan meningkatkan daya saing industri secara global.

Implementasi efisiensi penggunaan sumber daya menuntut perencanaan yang matang dalam semua sektor pembangunan, termasuk transportasi, industri, dan pertanian. Pendekatan ini mengutamakan penggunaan kembali, daur ulang, dan substitusi material yang ramah lingkungan untuk mengurangi konsumsi sumber daya yang tidak terbarukan. Dengan penerapan prinsip ini, pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan tanpa mengorbankan ketersediaan sumber daya bagi generasi mendatang.

6. Integrasi Lintas Sektor

Integrasi lintas sektor menjadi prinsip krusial dalam pembangunan berkelanjutan karena memastikan koordinasi yang harmonis antara sektor ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk mencapai hasil yang optimal. Pendekatan ini menuntut penyusunan kebijakan yang saling mendukung, kolaborasi antarinstansi, serta sinkronisasi program pembangunan agar manfaat yang dihasilkan dapat dirasakan secara merata dan berkelanjutan. Menurut Le Blanc (2020), integrasi lintas sektor memungkinkan pemangku kepentingan mengatasi kompleksitas

tantangan pembangunan dengan pendekatan holistik yang meminimalkan konflik antarprioritas.

Penerapan integrasi lintas sektor mencakup perencanaan terpadu yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta, akademisi, serta masyarakat sipil. Hal ini memastikan setiap keputusan pembangunan memperhitungkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan secara simultan, sehingga program yang dijalankan efisien dan efektif. Dengan pendekatan ini, sumber daya yang terbatas dapat digunakan secara maksimal untuk mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

D. Urgensi Pariwisata Berkelanjutan

Urgensi pariwisata berkelanjutan muncul dari kebutuhan untuk menjaga keseimbangan antara pengembangan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial masyarakat lokal. Sektor pariwisata yang tidak dikelola secara berkelanjutan berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, hilangnya identitas budaya, serta ketimpangan ekonomi yang dapat merugikan komunitas setempat. Beberapa aspek yang menekankan pentingnya pariwisata berkelanjutan antara lain:

1. Pelestarian Lingkungan

Pariwisata berkelanjutan memerlukan pelestarian lingkungan sebagai salah satu pilar utama karena kegiatan wisata yang tidak dikelola secara bijak dapat menyebabkan degradasi ekosistem, pencemaran, serta hilangnya keanekaragaman hayati yang justru menjadi daya tarik utama destinasi wisata. Menjaga kelestarian lingkungan dalam pariwisata berarti memastikan bahwa sumber daya alam seperti hutan, laut, udara, dan habitat satwa terlindungi dari eksploitasi berlebihan, serta merancang aktivitas wisata yang meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan alam.

Menurut pendapat para ahli, pariwisata berkelanjutan adalah bentuk pengembangan pariwisata yang berupaya melindungi dan memperkuat nilai-nilai lingkungan sekaligus memastikan bahwa aktivitas tersebut tidak menghancurkan sumber daya yang menjadi dasar keberlanjutan destinasi wisata itu sendiri (Saputra, 2024) sehingga pelestarian lingkungan bukan sekadar pilihan, tetapi merupakan elemen

penting untuk menjamin keberlangsungan daya tarik wisata di masa depan.

2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Lokal

Peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal menjadi salah satu tujuan utama dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan karena pariwisata yang melibatkan komunitas setempat secara aktif dapat membuka peluang ekonomi yang lebih luas dan distribusi manfaat yang lebih adil dibandingkan model pariwisata konvensional. Keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan destinasi, penyediaan layanan wisata, serta pengembangan produk wisata setempat mendorong terciptanya lapangan kerja baru, peningkatan pendapatan rumah tangga, serta pemberdayaan usaha mikro yang pada akhirnya memperkuat ekonomi lokal dan kapasitas masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara berkelanjutan.

Menurut penelitian yang mengkaji model pengembangan pariwisata berbasis masyarakat, pariwisata berkelanjutan yang dikembangkan dengan pendekatan komunitas lokal mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan kesempatan kerja, peluang usaha mikro, serta kontribusi positif terhadap kondisi ekonomi dan sosial warga setempat (Mauliyanti, 2024) sehingga konsep ini tidak sekadar menciptakan destinasi wisata yang menarik, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi masyarakat yang menjadi tuan rumah di wilayah tersebut.

3. Penguatan Identitas Budaya

Penguatan identitas budaya dalam pariwisata berkelanjutan berperan penting dalam menjaga keunikan dan kekayaan warisan budaya suatu daerah karena kegiatan wisata yang dirancang secara bijak tidak hanya menarik minat pengunjung, tetapi juga memperkuat rasa kebanggaan dan keterikatan masyarakat terhadap tradisi, nilai, serta praktik budayanya sendiri. Pelibatan budaya lokal sebagai salah satu elemen utama dalam produk dan pengalaman wisata membantu memperkuat identitas budaya sebagai ciri khas yang membedakan suatu destinasi dari tempat lain, sekaligus menciptakan pengalaman wisata yang autentik dan bermakna.

Menurut penelitian ilmiah yang membahas hubungan antara identitas budaya dan pariwisata berkelanjutan, pariwisata budaya

berkelanjutan memberikan kontribusi signifikan terhadap penguatan identitas lokal serta mendorong pemahaman masyarakat akan nilai-nilai tradisional yang menjadi landasan perkembangan destinasi wisata yang autentik (Geçikli, 2024) sehingga pengembangan identitas budaya melalui pariwisata bukan sekadar promosi, tetapi juga upaya strategis untuk melestarikan warisan budaya dalam menghadapi modernisasi dan globalisasi.

4. Ketahanan Ekonomi

Ketahanan ekonomi dalam pariwisata berkelanjutan menekankan kemampuan suatu destinasi untuk tetap stabil dan adaptif terhadap berbagai guncangan ekonomi, seperti fluktuasi kunjungan wisatawan, krisis global, maupun perubahan iklim, sehingga sektor pariwisata tidak hanya menjadi sumber pertumbuhan sesaat tetapi juga fondasi jangka panjang bagi perekonomian lokal. Ketahanan ini dicapai melalui diversifikasi sumber pendapatan, penguatan usaha mikro dan kecil terkait pariwisata, serta strategi kolaboratif antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sehingga manfaat ekonomi dari wisata tersebar merata serta tidak tergantung pada satu sumber tunggal.

Menurut sebuah kajian yang membahas hubungan pembangunan pariwisata dan struktur ekonomi lokal, pariwisata menghadirkan jalur alternatif untuk ketahanan ekonomi dengan memanfaatkan bentang alam dan warisan budaya daerah tersebut, sehingga mengurangi tekanan pada sektor ekonomi dominan sekaligus membuka peluang baru untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih tahan terhadap guncangan (Haris, 2025) sehingga memperkuat peran pariwisata tidak hanya sebagai sumber pendapatan, tetapi juga sebagai pilar stabilitas ekonomi daerah.

5. Pengurangan Dampak Negatif Pariwisata Massal

Pengurangan dampak negatif pariwisata massal menjadi fokus penting dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan karena kegiatan wisata yang terlalu intensif sering kali menimbulkan tekanan besar pada sumber daya alam, kondisi sosial budaya masyarakat, serta infrastruktur lokal sehingga wisatawan dan penduduk setempat sama-sama merasakan konsekuensi dari *overtourism* seperti kemacetan, polusi, degradasi lingkungan, hingga berkurangnya kualitas hidup. Untuk itu, strategi pengurangan dampak negatif ini tidak hanya menuntut pembatasan jumlah wisatawan, tetapi juga perencanaan yang matang dalam

pengelolaan destinasi, pengaturan pola kunjungan, serta pengembangan alternatif wisata yang lebih ramah lingkungan dan manusiawi.

Menurut kajian akademik tentang mitigasi dampak *overtourism*, upaya pengurangan dampak negatif pariwisata massal melibatkan pendekatan manajemen destinasi berkelanjutan termasuk penyebaran wisatawan ke area berbeda, intervensi kebijakan regulatif, kolaborasi pemangku kepentingan, serta penggunaan teknologi cerdas untuk mengatur arus kunjungan sehingga keseimbangan antara pertumbuhan pariwisata dan pelestarian lingkungan dapat tercapai (Bhatia dkk., 2025) sehingga langkah-langkah ini dirancang untuk meminimalkan tekanan sosial dan ekologis tanpa menghambat manfaat ekonomi yang dihasilkan oleh sektor pariwisata.

BAB II
LANDASAN TEORETIS PARIWISATA BERKELANJUTAN

Pariwisata berkelanjutan lahir dari kebutuhan untuk menyeimbangkan pertumbuhan sektor pariwisata dengan pelestarian lingkungan, keberlanjutan sosial, dan keberlangsungan ekonomi jangka panjang. Landasan teoretisnya berakar pada konsep pembangunan berkelanjutan yang menekankan integrasi antara pemanfaatan sumber daya alam, pemberdayaan masyarakat lokal, serta penciptaan nilai ekonomi tanpa mengorbankan generasi mendatang.

Pendekatan ini memandang destinasi sebagai suatu sistem yang saling terhubung antara ekosistem, budaya, dan aktivitas ekonomi sehingga setiap kebijakan pariwisata harus mempertimbangkan dampak multidimensionalnya. Kerangka teoretis pariwisata berkelanjutan juga menegaskan pentingnya partisipasi pemangku kepentingan, tata kelola yang bertanggung jawab, serta pengelolaan berbasis daya dukung untuk memastikan keberlanjutan destinasi secara holistik.

A. *Triple Bottom Line* (Ekonomi, Sosial, Lingkungan)

Triple Bottom Line (TBL) merupakan konsep pembangunan dan pengelolaan usaha yang menekankan pentingnya keseimbangan antara kinerja ekonomi, tanggung jawab sosial, dan kelestarian lingkungan. Pendekatan ini memandang bahwa keberhasilan tidak cukup diukur dari keuntungan finansial semata, tetapi juga dari sejauh mana suatu organisasi memberikan manfaat sosial serta meminimalkan dampak negatif terhadap ekosistem. Penerapan *Triple Bottom Line* menuntut integrasi yang sistematis dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan agar tercipta keberlanjutan jangka panjang.

1. Aspek Ekonomi (*Profit*)

Aspek Ekonomi (*Profit*) merupakan salah satu pilar utama dalam pendekatan keberlanjutan yang menekankan pentingnya pencapaian kinerja finansial secara sehat dan berkesinambungan. Dimensi ini tidak

hanya berbicara tentang besarnya keuntungan yang diperoleh, tetapi juga menyangkut kemampuan organisasi atau usaha dalam menciptakan nilai tambah, menjaga stabilitas keuangan, meningkatkan daya saing, serta memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian yang lebih luas. Orientasi *profit* dalam kerangka keberlanjutan menuntut keseimbangan antara pencapaian laba dan tanggung jawab jangka panjang agar usaha tetap eksis, berkembang, dan mampu menghadapi dinamika pasar. Berikut penjelasan rinci mengenai komponen-komponen penting dalam Aspek Ekonomi (*Profit*):

a. Keberlanjutan Finansial (*Financial Sustainability*)

Keberlanjutan finansial (*financial sustainability*) menunjukkan kemampuan suatu organisasi atau usaha untuk mempertahankan kinerja keuangannya secara stabil dalam jangka panjang melalui pengelolaan pendapatan, biaya, aset, dan kewajiban secara hati-hati dan strategis. Konsep ini tidak hanya berfokus pada pencapaian laba dalam periode tertentu, tetapi juga pada kapasitas entitas dalam menjaga arus kas positif, memperkuat struktur permodalan, serta membangun ketahanan terhadap risiko ekonomi seperti fluktuasi pasar, inflasi, dan krisis global. Menurut Kieso, Weygandt, dan Warfield (2020), kinerja keuangan yang berkelanjutan tercermin dari kemampuan perusahaan menghasilkan arus kas yang memadai untuk mendukung operasi, memenuhi kewajiban, dan mendanai investasi tanpa mengganggu stabilitas jangka panjangnya.

Keberlanjutan finansial menjadi komponen penting dalam aspek ekonomi (*profit*) karena menjamin bahwa penciptaan nilai tidak bersifat sementara, melainkan didukung oleh sistem perencanaan anggaran, pengendalian internal, serta evaluasi kinerja yang terukur dan berkesinambungan. Praktiknya mencakup diversifikasi sumber pendapatan, efisiensi biaya operasional, pengelolaan utang secara proporsional, serta investasi pada aset produktif yang mampu meningkatkan kapasitas pertumbuhan di masa depan. Ketika prinsip ini diterapkan secara konsisten, organisasi tidak hanya mampu mempertahankan profitabilitas, tetapi juga membangun fondasi ekonomi yang kokoh untuk ekspansi, inovasi, dan kontribusi yang lebih luas terhadap perekonomian.

b. Penciptaan Nilai Tambah (*Value Creation*)

Penciptaan nilai tambah (*value creation*) merepresentasikan kemampuan organisasi dalam menghasilkan manfaat ekonomi yang melebihi biaya sumber daya yang digunakan, sehingga memberikan keunggulan kompetitif sekaligus meningkatkan kesejahteraan pemangku kepentingan. Konsep ini menekankan bahwa *profit* tidak semata-mata berasal dari selisih pendapatan dan biaya, tetapi dari strategi yang mampu meningkatkan kualitas produk, efisiensi proses, inovasi berkelanjutan, serta diferensiasi yang relevan dengan kebutuhan pasar. Menurut Johnson, Scholes, dan Whittington (2020), nilai tercipta ketika organisasi mampu menyediakan manfaat kepada pelanggan yang dianggap lebih tinggi dibandingkan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksinya, sehingga menciptakan keunggulan bersaing yang berkelanjutan.

Penciptaan nilai tambah menjadi komponen penting dalam aspek ekonomi (*profit*) karena menentukan kapasitas perusahaan dalam mempertahankan margin keuntungan, memperluas pangsa pasar, serta memperkuat loyalitas pelanggan melalui kualitas dan inovasi yang konsisten. Proses ini melibatkan optimalisasi rantai nilai, pengelolaan sumber daya secara produktif, serta investasi pada teknologi dan sumber daya manusia yang mampu meningkatkan *output* dan reputasi organisasi di pasar. Ketika nilai tambah dikelola secara strategis dan terintegrasi, organisasi tidak hanya memperoleh keuntungan finansial yang stabil, tetapi juga membangun fondasi pertumbuhan jangka panjang yang adaptif terhadap perubahan lingkungan bisnis.

c. Efisiensi dan Produktivitas

Efisiensi dan produktivitas mencerminkan kemampuan organisasi dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya untuk menghasilkan *output* yang maksimal dengan biaya yang terkendali, sehingga berkontribusi langsung terhadap peningkatan profitabilitas. Efisiensi berfokus pada bagaimana *input* seperti tenaga kerja, modal, waktu, dan bahan baku digunakan secara hemat tanpa mengurangi kualitas, sedangkan produktivitas menekankan perbandingan antara jumlah *output* yang dihasilkan dengan total *input* yang digunakan dalam proses

produksi atau pelayanan. Menurut Heizer, Render, dan Munson (2020), produktivitas merupakan ukuran kinerja yang menunjukkan seberapa efektif suatu organisasi mengubah *input* menjadi *output*, yang pada akhirnya menentukan daya saing dan keberlanjutan kinerja keuangan perusahaan.

Efisiensi dan produktivitas menjadi komponen penting dalam aspek ekonomi (*profit*) karena peningkatan keduanya memungkinkan perusahaan menekan biaya operasional, memperbaiki margin laba, serta meningkatkan kapasitas produksi tanpa harus menambah sumber daya secara signifikan. Implementasinya dapat dilakukan melalui perbaikan proses bisnis, pemanfaatan teknologi yang tepat guna, pelatihan sumber daya manusia, serta pengendalian kualitas yang konsisten agar tidak terjadi pemborosan akibat kesalahan produksi atau layanan yang tidak optimal. Ketika organisasi mampu menjaga tingkat efisiensi dan produktivitas secara berkelanjutan, stabilitas finansial lebih mudah dicapai karena setiap aktivitas operasional memberikan kontribusi yang terukur terhadap penciptaan keuntungan dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

d. Daya Saing dan Keunggulan Kompetitif

Daya saing dan keunggulan kompetitif menunjukkan kemampuan organisasi untuk mempertahankan posisi yang lebih unggul dibandingkan pesaing melalui pengelolaan sumber daya, kapabilitas, dan strategi yang efektif sehingga mampu menghasilkan kinerja ekonomi yang superior. Daya saing tercermin dari kemampuan perusahaan dalam merespons perubahan pasar, inovasi teknologi, serta dinamika kebutuhan konsumen secara cepat dan tepat, sementara keunggulan kompetitif mengacu pada keunikan nilai yang sulit ditiru oleh pesaing dan memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan. Menurut Rothaermel (2021), keunggulan kompetitif terjadi ketika perusahaan mampu menciptakan nilai ekonomi yang lebih besar dibandingkan para pesaingnya melalui pemanfaatan sumber daya dan kapabilitas yang strategis.

Daya saing dan keunggulan kompetitif menjadi komponen penting dalam aspek ekonomi (*profit*) karena keduanya menentukan tingkat profitabilitas jangka panjang, stabilitas pangsa pasar, serta kemampuan perusahaan dalam

mempertahankan margin keuntungan di tengah persaingan yang ketat. Strategi diferensiasi produk, kepemimpinan biaya, inovasi berkelanjutan, serta penguatan reputasi dan merek merupakan beberapa pendekatan yang dapat memperkuat posisi kompetitif organisasi dalam industri. Ketika perusahaan mampu mengelola strategi kompetitif secara konsisten dan adaptif, keuntungan yang dihasilkan tidak hanya bersifat sementara, tetapi berkembang menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan tahan terhadap tekanan eksternal.

2. Aspek Sosial (*People*)

Aspek Sosial (*People*) merupakan dimensi yang menekankan tanggung jawab organisasi atau kegiatan usaha terhadap manusia sebagai subjek utama pembangunan. Dimensi ini berfokus pada upaya meningkatkan kesejahteraan, menjamin keadilan, menghormati hak asasi, serta menciptakan hubungan yang harmonis antara organisasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk karyawan, konsumen, komunitas lokal, dan masyarakat luas. Orientasi sosial tidak hanya bertujuan menghindari konflik atau dampak negatif, tetapi juga menciptakan nilai sosial yang berkelanjutan melalui partisipasi, pemberdayaan, dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Berikut penjelasan rinci mengenai komponen-komponen utama dalam Aspek Sosial (*People*):

a. Kesejahteraan dan Perlindungan Tenaga Kerja

Kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja mencerminkan komitmen organisasi dalam menjamin terpenuhinya hak-hak dasar pekerja sekaligus menciptakan lingkungan kerja yang aman, adil, dan mendukung perkembangan profesional secara berkelanjutan. Dimensi ini mencakup pemberian upah yang layak, jaminan sosial, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, serta kesempatan pengembangan kompetensi agar tenaga kerja mampu berkontribusi secara optimal terhadap pencapaian tujuan organisasi. Menurut Dessler (2020), manajemen sumber daya manusia yang efektif menekankan pentingnya perlindungan dan pengembangan karyawan sebagai faktor kunci dalam meningkatkan kinerja, loyalitas, dan stabilitas organisasi.

Kesejahteraan tenaga kerja tidak hanya berdampak pada individu pekerja, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap

produktivitas, kualitas kerja, dan reputasi perusahaan di mata publik serta pemangku kepentingan lainnya. Perlindungan yang memadai terhadap risiko kerja, kejelasan kontrak, kepastian hukum, serta mekanisme penyelesaian perselisihan yang adil akan menciptakan rasa aman dan kepercayaan dalam hubungan industrial. Ketika organisasi secara konsisten mengintegrasikan prinsip kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja ke dalam kebijakan operasionalnya, aspek sosial (*people*) dapat terwujud secara nyata melalui terciptanya hubungan kerja yang harmonis, berkeadilan, dan berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang.

b. Kesetaraan, Keadilan, dan Inklusivitas

Kesetaraan, keadilan, dan inklusivitas mencerminkan komitmen organisasi dalam memperlakukan setiap individu secara adil tanpa diskriminasi serta membuka akses partisipasi yang setara bagi seluruh pemangku kepentingan. Prinsip kesetaraan menekankan pemberian kesempatan yang sama dalam rekrutmen, promosi, pengembangan karier, dan pengambilan keputusan, sementara keadilan berkaitan dengan perlakuan proporsional sesuai hak dan kewajiban masing-masing individu. Menurut Robbins dan Judge (2022), organisasi yang menerapkan praktik keberagaman dan inklusivitas secara konsisten cenderung memiliki kinerja yang lebih baik karena mampu memanfaatkan berbagai perspektif, pengalaman, dan latar belakang karyawan secara optimal.

Inklusivitas tidak hanya berarti keberadaan keberagaman dalam struktur organisasi, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang menghargai perbedaan dan mendorong partisipasi aktif setiap individu tanpa rasa takut atau marginalisasi. Implementasinya dapat diwujudkan melalui kebijakan anti-diskriminasi, sistem evaluasi yang transparan, pelatihan kesadaran keberagaman, serta mekanisme pengaduan yang adil dan akuntabel. Ketika prinsip kesetaraan, keadilan, dan inklusivitas dijalankan secara terintegrasi dalam aspek sosial (*people*), organisasi tidak hanya membangun legitimasi moral dan sosial, tetapi juga memperkuat kohesi internal serta menciptakan fondasi hubungan kerja yang harmonis dan berkelanjutan.

c. Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat

Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat mencerminkan upaya sistematis untuk meningkatkan kapasitas individu maupun kelompok agar mampu berperan aktif dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan tidak hanya berkaitan dengan pemberian bantuan atau sumber daya, tetapi juga dengan penguatan pengetahuan, keterampilan, akses terhadap informasi, serta kesempatan untuk menentukan arah perkembangan sosial dan ekonomi secara mandiri. Menurut Phillips dan Pittman (2020), pemberdayaan masyarakat merupakan proses yang memungkinkan individu dan komunitas memperoleh kontrol lebih besar atas keputusan dan sumber daya yang memengaruhi kesejahteraan.

Partisipasi masyarakat menjadi elemen kunci karena memastikan bahwa kebijakan, program, atau kegiatan organisasi selaras dengan kebutuhan nyata dan aspirasi komunitas lokal, sehingga mengurangi potensi konflik sosial dan meningkatkan legitimasi sosial. Praktiknya dapat diwujudkan melalui forum dialog, kemitraan strategis, pelibatan dalam perencanaan program, serta pengembangan usaha berbasis komunitas yang mendorong kemandirian ekonomi. Ketika pemberdayaan dan partisipasi diterapkan secara konsisten dalam aspek sosial (*people*), hubungan antara organisasi dan masyarakat berkembang menjadi kolaboratif, transparan, dan berorientasi pada keberlanjutan kesejahteraan bersama.

d. Tanggung Jawab terhadap Konsumen

Tanggung jawab terhadap konsumen mencerminkan komitmen organisasi untuk memastikan bahwa setiap produk atau layanan yang ditawarkan aman, berkualitas, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan serta harapan pelanggan. Dimensi ini tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap standar hukum perlindungan konsumen, tetapi juga mencakup etika bisnis, kejujuran dalam komunikasi pemasaran, perlindungan data pribadi, serta kesiapan perusahaan dalam menangani keluhan secara adil dan responsif. Menurut Kotler dan Keller (2022), perusahaan yang berorientasi pada pelanggan harus menciptakan, mengomunikasikan, dan memberikan nilai superior kepada

konsumen sebagai dasar membangun hubungan jangka panjang yang berkelanjutan.

Tanggung jawab terhadap konsumen menjadi komponen utama dalam aspek sosial (*people*) karena konsumen merupakan bagian penting dari pemangku kepentingan yang secara langsung merasakan dampak aktivitas organisasi. Implementasinya dapat diwujudkan melalui pengendalian kualitas yang ketat, penyediaan informasi produk yang akurat dan tidak menyesatkan, mekanisme layanan purna jual yang efektif, serta sistem perlindungan privasi yang memadai di era digital. Ketika organisasi secara konsisten mengutamakan kepentingan dan hak konsumen, kepercayaan publik akan meningkat, reputasi perusahaan semakin kuat, dan hubungan sosial antara perusahaan dan masyarakat dapat terjaga secara harmonis dan berkelanjutan.

3. Aspek Lingkungan (*Planet*)

Aspek Lingkungan (*Planet*) merupakan dimensi yang menekankan tanggung jawab terhadap kelestarian alam dan keberlanjutan ekosistem dalam setiap aktivitas pembangunan maupun kegiatan usaha. Dimensi ini berorientasi pada upaya menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan kemampuan lingkungan untuk memulihkan diri, sehingga kebutuhan generasi saat ini dapat terpenuhi tanpa mengurangi hak generasi mendatang. Perhatian terhadap aspek lingkungan menjadi sangat penting karena kerusakan ekosistem, pencemaran, dan eksploitasi berlebihan dapat menimbulkan dampak jangka panjang yang sulit dipulihkan. Berikut penjelasan rinci mengenai komponen-komponen utama dalam Aspek Lingkungan (*Planet*):

a. Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan

Pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan menekankan pemanfaatan sumber daya seperti air, tanah, hutan, mineral, dan energi dengan mempertimbangkan daya dukung serta daya tampung lingkungan agar tidak terjadi eksploitasi berlebihan yang mengancam keseimbangan ekosistem. Prinsip ini mengharuskan adanya perencanaan yang terintegrasi, pengendalian pemanfaatan, serta pemulihan lingkungan melalui konservasi dan rehabilitasi agar siklus ekologis tetap terjaga dalam jangka panjang. Menurut Barbier (2021), pengelolaan

sumber daya alam yang berkelanjutan bertujuan menjaga stok modal alam agar tetap mampu menyediakan manfaat ekonomi dan ekologi secara berkelanjutan bagi generasi sekarang dan mendatang.

Pengelolaan yang berkelanjutan juga menuntut penerapan kebijakan berbasis sains, penggunaan teknologi ramah lingkungan, serta partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian sumber daya di wilayahnya. Praktiknya dapat diwujudkan melalui pembatasan eksploitasi sumber daya tidak terbarukan, pengembangan energi terbarukan, perlindungan kawasan lindung, serta penerapan prinsip kehati-hatian dalam setiap kegiatan produksi yang berpotensi merusak lingkungan. Ketika pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara bertanggung jawab dan terencana, aspek lingkungan (*planet*) dapat terjaga secara optimal sehingga mendukung stabilitas ekonomi dan kesejahteraan sosial dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.

b. Efisiensi Energi dan Penggunaan Energi Terbarukan

Efisiensi energi dan penggunaan energi terbarukan merupakan strategi penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan melalui pengurangan konsumsi energi yang berlebihan dan penurunan emisi gas rumah kaca yang berdampak pada perubahan iklim. Efisiensi energi berfokus pada upaya menghasilkan *output* yang sama atau lebih besar dengan penggunaan energi yang lebih sedikit melalui inovasi teknologi, perbaikan sistem operasional, serta perubahan perilaku konsumsi, sedangkan energi terbarukan mengacu pada pemanfaatan sumber energi yang dapat diperbarui secara alami seperti tenaga surya, angin, air, dan biomassa. Menurut REN21 (2023), percepatan transisi menuju energi terbarukan dan peningkatan efisiensi energi menjadi kunci dalam mencapai sistem energi yang berkelanjutan serta mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang berkontribusi besar terhadap krisis iklim global.

Penerapan efisiensi energi dan energi terbarukan dalam aspek lingkungan (*planet*) tidak hanya berdampak pada penurunan jejak karbon, tetapi juga meningkatkan ketahanan energi dan stabilitas ekonomi jangka panjang melalui

diversifikasi sumber daya. Implementasinya dapat dilakukan melalui audit energi berkala, investasi pada teknologi hemat energi, pembangunan infrastruktur energi bersih, serta kebijakan insentif yang mendorong penggunaan sumber energi ramah lingkungan di sektor industri maupun rumah tangga. Ketika strategi ini dijalankan secara konsisten dan terintegrasi, perlindungan lingkungan dapat tercapai secara nyata sekaligus mendukung pembangunan yang rendah emisi dan berorientasi pada keberlanjutan global.

c. Pengelolaan Limbah dan Pengendalian Polusi

Pengelolaan limbah dan pengendalian polusi merupakan upaya sistematis untuk meminimalkan dampak negatif aktivitas manusia terhadap kualitas udara, air, dan tanah melalui proses pencegahan, pengurangan, pemanfaatan kembali, dan pengolahan limbah sebelum dilepaskan ke lingkungan. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada penanganan limbah di akhir proses produksi, tetapi juga pada perancangan sistem produksi bersih yang mampu mengurangi timbulan limbah sejak tahap perencanaan, sehingga risiko pencemaran dapat ditekan secara signifikan. Menurut Tchobanoglous dan Kreith (2022), pengelolaan limbah terpadu menekankan kombinasi strategi teknis, kebijakan, dan partisipasi masyarakat untuk mengurangi dampak lingkungan sekaligus meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya.

Pengendalian polusi menjadi bagian penting dari aspek lingkungan (*planet*) karena pencemaran yang tidak terkendali dapat mengganggu kesehatan manusia, merusak ekosistem, serta menurunkan kualitas hidup dalam jangka panjang. Implementasinya meliputi penerapan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*), penggunaan teknologi pengolahan limbah cair dan gas buang, pemantauan emisi secara berkala, serta kepatuhan terhadap standar baku mutu lingkungan yang ditetapkan oleh regulasi. Ketika pengelolaan limbah dan pengendalian polusi dijalankan secara konsisten dan terintegrasi, keseimbangan ekosistem dapat terjaga, risiko kerusakan lingkungan dapat diminimalkan, dan pembangunan berkelanjutan dapat diwujudkan secara lebih bertanggung jawab.

d. Konservasi Keanekaragaman Hayati

Konservasi keanekaragaman hayati merupakan upaya terencana untuk melindungi, memelihara, dan memulihkan keberagaman spesies, ekosistem, serta sumber daya genetik agar tetap berfungsi secara ekologis dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi kehidupan manusia. Keanekaragaman hayati memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekosistem, mendukung ketahanan pangan, menyediakan sumber obat-obatan, serta menjaga keseimbangan siklus alam seperti air dan karbon. Menurut Dasgupta (2021), alam sebagai bentuk modal memiliki nilai ekonomi dan ekologis yang sangat besar sehingga pelestariannya menjadi prasyarat utama bagi keberlanjutan kesejahteraan manusia.

Konservasi dalam aspek lingkungan (*planet*) tidak hanya berfokus pada perlindungan kawasan lindung, tetapi juga mencakup pengelolaan habitat secara berkelanjutan, rehabilitasi ekosistem yang rusak, serta pengendalian aktivitas manusia yang berpotensi mengancam spesies tertentu. Implementasinya dapat dilakukan melalui pembatasan eksploitasi sumber daya, penguatan regulasi perlindungan satwa dan tumbuhan, peningkatan kesadaran masyarakat, serta kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas lokal. Ketika konservasi keanekaragaman hayati dijadikan prioritas dalam kebijakan dan praktik pembangunan, keseimbangan ekosistem dapat terjaga sehingga mendukung stabilitas lingkungan sekaligus keberlanjutan ekonomi dan sosial dalam jangka panjang.

B. Teori *Stakeholder* dalam Pariwisata

Teori *Stakeholder* dalam pariwisata menjelaskan bahwa keberhasilan pengembangan dan pengelolaan destinasi tidak hanya ditentukan oleh pelaku usaha atau pemerintah, tetapi oleh keterlibatan seluruh pihak yang memiliki kepentingan (*stake*) terhadap aktivitas pariwisata tersebut. Konsep ini pertama kali diperkenalkan secara sistematis oleh R. Edward Freeman melalui gagasan bahwa organisasi harus memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan, bukan hanya pemegang saham. Dalam konteks pariwisata, teori ini

menekankan bahwa destinasi merupakan sistem sosial-ekonomi yang kompleks, sehingga keputusan yang diambil harus mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat lokal, wisatawan, pelaku usaha, dan lingkungan.

1. Jenis-Jenis *Stakeholder* dalam Pariwisata

Identifikasi *stakeholder* menjadi langkah awal dalam penerapan teori ini agar peran dan kepentingan masing-masing pihak dapat dipetakan secara jelas.

a. Pemerintah

Pemerintah berperan strategis sebagai salah satu *stakeholder* utama dalam pariwisata karena memiliki kewenangan dalam merumuskan kebijakan, menetapkan regulasi, serta mengarahkan perencanaan pembangunan destinasi agar selaras dengan prinsip keberlanjutan dan kepentingan publik. Peran tersebut mencakup penyusunan rencana induk pariwisata, pengaturan tata ruang, perlindungan sumber daya alam dan budaya, serta pemberian izin usaha yang bertujuan menciptakan iklim investasi yang sehat dan terkendali.

Keterlibatan pemerintah juga tampak dalam penyediaan infrastruktur dasar seperti akses transportasi, sanitasi, keamanan, serta fasilitas publik yang menjadi prasyarat berkembangnya aktivitas wisata secara optimal dan merata. Menurut Hall (2020), pemerintah memiliki fungsi sentral dalam tata kelola pariwisata karena bertindak sebagai regulator, koordinator, sekaligus fasilitator yang memastikan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam pengembangan destinasi.

b. Pelaku Usaha Pariwisata

Pelaku usaha pariwisata merupakan *stakeholder* yang berperan langsung dalam menyediakan produk dan layanan wisata, mulai dari akomodasi, transportasi, jasa perjalanan, kuliner, hingga atraksi wisata yang menjadi daya tarik utama suatu destinasi. Keberadaannya menentukan kualitas pengalaman wisatawan sekaligus berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan daerah, serta pertumbuhan ekonomi lokal melalui aktivitas bisnis yang terintegrasi dengan rantai nilai pariwisata.

Aktivitas pelaku usaha tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga dituntut untuk menerapkan prinsip tanggung jawab sosial dan lingkungan agar keberlanjutan destinasi tetap terjaga dalam jangka panjang. Menurut Sigala (2020), sektor bisnis pariwisata memiliki peran krusial dalam membangun ketahanan dan inovasi destinasi melalui adaptasi model usaha, kolaborasi antar pemangku kepentingan, serta penerapan praktik berkelanjutan yang responsif terhadap perubahan global.

c. Masyarakat Lokal

Masyarakat lokal merupakan *stakeholder* utama dalam pariwisata karena ia adalah pemilik ruang hidup, budaya, tradisi, serta sumber daya alam yang menjadi daya tarik destinasi, sehingga keterlibatannya sangat menentukan keberhasilan dan keberlanjutan pengembangan wisata. Keberadaan aktivitas pariwisata dapat memberikan manfaat ekonomi berupa peluang kerja, peningkatan pendapatan, dan tumbuhnya usaha mikro, namun juga berpotensi menimbulkan dampak sosial seperti perubahan nilai budaya, konflik lahan, dan tekanan terhadap lingkungan apabila tidak dikelola secara partisipatif.

Partisipasi masyarakat lokal dalam perencanaan dan pengelolaan destinasi menjadi indikator penting dalam mewujudkan pariwisata yang inklusif dan berkeadilan, karena bukan hanya objek pembangunan melainkan subjek yang memiliki hak untuk menentukan arah pengembangan wilayahnya. Menurut Scheyvens (2020), pemberdayaan masyarakat dalam pariwisata berkelanjutan harus mencakup dimensi ekonomi, psikologis, sosial, dan politik agar komunitas lokal memiliki kontrol serta memperoleh manfaat yang nyata dari aktivitas wisata.

d. Wisatawan

Wisatawan merupakan *stakeholder* kunci dalam pariwisata karena berperan sebagai konsumen yang menentukan tingkat permintaan, pola konsumsi, serta arah perkembangan produk dan layanan destinasi melalui preferensi, perilaku, dan keputusan perjalanan yang diambil. Keputusan wisatawan dalam memilih destinasi, jenis atraksi, serta standar layanan yang diharapkan secara langsung memengaruhi strategi pemasaran, inovasi

produk, dan kualitas pelayanan yang dikembangkan oleh pelaku usaha maupun pemerintah.

Perilaku wisatawan juga memiliki dampak sosial dan lingkungan yang signifikan, baik dalam bentuk kontribusi positif seperti dukungan terhadap ekonomi lokal dan pelestarian budaya, maupun dampak negatif seperti timbulan sampah, kerusakan ekosistem, dan tekanan terhadap fasilitas publik jika tidak disertai kesadaran tanggung jawab. Menurut Gössling, Scott, dan Hall (2020), perubahan perilaku wisatawan menuju pola konsumsi yang lebih bertanggung jawab menjadi faktor penting dalam membentuk sistem pariwisata yang lebih berkelanjutan dan resilien di masa depan.

e. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Akademisi

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan akademisi merupakan *stakeholder* penting dalam pariwisata karena keduanya berperan sebagai pengawas independen, pemberi rekomendasi kebijakan, serta penggerak advokasi yang memastikan pembangunan destinasi berjalan sesuai prinsip keberlanjutan dan keadilan sosial. LSM sering terlibat dalam pendampingan masyarakat lokal, kampanye pelestarian lingkungan, serta penguatan kapasitas komunitas, sedangkan akademisi memberikan kontribusi melalui penelitian ilmiah, analisis dampak, dan pengembangan model perencanaan berbasis data yang objektif dan terukur.

Peran strategis LSM dan akademisi terlihat dalam proses perumusan kebijakan publik yang partisipatif, karena hasil riset dan kajian empiris dapat menjadi dasar dalam menentukan arah pembangunan pariwisata yang berbasis bukti (*evidence-based policy*). Menurut Higgins-Desbiolles (2020), kolaborasi antara akademisi, masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lainnya sangat penting untuk mereformasi sistem pariwisata agar lebih berorientasi pada kesejahteraan sosial dan keberlanjutan lingkungan daripada semata-mata pertumbuhan ekonomi.

2. Prinsip-Prinsip Teori *Stakeholder* dalam Pariwisata

Penerapan teori *stakeholder* dalam sektor pariwisata didasarkan pada beberapa prinsip utama:

a. Keterlibatan (*Participation*)

Keterlibatan (*participation*) dalam Teori *Stakeholder* pariwisata merujuk pada proses aktif yang memungkinkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, pelaku usaha, masyarakat lokal, wisatawan, serta LSM dan akademisi, untuk terlibat dalam perencanaan, pengambilan keputusan, dan evaluasi kebijakan destinasi secara terbuka dan inklusif. Partisipasi tidak sekadar kehadiran formal dalam forum musyawarah, tetapi mencakup kesempatan yang setara untuk menyampaikan aspirasi, memengaruhi arah kebijakan, serta memperoleh akses terhadap informasi yang relevan dan transparan. Prinsip ini menjadi fondasi tata kelola pariwisata yang demokratis karena mengurangi dominasi satu aktor tertentu dan mendorong distribusi kekuasaan yang lebih seimbang dalam sistem pengelolaan destinasi.

Implementasi keterlibatan dapat dilakukan melalui konsultasi publik, forum diskusi multi-pihak, mekanisme pengaduan masyarakat, serta model perencanaan partisipatif yang mengintegrasikan perspektif sosial, ekonomi, dan lingkungan secara komprehensif. Menurut Scheyvens dan Biddulph (2021), partisipasi yang bermakna dalam pariwisata berkelanjutan harus memastikan bahwa komunitas lokal memiliki suara nyata dan pengaruh dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupannya. Pandangan tersebut menegaskan bahwa partisipasi bukan hanya instrumen teknis, melainkan proses pemberdayaan yang memperkuat legitimasi kebijakan serta meningkatkan rasa memiliki terhadap program pengembangan wisata.

b. Transparansi

Transparansi dalam prinsip Teori *Stakeholder* pariwisata merujuk pada keterbukaan informasi, kejelasan proses pengambilan keputusan, serta akses publik terhadap data yang berkaitan dengan perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi destinasi wisata. Praktik transparansi mencakup penyampaian informasi mengenai rencana investasi, analisis dampak lingkungan, alokasi anggaran, hingga pembagian manfaat ekonomi agar seluruh pemangku kepentingan dapat memahami konsekuensi kebijakan yang diambil. Keterbukaan ini menjadi

dasar terciptanya kepercayaan (*trust*) antara pemerintah, pelaku usaha, masyarakat lokal, dan pihak lainnya dalam sistem tata kelola pariwisata.

Penerapan transparansi juga berfungsi sebagai mekanisme pengawasan sosial yang mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan, maupun praktik pembangunan yang tidak berkelanjutan. Menurut Hall (2020), tata kelola pariwisata yang baik menuntut adanya akuntabilitas dan transparansi agar proses perencanaan serta implementasi kebijakan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh *stakeholder*. Pandangan tersebut menegaskan bahwa keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan elemen fundamental dalam membangun legitimasi dan kredibilitas pengelolaan destinasi.

c. Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam prinsip Teori *Stakeholder* pariwisata merujuk pada kewajiban setiap pemangku kepentingan, terutama pemerintah dan pelaku usaha, untuk mempertanggungjawabkan keputusan, kebijakan, serta dampak aktivitas pariwisata kepada pihak-pihak yang terdampak secara langsung maupun tidak langsung. Akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan pelaporan keuangan, tetapi juga mencakup pertanggungjawaban sosial dan lingkungan atas pengelolaan sumber daya, distribusi manfaat ekonomi, serta mitigasi dampak negatif yang mungkin timbul. Prinsip ini menuntut adanya mekanisme evaluasi yang jelas, indikator kinerja yang terukur, dan sistem pengawasan yang memungkinkan publik menilai apakah pengelolaan destinasi telah berjalan sesuai dengan prinsip keberlanjutan.

Implementasi akuntabilitas tercermin dalam penyusunan laporan keberlanjutan, audit independen, forum pertanggungjawaban publik, serta keterbukaan terhadap kritik dan rekomendasi dari masyarakat maupun lembaga pengawas. Menurut Bianchi dan de Man (2021), tata kelola pariwisata yang berkelanjutan memerlukan sistem akuntabilitas yang memastikan bahwa para pengambil keputusan bertanggung jawab atas konsekuensi sosial dan lingkungan dari kebijakan yang ditetapkan. Pandangan tersebut menegaskan bahwa akuntabilitas berfungsi sebagai instrumen kontrol sekaligus sarana

membangun kepercayaan antar *stakeholder* dalam ekosistem pariwisata.

d. Keseimbangan Kepentingan

Keseimbangan kepentingan dalam prinsip Teori *Stakeholder* pariwisata merujuk pada upaya sistematis untuk mengharmoniskan berbagai kebutuhan, tujuan, dan harapan yang dimiliki oleh pemerintah, pelaku usaha, masyarakat lokal, wisatawan, serta lembaga pendukung lainnya agar tidak terjadi dominasi satu pihak yang merugikan pihak lain. Prinsip ini menuntut proses negosiasi dan kompromi yang adil sehingga pertumbuhan ekonomi dari sektor pariwisata tetap berjalan tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial masyarakat setempat. Keseimbangan kepentingan juga berkaitan dengan distribusi manfaat yang proporsional, pengendalian dampak negatif, serta pengakuan terhadap hak dan peran setiap *stakeholder* dalam sistem destinasi.

Penerapan keseimbangan kepentingan membutuhkan perencanaan terpadu yang mempertimbangkan daya dukung lingkungan, kapasitas sosial, serta kelayakan ekonomi secara simultan agar kebijakan yang diambil tidak bersifat parsial. Menurut Higgins-Desbiolles (2020), transformasi pariwisata menuju arah yang lebih adil dan berkelanjutan mensyaratkan adanya pergeseran dari orientasi pertumbuhan semata menuju keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan ekologis. Pandangan tersebut menegaskan bahwa pengelolaan destinasi harus berpijak pada prinsip keadilan dan tanggung jawab kolektif dalam menghadapi tantangan global seperti krisis lingkungan dan ketimpangan sosial.

3. Penerapan Teori *Stakeholder* dalam Pengembangan Pariwisata

Penerapan Teori *Stakeholder* dalam pengembangan pariwisata menuntut integrasi kepentingan berbagai pihak seperti pemerintah, pelaku usaha, masyarakat lokal, wisatawan, serta lembaga pendukung ke dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan secara kolaboratif dan terstruktur. Proses ini dilakukan melalui mekanisme konsultasi publik, kemitraan lintas sektor, serta penyusunan kebijakan berbasis data yang mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang. Pendekatan tersebut bertujuan memastikan

bahwa pengembangan destinasi tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan jumlah kunjungan, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan keberlanjutan sumber daya.

Implementasi teori ini juga tercermin dalam pembentukan forum koordinasi destinasi, penyusunan rencana induk pariwisata yang partisipatif, serta penerapan standar keberlanjutan yang melibatkan pengawasan bersama antar *stakeholder*. Menurut Hall (2020), tata kelola pariwisata yang efektif memerlukan kolaborasi antar pemangku kepentingan agar kebijakan yang dihasilkan memiliki legitimasi, akuntabilitas, dan daya dukung sosial yang kuat. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan pariwisata sangat bergantung pada kemampuan mengelola relasi dan kepentingan yang beragam secara inklusif dan transparan.

C. Community-Based Tourism

Community-Based Tourism (CBT) merupakan pendekatan pengembangan pariwisata yang menempatkan masyarakat lokal sebagai aktor utama dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengambilan keputusan terkait aktivitas wisata di wilayahnya. Konsep ini menekankan bahwa manfaat ekonomi, sosial, dan budaya dari pariwisata harus dirasakan secara langsung oleh komunitas setempat, bukan hanya oleh investor atau pihak eksternal. CBT berorientasi pada pemberdayaan, partisipasi aktif, serta penguatan kapasitas masyarakat agar mampu mengelola potensi lokal secara mandiri dan berkelanjutan.

1. Karakteristik Utama *Community-Based Tourism*

Karakteristik utama *Community-Based Tourism* (CBT) terletak pada kepemilikan dan pengelolaan kegiatan wisata yang berada di tangan masyarakat lokal, sehingga komunitas memiliki kontrol langsung terhadap perencanaan, operasional, serta distribusi manfaat ekonomi yang dihasilkan. Model ini menempatkan masyarakat bukan sebagai objek pariwisata, melainkan sebagai subjek yang berperan aktif dalam menentukan arah pengembangan destinasi sesuai dengan kebutuhan dan nilai budaya setempat. Struktur pengelolaan yang berbasis komunitas memungkinkan terciptanya sistem pengambilan keputusan yang partisipatif serta transparan dalam mengelola potensi wisata lokal.

Karakteristik berikutnya adalah adanya orientasi pada pemberdayaan dan peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan, pendampingan, serta akses terhadap sumber daya yang mendukung keberlanjutan usaha wisata. Menurut Scheyvens (2020), *Community-Based Tourism* harus mampu memberikan pemberdayaan ekonomi, sosial, psikologis, dan politik kepada masyarakat agar benar-benar memperoleh kendali dan manfaat nyata dari aktivitas pariwisata. Pandangan tersebut menegaskan bahwa keberhasilan CBT tidak hanya diukur dari jumlah kunjungan wisatawan, tetapi dari sejauh mana komunitas memperoleh posisi tawar yang kuat dalam sistem pariwisata.

2. Prinsip-Prinsip *Community-Based Tourism*

Pelaksanaan CBT didasarkan pada beberapa prinsip penting:

a. Pemberdayaan (*Empowerment*)

Pemberdayaan (*empowerment*) sebagai prinsip dalam *Community-Based Tourism* (CBT) mengacu pada proses di mana komunitas lokal tidak hanya menjadi penerima dampak dari aktivitas pariwisata, tetapi juga menjadi agen utama yang diberi kapasitas, akses, dan wewenang untuk mengelola sumber daya, mengambil keputusan strategis, serta membentuk arah pengembangan wisata di wilayahnya sendiri. Prinsip ini melibatkan peningkatan keterampilan, pengetahuan, serta kapabilitas masyarakat untuk menjalankan usaha pariwisata, mengelola pemasaran, serta memaksimalkan manfaat yang diperoleh secara adil dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Pemberdayaan dalam konteks pariwisata tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga memperkuat struktur sosial dan kelembagaan komunitas, sehingga masyarakat mampu berdiri secara mandiri dan berkontribusi secara aktif terhadap tata kelola destinasi.

Implementasi pemberdayaan dalam CBT dilakukan melalui proses pelatihan, pendampingan teknis, pembentukan kelompok usaha, serta penyediaan akses terhadap sumber daya dan informasi yang relevan agar masyarakat dapat mengambil peran penuh dalam setiap tahapan pengembangan pariwisata. Menurut Jackson *et al*. (2025), *community-based tourism* menempatkan komunitas lokal sebagai pusat pengembangan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat

melalui kontrol langsung atas perencanaan, manajemen, dan pembagian manfaat dari kegiatan pariwisata.

b. Keberlanjutan (*Sustainability*)

Keberlanjutan (*sustainability*) sebagai prinsip dalam *Community-Based Tourism* (CBT) menekankan pengelolaan pariwisata yang mampu memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya, dengan menjaga keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Prinsip ini mengharuskan komunitas lokal untuk mengelola sumber daya alam dan budaya secara bijaksana agar daya tarik wisata tetap terpelihara sekaligus memberikan manfaat ekonomi yang stabil dan berjangka panjang bagi masyarakat.

Keberlanjutan dalam CBT tercermin melalui praktik konservasi lingkungan, pelestarian tradisi dan kearifan lokal, serta pengembangan usaha wisata yang tidak melebihi daya dukung wilayah sehingga risiko degradasi dapat diminimalkan. Menurut Higgins-Desbiolles (2020), pariwisata yang berkelanjutan harus berorientasi pada keadilan sosial dan integritas ekologis, bukan semata-mata pada pertumbuhan ekonomi. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa keberlanjutan dalam CBT menuntut adanya tanggung jawab kolektif untuk memastikan bahwa aktivitas wisata tidak merusak struktur sosial maupun ekosistem setempat.

c. Keadilan Sosial (*Equity*)

Keadilan sosial (*equity*) sebagai prinsip *Community-Based Tourism* (CBT) menekankan pentingnya distribusi manfaat pariwisata yang adil dan merata bagi seluruh anggota komunitas lokal tanpa diskriminasi, sehingga setiap individu berkesempatan memperoleh keuntungan ekonomi, sosial, dan budaya dari aktivitas wisata yang berkembang di wilayahnya. Prinsip ini juga mengatur mekanisme pembagian hasil usaha, peluang kerja, serta akses terhadap sumber daya dan keputusan, dengan mempertimbangkan kebutuhan khusus kelompok rentan atau marginal agar tidak terkucilkan dalam proses pembangunan pariwisata.

Penerapan keadilan sosial dalam CBT menciptakan lingkungan yang inklusif dan menghormati hak-hak masyarakat

lokal, sehingga potensi konflik dapat diminimalkan dan legitimasi sosial terhadap program pariwisata meningkat karena semua pihak merasa dihargai dan terwakili. Menurut Scheyvens dan Biddulph (2021), *community-based tourism* yang berkelanjutan harus memprioritaskan prinsip keadilan sosial agar dampak positif ekonomi dan sosialnya dapat dirasakan secara luas oleh komunitas, bukan hanya oleh segelintir pihak. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa keadilan sosial dalam CBT bukan sekadar distribusi materi, tetapi juga penciptaan ruang partisipasi dan pengakuan terhadap kontribusi semua kelompok dalam pengembangan destinasi.

d. Kemitraan (*Partnership*)

Kemitraan (*partnership*) dalam prinsip *Community-Based Tourism* (CBT) merupakan kerja sama strategis antara komunitas lokal, pemerintah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memaksimalkan potensi destinasi secara berkelanjutan dengan saling berbagi sumber daya, informasi, dan tanggung jawab. Prinsip ini menekankan bahwa keterlibatan berbagai aktor secara kolaboratif dapat menciptakan sinergi yang memperkuat kapasitas masyarakat dalam pengelolaan wisata, memperluas akses pasar, serta meningkatkan kualitas layanan tanpa mengabaikan nilai-nilai sosial dan lingkungan setempat.

Kemitraan dalam CBT menciptakan saluran komunikasi yang efektif untuk merumuskan kebijakan, mengidentifikasi peluang investasi yang sesuai dengan aspirasi komunitas, serta menyediakan dukungan teknis dan finansial ketika diperlukan. Menurut Tse dan So (2022), kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam pariwisata berbasis komunitas meningkatkan efektivitas pengembangan destinasi melalui pembagian risiko, peningkatan kapasitas lokal, serta penguatan jaringan pemasaran. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa kemitraan tidak hanya bersifat transaksional tetapi juga mencerminkan hubungan saling menguntungkan yang memperkuat ketahanan dan keberlanjutan sistem pariwisata.

3. Manfaat *Community-Based Tourism*

Community-Based Tourism (CBT) memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi masyarakat lokal karena kegiatan wisata

yang dikelola sendiri memungkinkan pendapatan tetap berada di komunitas, membuka peluang usaha mikro dan lapangan kerja sehingga meningkatkan kesejahteraan keluarga secara langsung. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam produksi barang dan jasa wisata mendorong peredaran uang di tingkat lokal dan memperkuat basis ekonomi komunitas tanpa terlalu bergantung pada pihak eksternal.

CBT juga memupuk pelestarian sosial dan budaya karena masyarakat diberi peran untuk mempertahankan tradisi, kearifan lokal, serta ritual budaya sebagai bagian dari pengalaman wisata yang autentik, sehingga identitas komunitas tetap hidup dan dihargai oleh wisatawan. Menurut Scheyvens dan Biddulph (2021), pariwisata berbasis komunitas yang inklusif dan adil mampu memperkuat kohesi sosial, meningkatkan kapasitas lokal, dan memberikan rasa memiliki terhadap destinasi sambil meminimalkan potensi konflik dan eksklusi sosial. Implementasi CBT yang memperhatikan nilai sosial dan lingkungan akan mendukung keberlanjutan jangka panjang, bukan hanya berbicara soal keuntungan ekonomi semata.

4. Tantangan dalam Implementasi CBT

Tantangan dalam implementasi *Community-Based Tourism* (CBT) sering kali berkaitan dengan keterbatasan kapasitas masyarakat lokal dalam mengelola usaha pariwisata secara profesional, termasuk kurangnya akses terhadap modal, keterampilan pemasaran, serta kemampuan administrasi yang memadai untuk menjamin keberlanjutan usaha. Hal ini dapat menghambat efektivitas pengelolaan destinasi karena tanpa dukungan pelatihan dan pendampingan yang cukup, masyarakat cenderung bergantung pada bantuan eksternal atau mengalami kesulitan mempertahankan kualitas layanan yang kompetitif.

Konflik internal dalam komunitas terkait pembagian manfaat, perbedaan prioritas antar kelompok, dan tekanan eksternal seperti perubahan kebijakan atau masuknya investor besar juga menjadi hambatan serius dalam pelaksanaan CBT. Menurut Jackson *et al*. (2025), tantangan utama CBT mencakup masalah kelembagaan, kesenjangan kapasitas lokal, serta dinamika kekuasaan yang seringkali membuat partisipasi masyarakat menjadi kurang efektif. Situasi ini menunjukkan bahwa implementasi CBT tidak hanya membutuhkan komitmen terhadap prinsip pemberdayaan dan keberlanjutan, tetapi juga

mekanisme penyelesaian konflik dan penguatan struktur kelembagaan lokal agar mitigasi tantangan dapat dilakukan secara sistematis.

D. *Carrying Capacity* dan Daya Dukung Destinasi

Carrying Capacity dan Daya Dukung Destinasi merupakan konsep fundamental dalam perencanaan dan pengelolaan pariwisata berkelanjutan karena berkaitan langsung dengan batas toleransi suatu kawasan wisata terhadap aktivitas pengunjung. Konsep ini digunakan untuk menentukan sejauh mana suatu destinasi mampu menerima kunjungan tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan, penurunan kualitas pengalaman wisatawan, maupun gangguan sosial budaya pada masyarakat setempat. Pendekatan daya dukung menekankan prinsip keseimbangan antara pemanfaatan dan konservasi sehingga pengembangan destinasi tetap berada dalam batas yang dapat ditoleransi secara ekologis dan sosial.

1. Pengertian *Carrying Capacity*

Carrying capacity merupakan konsep yang menjelaskan batas maksimum jumlah individu atau aktivitas yang dapat ditampung oleh suatu lingkungan tanpa menimbulkan kerusakan permanen terhadap sumber daya alam, penurunan kualitas lingkungan, maupun gangguan terhadap keseimbangan ekosistem. Dalam konteks pariwisata, *carrying capacity* tidak hanya merujuk pada kapasitas fisik suatu ruang, tetapi juga mencakup kemampuan sosial dan ekologis destinasi untuk mempertahankan fungsi serta kualitasnya dalam jangka panjang. UNWTO (2021) menyatakan bahwa *carrying capacity* adalah tingkat maksimum penggunaan pengunjung yang dapat ditoleransi oleh suatu kawasan tanpa menyebabkan dampak negatif yang tidak dapat diterima terhadap lingkungan, ekonomi, dan sosial budaya destinasi tersebut.

Konsep ini bersifat dinamis karena kapasitas suatu kawasan dapat berubah tergantung pada kualitas pengelolaan, teknologi pendukung, regulasi, serta perilaku wisatawan yang memanfaatkan ruang tersebut. Pengukuran *carrying capacity* umumnya mempertimbangkan dimensi fisik, ekologis, sosial, dan psikologis agar perencanaan destinasi mampu mencegah terjadinya *overtourism* dan degradasi sumber daya. Penerapan prinsip ini menjadi instrumen strategis dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan karena

membantu pengambil kebijakan menentukan batas pemanfaatan yang rasional dan berbasis daya dukung nyata suatu wilayah.

2. Jenis-Jenis Daya Dukung Destinasi

Pengukuran daya dukung destinasi dilakukan melalui beberapa dimensi yang saling berkaitan, karena tekanan terhadap destinasi tidak hanya bersumber dari jumlah pengunjung, tetapi juga dari pola aktivitas dan intensitas pemanfaatan.

a. Daya Dukung Fisik (*Physical Carrying Capacity*)

Daya Dukung Fisik (*Physical Carrying Capacity*) merupakan batas maksimum jumlah wisatawan yang dapat ditampung oleh suatu destinasi berdasarkan ketersediaan ruang dan kapasitas infrastruktur tanpa menimbulkan kepadatan yang melampaui standar kenyamanan dan keselamatan. Konsep ini menitikberatkan pada pengukuran kuantitatif yang mencakup luas area efektif, standar kebutuhan ruang per individu, kapasitas fasilitas publik, serta pola rotasi kunjungan dalam periode waktu tertentu.

Menurut Milano, Cheer, dan Novelli (2021), *physical carrying capacity* merujuk pada jumlah maksimum pengunjung yang secara fisik dapat berada di suatu ruang destinasi berdasarkan parameter spasial dan infrastruktur yang tersedia tanpa menimbulkan tekanan berlebih terhadap fungsi dasar kawasan wisata. Penentuan kapasitas fisik umumnya dilakukan melalui pendekatan matematis yang mempertimbangkan luas zona yang dapat diakses wisatawan, waktu operasional destinasi, serta tingkat sirkulasi pengunjung dalam satu hari.

b. Daya Dukung Ekologis (*Ecological Carrying Capacity*)

Daya Dukung Ekologis (*Ecological Carrying Capacity*) merupakan batas kemampuan suatu ekosistem destinasi wisata dalam menerima tekanan aktivitas manusia tanpa mengalami kerusakan permanen atau penurunan fungsi ekologisnya. Konsep ini menitikberatkan pada keseimbangan antara tingkat pemanfaatan wisata dengan kapasitas regeneratif lingkungan, termasuk kemampuan alam untuk memulihkan diri dari gangguan fisik, kimia, maupun biologis.

Dimensi ekologis dalam daya dukung mencakup berbagai indikator seperti kualitas air dan udara, tingkat erosi tanah, daya

serap limbah, stabilitas habitat, serta keberlanjutan keanekaragaman hayati yang menjadi daya tarik utama destinasi berbasis alam. Buckley (2020) menyatakan bahwa *ecological carrying capacity* dalam pariwisata merujuk pada tingkat penggunaan pengunjung yang masih memungkinkan sistem lingkungan mempertahankan struktur, fungsi, dan proses ekologisnya tanpa mengalami degradasi yang tidak dapat dipulihkan.

c. Daya Dukung Sosial-Budaya (*Social Carrying Capacity*)

Daya Dukung Sosial-Budaya (*Social Carrying Capacity*) merupakan batas toleransi masyarakat lokal dan sistem sosial budaya suatu destinasi terhadap aktivitas pariwisata tanpa menimbulkan gangguan signifikan terhadap nilai, norma, serta struktur kehidupan komunitas setempat. Konsep ini menekankan bahwa keberlanjutan destinasi tidak hanya ditentukan oleh kondisi fisik dan ekologis, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat dalam menerima, beradaptasi, dan tetap mempertahankan identitas budayanya di tengah arus kunjungan wisatawan.

Dimensi sosial-budaya dalam daya dukung mencakup tingkat penerimaan masyarakat terhadap wisatawan, perubahan pola interaksi sosial, potensi konflik kepentingan, serta risiko komodifikasi budaya yang berlebihan akibat tekanan ekonomi pariwisata. Higgins-Desbiolles (2020) menjelaskan bahwa *social carrying capacity* merujuk pada ambang batas di mana intensitas pariwisata mulai memicu dampak sosial dan kultural yang tidak dapat diterima oleh komunitas tuan rumah dan mengancam kohesi sosial.

d. Daya Dukung Psikologis (*Psychological Carrying Capacity*)

Daya Dukung Psikologis (*Psychological Carrying Capacity*) merupakan batas tingkat kepadatan dan intensitas aktivitas wisata yang masih dapat diterima oleh wisatawan tanpa menurunkan persepsi kenyamanan, kepuasan, dan kualitas pengalaman berkunjung. Konsep ini berfokus pada dimensi perseptual dan subjektif yang berkaitan dengan bagaimana wisatawan menilai keramaian, antrian, kebisingan, serta gangguan visual yang muncul akibat konsentrasi pengunjung yang berlebihan.

Dimensi psikologis sangat dipengaruhi oleh karakteristik wisatawan, motivasi perjalanan, ekspektasi terhadap destinasi, serta jenis pengalaman yang dicari, sehingga ambang batas toleransi dapat berbeda antara satu segmen pasar dengan segmen lainnya. Oklevik, Gössling, Hall, Jacobsen, Grøtte, dan McCabe (2019) yang masih relevan dalam kajian 2020–2026 menjelaskan bahwa *psychological carrying capacity* berkaitan dengan titik di mana kepadatan pengunjung mulai secara signifikan menurunkan kepuasan dan persepsi kualitas pengalaman wisata.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Daya Dukung Destinasi

Faktor-faktor yang mempengaruhi daya dukung destinasi berkaitan erat dengan karakteristik fisik lingkungan, kapasitas infrastruktur, serta pola pemanfaatan ruang oleh wisatawan dalam periode tertentu. Kondisi geografis, tingkat kerentanan ekosistem, ketersediaan air bersih, sistem pengelolaan limbah, serta kualitas fasilitas publik menjadi variabel utama yang menentukan sejauh mana suatu kawasan mampu menampung aktivitas wisata tanpa mengalami degradasi. Intensitas kunjungan yang tinggi tanpa diimbangi dengan pengaturan zonasi dan pengendalian arus wisatawan dapat mempercepat penurunan kualitas lingkungan dan menurunkan kapasitas efektif destinasi.

Aspek sosial dan kelembagaan juga berperan signifikan dalam menentukan daya dukung karena tingkat partisipasi masyarakat, efektivitas regulasi, serta kapasitas manajemen destinasi memengaruhi kemampuan adaptasi terhadap tekanan pariwisata. Struktur ekonomi lokal, distribusi manfaat pariwisata, serta persepsi komunitas terhadap wisatawan dapat memperluas atau justru mempersempit batas toleransi sosial terhadap perkembangan sektor tersebut. UNWTO (2022) menegaskan bahwa daya dukung destinasi dipengaruhi oleh interaksi antara faktor lingkungan, sosial, ekonomi, dan tata kelola yang secara bersama-sama menentukan batas penggunaan yang dapat diterima dalam kerangka keberlanjutan.

4. Metode Penentuan Daya Dukung

Metode penentuan daya dukung destinasi melibatkan berbagai pendekatan yang sistematis untuk menilai batas toleransi suatu kawasan terhadap aktivitas wisata tanpa menimbulkan dampak negatif yang tidak

dapat diterima secara ekologis maupun sosial. Pendekatan yang sering digunakan dalam studi *carrying capacity* mencakup metode normatif yang mengandalkan kurva sosial dan indikator serta metode kuantitatif yang dirumuskan melalui serangkaian perhitungan seperti *Physical Carrying Capacity* (PCC), *Real Carrying Capacity* (RCC), dan *Effective Carrying Capacity* (ECC) berdasarkan formula tertentu. Beberapa metode lainnya juga menggabungkan indikator lingkungan, sosial, dan manajerial untuk menghasilkan angka ambang batas yang mempertimbangkan persepsi pengalaman pengunjung serta batas toleransi komunitas lokal sebagai bagian dari penilaian.

Menurut Zamru Ajuhari dan kolega (2023), dalam *literature review* tentang metode penilaian daya dukung pariwisata, dua pendekatan utama yang dominan digunakan adalah pendekatan normatif dan metode yang berkembang dari formulasi Cifuentes Arias, yang keduanya memberikan kerangka kerja berbeda dalam bagaimana *carrying capacity* diukur dan diimplementasikan dalam destinasi wisata berkelanjutan. Pendekatan normatif lebih menekankan pada jumlah penggunaan yang dapat diterima berdasarkan standar sosial dan preferensi pengunjung, sedangkan metode Cifuentes Arias menekankan rumus matematis untuk menentukan batas maksimal jumlah pengunjung melalui komponen PCC, RCC, dan ECC yang disesuaikan dengan kondisi fisik dan kapabilitas pengelolaan destinasi.

BAB III
PERENCANAAN PARIWISATA BERKELANJUTAN

Perencanaan pariwisata berkelanjutan merupakan pendekatan strategis dalam pengelolaan destinasi yang menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan secara terpadu. Orientasi ini menekankan integrasi antara pengembangan atraksi, penyediaan infrastruktur, serta penguatan kapasitas masyarakat lokal agar pertumbuhan sektor pariwisata tidak menimbulkan degradasi sumber daya maupun ketimpangan sosial.

Praktik perencanaan yang berkelanjutan mengharuskan adanya analisis daya dukung kawasan, pengendalian dampak lingkungan, serta tata kelola yang partisipatif dan akuntabel. Melalui kerangka kebijakan yang adaptif dan berbasis data, perencanaan pariwisata berkelanjutan diarahkan untuk menjamin keberlangsungan destinasi dalam jangka panjang sekaligus meningkatkan kesejahteraan komunitas tuan rumah.

A. Perencanaan Destinasi Wisata

Perencanaan destinasi wisata merupakan proses sistematis dalam merancang, mengembangkan, dan mengelola suatu kawasan agar memiliki daya tarik, aksesibilitas, amenitas, serta tata kelola yang terpadu dan berkelanjutan. Proses ini bertujuan memastikan bahwa pengembangan pariwisata memberikan manfaat ekonomi, menjaga kelestarian lingkungan, serta memperkuat identitas sosial-budaya masyarakat lokal. Perencanaan yang efektif menuntut pendekatan multidisipliner yang mengintegrasikan aspek spasial, ekonomi, sosial, lingkungan, dan kelembagaan. Berikut penjelasan rinci mengenai komponen utama dalam perencanaan destinasi wisata:

1. Analisis Potensi dan Karakteristik Destinasi

Analisis potensi dan karakteristik destinasi merupakan tahap fundamental dalam perencanaan pariwisata yang berfungsi untuk mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan mengevaluasi seluruh sumber

daya yang dimiliki suatu kawasan, baik berupa daya tarik alam, budaya, maupun buatan, sehingga dapat diketahui keunggulan komparatif dan kompetitifnya secara objektif. Proses ini tidak hanya mencakup inventarisasi atraksi, tetapi juga penilaian terhadap aksesibilitas, amenitas, infrastruktur pendukung, serta kesiapan masyarakat lokal dalam menerima aktivitas pariwisata. UNWTO (2021) menegaskan bahwa pengembangan destinasi yang efektif harus didasarkan pada pemahaman menyeluruh terhadap aset lokal, kapasitas kawasan, serta kebutuhan pasar agar tercapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.

Karakteristik destinasi dianalisis melalui pendekatan multidimensional yang melibatkan aspek fisik-geografis, sosial-budaya, ekonomi, dan kelembagaan guna memperoleh gambaran utuh mengenai struktur dan dinamika kawasan wisata. Aspek fisik meliputi kondisi bentang alam, iklim, keunikan ekosistem, serta tingkat kerentanan lingkungan, sementara aspek sosial-budaya mencakup nilai tradisi, pola interaksi masyarakat, dan tingkat penerimaan terhadap wisatawan. Analisis ini penting untuk menentukan *positioning* destinasi, segmentasi pasar yang sesuai, serta strategi pengembangan produk wisata yang autentik dan berdaya saing.

2. Perumusan Visi, Misi, dan Konsep Pengembangan

Perumusan visi, misi, dan konsep pengembangan merupakan fondasi strategis dalam perencanaan destinasi karena menentukan arah transformasi kawasan wisata secara jangka panjang serta menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan lintas sektor. Visi dirancang sebagai pernyataan normatif yang menggambarkan kondisi ideal destinasi di masa depan dengan menekankan identitas, keunggulan kompetitif, dan komitmen terhadap keberlanjutan, sedangkan misi berfungsi menerjemahkan visi tersebut ke dalam tujuan operasional dan langkah strategis yang terukur. Kejelasan perumusan ini memastikan konsistensi kebijakan, integrasi program, serta sinkronisasi antara kepentingan pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat lokal.

Konsep pengembangan disusun berdasarkan hasil analisis potensi, karakteristik wilayah, tren pasar, serta proyeksi dinamika industri pariwisata agar tercipta diferensiasi produk dan *positioning* destinasi yang kuat. Konsep tersebut dapat berbentuk penguatan tema tertentu seperti pariwisata berbasis alam, budaya, kreativitas, atau

komunitas yang diselaraskan dengan daya dukung kawasan dan kapasitas sosial-ekonomi masyarakat. Dredge dan Jamal (2022) menjelaskan bahwa perencanaan destinasi yang efektif mensyaratkan adanya visi bersama yang dirumuskan melalui tata kelola kolaboratif agar mampu mengarahkan pembangunan pariwisata secara adaptif dan berkelanjutan.

3. Perencanaan Tata Ruang dan Infrastruktur

Perencanaan tata ruang dan infrastruktur dalam pengembangan destinasi pariwisata merupakan proses strategis yang mengatur pemanfaatan ruang secara terstruktur agar aktivitas wisata dapat berlangsung selaras dengan fungsi lindung, fungsi budidaya, serta kepentingan sosial-ekonomi masyarakat. Penataan ruang dilakukan melalui mekanisme zonasi yang jelas untuk memisahkan area konservasi, zona atraksi, kawasan komersial, serta ruang publik guna mencegah konflik pemanfaatan lahan dan degradasi lingkungan. Infrastruktur pendukung seperti jaringan transportasi, sanitasi, energi, telekomunikasi, dan fasilitas umum dirancang secara terpadu untuk menjamin aksesibilitas, kenyamanan, serta keamanan wisatawan tanpa mengabaikan prinsip keberlanjutan.

Integrasi antara tata ruang dan infrastruktur menjadi kunci dalam menciptakan destinasi yang efisien secara spasial sekaligus resilien terhadap tekanan lingkungan dan pertumbuhan kunjungan wisata. Perencanaan ini memerlukan analisis spasial berbasis data, proyeksi pertumbuhan wisatawan, serta kajian dampak lingkungan untuk memastikan bahwa pembangunan fisik tidak melampaui daya dukung kawasan. UN-Habitat (2020) menegaskan bahwa perencanaan ruang yang terintegrasi dengan infrastruktur berkelanjutan merupakan prasyarat utama bagi pembangunan kawasan yang inklusif, aman, tangguh, dan berwawasan lingkungan.

4. Pengelolaan Dampak Lingkungan dan Sosial

Pengelolaan dampak lingkungan dan sosial dalam pembangunan pariwisata merupakan upaya sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, serta mengendalikan berbagai konsekuensi yang timbul akibat aktivitas wisata terhadap ekosistem dan struktur sosial masyarakat lokal. Aktivitas pariwisata yang tidak terkelola dengan baik berpotensi menimbulkan degradasi lingkungan seperti pencemaran, kerusakan

habitat, serta peningkatan limbah, sekaligus memicu perubahan sosial berupa komersialisasi budaya, konflik kepentingan, dan ketimpangan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan instrumen pengendalian seperti analisis mengenai dampak lingkungan, evaluasi daya dukung sosial, serta mekanisme partisipatif yang melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan.

Pendekatan pengelolaan yang efektif menekankan prinsip pencegahan, mitigasi, dan adaptasi melalui regulasi yang jelas, pengawasan berkelanjutan, serta penerapan standar operasional berbasis keberlanjutan. Implementasi strategi ini dapat mencakup pembatasan jumlah kunjungan, pengelolaan sampah terpadu, konservasi sumber daya alam, serta perlindungan terhadap warisan budaya agar tidak mengalami distorsi akibat tekanan pasar. Gössling dan Scott (2021) menyatakan bahwa pengelolaan dampak pariwisata harus berorientasi pada transformasi sistemik yang mengintegrasikan kebijakan lingkungan, keadilan sosial, dan tanggung jawab industri dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.

5. Strategi Pemasaran dan Branding Destinasi

Strategi pemasaran dan *branding* destinasi merupakan instrumen kunci dalam meningkatkan daya saing kawasan wisata melalui pembentukan citra yang kuat, konsisten, dan relevan dengan preferensi pasar sasaran. Proses ini mencakup penentuan segmentasi, targeting, dan *positioning* yang berbasis riset pasar agar pesan promosi sesuai dengan karakteristik wisatawan, tren perjalanan, serta keunggulan unik destinasi. Branding destinasi tidak hanya berfokus pada logo atau slogan, tetapi pada konstruksi identitas yang merepresentasikan nilai, pengalaman, dan diferensiasi yang ditawarkan kepada wisatawan secara holistik.

Implementasi strategi pemasaran modern memanfaatkan bauran komunikasi terpadu yang melibatkan media digital, platform media sosial, kolaborasi dengan pelaku industri, serta penyelenggaraan event untuk memperkuat *brand awareness* dan *brand engagement*. Pengelolaan reputasi destinasi juga menjadi bagian penting melalui monitoring ulasan wisatawan, manajemen krisis, serta peningkatan kualitas layanan guna menjaga persepsi positif di pasar global. Pike dan Page (2020) menegaskan bahwa keberhasilan *branding* destinasi sangat ditentukan oleh konsistensi pesan strategis dan koordinasi antar

pemangku kepentingan dalam membangun proposisi nilai yang autentik dan berkelanjutan.

6. Tata Kelola dan Kelembagaan

Tata kelola dan kelembagaan dalam pengembangan destinasi pariwisata merujuk pada sistem pengaturan, koordinasi, serta distribusi peran antar pemangku kepentingan yang meliputi pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan lembaga pendukung lainnya. Struktur tata kelola yang efektif menuntut adanya kejelasan kewenangan, mekanisme pengambilan keputusan yang transparan, serta akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan pariwisata. Kelembagaan yang kuat berfungsi sebagai instrumen pengendali agar perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program berjalan konsisten dengan prinsip keberlanjutan dan kepentingan publik.

Pendekatan kolaboratif menjadi elemen penting dalam tata kelola destinasi karena kompleksitas sektor pariwisata melibatkan berbagai aktor dengan kepentingan yang beragam dan saling terkait. Koordinasi lintas sektor memungkinkan integrasi kebijakan tata ruang, lingkungan, investasi, dan promosi sehingga tidak terjadi tumpang tindih regulasi maupun konflik kewenangan. Hall (2020) menegaskan bahwa tata kelola pariwisata yang efektif bergantung pada kapasitas institusional dan jejaring kolaboratif yang mampu mengelola interaksi antar aktor dalam sistem yang dinamis dan multi-level.

B. Analisis Potensi dan Dampak Pariwisata

Analisis potensi dan dampak pariwisata merupakan proses evaluatif yang bertujuan mengidentifikasi kapasitas suatu wilayah dalam dikembangkan sebagai destinasi wisata sekaligus menilai konsekuensi yang ditimbulkan dari aktivitas tersebut terhadap aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Analisis ini menjadi instrumen dasar dalam perencanaan strategis karena menentukan arah kebijakan, skala pengembangan, serta model pengelolaan yang akan diterapkan. Pendekatan yang digunakan bersifat komprehensif dan berbasis data agar keputusan yang diambil tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan kunjungan, tetapi juga pada keberlanjutan jangka panjang.

1. Analisis Potensi Pariwisata

Analisis potensi bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan internal destinasi serta peluang eksternal yang dapat dimanfaatkan dalam pengembangan kawasan wisata. Penilaian potensi dilakukan melalui kajian terhadap sumber daya, kesiapan infrastruktur, serta kondisi pasar yang relevan.

a. Potensi Sumber Daya Alam

Potensi sumber daya alam mencakup keseluruhan aset alamiah yang dapat dimanfaatkan sebagai daya tarik utama dalam aktivitas pariwisata, seperti lanskap alam yang unik, keanekaragaman flora dan fauna, dataran tinggi, pantai, hutan, sungai, air terjun, dan ekosistem khusus lainnya yang memiliki nilai estetika dan rekreatif bagi wisatawan. Potensi ini menjadi landasan fundamental karena sumber daya alam menyediakan basis atraksi yang autentik dan tidak mudah ditiru oleh destinasi lain, sehingga menjadi penentu daya saing suatu lokasi sebagai tujuan wisata efektif. Potensi alam juga mendukung diversifikasi produk pariwisata seperti ekowisata, petualangan, wisata alam, dan pendidikan lingkungan, yang membuka peluang peningkatan aliran kunjungan serta memperluas segmentasi pasar wisatawan. Potensi sumber daya alam yang terkelola dengan baik memengaruhi pola kunjungan, durasi tinggal, dan belanja wisatawan, sekaligus memperkuat proposisi nilai destinasi di tengah persaingan global pariwisata. Menurut studi terbaru, pemahaman menyeluruh terhadap karakter, distribusi, dan nilai estetika sumber daya alam merupakan prasyarat penting untuk merancang strategi pengembangan destinasi yang berkelanjutan dan adaptif terhadap kebutuhan pasar serta tantangan lingkungan (Ruban, 2021).

Pemanfaatan potensi sumber daya alam dalam pariwisata tidak hanya berorientasi pada atraksi visual, tetapi juga pada pengalaman yang dapat dialami wisatawan seperti melihat satwa liar, *trekking* melalui jalur alam, *snorkeling* di terumbu karang, atau menikmati panorama pegunungan; aktivitas-aktivitas ini meningkatkan keterlibatan emosional dan nilai pengalaman kunjungan. Evaluasi potensi ini mencakup penilaian kualitas fisik sumber daya, keterkaitan dengan sistem ekologi yang ada, serta kesiapan fasilitas pendukung untuk memberikan pengalaman

yang aman, nyaman, dan edukatif bagi pengunjung. Selain itu, pemetaan dan inventarisasi potensi alam harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan ekologis agar pemanfaatan tidak merusak habitat atau mengurangi nilai estetika sumber daya itu sendiri. Identifikasi dan klasifikasi potensi alam yang akurat juga menjadi dasar dalam menentukan segmentasi pasar yang tepat serta strategi pemasaran yang efektif sehingga daya tarik alamiah destinasi dapat dikomunikasikan secara optimal kepada wisatawan domestik maupun internasional.

b. Potensi Sosial dan Budaya

Potensi sosial dan budaya dalam pariwisata merujuk pada seluruh nilai, praktik, ekspresi, serta struktur kehidupan masyarakat yang dapat menjadi daya tarik wisata sekaligus identitas pembeda suatu destinasi di tengah persaingan global. Unsur tersebut meliputi tradisi adat, ritual keagamaan, seni pertunjukan, kerajinan tangan, kuliner khas, arsitektur lokal, serta pola interaksi sosial yang mencerminkan karakter komunitas setempat dan membentuk pengalaman autentik bagi wisatawan. Keberadaan modal sosial seperti solidaritas komunitas, jaringan kelembagaan lokal, serta partisipasi masyarakat juga menjadi faktor penting karena menentukan kapasitas destinasi dalam mengelola aktivitas pariwisata secara inklusif dan berkelanjutan. Potensi ini tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi simbolik dan identitas yang memperkuat rasa memiliki masyarakat terhadap warisan budaya. UNESCO (2021) menegaskan bahwa warisan budaya takbenda, termasuk praktik sosial dan ekspresi tradisional, merupakan sumber daya strategis yang berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan apabila dikelola dengan partisipasi komunitas pemiliknya.

Pemanfaatan potensi sosial dan budaya dalam pengembangan pariwisata memerlukan pendekatan yang sensitif terhadap nilai lokal agar tidak terjadi komodifikasi berlebihan yang menghilangkan makna asli suatu tradisi. Evaluasi terhadap potensi ini dilakukan melalui inventarisasi aset budaya, analisis tingkat autentisitas, serta kajian dampak sosial guna memastikan bahwa interaksi antara wisatawan dan masyarakat tidak menimbulkan distorsi budaya maupun konflik sosial. Penguatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan, pemberdayaan ekonomi

kreatif, dan perlindungan hukum terhadap warisan budaya menjadi langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan nilai sosial tersebut. Pengelolaan yang tepat memungkinkan potensi sosial dan budaya berfungsi sebagai instrumen pelestarian sekaligus penggerak ekonomi lokal yang memperkuat kohesi sosial. Integrasi antara pelestarian budaya dan strategi pemasaran destinasi akan menghasilkan *positioning* yang kuat karena wisatawan modern cenderung mencari pengalaman berbasis keaslian dan keterlibatan langsung dengan komunitas lokal.

c. Potensi Ekonomi dan Infrastruktur

Potensi ekonomi dan infrastruktur dalam pengembangan pariwisata mencerminkan kapasitas suatu wilayah untuk mendukung aktivitas wisata melalui kekuatan struktur ekonomi lokal serta ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Dimensi ekonomi meliputi keberadaan usaha mikro, kecil, dan menengah, jaringan industri kreatif, ketersediaan tenaga kerja terampil, serta sistem distribusi barang dan jasa yang mampu menunjang kebutuhan wisatawan secara efisien dan berkelanjutan. Infrastruktur mencakup aksesibilitas transportasi darat, laut, dan udara, jaringan jalan yang terintegrasi, sistem sanitasi dan pengelolaan limbah, ketersediaan air bersih dan energi, fasilitas kesehatan, serta konektivitas digital yang mendukung promosi dan transaksi pariwisata berbasis teknologi. Ketersediaan infrastruktur yang andal berperan sebagai enabler pertumbuhan destinasi karena menentukan kemudahan akses, kenyamanan kunjungan, dan persepsi kualitas layanan secara keseluruhan. Menurut World Travel & Tourism Council (2021), investasi pada infrastruktur dan ekosistem bisnis pariwisata memiliki korelasi langsung dengan peningkatan kontribusi sektor pariwisata terhadap produk domestik bruto dan penciptaan lapangan kerja.

Evaluasi potensi ekonomi dan infrastruktur dilakukan melalui analisis kapasitas fiskal daerah, struktur rantai nilai pariwisata, serta tingkat kesiapan investasi yang dapat menarik partisipasi sektor swasta secara berkelanjutan. Penilaian ini juga mempertimbangkan aspek konektivitas regional, efisiensi logistik, dan integrasi antar sektor agar tidak terjadi *bottleneck* yang menghambat mobilitas wisatawan maupun distribusi

manfaat ekonomi kepada masyarakat lokal. Penguatan infrastruktur harus diselaraskan dengan prinsip tata ruang dan daya dukung lingkungan untuk menghindari pembangunan yang eksploitatif atau tidak terkendali. Optimalisasi potensi ekonomi memerlukan kebijakan yang mendorong kewirausahaan lokal, kemitraan publik-swasta, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia agar tercipta *multiplier effect* yang merata. Integrasi antara kesiapan ekonomi dan infrastruktur yang terencana dengan baik akan memperkuat daya saing destinasi sekaligus meningkatkan ketahanan ekonomi wilayah terhadap fluktuasi pasar pariwisata global.

d. Potensi Pasar dan Daya Saing

Potensi pasar dan daya saing pariwisata menunjukkan kemampuan suatu destinasi untuk menarik wisatawan dari berbagai segmen sekaligus mempertahankan posisinya dibandingkan destinasi lain. Analisis potensi pasar mencakup preferensi, perilaku, dan tren wisatawan untuk menentukan segmen yang paling menguntungkan, sedangkan daya saing menilai kemampuan destinasi menawarkan pengalaman, fasilitas, dan nilai tambah yang lebih menarik daripada pesaing. Chernega (2021) menyatakan bahwa destinasi yang efektif menggabungkan pemahaman pasar dengan strategi diferensiasi untuk mempertahankan dan memperluas pangsa pasar.

Evaluasi potensi pasar dilakukan melalui pemetaan segmen wisatawan, karakteristik demografis, dan tren industri, sedangkan daya saing ditentukan oleh citra merek, kualitas fasilitas, aksesibilitas, dan inovasi produk. Destinasi yang mampu menyeimbangkan potensi pasar dengan keunggulan kompetitif cenderung menarik lebih banyak kunjungan, meningkatkan loyalitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan. Penyesuaian strategi secara berkelanjutan penting agar destinasi tetap relevan di tengah perubahan preferensi wisatawan dan kondisi pasar global.

2. Analisis Dampak Pariwisata

Analisis dampak dilakukan untuk menilai efek yang ditimbulkan oleh aktivitas pariwisata terhadap berbagai dimensi kehidupan

masyarakat dan lingkungan. Evaluasi ini penting untuk mencegah eksploitasi berlebihan serta memastikan distribusi manfaat yang adil.

a. Dampak Ekonomi

Dampak ekonomi pariwisata mencakup kontribusi sektor wisata terhadap peningkatan pendapatan, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan usaha lokal yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Aktivitas wisata juga mendorong perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah serta memperkuat rantai nilai ekonomi di tingkat regional, sekaligus meningkatkan penerimaan daerah melalui pajak dan retribusi pariwisata. Gössling dan Hall (2021) menyatakan bahwa sektor pariwisata yang dikelola berkelanjutan dapat menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi lokal sekaligus meminimalkan risiko ketergantungan ekonomi berlebih pada kunjungan wisatawan.

Evaluasi dampak ekonomi dilakukan melalui analisis kontribusi pariwisata terhadap produk domestik bruto, tingkat pengeluaran wisatawan, dan penciptaan lapangan kerja langsung maupun tidak langsung. Pengelolaan yang tepat memastikan manfaat ekonomi tersebar merata ke masyarakat lokal dan mengurangi kebocoran ekonomi yang disebabkan oleh dominasi investor eksternal. Integrasi strategi pengembangan dan pemantauan berkelanjutan membantu destinasi memaksimalkan dampak ekonomi positif sekaligus menjaga stabilitas sosial dan keberlanjutan lingkungan.

b. Dampak Sosial dan Budaya

Dampak sosial dan budaya pariwisata mencakup perubahan dalam struktur, nilai, serta dinamika kehidupan masyarakat akibat interaksi dengan wisatawan dan arus modal dari aktivitas wisata. Interaksi ini dapat memicu perubahan sosial seperti mobilitas tenaga kerja, transformasi peran gender, serta pergeseran nilai-nilai lokal, sekaligus menimbulkan adaptasi atau komersialisasi budaya ketika praktik tradisional dipasarkan sebagai atraksi wisata. Tindakan komersialisasi tersebut berpotensi mengikis makna autentik tradisi jika tidak disertai penghormatan terhadap nilai-nilai lokal, sehingga penting bagi pengelola destinasi untuk menyeimbangkan manfaat ekonomi dengan pelestarian identitas dan norma komunitas. Menurut

Smith dan Xiao (2021), perkembangan pariwisata yang intens dapat memperkuat kebanggaan budaya sekaligus menimbulkan resistensi sosial apabila perubahan nilai dan pola konsumsi tidak dikelola secara inklusif dan sensitif terhadap konteks lokal.

Adanya aktivitas pariwisata sering kali mendorong revitalisasi seni, adat, dan tradisi yang sebelumnya kurang mendapat perhatian, karena permintaan pasar wisata mendorong pelestarian praktik budaya yang bernilai. Namun, dampak sosial juga dapat berupa ketimpangan akses terhadap manfaat ekonomi, konflik sosial akibat pergeseran prioritas pembangunan, serta meningkatnya tekanan pada sistem sosial yang semula stabil. Oleh karena itu, analisis dampak sosial budaya harus mencakup kajian perubahan pola interaksi sosial, persepsi terhadap identitas budaya, serta mekanisme adaptasi komunitas terhadap perubahan eksternal yang dibawa oleh sektor pariwisata.

c. Dampak Lingkungan

Dampak lingkungan dari pariwisata mencakup berbagai perubahan fisik dan ekologis yang terjadi ketika aktivitas wisata meningkat di suatu kawasan, termasuk degradasi habitat, polusi air dan udara, penumpukan limbah, serta tekanan terhadap sumber daya alam seperti air dan energi. Aktivitas wisata yang intensif seperti transportasi, pembangunan fasilitas, serta konsumsi sumber daya oleh wisatawan dan industri pendukungnya turut meningkatkan emisi gas rumah kaca, mempercepat fragmentasi habitat, dan mengurangi kualitas ekosistem lokal yang rentan terhadap gangguan eksternal. Dampak tersebut tidak hanya memengaruhi komponen fisik lingkungan, tetapi juga mengurangi kapasitas ekosistem untuk menyediakan layanan lingkungan seperti penyerapan karbon, penyaringan air, dan keanekaragaman hayati yang menjadi bagian penting dari fungsi ekologis kawasan wisata.

Tingkat dampak lingkungan sering kali terkait dengan skala perkembangan pariwisata, pola mobilitas wisatawan, serta mekanisme pengelolaan destinasi yang diterapkan, sehingga tanpa strategi keberlanjutan yang tepat kawasan rentan mengalami overeksploitasi dan degradasi jangka panjang. Wang dan Cheablam (2025) menegaskan bahwa perkembangan pariwisata dapat meningkatkan emisi karbon secara signifikan

dan berkontribusi terhadap penurunan kualitas lingkungan jika tidak diimbangi dengan investasi dalam teknologi ramah lingkungan dan kebijakan yang menekankan ketahanan ekologi. Pemahaman terhadap pola dampak ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang efektif dalam pengelolaan destinasi, seperti regulasi kapasitas kunjungan, pengelolaan limbah terpadu, serta penerapan infrastruktur hijau yang dapat meminimalkan tekanan terhadap lingkungan sekaligus mempertahankan kualitas pengalaman wisata.

d. Dampak Tata Ruang dan Infrastruktur

Dampak tata ruang dan infrastruktur dalam pariwisata terlihat dari perubahan penggunaan lahan, pembangunan fasilitas wisata, serta penataan transportasi yang dapat mengubah struktur fisik kawasan dan pola mobilitas masyarakat. Peningkatan pembangunan infrastruktur tanpa perencanaan yang matang dapat menyebabkan kepadatan, degradasi lingkungan, dan konflik penggunaan lahan, sekaligus memengaruhi kenyamanan dan pengalaman wisatawan. Menurut López-Bonilla dan López-Bonilla (2022), perencanaan tata ruang yang terpadu dan berkelanjutan sangat penting untuk meminimalkan dampak negatif infrastruktur terhadap lingkungan dan masyarakat sambil mendukung pengembangan pariwisata.

Perubahan tata ruang yang terkait pariwisata juga memengaruhi aksesibilitas, distribusi fasilitas publik, dan kapasitas layanan, sehingga dapat memperkuat atau menurunkan daya saing destinasi. Evaluasi dampak ini dilakukan dengan menilai keterkaitan antara pembangunan fisik dan kebutuhan ekologis serta sosial setempat, termasuk kapasitas transportasi, energi, dan sistem sanitasi. Perencanaan yang mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dan sosial memungkinkan destinasi menjaga kualitas ruang, meningkatkan kenyamanan wisatawan, dan memastikan manfaat ekonomi serta sosial tersebar merata.

C. Zonasi dan Tata Ruang Pariwisata

Zonasi dan tata ruang pariwisata merupakan proses pengaturan pemanfaatan ruang dalam suatu wilayah destinasi wisata yang bertujuan

untuk mengoptimalkan potensi pariwisata sekaligus menjaga kelestarian lingkungan, sosial, dan budaya. Konsep ini digunakan untuk menentukan fungsi serta batasan penggunaan ruang sehingga setiap aktivitas pariwisata dapat berjalan secara terencana, terarah, dan tidak menimbulkan konflik antara kepentingan ekonomi, ekologi, maupun kepentingan masyarakat lokal. Melalui penerapan zonasi dan tata ruang yang tepat, pengembangan destinasi wisata dapat dilakukan secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan, kenyamanan wisatawan, serta keseimbangan ekosistem.

1. Konsep Dasar Zonasi Pariwisata

Konsep dasar zonasi pariwisata merujuk pada proses pembagian suatu kawasan destinasi wisata ke dalam beberapa area berdasarkan fungsi, karakteristik lingkungan, serta jenis aktivitas wisata yang dapat dilakukan di dalamnya, sehingga pemanfaatan ruang dapat diatur secara terencana dan tidak menimbulkan kerusakan terhadap sumber daya alam maupun sosial budaya. Penerapan zonasi dalam pengembangan destinasi bertujuan untuk mengatur distribusi aktivitas wisata, mengendalikan intensitas penggunaan ruang, serta memastikan bahwa setiap kawasan memiliki fungsi yang jelas antara area konservasi, pemanfaatan wisata, dan fasilitas pendukung sehingga tercipta keseimbangan antara kegiatan wisata dan kelestarian lingkungan. Penataan kawasan wisata melalui sistem zonasi juga membantu pengelola destinasi dalam mengarahkan alur pergerakan wisatawan, menjaga kualitas pengalaman wisata, serta menghindari konflik pemanfaatan ruang antara kepentingan ekonomi, ekologis, dan sosial masyarakat setempat (Murti, 2025).

Penerapan konsep zonasi pariwisata juga berkaitan erat dengan prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan yang menekankan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya wisata dan upaya pelestarian lingkungan serta budaya lokal. Pengaturan ruang yang sistematis melalui zonasi memungkinkan pengelolaan destinasi dilakukan secara lebih terarah dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan, kapasitas kunjungan wisatawan, serta kebutuhan pengembangan fasilitas pariwisata secara bertahap dan terkontrol. Melalui pendekatan ini, destinasi wisata dapat dikembangkan secara berkelanjutan karena setiap zona memiliki peran yang berbeda dalam mendukung fungsi konservasi, rekreasi, edukasi, maupun aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar kawasan wisata.

2. Jenis-Jenis Zona dalam Tata Ruang Pariwisata

Pada perencanaan pariwisata, wilayah destinasi umumnya dibagi ke dalam beberapa jenis zona berdasarkan fungsi dan tingkat pemanfaatannya.

a. Zona Inti (*Core Zone*)

Zona inti (*core zone*) merupakan bagian utama dalam sistem zonasi pariwisata yang memiliki nilai konservasi paling tinggi karena di dalamnya terdapat sumber daya alam, keanekaragaman hayati, atau warisan budaya yang memiliki tingkat keaslian dan sensitivitas lingkungan yang sangat tinggi. Kawasan ini biasanya ditetapkan sebagai area yang perlindungannya diprioritaskan sehingga berbagai aktivitas manusia dibatasi secara ketat guna menjaga kelestarian ekosistem, keaslian lanskap, serta keberlanjutan nilai ekologis dan budaya yang menjadi daya tarik utama suatu destinasi wisata.

Keberadaan zona inti berfungsi sebagai pusat konservasi yang menjadi fondasi utama bagi keberlanjutan kawasan pariwisata karena wilayah ini berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem serta mempertahankan kualitas lingkungan yang mendukung keberlangsungan destinasi wisata dalam jangka panjang. Pengelolaan kawasan ini umumnya menerapkan kebijakan pembatasan akses, pengawasan aktivitas wisata, serta pengendalian jumlah pengunjung agar dampak negatif terhadap lingkungan dapat diminimalkan sekaligus memastikan bahwa aktivitas wisata yang dilakukan bersifat edukatif dan tidak merusak ekosistem.

b. Zona Penyangga (*Buffer Zone*)

Zona penyangga (*buffer zone*) merupakan kawasan yang berada di sekitar atau mengelilingi zona inti dalam suatu wilayah pariwisata yang berfungsi sebagai area perlindungan terhadap tekanan aktivitas manusia yang dapat mengganggu kelestarian lingkungan di kawasan utama. Keberadaan zona ini dirancang untuk mengurangi dampak negatif yang berasal dari aktivitas pariwisata, pembangunan infrastruktur, maupun kegiatan ekonomi masyarakat sehingga ekosistem pada zona inti tetap terjaga dan tidak mengalami kerusakan yang signifikan.

Zona penyangga juga memiliki peran penting dalam mendukung pengelolaan kawasan wisata secara berkelanjutan

karena area ini dapat dimanfaatkan secara terbatas untuk berbagai aktivitas wisata yang lebih terkendali seperti wisata edukasi, ekowisata, atau kegiatan penelitian lingkungan. Pengelolaan zona ini biasanya dilakukan dengan menerapkan aturan pemanfaatan ruang yang lebih fleksibel dibandingkan zona inti, namun tetap memperhatikan prinsip konservasi agar aktivitas yang dilakukan tidak memberikan tekanan berlebihan terhadap lingkungan.

c. Zona Pemanfaatan Wisata (*Tourism Utilization Zone*)

Zona pemanfaatan wisata (*tourism utilization zone*) merupakan bagian dari kawasan destinasi yang secara khusus dialokasikan untuk kegiatan pariwisata dan rekreasi dengan tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan serta perlindungan terhadap lingkungan sekitar. Kawasan ini biasanya memiliki kondisi alam, aksesibilitas, serta potensi daya tarik wisata yang memungkinkan dilakukannya berbagai aktivitas wisata seperti rekreasi alam, ekowisata, pendidikan lingkungan, maupun kegiatan interpretasi wisata tanpa mengganggu fungsi konservasi kawasan secara keseluruhan.

Zona pemanfaatan wisata dirancang sebagai ruang yang mendukung interaksi antara wisatawan dengan lingkungan alam atau budaya secara terkontrol sehingga pengalaman wisata dapat tercipta dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya yang ada. Pengembangan fasilitas wisata seperti jalur interpretasi, pusat informasi, sarana rekreasi, serta infrastruktur pendukung lainnya biasanya ditempatkan di kawasan ini agar aktivitas wisata terpusat pada area yang telah direncanakan sehingga tekanan terhadap zona konservasi dapat diminimalkan.

d. Zona Pengembangan dan Infrastruktur

Zona pengembangan dan infrastruktur merupakan bagian dari kawasan pariwisata yang difokuskan untuk pembangunan berbagai fasilitas pendukung yang diperlukan dalam menunjang aktivitas wisata serta meningkatkan kenyamanan dan aksesibilitas bagi wisatawan. Kawasan ini biasanya dirancang sebagai area yang memungkinkan pengembangan sarana seperti akomodasi, transportasi, pusat informasi wisata, fasilitas rekreasi, serta berbagai layanan pendukung lainnya yang

berfungsi untuk memperkuat daya tarik dan kualitas destinasi wisata.

Keberadaan zona pengembangan dan infrastruktur memiliki peran strategis dalam menciptakan sistem pariwisata yang terintegrasi karena fasilitas yang dibangun di dalamnya dapat mendukung kelancaran aktivitas wisata sekaligus meningkatkan daya saing destinasi di tingkat regional maupun global. Pembangunan fasilitas pada zona ini juga harus memperhatikan prinsip perencanaan berkelanjutan agar perkembangan infrastruktur tidak menimbulkan tekanan berlebihan terhadap lingkungan serta tetap selaras dengan karakteristik alam dan budaya yang menjadi identitas suatu destinasi wisata.

3. Prinsip Tata Ruang dalam Pengembangan Pariwisata

Prinsip tata ruang dalam pengembangan pariwisata berkaitan dengan pengaturan pemanfaatan ruang secara terencana agar kegiatan pariwisata dapat berkembang tanpa menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan maupun konflik pemanfaatan lahan. Perencanaan ruang dalam sektor pariwisata harus mempertimbangkan kesesuaian antara karakteristik wilayah, potensi sumber daya alam dan budaya, serta kebutuhan pembangunan fasilitas wisata sehingga pemanfaatan ruang dapat berjalan secara efisien dan tetap menjaga keseimbangan antara kegiatan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Pendekatan tata ruang yang terintegrasi juga memungkinkan setiap zona dalam kawasan wisata memiliki fungsi yang jelas, mulai dari kawasan konservasi, zona pemanfaatan wisata, hingga area pengembangan infrastruktur yang dirancang untuk mendukung aktivitas wisata secara terorganisasi.

Pengembangan pariwisata yang berbasis pada prinsip tata ruang juga menekankan pentingnya pengendalian daya dukung lingkungan, partisipasi masyarakat lokal, serta integrasi perencanaan pariwisata dengan kebijakan pembangunan wilayah secara keseluruhan. Pengaturan ruang yang baik dapat mengurangi tekanan terhadap kawasan sensitif, mengarahkan pembangunan fasilitas wisata pada lokasi yang tepat, serta menciptakan distribusi aktivitas wisata yang lebih merata sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar destinasi. Prinsip ini menegaskan bahwa perencanaan tata ruang dalam pariwisata harus mempertimbangkan keseimbangan antara aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi agar pembangunan destinasi dapat berlangsung

secara berkelanjutan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat serta lingkungan (Chen, Xu, & Lew, 2020).

4. Manfaat Penerapan Zonasi dan Tata Ruang Pariwisata

Manfaat penerapan zonasi dan tata ruang pariwisata dapat dilihat dari kemampuannya dalam mengatur pemanfaatan ruang secara terencana sehingga kegiatan pariwisata tidak menimbulkan kerusakan lingkungan maupun konflik penggunaan lahan di suatu destinasi wisata. Pengaturan ruang melalui sistem zonasi memungkinkan setiap kawasan memiliki fungsi yang jelas, seperti kawasan konservasi, zona pemanfaatan wisata, serta area pengembangan fasilitas sehingga aktivitas wisata dapat berlangsung secara terkontrol dan seimbang antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Penataan ruang yang baik juga membantu menjaga kualitas lingkungan destinasi wisata karena pembangunan fasilitas serta aktivitas wisata diarahkan pada area yang sesuai dengan daya dukung wilayah sehingga tekanan terhadap ekosistem dapat diminimalkan.

Penerapan zonasi dan tata ruang juga memberikan manfaat dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan destinasi wisata karena pemerintah dan pengelola kawasan dapat merencanakan pembangunan pariwisata secara lebih sistematis dan terintegrasi dengan kebijakan pembangunan wilayah. Pengaturan ruang yang terencana memungkinkan distribusi aktivitas wisata menjadi lebih merata sehingga tidak terjadi penumpukan wisatawan pada satu lokasi tertentu sekaligus memberikan peluang ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat di sekitar kawasan wisata. Perencanaan pariwisata yang berbasis tata ruang pada akhirnya dapat membantu memaksimalkan manfaat ekonomi dari sektor pariwisata sekaligus meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat lokal (Widiati & Permatasari, 2022).

D. Perencanaan Berbasis Partisipasi Masyarakat

Perencanaan berbasis partisipasi masyarakat merupakan pendekatan dalam proses perencanaan pembangunan yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap tahapan pengambilan keputusan, mulai dari identifikasi potensi dan masalah, penyusunan rencana, hingga pelaksanaan dan evaluasi program. Pendekatan ini menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan yang memiliki peran penting

dalam menentukan arah pengembangan wilayah atau sektor tertentu, termasuk dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan. Melalui keterlibatan masyarakat, perencanaan yang dilakukan cenderung lebih sesuai dengan kebutuhan lokal, kondisi sosial budaya, serta potensi sumber daya yang dimiliki oleh wilayah tersebut.

Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan juga membantu meningkatkan rasa memiliki (*sense of ownership*) terhadap program pembangunan yang dijalankan. Ketika masyarakat terlibat secara langsung dalam proses perencanaan, akan lebih bertanggung jawab dalam menjaga keberlanjutan program serta mendukung implementasi kebijakan yang telah disepakati bersama. Selain itu, pendekatan partisipatif juga dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta memperkuat hubungan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat lokal dalam pengelolaan pembangunan.

1. Konsep Dasar Perencanaan Partisipatif

Konsep dasar perencanaan partisipatif merujuk pada pendekatan perencanaan pembangunan yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam proses pengambilan keputusan, sehingga setiap rencana yang disusun tidak hanya berasal dari kebijakan pemerintah atau pihak perencana, tetapi juga mencerminkan aspirasi, kebutuhan, serta potensi yang dimiliki oleh masyarakat lokal. Pendekatan ini menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam berbagai tahapan perencanaan mulai dari identifikasi masalah, penentuan prioritas pembangunan, penyusunan program, hingga proses evaluasi, karena partisipasi masyarakat diyakini mampu meningkatkan efektivitas kebijakan pembangunan serta memperkuat keberlanjutan program yang dijalankan (Reed, 2020).

2. Tujuan Perencanaan Berbasis Partisipasi Masyarakat

Tujuan perencanaan berbasis partisipasi masyarakat adalah untuk menciptakan proses pembangunan yang lebih inklusif dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya dan pembangunan wilayahnya. Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan memungkinkan berbagai aspirasi, kebutuhan, serta potensi lokal dapat terakomodasi secara lebih tepat sehingga kebijakan yang dihasilkan

menjadi lebih relevan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat.

Perencanaan yang melibatkan masyarakat juga bertujuan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab dan kepemilikan masyarakat terhadap program pembangunan yang dirancang, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat tetapi juga menjadi bagian dari pelaksana dan pengawas program tersebut. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan terbukti mampu meningkatkan kualitas keputusan pembangunan karena menggabungkan pengetahuan lokal dengan kebijakan institusional, yang pada akhirnya mendukung terciptanya pembangunan yang lebih efektif, demokratis, dan berkelanjutan (Reed *et al*., 2020).

3. Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan

Bentuk partisipasi masyarakat dalam perencanaan dapat dilihat dari berbagai bentuk keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembangunan wilayah atau program tertentu. Keterlibatan tersebut tidak hanya terbatas pada kehadiran dalam forum musyawarah atau pertemuan perencanaan, tetapi juga mencakup pemberian gagasan, usulan program, serta penyampaian aspirasi yang berkaitan dengan kebutuhan dan potensi masyarakat di suatu wilayah. Partisipasi dalam tahap ini memungkinkan masyarakat memberikan masukan mengenai permasalahan yang dihadapi serta alternatif solusi yang dianggap paling sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat.

Bentuk partisipasi masyarakat juga dapat diwujudkan melalui keterlibatan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan penyusunan rencana program pembangunan yang akan dilaksanakan. Dalam proses ini masyarakat dapat berperan sebagai pihak yang memberikan pertimbangan terhadap prioritas pembangunan, menentukan program yang dianggap paling penting, serta terlibat dalam diskusi atau forum konsultasi publik yang diselenggarakan oleh pemerintah atau lembaga perencana. Keterlibatan tersebut menjadi penting karena masyarakat memiliki pengetahuan lokal yang dapat membantu menghasilkan perencanaan yang lebih realistis dan sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan.

4. Manfaat Perencanaan Berbasis Partisipasi Masyarakat

Manfaat perencanaan berbasis partisipasi masyarakat dapat dilihat dari kemampuannya dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan karena proses penyusunan program tidak hanya didasarkan pada perspektif pemerintah atau perencana, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan, aspirasi, serta pengalaman masyarakat yang secara langsung merasakan dampak dari kebijakan tersebut. Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan juga membantu menghasilkan keputusan yang lebih realistis dan kontekstual karena masyarakat memiliki pengetahuan lokal mengenai kondisi sosial, ekonomi, maupun lingkungan di wilayahnya sehingga program pembangunan yang dirancang menjadi lebih tepat sasaran dan mudah diimplementasikan.

Manfaat lain dari perencanaan partisipatif adalah meningkatnya rasa tanggung jawab dan kepemilikan masyarakat terhadap program pembangunan yang telah disepakati bersama sehingga masyarakat cenderung lebih aktif dalam mendukung pelaksanaan dan menjaga keberlanjutan program tersebut. Pendekatan partisipatif juga mampu memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembangunan karena masyarakat terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan, pengawasan pelaksanaan program, serta evaluasi hasil pembangunan sehingga pembangunan dapat berjalan lebih demokratis dan berkelanjutan (Widianingsih, 2020).

BAB IV
STRATEGI PENGELOLAAN DESTINASI

Strategi pengelolaan destinasi pariwisata merupakan pendekatan yang dirancang secara sistematis untuk mengatur, mengembangkan, dan memanfaatkan potensi suatu kawasan wisata agar mampu memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan secara berkelanjutan. Pengelolaan yang terencana tidak hanya berfokus pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga menekankan pada keseimbangan antara pelestarian sumber daya alam, penguatan budaya lokal, serta peningkatan kualitas pengalaman wisata bagi pengunjung.

Pengembangan destinasi yang efektif membutuhkan sinergi antara pemerintah, pelaku industri pariwisata, dan masyarakat lokal agar setiap potensi yang dimiliki dapat dikelola secara optimal dan bertanggung jawab. Strategi pengelolaan yang tepat akan membantu menciptakan daya saing destinasi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, serta menjaga keberlanjutan lingkungan sehingga destinasi tersebut tetap menarik dan relevan dalam jangka panjang.

A. Manajemen Daya Tarik Wisata

Manajemen daya tarik wisata merupakan proses pengelolaan berbagai potensi yang menjadi alasan utama wisatawan mengunjungi suatu destinasi, baik yang bersifat alam, budaya, maupun buatan. Pengelolaan ini bertujuan untuk menjaga kualitas pengalaman wisatawan, meningkatkan nilai ekonomi destinasi, serta memastikan keberlanjutan sumber daya yang menjadi daya tarik utama.

Manajemen daya tarik wisata menekankan pada upaya perencanaan, pengorganisasian, pengembangan, serta pengendalian seluruh komponen atraksi wisata agar dapat dikelola secara optimal dan memberikan manfaat bagi wisatawan maupun masyarakat lokal. Proses pengelolaan tersebut juga harus memperhatikan aspek pelestarian lingkungan, keaslian budaya, keamanan pengunjung, serta kualitas

pelayanan agar daya tarik wisata tetap menarik dan mampu bersaing dengan destinasi lainnya.

1. Identifikasi dan Inventarisasi Potensi Daya Tarik

Identifikasi dan inventarisasi potensi daya tarik wisata merupakan tahap awal dalam proses perencanaan dan pengembangan destinasi yang bertujuan untuk mengenali berbagai sumber daya yang dapat dikembangkan menjadi atraksi wisata yang bernilai. Proses ini dilakukan dengan mengkaji secara sistematis berbagai potensi yang terdapat di suatu wilayah, seperti sumber daya alam, budaya, sejarah, maupun kreativitas masyarakat yang memiliki nilai keunikan, keaslian, dan daya tarik bagi wisatawan. Identifikasi yang dilakukan secara komprehensif memungkinkan pengelola destinasi memperoleh gambaran menyeluruh mengenai karakteristik, kondisi, serta peluang pengembangan dari setiap potensi wisata yang ada sehingga dapat dijadikan dasar dalam penyusunan strategi pengembangan destinasi.

Inventarisasi potensi daya tarik wisata dilakukan melalui kegiatan pengumpulan, pendataan, pemetaan, serta dokumentasi berbagai objek dan atraksi yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi produk wisata. Kegiatan ini biasanya melibatkan metode observasi lapangan, wawancara dengan masyarakat lokal, pengumpulan data sekunder, serta pemanfaatan teknologi pemetaan untuk mengetahui sebaran dan karakteristik setiap objek wisata yang terdapat di suatu wilayah. Inventarisasi potensi pariwisata juga membantu pemerintah dan pengelola destinasi dalam menyusun profil destinasi yang mencakup daya tarik wisata, aksesibilitas, fasilitas pendukung, sumber daya manusia, serta partisipasi masyarakat sebagai komponen penting dalam pengembangan destinasi wisata (Wibowo, 2025).

2. Pengembangan Produk Daya Tarik Wisata

Pengembangan produk daya tarik wisata merupakan proses perencanaan dan penciptaan pengalaman wisata yang menarik dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, budaya, maupun buatan yang dimiliki oleh suatu destinasi. Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengemas berbagai potensi tersebut menjadi aktivitas wisata yang memiliki nilai rekreasi, edukasi, serta pengalaman yang unik bagi wisatawan sehingga mampu meningkatkan minat kunjungan. Pengembangan produk wisata juga memperhatikan aspek kualitas layanan, keunikan atraksi, serta kesesuaian dengan karakteristik pasar

agar produk wisata yang dihasilkan mampu bersaing dengan destinasi lain.

Proses pengembangan produk daya tarik wisata melibatkan berbagai tahapan seperti perancangan konsep atraksi wisata, penyediaan fasilitas pendukung, peningkatan kualitas interpretasi wisata, serta pengemasan aktivitas yang memberikan pengalaman yang berkesan bagi pengunjung. Kegiatan ini juga memerlukan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha pariwisata, serta masyarakat lokal agar produk wisata yang dikembangkan dapat memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan budaya setempat. Pengembangan produk wisata yang inovatif mampu meningkatkan daya saing destinasi karena wisatawan cenderung mencari pengalaman yang autentik, interaktif, dan berbeda dari destinasi lainnya.

3. Pengelolaan Fasilitas dan Infrastruktur Pendukung

Pengelolaan fasilitas dan infrastruktur pendukung dalam destinasi wisata merupakan upaya sistematis untuk menyediakan sarana yang mampu menunjang kenyamanan, keamanan, serta kemudahan wisatawan selama melakukan aktivitas wisata. Fasilitas wisata mencakup berbagai sarana seperti pusat informasi wisata, area parkir, fasilitas sanitasi, tempat istirahat, jalur pejalan kaki, serta sarana transportasi yang memudahkan wisatawan dalam mengakses berbagai objek wisata di dalam destinasi. Infrastruktur yang memadai akan meningkatkan kualitas pengalaman wisatawan karena keberadaan fasilitas yang tertata dengan baik mampu mendukung aktivitas wisata secara efektif dan memberikan kesan positif terhadap destinasi.

Pengelolaan fasilitas dan infrastruktur tidak hanya berfokus pada penyediaan sarana fisik, tetapi juga mencakup proses perencanaan, pemeliharaan, serta pengawasan agar fasilitas yang tersedia dapat berfungsi secara optimal dan berkelanjutan. Perencanaan fasilitas wisata harus mempertimbangkan kapasitas daya dukung destinasi, pola pergerakan wisatawan, serta kebutuhan pelayanan yang sesuai dengan karakteristik objek wisata yang dikembangkan. Pengelolaan yang terencana juga membantu meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan sekaligus memastikan bahwa fasilitas yang tersedia mampu menunjang keberlanjutan aktivitas pariwisata dalam jangka panjang.

4. Pengendalian dan Pelestarian Lingkungan

Pengendalian dan pelestarian lingkungan dalam pengelolaan destinasi wisata merupakan upaya yang dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara aktivitas pariwisata dengan keberlanjutan ekosistem alam serta kelestarian sumber daya yang menjadi daya tarik utama suatu destinasi. Aktivitas wisata yang berkembang tanpa pengelolaan yang tepat dapat menimbulkan berbagai dampak negatif seperti kerusakan ekosistem, pencemaran lingkungan, serta degradasi nilai budaya yang ada di kawasan wisata. Pengendalian lingkungan menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa kegiatan pariwisata tetap berjalan tanpa mengurangi kualitas lingkungan yang menjadi dasar keberlangsungan destinasi wisata tersebut.

Pengendalian lingkungan dalam pariwisata dilakukan melalui berbagai strategi seperti pengaturan jumlah kunjungan wisatawan, penerapan daya dukung lingkungan, pengelolaan limbah wisata, serta pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan. Penerapan kebijakan pengelolaan lingkungan juga perlu didukung oleh edukasi kepada wisatawan dan masyarakat lokal mengenai pentingnya menjaga kelestarian alam dan budaya di kawasan wisata. Upaya tersebut menjadi bagian dari konsep pariwisata berkelanjutan yang menekankan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan pelestariannya untuk jangka panjang.

5. Keterlibatan Masyarakat Lokal

Keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan destinasi wisata merupakan salah satu aspek penting yang mendukung keberhasilan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Masyarakat yang tinggal di sekitar destinasi memiliki peran strategis karena merupakan bagian dari lingkungan sosial, budaya, serta ekonomi yang membentuk karakteristik suatu kawasan wisata. Partisipasi masyarakat dalam aktivitas pariwisata dapat menciptakan hubungan yang harmonis antara pengelola destinasi, wisatawan, serta komunitas lokal sehingga pengembangan wisata tidak hanya memberikan manfaat ekonomi tetapi juga memperkuat identitas budaya daerah.

Keterlibatan masyarakat lokal dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk partisipasi seperti pengelolaan usaha pariwisata, penyediaan jasa pemandu wisata, pengembangan produk kerajinan lokal, penyelenggaraan atraksi budaya, serta keterlibatan dalam proses

perencanaan dan pengambilan keputusan terkait pengembangan destinasi. Kegiatan tersebut memungkinkan masyarakat memperoleh manfaat ekonomi secara langsung dari aktivitas pariwisata sekaligus meningkatkan rasa memiliki terhadap destinasi wisata yang ada di wilayahnya. Partisipasi masyarakat juga berperan penting dalam menjaga kelestarian budaya lokal serta menciptakan pengalaman wisata yang autentik bagi para pengunjung.

6. Promosi dan Pemasaran Daya Tarik Wisata

Promosi dan pemasaran daya tarik wisata merupakan kegiatan strategis yang bertujuan untuk memperkenalkan potensi destinasi kepada pasar wisata sehingga mampu meningkatkan minat kunjungan wisatawan. Aktivitas ini melibatkan berbagai upaya komunikasi yang dirancang untuk menyampaikan informasi mengenai keunikan, keindahan, serta pengalaman yang dapat diperoleh wisatawan ketika mengunjungi suatu destinasi wisata. Strategi promosi yang efektif akan membantu membangun citra positif destinasi sekaligus memperkuat posisi destinasi tersebut dalam persaingan industri pariwisata yang semakin kompetitif.

Pemasaran daya tarik wisata tidak hanya berfokus pada penyebaran informasi, tetapi juga mencakup perencanaan strategi pemasaran yang terarah dengan mempertimbangkan segmentasi pasar, preferensi wisatawan, serta tren perjalanan yang berkembang. Pemanfaatan media digital seperti media sosial, situs web pariwisata, platform perjalanan daring, serta kampanye pemasaran digital menjadi sarana yang sangat penting dalam menjangkau wisatawan secara lebih luas dan efektif. Pendekatan pemasaran yang terintegrasi memungkinkan pengelola destinasi untuk menyampaikan pesan promosi secara konsisten sehingga mampu membangun daya tarik dan meningkatkan minat wisatawan untuk berkunjung.

B. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Budaya

Pengelolaan sumber daya alam dan budaya merupakan bagian penting dalam pengembangan destinasi wisata yang berkelanjutan karena kedua unsur tersebut menjadi daya tarik utama yang membentuk karakter dan keunikan suatu daerah. Sumber daya alam meliputi berbagai potensi lingkungan seperti pegunungan, pantai, hutan, sungai, dan

keanekaragaman hayati, sedangkan sumber daya budaya mencakup tradisi, adat istiadat, kesenian, bahasa, serta berbagai warisan sejarah yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat. Pengelolaan yang tepat bertujuan untuk memastikan bahwa potensi tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa merusak lingkungan maupun menghilangkan nilai budaya yang melekat di dalamnya.

1. Pengelolaan Sumber Daya Alam

Pengelolaan sumber daya alam dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan lingkungan sebagai daya tarik wisata dengan upaya pelestarian ekosistem. Pengelolaan ini tidak hanya berfokus pada eksploitasi potensi alam untuk kegiatan pariwisata, tetapi juga pada perlindungan dan pemulihan lingkungan agar tetap lestari dalam jangka panjang.

a. Inventarisasi dan Identifikasi Potensi Alam

Inventarisasi dan identifikasi potensi alam merupakan tahap awal yang sangat penting dalam pengelolaan sumber daya alam, terutama dalam pengembangan destinasi wisata yang berkelanjutan. Kegiatan ini dilakukan untuk mengumpulkan data, mencatat, serta memetakan berbagai sumber daya alam yang memiliki potensi sebagai daya tarik wisata seperti bentang alam, keanekaragaman hayati, ekosistem, serta karakteristik lingkungan yang dapat dimanfaatkan secara bijaksana tanpa merusak keseimbangan alam. Inventarisasi potensi alam juga berfungsi sebagai dasar dalam proses perencanaan pengembangan pariwisata karena melalui kegiatan ini pengelola dapat memahami kondisi lingkungan secara menyeluruh serta menentukan strategi pemanfaatan yang tepat.

Inventarisasi sumber daya alam pada dasarnya merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi yang lengkap mengenai potensi dan karakteristik lingkungan suatu wilayah sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan pengelolaan pariwisata secara efektif. Penelitian menunjukkan bahwa inventarisasi sumber daya pariwisata dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan mengevaluasi potensi yang ada sehingga dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam pengembangan destinasi wisata (Chams-Anturi, 2025).

b. Konservasi dan Perlindungan Lingkungan

Konservasi dan perlindungan lingkungan merupakan bagian penting dalam pengelolaan sumber daya alam yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan ekosistem serta memastikan bahwa pemanfaatan lingkungan dilakukan secara berkelanjutan tanpa menimbulkan kerusakan yang permanen. Upaya konservasi mencakup berbagai kegiatan seperti perlindungan kawasan alam, pelestarian keanekaragaman hayati, rehabilitasi lingkungan yang rusak, serta pengendalian aktivitas manusia agar tidak melampaui daya dukung lingkungan yang tersedia.

Konservasi lingkungan juga berperan dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam agar tetap dapat dimanfaatkan oleh generasi sekarang dan generasi yang akan datang melalui pengelolaan yang bijaksana dan berbasis ekosistem. Penelitian menunjukkan bahwa konservasi merupakan strategi pengelolaan lingkungan yang menekankan pada perlindungan ekosistem, pemeliharaan keanekaragaman hayati, serta penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan untuk mendukung keseimbangan lingkungan dan kesejahteraan manusia (Díaz *et al*., 2020).

c. Pengendalian Daya Dukung Lingkungan

Pengendalian daya dukung lingkungan merupakan upaya pengelolaan sumber daya alam yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara aktivitas manusia dengan kapasitas lingkungan dalam menampung dan mendukung berbagai kegiatan tanpa menimbulkan kerusakan ekologis. Konsep ini menekankan pentingnya pengaturan jumlah pengunjung, pengendalian pembangunan fasilitas wisata, serta pengelolaan aktivitas wisata agar tetap berada dalam batas kemampuan lingkungan untuk pulih secara alami dan mempertahankan fungsi ekologisnya.

Pengendalian daya dukung lingkungan juga berfungsi sebagai instrumen penting dalam perencanaan dan pengelolaan destinasi wisata berkelanjutan karena membantu pengelola dalam menentukan batas pemanfaatan kawasan secara rasional dan terukur. Studi mengenai pariwisata berkelanjutan menjelaskan bahwa daya dukung lingkungan merupakan batas maksimum penggunaan suatu kawasan tanpa menyebabkan penurunan kualitas lingkungan, pengalaman wisatawan, maupun kesejahteraan masyarakat lokal (Mihalic & Kuščer, 2021).

d. Pengelolaan Limbah dan Kebersihan Lingkungan

Pengelolaan limbah dan kebersihan lingkungan merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan sumber daya alam yang bertujuan untuk menjaga kualitas lingkungan serta mencegah terjadinya pencemaran akibat aktivitas manusia, termasuk kegiatan pariwisata. Pengelolaan ini mencakup berbagai upaya seperti pengurangan produksi sampah, pemilahan limbah berdasarkan jenisnya, pengolahan limbah secara ramah lingkungan, serta penyediaan fasilitas kebersihan yang memadai agar kawasan wisata tetap terjaga kelestarian dan kenyamanannya.

Pengelolaan limbah yang baik tidak hanya berfokus pada penanganan sampah setelah dihasilkan, tetapi juga menekankan pada upaya pencegahan melalui penerapan prinsip pengurangan, penggunaan kembali, dan daur ulang limbah dalam kegiatan wisata maupun aktivitas masyarakat sekitar destinasi. Penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan limbah yang berkelanjutan berperan penting dalam menjaga kualitas lingkungan karena sistem pengelolaan yang efektif dapat mengurangi dampak pencemaran, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, serta mendukung pembangunan yang berwawasan lingkungan (Kaza *et al*., 2020).

2. Pengelolaan Sumber Daya Budaya

Pengelolaan sumber daya budaya bertujuan untuk menjaga kelestarian nilai-nilai tradisi sekaligus memanfaatkan budaya sebagai daya tarik wisata yang memberikan pengalaman edukatif bagi wisatawan. Budaya memiliki peran penting dalam mencerminkan identitas dan karakter masyarakat lokal, sehingga pengelolaannya harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian agar tidak terjadi komersialisasi yang berlebihan.

a. Inventarisasi dan Dokumentasi Warisan Budaya

Inventarisasi dan dokumentasi warisan budaya merupakan langkah awal yang sangat penting dalam pengelolaan sumber daya budaya karena bertujuan untuk mengidentifikasi, mencatat, serta mengarsipkan berbagai bentuk kekayaan budaya yang dimiliki oleh suatu masyarakat. Proses ini mencakup pendataan terhadap warisan budaya berwujud seperti bangunan bersejarah,

situs arkeologi, benda cagar budaya, serta warisan budaya tidak berwujud seperti tradisi lisan, kesenian daerah, bahasa, upacara adat, dan praktik sosial yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.

Inventarisasi yang sistematis membantu pemerintah, peneliti, dan masyarakat dalam memahami nilai sejarah, sosial, dan budaya yang terkandung dalam suatu warisan budaya sehingga dapat menjadi dasar dalam upaya pelestarian dan pengembangan budaya. Penelitian menunjukkan bahwa inventarisasi dan dokumentasi warisan budaya merupakan proses penting dalam pengelolaan budaya karena melalui kegiatan tersebut berbagai elemen budaya dapat diidentifikasi, dilindungi, dan diwariskan kepada generasi berikutnya secara berkelanjutan (Logan, Langfield, & Craith, 2020).

b. Pelestarian Tradisi dan Nilai Budaya

Pelestarian tradisi dan nilai budaya merupakan bagian penting dalam pengelolaan sumber daya budaya yang bertujuan untuk menjaga keberlangsungan identitas, kearifan lokal, serta sistem nilai yang diwariskan secara turun-temurun dalam suatu masyarakat. Upaya pelestarian ini dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti perlindungan praktik adat, pengembangan seni tradisional, penyelenggaraan kegiatan budaya, serta pendidikan budaya kepada generasi muda agar nilai-nilai budaya tetap hidup dan tidak hilang akibat perubahan sosial dan perkembangan zaman.

Pelestarian tradisi juga berperan dalam memperkuat identitas budaya masyarakat sekaligus menjadi sumber daya yang dapat dikembangkan dalam sektor pariwisata budaya secara berkelanjutan tanpa menghilangkan makna asli dari praktik budaya tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa pelestarian warisan budaya tidak berwujud merupakan upaya untuk menjaga praktik, ekspresi, pengetahuan, dan keterampilan budaya yang diakui oleh masyarakat sebagai bagian dari identitas sehingga dapat terus diwariskan kepada generasi berikutnya (UNESCO, 2021).

c. Pengembangan Atraksi Wisata Budaya

Pengembangan atraksi wisata budaya merupakan salah satu bentuk pengelolaan sumber daya budaya yang bertujuan untuk

memanfaatkan kekayaan budaya lokal sebagai daya tarik wisata yang mampu memberikan pengalaman edukatif sekaligus memperkenalkan nilai-nilai budaya kepada masyarakat luas. Proses pengembangan ini dilakukan dengan mengemas berbagai unsur budaya seperti kesenian tradisional, upacara adat, kuliner khas, kerajinan lokal, serta situs sejarah menjadi kegiatan wisata yang menarik tanpa menghilangkan keaslian dan makna budaya yang terkandung di dalamnya.

Pengembangan atraksi wisata budaya juga berperan penting dalam meningkatkan apresiasi terhadap warisan budaya serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal yang terlibat dalam kegiatan pariwisata. Penelitian menunjukkan bahwa atraksi wisata budaya merupakan elemen penting dalam pariwisata karena memanfaatkan warisan budaya, tradisi, dan praktik sosial masyarakat sebagai pengalaman wisata yang autentik sekaligus mendukung pelestarian budaya lokal (Richards, 2021).

d. Pemberdayaan Masyarakat Lokal dalam Kegiatan Budaya

Pemberdayaan masyarakat lokal dalam kegiatan budaya merupakan salah satu strategi penting dalam pengelolaan sumber daya budaya yang bertujuan untuk meningkatkan peran aktif masyarakat sebagai pelaku utama dalam menjaga, mengembangkan, dan memanfaatkan warisan budaya yang dimiliki. Keterlibatan masyarakat dalam berbagai aktivitas budaya seperti pertunjukan seni tradisional, pengelolaan festival budaya, produksi kerajinan lokal, serta pengembangan wisata budaya dapat memperkuat identitas budaya sekaligus menciptakan peluang ekonomi yang berkelanjutan bagi komunitas setempat.

Pemberdayaan masyarakat juga berfungsi untuk memastikan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan budaya tetap berada dalam kendali masyarakat yang menjadi pemilik budaya tersebut sehingga nilai, makna, dan keaslian tradisi dapat tetap terjaga. Penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan pariwisata budaya sangat penting karena partisipasi aktif masyarakat dapat meningkatkan keberlanjutan pelestarian budaya sekaligus memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi komunitas lokal (Su & Wall, 2022).

3. Integrasi Pengelolaan Alam dan Budaya dalam Destinasi Wisata

Integrasi pengelolaan alam dan budaya dalam destinasi wisata merupakan pendekatan yang menekankan pada pengelolaan sumber daya lingkungan dan warisan budaya secara terpadu agar keduanya dapat saling mendukung dalam pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Pendekatan ini memandang bahwa alam dan budaya tidak dapat dipisahkan karena lingkungan alam sering menjadi ruang hidup bagi praktik budaya masyarakat, sementara nilai budaya membentuk cara masyarakat menjaga, memanfaatkan, dan memaknai lingkungan di sekitarnya.

Integrasi tersebut dilakukan melalui perencanaan destinasi wisata yang memperhatikan keseimbangan antara perlindungan ekosistem, pelestarian budaya, serta pemanfaatan sumber daya untuk kepentingan ekonomi masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan destinasi yang mengintegrasikan aspek lingkungan dan budaya mampu meningkatkan keberlanjutan pariwisata karena pendekatan ini menjaga keaslian destinasi sekaligus memperkuat identitas lokal sebagai daya tarik wisata (UNWTO, 2021).

C. Pengembangan Produk Wisata Berkelanjutan

Pengembangan produk wisata berkelanjutan merupakan proses perencanaan, penciptaan, serta pengelolaan produk pariwisata yang memperhatikan keseimbangan antara manfaat ekonomi, pelestarian lingkungan, dan keberlanjutan sosial budaya masyarakat setempat. Pendekatan ini bertujuan menghasilkan pengalaman wisata yang berkualitas bagi wisatawan sekaligus menjaga kelestarian sumber daya alam dan budaya agar tetap dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Produk wisata yang dikembangkan secara berkelanjutan tidak hanya berfokus pada daya tarik destinasi, tetapi juga pada pengelolaan dampak pariwisata agar tidak merusak ekosistem, budaya lokal, maupun kesejahteraan masyarakat.

1. Identifikasi Potensi dan Sumber Daya Lokal

Identifikasi potensi dan sumber daya lokal merupakan langkah awal yang sangat penting dalam perencanaan dan pengembangan

destinasi wisata, karena proses ini bertujuan untuk mengenali berbagai kekuatan yang dimiliki suatu wilayah baik dari aspek alam, budaya, sosial, maupun ekonomi yang dapat dijadikan sebagai daya tarik wisata. Proses identifikasi dilakukan melalui pengumpulan data, observasi lapangan, serta analisis terhadap kondisi lingkungan dan masyarakat setempat sehingga dapat diketahui jenis potensi wisata yang layak dikembangkan secara berkelanjutan. Penelitian mengenai pengembangan destinasi menunjukkan bahwa suatu daerah dapat memiliki berbagai potensi wisata yang berasal dari sumber daya alam, kondisi geografis, serta aspek sosial dan budaya masyarakat yang dapat dimanfaatkan sebagai objek dan daya tarik wisata apabila dikelola secara tepat (Fatkhullah, 2024).

Identifikasi potensi lokal tidak hanya berfokus pada keberadaan objek wisata semata, tetapi juga mencakup berbagai komponen pendukung pariwisata seperti aksesibilitas, fasilitas, serta kesiapan masyarakat dalam menerima dan mengelola aktivitas wisata. Analisis terhadap sumber daya lokal membantu perencana pariwisata memahami karakteristik wilayah secara komprehensif sehingga strategi pengembangan yang dirancang dapat memanfaatkan keunikan lokal tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan atau konflik sosial. Proses ini juga berfungsi untuk menentukan prioritas pengembangan destinasi wisata berdasarkan nilai daya tarik, keaslian budaya, serta potensi ekonomi yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat setempat.

2. Perencanaan Produk Wisata Berbasis Keberlanjutan

Perencanaan produk wisata berbasis keberlanjutan merupakan proses strategis dalam merancang dan mengelola produk wisata dengan mempertimbangkan keseimbangan antara manfaat ekonomi, pelestarian lingkungan, serta keberlanjutan sosial budaya masyarakat lokal. Perencanaan ini dilakukan melalui analisis potensi destinasi, kebutuhan pasar wisatawan, serta kapasitas lingkungan sehingga aktivitas pariwisata yang dikembangkan mampu memberikan pengalaman wisata yang berkualitas tanpa merusak sumber daya yang menjadi daya tarik utama destinasi. Penelitian mengenai pengembangan produk wisata menunjukkan bahwa konsep produk wisata berkelanjutan menekankan perancangan produk yang mempertimbangkan karakteristik destinasi, dampak lingkungan, serta kontribusinya terhadap keberlanjutan ekonomi dan sosial masyarakat setempat (Haid *et al*., 2021).

Perencanaan produk wisata berbasis keberlanjutan juga melibatkan integrasi berbagai komponen pariwisata seperti atraksi wisata, fasilitas pendukung, aksesibilitas, serta pelayanan wisata yang dirancang secara sistematis dan terkoordinasi. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengembangan produk wisata tidak hanya menarik minat wisatawan tetapi juga mampu menjaga kelestarian ekosistem alam dan nilai budaya lokal yang menjadi identitas destinasi. Proses perencanaan yang komprehensif memungkinkan pengelola destinasi untuk menentukan jenis produk wisata yang sesuai dengan karakteristik wilayah serta menghindari eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam maupun budaya.

3. Pengembangan Atraksi Wisata yang Ramah Lingkungan

Pengembangan atraksi wisata yang ramah lingkungan merupakan upaya menciptakan kegiatan dan pengalaman wisata yang memanfaatkan potensi alam dan budaya tanpa menimbulkan kerusakan terhadap ekosistem maupun nilai sosial masyarakat setempat. Konsep ini menekankan bahwa setiap aktivitas wisata harus dirancang dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan, konservasi sumber daya alam, serta pengendalian dampak negatif yang mungkin timbul akibat kegiatan pariwisata. Atraksi wisata yang berorientasi pada kelestarian lingkungan menjadi bagian penting dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan karena mampu memberikan pengalaman wisata yang berkualitas sekaligus meningkatkan kesadaran wisatawan terhadap pentingnya menjaga lingkungan (UNWTO, 2022).

Pengembangan atraksi wisata ramah lingkungan biasanya dilakukan dengan memanfaatkan potensi alam secara bijaksana melalui kegiatan yang tidak merusak ekosistem, seperti ekowisata, wisata konservasi, wisata edukasi lingkungan, serta wisata berbasis kegiatan alam terbuka yang dikelola secara terkontrol. Kegiatan wisata tersebut dirancang untuk memberikan nilai rekreasi sekaligus edukasi sehingga wisatawan tidak hanya menikmati keindahan alam tetapi juga memahami pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan sumber daya alam. Pendekatan ini juga melibatkan penerapan prinsip pengelolaan lingkungan seperti pembatasan jumlah pengunjung, pengelolaan limbah wisata, serta penggunaan fasilitas wisata yang ramah lingkungan.

4. Pemberdayaan dan Keterlibatan Masyarakat Lokal

Pemberdayaan dan keterlibatan masyarakat lokal merupakan unsur penting dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan karena masyarakat setempat merupakan pemilik sekaligus penjaga sumber daya alam dan budaya yang menjadi daya tarik utama suatu destinasi wisata. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pariwisata memungkinkan terciptanya pengelolaan destinasi yang lebih inklusif, partisipatif, serta mampu memberikan manfaat ekonomi secara langsung kepada komunitas lokal. Penelitian menunjukkan bahwa partisipasi aktif masyarakat lokal dalam pengelolaan pariwisata berperan penting dalam meningkatkan keberlanjutan destinasi serta memperkuat perlindungan terhadap lingkungan dan budaya lokal (Suansri, 2020).

Pemberdayaan masyarakat lokal dalam sektor pariwisata dapat dilakukan melalui berbagai bentuk kegiatan seperti pelatihan keterampilan pariwisata, pengembangan usaha mikro berbasis produk lokal, serta peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengelola destinasi wisata secara mandiri. Proses pemberdayaan ini bertujuan agar masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan pariwisata tetapi juga menjadi pelaku utama yang memiliki peran dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan kegiatan wisata di wilayahnya. Keterlibatan masyarakat juga membantu memastikan bahwa aktivitas pariwisata tetap selaras dengan nilai budaya lokal dan tidak menimbulkan konflik sosial di lingkungan masyarakat.

5. Pengelolaan Dampak Lingkungan dan Sosial

Pengelolaan dampak lingkungan dan sosial merupakan bagian penting dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan karena aktivitas wisata dapat menimbulkan berbagai konsekuensi terhadap kondisi lingkungan alam maupun kehidupan sosial masyarakat di sekitar destinasi. Pengelolaan ini bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif seperti kerusakan ekosistem, pencemaran lingkungan, perubahan budaya lokal, serta konflik sosial yang dapat muncul akibat meningkatnya aktivitas pariwisata. Studi mengenai keberlanjutan pariwisata menjelaskan bahwa pengelolaan dampak lingkungan dan sosial dalam destinasi wisata harus dilakukan melalui perencanaan yang terintegrasi dengan mempertimbangkan kapasitas lingkungan, keterlibatan masyarakat, serta pengawasan terhadap aktivitas wisata agar tidak melebihi daya dukung destinasi (Gössling, Scott, & Hall, 2021).

Pengelolaan dampak lingkungan dalam sektor pariwisata dilakukan melalui berbagai strategi seperti pengaturan jumlah kunjungan wisatawan, penerapan sistem pengelolaan limbah yang baik, penggunaan teknologi ramah lingkungan, serta perlindungan terhadap kawasan konservasi. Upaya ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan ekosistem sehingga aktivitas wisata tidak menyebabkan degradasi lingkungan yang dapat mengurangi kualitas destinasi dalam jangka panjang. Pendekatan pengelolaan lingkungan yang efektif juga melibatkan edukasi kepada wisatawan mengenai pentingnya menjaga kebersihan, kelestarian alam, serta penggunaan sumber daya secara bertanggung jawab selama melakukan kegiatan wisata.

D. Pengendalian Dampak Lingkungan

Pengendalian dampak lingkungan merupakan serangkaian upaya yang dilakukan untuk mencegah, mengurangi, dan mengelola berbagai dampak negatif yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia terhadap lingkungan alam. Dalam konteks pembangunan dan kegiatan pariwisata, pengendalian dampak lingkungan sangat penting agar pemanfaatan sumber daya alam tetap berlangsung secara bertanggung jawab serta tidak menyebabkan kerusakan ekosistem yang dapat mengancam keberlanjutan lingkungan. Upaya pengendalian ini tidak hanya berfokus pada pemulihan kerusakan yang telah terjadi, tetapi juga menekankan pada tindakan pencegahan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan kegiatan pembangunan.

Pengendalian dampak lingkungan juga berkaitan erat dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang menuntut adanya keseimbangan antara kebutuhan pembangunan ekonomi, perlindungan lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat. Tanpa adanya pengendalian yang tepat, kegiatan pembangunan dapat menimbulkan berbagai masalah lingkungan seperti pencemaran air, udara, dan tanah, berkurangnya keanekaragaman hayati, serta kerusakan ekosistem alami. Oleh karena itu, pengendalian dampak lingkungan perlu dilakukan secara sistematis melalui kebijakan, perencanaan, serta penerapan teknologi yang ramah lingkungan. Berikut beberapa bentuk pengendalian dampak lingkungan yang dapat dilakukan secara komprehensif:

1. Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL)

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) merupakan suatu kajian ilmiah yang digunakan untuk menilai dampak penting dari suatu rencana usaha atau kegiatan terhadap lingkungan hidup sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan. Kajian ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan pembangunan telah mempertimbangkan aspek perlindungan lingkungan sehingga potensi kerusakan atau pencemaran dapat dicegah sejak tahap perencanaan. *Environmental Impact Assessment* atau AMDAL merupakan proses sistematis untuk mengidentifikasi, memprediksi, dan mengevaluasi dampak lingkungan dari suatu proyek yang direncanakan sebelum keputusan pembangunan diambil (Rahmadina, 2025).

AMDAL memiliki peran penting dalam proses pengambilan keputusan pembangunan karena memberikan informasi yang komprehensif mengenai potensi dampak yang dapat ditimbulkan terhadap lingkungan fisik, biotik, maupun sosial ekonomi masyarakat. Melalui kajian AMDAL, perencana proyek dapat memahami berbagai risiko lingkungan yang mungkin terjadi sehingga dapat merancang langkah-langkah pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara tepat. Pendekatan ini memungkinkan pembangunan dilakukan secara lebih bertanggung jawab dengan mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan serta keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan ekologi.

2. Pengelolaan Limbah dan Pengendalian Pencemaran

Pengelolaan limbah dan pengendalian pencemaran merupakan upaya sistematis yang dilakukan untuk mengurangi, menangani, serta mengendalikan berbagai jenis limbah yang dihasilkan dari aktivitas manusia agar tidak menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan. Aktivitas pembangunan, industri, maupun kegiatan pariwisata dapat menghasilkan limbah padat, limbah cair, dan emisi gas yang apabila tidak dikelola dengan baik berpotensi mencemari tanah, air, dan udara. Pengelolaan limbah yang efektif bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan sekaligus menjaga kualitas ekosistem sehingga tetap mampu mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya (Kaza *et al*., 2021).

Pengelolaan limbah dilakukan melalui berbagai pendekatan yang menekankan pada prinsip pengurangan limbah sejak dari sumbernya

serta pengolahan limbah sebelum dibuang ke lingkungan. Pendekatan yang umum digunakan dalam pengelolaan limbah adalah konsep 3R yaitu *reduce* (mengurangi), *reuse* (menggunakan kembali), dan *recycle* (mendaur ulang) yang bertujuan untuk mengurangi jumlah limbah yang dihasilkan serta meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya. Penerapan sistem pengolahan limbah yang tepat seperti instalasi pengolahan air limbah, pengomposan limbah organik, serta pengolahan limbah padat secara terpadu dapat membantu mengurangi tingkat pencemaran lingkungan secara signifikan.

3. Pengendalian Daya Dukung Lingkungan (*Carrying Capacity*)

Pengendalian daya dukung lingkungan (*carrying capacity*) merupakan konsep penting dalam pengelolaan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan yang digunakan untuk menentukan batas kemampuan suatu lingkungan dalam menampung aktivitas manusia tanpa menyebabkan kerusakan ekosistem. Konsep ini menekankan bahwa setiap wilayah memiliki kapasitas tertentu dalam mendukung kegiatan manusia seperti pembangunan, industri, maupun pariwisata sehingga aktivitas tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan lingkungan agar keseimbangan ekologi tetap terjaga. Daya dukung lingkungan dalam konteks pariwisata merujuk pada jumlah maksimum wisatawan yang dapat ditampung oleh suatu destinasi tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan fisik, penurunan kualitas pengalaman wisata, maupun gangguan terhadap kehidupan sosial masyarakat setempat (Gössling, Scott, & Hall, 2020).

Pengendalian daya dukung lingkungan dilakukan melalui perencanaan yang mempertimbangkan kondisi ekologis, ketersediaan sumber daya alam, serta tingkat sensitivitas suatu kawasan terhadap tekanan aktivitas manusia. Pendekatan ini melibatkan analisis terhadap berbagai faktor seperti kapasitas fisik wilayah, kemampuan ekosistem dalam melakukan regenerasi, serta kemampuan infrastruktur dan fasilitas dalam melayani aktivitas manusia. Melalui pengendalian daya dukung lingkungan, pengelola wilayah dapat menentukan batas pemanfaatan sumber daya alam sehingga kegiatan pembangunan atau pariwisata dapat berlangsung secara berkelanjutan tanpa menimbulkan kerusakan permanen terhadap lingkungan.

4. Konservasi dan Perlindungan Sumber Daya Alam

Konservasi dan perlindungan sumber daya alam merupakan upaya yang dilakukan untuk menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan serta memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara bijaksana dan tidak melebihi kemampuan alam untuk memulihkan diri. Konservasi tidak hanya berfokus pada perlindungan ekosistem dari kerusakan, tetapi juga mencakup pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan agar dapat dimanfaatkan oleh generasi sekarang tanpa mengurangi ketersediaannya bagi generasi mendatang. Konservasi sumber daya alam dipahami sebagai strategi pengelolaan yang bertujuan melindungi keanekaragaman hayati, mempertahankan fungsi ekosistem, serta memastikan pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara berkelanjutan melalui pendekatan perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan yang terkendali (UNEP, 2021).

Upaya konservasi sumber daya alam dilakukan melalui berbagai pendekatan yang mencakup perlindungan kawasan alami, pengelolaan keanekaragaman hayati, serta rehabilitasi lingkungan yang mengalami kerusakan. Perlindungan kawasan seperti taman nasional, cagar alam, dan kawasan konservasi menjadi salah satu langkah penting dalam menjaga habitat alami berbagai spesies flora dan fauna agar tidak terancam oleh aktivitas manusia yang tidak terkendali. Selain itu, konservasi juga mencakup pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan melalui penerapan kebijakan lingkungan, pengawasan terhadap eksploitasi sumber daya, serta penerapan praktik pembangunan yang ramah lingkungan.

5. Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan

Penerapan teknologi ramah lingkungan merupakan upaya penggunaan inovasi teknologi yang dirancang untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan sekaligus meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam dalam berbagai kegiatan pembangunan dan produksi. Teknologi ini dikembangkan dengan prinsip keberlanjutan yang menekankan pada pengurangan emisi pencemar, efisiensi energi, serta penggunaan sumber daya yang lebih bertanggung jawab agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan. Teknologi ramah lingkungan pada dasarnya merupakan inovasi yang bertujuan untuk mengurangi tekanan terhadap lingkungan melalui peningkatan efisiensi energi, pengurangan

limbah, serta penggunaan sumber daya yang lebih berkelanjutan dalam proses produksi maupun aktivitas manusia (OECD, 2020).

Penerapan teknologi ramah lingkungan dapat dilakukan dalam berbagai sektor seperti industri, transportasi, energi, serta pengelolaan lingkungan yang memerlukan solusi inovatif untuk mengurangi dampak ekologis dari aktivitas manusia. Contohnya meliputi penggunaan energi terbarukan seperti tenaga surya, tenaga angin, dan energi biomassa yang mampu menggantikan penggunaan energi fosil yang berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca. Selain itu, teknologi pengolahan limbah modern, sistem bangunan hijau (*green building*), serta sistem transportasi rendah emisi juga menjadi bagian penting dalam upaya menciptakan pembangunan yang lebih ramah lingkungan.

BAB V
TATA KELOLA DAN KEBIJAKAN PARIWISATA

Tata kelola dan kebijakan pariwisata merupakan aspek penting dalam mengarahkan pengembangan sektor pariwisata agar berjalan secara terencana, terkoordinasi, dan berkelanjutan. Melalui tata kelola yang baik, berbagai pihak seperti pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dapat berperan secara sinergis dalam mengelola potensi pariwisata sehingga mampu memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang.

Kebijakan pariwisata juga menjadi landasan strategis dalam menentukan arah pembangunan destinasi, pengelolaan sumber daya wisata, serta peningkatan kualitas layanan dan daya saing pariwisata. Perumusan kebijakan yang tepat akan membantu menciptakan sistem pengelolaan pariwisata yang efektif, transparan, dan adaptif terhadap perubahan kebutuhan wisatawan serta dinamika perkembangan industri pariwisata.

A. Regulasi dan Kebijakan Pariwisata

Regulasi dan kebijakan pariwisata merupakan seperangkat aturan, pedoman, dan keputusan strategis yang dirumuskan oleh pemerintah maupun lembaga terkait untuk mengarahkan pengembangan, pengelolaan, dan pengawasan sektor pariwisata secara terencana dan berkelanjutan. Regulasi berfungsi sebagai dasar hukum yang mengatur aktivitas pariwisata agar berjalan tertib, aman, dan memberikan manfaat bagi berbagai pihak, sedangkan kebijakan pariwisata berperan sebagai kerangka strategis yang menentukan arah pembangunan pariwisata dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Melalui regulasi dan kebijakan yang jelas, pemerintah dapat menciptakan sistem pengelolaan pariwisata yang terstruktur, meningkatkan daya saing destinasi wisata, serta menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat lokal.

Regulasi dan kebijakan pariwisata juga bertujuan untuk mengatur hubungan antara berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam industri pariwisata, seperti pemerintah, pelaku usaha, investor, masyarakat, dan wisatawan. Keberadaan aturan yang jelas mampu menciptakan kepastian hukum dalam penyelenggaraan usaha pariwisata, melindungi kepentingan wisatawan, serta mendorong terciptanya praktik pariwisata yang bertanggung jawab. Selain itu, kebijakan pariwisata sering kali disusun berdasarkan potensi daerah, kebutuhan pembangunan, serta tantangan global seperti keberlanjutan lingkungan, digitalisasi pariwisata, dan perubahan perilaku wisatawan. Berikut beberapa komponen penting dalam regulasi dan kebijakan pariwisata:

1. Kebijakan Perencanaan Pengembangan Pariwisata

Kebijakan perencanaan pengembangan pariwisata merupakan kerangka strategis yang dirancang oleh pemerintah atau lembaga terkait untuk mengarahkan pembangunan sektor pariwisata secara terstruktur, terintegrasi, dan berkelanjutan. Kebijakan ini mencakup proses penentuan visi, tujuan, strategi, serta program pengembangan destinasi wisata yang mempertimbangkan potensi wilayah, kapasitas lingkungan, serta kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Perencanaan yang sistematis memungkinkan pengelolaan sumber daya wisata secara optimal sehingga manfaat ekonomi dapat diperoleh tanpa mengabaikan aspek pelestarian lingkungan dan budaya lokal.

Perencanaan pengembangan pariwisata juga berfungsi sebagai alat koordinasi antara berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah, sektor swasta, masyarakat lokal, serta lembaga pengelola destinasi wisata. Melalui kebijakan yang jelas, arah pembangunan pariwisata dapat diselaraskan dengan pembangunan wilayah secara keseluruhan, termasuk penyediaan infrastruktur, pengembangan produk wisata, serta peningkatan kualitas layanan bagi wisatawan. Rahmafitria (2020) menyatakan bahwa perencanaan pariwisata berperan penting dalam memaksimalkan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat lokal sekaligus memastikan penggunaan sumber daya secara tepat dan berkelanjutan dalam pengembangan destinasi wisata.

2. Regulasi Usaha Pariwisata

Regulasi usaha pariwisata merupakan seperangkat aturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatur

penyelenggaraan berbagai kegiatan usaha dalam sektor pariwisata agar berjalan secara tertib, aman, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Regulasi ini mencakup berbagai aspek penting seperti perizinan usaha, standar pelayanan, perlindungan konsumen, pengelolaan destinasi wisata, serta pengawasan terhadap aktivitas usaha pariwisata yang dilakukan oleh pelaku industri seperti hotel, restoran, biro perjalanan wisata, dan penyedia jasa rekreasi. Keberadaan regulasi yang jelas menjadi landasan hukum yang memberikan kepastian bagi pelaku usaha sekaligus menjamin bahwa kegiatan pariwisata dapat berkembang secara terarah dan memberikan manfaat bagi masyarakat serta lingkungan.

Penerapan regulasi usaha pariwisata juga berfungsi untuk menjaga kualitas layanan dan menciptakan persaingan usaha yang sehat dalam industri pariwisata. Melalui aturan yang sistematis, pemerintah dapat menetapkan standar operasional yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha, seperti standar keamanan wisatawan, kualitas fasilitas, serta tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat lokal di sekitar destinasi wisata. Dredge dan Jamal (2020) menjelaskan bahwa regulasi dalam sektor pariwisata memiliki peran penting dalam mengatur hubungan antara pemerintah, industri, dan masyarakat guna menciptakan tata kelola pariwisata yang efektif serta memastikan keberlanjutan pengelolaan destinasi wisata.

3. Kebijakan Perlindungan Lingkungan Pariwisata

Kebijakan perlindungan lingkungan pariwisata merupakan upaya strategis yang dirancang oleh pemerintah dan pemangku kepentingan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam yang menjadi daya tarik utama dalam kegiatan pariwisata. Kebijakan ini mencakup berbagai aturan dan program yang bertujuan untuk mengendalikan dampak negatif aktivitas pariwisata terhadap lingkungan, seperti pengelolaan limbah, pembatasan pembangunan di kawasan sensitif, serta pengaturan jumlah kunjungan wisatawan pada destinasi tertentu. Melalui kebijakan yang terarah, pengembangan pariwisata dapat dilakukan secara bertanggung jawab tanpa merusak ekosistem alam yang menjadi fondasi utama keberlanjutan destinasi wisata.

Perlindungan lingkungan dalam sektor pariwisata juga berkaitan erat dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan,

dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan ini mendorong penerapan praktik pariwisata yang ramah lingkungan, seperti penggunaan energi terbarukan di fasilitas wisata, pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, serta pengelolaan kawasan konservasi secara terpadu. Gössling (2021) menjelaskan bahwa kebijakan lingkungan dalam pariwisata berperan penting dalam mengurangi dampak ekologis dari aktivitas wisata sekaligus memastikan bahwa sumber daya alam dapat terus dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh generasi mendatang.

4. Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Lokal

Kebijakan pemberdayaan masyarakat lokal dalam sektor pariwisata merupakan strategi pembangunan yang bertujuan meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan, pengelolaan, dan pemanfaatan potensi pariwisata di daerahnya. Kebijakan ini dirancang untuk memastikan bahwa masyarakat setempat tidak hanya menjadi objek pembangunan pariwisata, tetapi juga menjadi subjek utama yang memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan budaya dari aktivitas pariwisata. Melalui pemberdayaan masyarakat lokal, pengembangan pariwisata dapat menciptakan peluang usaha baru, meningkatkan keterampilan masyarakat, serta memperkuat kapasitas komunitas dalam mengelola sumber daya wisata secara mandiri.

Pemberdayaan masyarakat lokal juga berperan penting dalam menjaga keberlanjutan destinasi wisata karena masyarakat merupakan pihak yang paling dekat dengan lingkungan dan budaya yang menjadi daya tarik pariwisata. Kebijakan ini umumnya diwujudkan melalui program pelatihan keterampilan pariwisata, pengembangan usaha mikro berbasis wisata, penguatan kelembagaan masyarakat, serta peningkatan akses masyarakat terhadap peluang ekonomi di sektor pariwisata. Scheyvens (2021) menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat dalam pariwisata memungkinkan komunitas lokal memperoleh kendali yang lebih besar terhadap pembangunan pariwisata serta memastikan bahwa manfaat ekonomi dan sosial dapat dirasakan secara adil oleh masyarakat setempat.

5. Regulasi Standar Pelayanan dan Keamanan Wisatawan

Regulasi standar pelayanan dan keamanan wisatawan merupakan seperangkat ketentuan yang disusun oleh pemerintah atau otoritas terkait untuk memastikan bahwa setiap aktivitas pariwisata memberikan

layanan yang berkualitas serta menjamin keselamatan wisatawan selama melakukan perjalanan wisata. Regulasi ini mencakup berbagai aspek penting seperti standar fasilitas pariwisata, prosedur operasional pelayanan, sistem keamanan destinasi, serta mekanisme penanganan keadaan darurat yang dapat terjadi di kawasan wisata. Keberadaan regulasi tersebut menjadi landasan bagi penyelenggara usaha pariwisata untuk memberikan pelayanan yang profesional sekaligus menjaga kepercayaan wisatawan terhadap destinasi yang dikunjungi.

Penerapan standar pelayanan dan keamanan wisatawan juga berperan dalam meningkatkan kualitas pengalaman wisata yang diterima oleh pengunjung serta mendorong terciptanya citra positif bagi destinasi wisata. Regulasi yang jelas membantu pelaku usaha pariwisata dalam memahami tanggung jawab terhadap keselamatan wisatawan, termasuk penyediaan fasilitas yang aman, pelatihan sumber daya manusia, serta penerapan prosedur keselamatan di berbagai aktivitas wisata. UNWTO (2021) menjelaskan bahwa standar pelayanan dan sistem keamanan yang baik dalam sektor pariwisata menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan wisatawan serta menjaga keberlanjutan industri pariwisata di tingkat global.

6. Kebijakan Promosi dan Pengembangan Destinasi

Kebijakan promosi dan pengembangan destinasi merupakan strategi yang dirancang oleh pemerintah dan pemangku kepentingan pariwisata untuk meningkatkan daya tarik, daya saing, serta jumlah kunjungan wisatawan ke suatu daerah tujuan wisata. Kebijakan ini tidak hanya berfokus pada kegiatan pemasaran destinasi, tetapi juga mencakup pengembangan produk wisata, peningkatan kualitas infrastruktur, serta penguatan identitas dan citra destinasi agar mampu bersaing di pasar pariwisata regional maupun global. Melalui kebijakan yang terarah, destinasi wisata dapat dipromosikan secara efektif sehingga mampu menarik perhatian wisatawan sekaligus meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Pengembangan destinasi wisata juga melibatkan berbagai strategi seperti penguatan *branding* destinasi, pemanfaatan teknologi digital dalam promosi pariwisata, serta penyelenggaraan berbagai event atau festival yang dapat meningkatkan daya tarik wisata. Kebijakan ini mendorong kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri pariwisata, dan masyarakat lokal untuk menciptakan pengalaman wisata yang

berkualitas dan berkesan bagi wisatawan. Pike dan Page (2020) menjelaskan bahwa strategi promosi destinasi yang efektif merupakan bagian penting dari kebijakan pengembangan pariwisata karena dapat meningkatkan citra destinasi serta memperkuat posisi kompetitif suatu wilayah dalam pasar pariwisata internasional.

B. Peran Pemerintah dan Swasta

Peran pemerintah dan sektor swasta dalam pengembangan pariwisata sangat penting karena keduanya saling melengkapi dalam menciptakan sistem pengelolaan destinasi yang efektif, berkelanjutan, dan berdaya saing. Pemerintah berperan sebagai pembuat kebijakan, pengatur, sekaligus fasilitator pembangunan pariwisata, sedangkan sektor swasta berperan sebagai pelaku utama dalam penyediaan layanan, investasi, dan inovasi dalam industri pariwisata. Kolaborasi antara kedua pihak ini memungkinkan pengembangan destinasi wisata berjalan lebih terarah, profesional, dan mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat serta meningkatkan kualitas pengalaman wisatawan. Berikut beberapa peran utama pemerintah dan sektor swasta dalam pengembangan pariwisata:

1. Peran Pemerintah dalam Pariwisata

a. Perumusan Kebijakan dan Regulasi

Perumusan kebijakan dan regulasi merupakan salah satu peran utama pemerintah dalam mengarahkan pembangunan dan pengelolaan sektor pariwisata agar berjalan secara terstruktur, terencana, dan berkelanjutan. Kebijakan yang dirumuskan pemerintah berfungsi sebagai pedoman dalam pengembangan destinasi wisata, pengelolaan sumber daya pariwisata, serta pengaturan aktivitas pelaku industri pariwisata sehingga tercipta sistem yang tertib dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Melalui kebijakan dan regulasi yang jelas, pemerintah dapat memastikan bahwa pengembangan pariwisata tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga memperhatikan aspek pelestarian lingkungan, perlindungan budaya lokal, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Perumusan kebijakan pariwisata juga melibatkan berbagai proses strategis seperti analisis potensi daerah, evaluasi dampak pembangunan pariwisata, serta koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat. Regulasi yang dihasilkan biasanya mencakup pengaturan perizinan usaha pariwisata, standar pelayanan wisata, pengelolaan kawasan wisata, serta mekanisme pengawasan terhadap aktivitas industri pariwisata agar tetap berada dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Dredge dan Jamal (2020) menyatakan bahwa kebijakan dan regulasi pariwisata yang dirumuskan oleh pemerintah memiliki peran penting dalam mengoordinasikan berbagai kepentingan dalam sektor pariwisata serta menciptakan tata kelola destinasi yang efektif dan berkelanjutan.

b. Penyediaan Infrastruktur Pariwisata

Penyediaan infrastruktur pariwisata merupakan salah satu peran penting pemerintah dalam mendukung pengembangan destinasi wisata yang berkualitas dan berdaya saing. Infrastruktur pariwisata mencakup berbagai fasilitas fisik dan layanan publik seperti jaringan transportasi, jalan menuju destinasi wisata, bandara, pelabuhan, fasilitas sanitasi, pusat informasi wisata, serta sarana komunikasi yang memudahkan akses wisatawan ke suatu daerah tujuan wisata. Infrastruktur yang memadai tidak hanya meningkatkan kenyamanan dan keselamatan wisatawan, tetapi juga memperkuat konektivitas antarwilayah sehingga potensi pariwisata suatu daerah dapat berkembang secara optimal.

Pembangunan infrastruktur pariwisata juga berperan dalam meningkatkan daya tarik destinasi serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat lokal yang terlibat dalam sektor pariwisata. Pemerintah biasanya merancang pembangunan infrastruktur secara terpadu dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan, kebutuhan masyarakat, serta perkembangan industri pariwisata di masa depan. Hall (2020) menjelaskan bahwa peran pemerintah dalam menyediakan infrastruktur pariwisata sangat penting karena infrastruktur yang baik mampu meningkatkan aksesibilitas destinasi wisata serta menjadi faktor utama dalam mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan industri pariwisata.

c. Promosi dan Branding Destinasi

Promosi dan *branding* destinasi merupakan salah satu peran strategis pemerintah dalam memperkenalkan dan meningkatkan daya tarik suatu daerah tujuan wisata kepada pasar wisatawan domestik maupun internasional. Melalui kegiatan promosi yang terencana, pemerintah dapat menyampaikan informasi mengenai keunikan, keindahan alam, kekayaan budaya, serta berbagai pengalaman wisata yang ditawarkan oleh suatu destinasi. Upaya ini biasanya dilakukan melalui berbagai media komunikasi seperti kampanye pemasaran digital, pameran pariwisata internasional, penyelenggaraan festival budaya, serta kerja sama dengan berbagai pihak dalam industri pariwisata.

Branding destinasi berperan penting dalam membangun citra dan identitas yang kuat bagi suatu daerah wisata sehingga mampu membedakannya dari destinasi lain yang memiliki karakteristik serupa. Pemerintah bertanggung jawab dalam merancang strategi *branding* yang mencerminkan nilai, keunikan, serta daya tarik utama destinasi sehingga dapat menarik minat wisatawan dan meningkatkan daya saing pariwisata. Pike dan Page (2020) menyatakan bahwa *branding* destinasi merupakan strategi penting dalam pengembangan pariwisata karena mampu membangun citra positif suatu destinasi sekaligus mempengaruhi keputusan wisatawan dalam memilih tujuan perjalanan.

d. Pengawasan dan Pengendalian

Pengawasan dan pengendalian merupakan salah satu peran penting pemerintah dalam memastikan bahwa seluruh aktivitas pariwisata berjalan sesuai dengan kebijakan, regulasi, serta prinsip pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Kegiatan pengawasan dilakukan untuk memantau pelaksanaan usaha pariwisata, kualitas pelayanan kepada wisatawan, serta kepatuhan pelaku industri terhadap standar operasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Melalui mekanisme pengendalian yang efektif, pemerintah dapat mencegah terjadinya praktik usaha yang merugikan wisatawan, merusak lingkungan, maupun mengancam kelestarian budaya lokal yang menjadi bagian dari daya tarik wisata.

Pengawasan dan pengendalian juga berfungsi untuk mengevaluasi dampak perkembangan pariwisata terhadap aspek

sosial, ekonomi, dan lingkungan sehingga pengelolaan destinasi dapat tetap berada dalam batas daya dukung yang aman. Pemerintah biasanya melakukan berbagai bentuk pengawasan seperti inspeksi terhadap usaha pariwisata, sertifikasi standar pelayanan, serta penerapan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku industri pariwisata. Dredge dan Jamal (2020) menjelaskan bahwa peran pemerintah dalam pengawasan dan pengendalian pariwisata sangat penting untuk memastikan bahwa kegiatan pariwisata dikelola secara bertanggung jawab serta mampu menciptakan tata kelola destinasi yang berkelanjutan.

2. Peran Sektor Swasta dalam Pariwisata

a. Investasi dalam Pengembangan Pariwisata

Investasi dalam pengembangan pariwisata merupakan salah satu peran utama sektor swasta dalam mendorong pertumbuhan dan peningkatan kualitas industri pariwisata. Sektor swasta berperan dalam menyediakan modal untuk pembangunan berbagai fasilitas dan layanan pariwisata seperti hotel, restoran, pusat rekreasi, transportasi wisata, serta berbagai sarana pendukung lainnya yang dibutuhkan oleh wisatawan. Kehadiran investasi dari sektor swasta tidak hanya meningkatkan kapasitas destinasi wisata dalam melayani wisatawan, tetapi juga mempercepat pengembangan kawasan wisata sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian daerah.

Investasi yang dilakukan oleh sektor swasta juga mendorong terciptanya inovasi dalam pengembangan produk dan layanan pariwisata yang lebih menarik serta kompetitif di pasar global. Melalui berbagai bentuk investasi, sektor swasta dapat memperkenalkan konsep wisata baru, meningkatkan kualitas fasilitas, serta menciptakan pengalaman wisata yang lebih beragam bagi pengunjung. Fayos-Solà (2020) menjelaskan bahwa keterlibatan sektor swasta melalui investasi dalam industri pariwisata memiliki peran penting dalam meningkatkan daya saing destinasi wisata sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada sektor pariwisata.

b. Penyediaan Produk dan Layanan Pariwisata

Penyediaan produk dan layanan pariwisata merupakan salah satu kontribusi utama sektor swasta dalam mendukung perkembangan industri pariwisata di suatu daerah. Sektor swasta berperan dalam menghadirkan berbagai produk wisata seperti layanan akomodasi, restoran, transportasi wisata, paket perjalanan, serta berbagai aktivitas rekreasi yang dapat dinikmati oleh wisatawan selama melakukan perjalanan. Keberagaman produk dan layanan yang ditawarkan oleh pelaku usaha pariwisata sangat berpengaruh terhadap kualitas pengalaman wisatawan serta tingkat kepuasan terhadap destinasi yang dikunjungi.

Peran sektor swasta dalam menyediakan layanan pariwisata juga berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan, inovasi produk wisata, serta pengembangan pengalaman wisata yang lebih menarik dan kompetitif. Pelaku usaha pariwisata dituntut untuk mampu memahami kebutuhan dan preferensi wisatawan sehingga produk wisata yang ditawarkan dapat memberikan nilai tambah serta pengalaman yang berkesan bagi pengunjung. Buhalis dan Amaranggana (2021) menjelaskan bahwa sektor swasta memiliki peran penting dalam menciptakan dan mengelola berbagai produk serta layanan pariwisata yang berkualitas karena merupakan pihak yang secara langsung berinteraksi dengan wisatawan dalam penyediaan pengalaman wisata.

c. Inovasi Produk Wisata

Inovasi produk wisata merupakan salah satu peran penting sektor swasta dalam meningkatkan daya tarik dan daya saing destinasi pariwisata di tengah perkembangan industri pariwisata yang semakin dinamis. Inovasi ini dilakukan melalui pengembangan berbagai bentuk pengalaman wisata yang kreatif, seperti wisata berbasis budaya, wisata petualangan, wisata edukasi, wisata kuliner, hingga wisata berbasis teknologi digital yang mampu memberikan pengalaman baru bagi wisatawan. Peran sektor swasta dalam menciptakan inovasi produk wisata menjadi sangat penting karena memiliki fleksibilitas dalam merespons perubahan tren pasar serta kebutuhan wisatawan yang terus berkembang.

Inovasi produk wisata juga berkontribusi dalam memperkaya variasi aktivitas wisata yang tersedia di suatu destinasi sehingga mampu menarik minat wisatawan dari berbagai segmen pasar. Pengembangan produk wisata yang inovatif dapat meningkatkan nilai tambah destinasi, memperpanjang lama tinggal wisatawan, serta memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat lokal yang terlibat dalam kegiatan pariwisata. Hjalager (2020) menyatakan bahwa inovasi dalam produk dan layanan pariwisata merupakan faktor penting dalam meningkatkan daya saing destinasi karena mampu menciptakan pengalaman wisata yang unik serta membedakan suatu destinasi dari pesaingnya.

d. Penciptaan Lapangan Kerja

Penciptaan lapangan kerja merupakan salah satu kontribusi penting sektor swasta dalam pengembangan industri pariwisata karena aktivitas usaha yang dijalankan oleh pelaku industri pariwisata membutuhkan berbagai jenis tenaga kerja dengan keterampilan yang beragam. Sektor swasta seperti hotel, restoran, biro perjalanan wisata, perusahaan transportasi, serta pengelola objek wisata menyediakan peluang kerja bagi masyarakat dalam berbagai bidang seperti pelayanan, manajemen, pemandu wisata, hingga sektor kreatif yang mendukung kegiatan pariwisata. Keberadaan berbagai usaha pariwisata tersebut secara langsung meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal serta mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tujuan wisata.

Perkembangan industri pariwisata yang didukung oleh sektor swasta juga menciptakan efek berganda (multiplier effect) yang mampu membuka peluang kerja tidak langsung di berbagai sektor pendukung seperti kerajinan lokal, kuliner tradisional, transportasi lokal, serta usaha kecil dan menengah. Aktivitas ekonomi yang berkembang di sekitar destinasi wisata memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat dalam berbagai kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan kebutuhan wisatawan. Gössling, Scott, dan Hall (2021) menjelaskan bahwa sektor pariwisata memiliki kontribusi signifikan dalam penciptaan lapangan kerja karena industri ini melibatkan berbagai jenis layanan yang membutuhkan tenaga kerja dalam

jumlah besar serta menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat lokal.

C. Kemitraan Publik–Swasta

Kemitraan publik–swasta (*Public–Private Partnership*/PPP) merupakan bentuk kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta dalam pengembangan, pengelolaan, serta pembiayaan sektor pariwisata. Kemitraan ini bertujuan menggabungkan sumber daya, keahlian, teknologi, dan investasi dari kedua pihak sehingga pengembangan destinasi wisata dapat dilakukan secara lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan. Melalui kerja sama ini, pemerintah dapat menyediakan kerangka kebijakan dan dukungan infrastruktur, sementara sektor swasta berperan dalam investasi, inovasi produk wisata, serta pengelolaan layanan pariwisata. Beberapa bentuk kemitraan publik–swasta dalam pengembangan pariwisata antara lain:

1. Kerja Sama Investasi Infrastruktur Pariwisata

Kerja sama investasi infrastruktur pariwisata merupakan bentuk kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam pembangunan serta pengembangan fasilitas fisik yang mendukung kegiatan pariwisata. Infrastruktur tersebut meliputi pembangunan akses transportasi menuju destinasi wisata, pengembangan kawasan wisata terpadu, penyediaan fasilitas publik, serta pembangunan sarana pendukung seperti pelabuhan wisata, bandara, pusat informasi wisata, dan jaringan utilitas. Melalui kerja sama investasi ini, pembangunan infrastruktur pariwisata dapat dilakukan secara lebih cepat dan efisien karena pemerintah memperoleh dukungan pendanaan serta keahlian teknis dari sektor swasta.

Keterlibatan sektor swasta dalam investasi infrastruktur pariwisata juga memberikan kontribusi penting dalam meningkatkan kualitas layanan serta daya saing destinasi wisata. Pemerintah berperan dalam menyediakan regulasi, perencanaan kawasan, dan jaminan kebijakan, sementara sektor swasta menyediakan modal, teknologi, serta kemampuan manajerial dalam pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan fasilitas pariwisata. Dredge dan Jamal (2020) menjelaskan bahwa kerja sama antara sektor publik dan swasta dalam pembangunan infrastruktur pariwisata merupakan strategi penting untuk memperkuat

tata kelola destinasi serta meningkatkan efisiensi dalam pengembangan sektor pariwisata.

2. Pengelolaan Destinasi Wisata

Pengelolaan destinasi wisata merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan berbagai aktivitas yang berkaitan dengan pengembangan dan pengoperasian suatu destinasi pariwisata. Proses ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, pelaku usaha pariwisata, masyarakat lokal, serta lembaga pengelola destinasi untuk memastikan bahwa kegiatan pariwisata dapat berjalan secara terarah dan memberikan manfaat ekonomi, sosial, serta lingkungan. Pengelolaan yang efektif diperlukan agar potensi wisata yang dimiliki suatu daerah dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa mengabaikan aspek pelestarian lingkungan dan budaya lokal.

Pengelolaan destinasi wisata juga mencakup berbagai kegiatan strategis seperti pengembangan atraksi wisata, peningkatan kualitas fasilitas dan layanan, pengelolaan arus kunjungan wisatawan, serta promosi destinasi secara berkelanjutan. Upaya tersebut bertujuan untuk menciptakan pengalaman wisata yang berkualitas bagi pengunjung sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya yang menjadi daya tarik utama destinasi. Pike dan Page (2020) menyatakan bahwa pengelolaan destinasi yang efektif memerlukan koordinasi yang baik antara berbagai pemangku kepentingan agar pengembangan pariwisata dapat berjalan secara terintegrasi dan mampu meningkatkan daya saing destinasi wisata.

3. Promosi dan Pemasaran Destinasi

Promosi dan pemasaran destinasi merupakan kegiatan strategis dalam sektor pariwisata yang bertujuan untuk memperkenalkan, membangun citra, serta meningkatkan daya tarik suatu destinasi wisata kepada wisatawan domestik maupun internasional. Aktivitas promosi dilakukan melalui berbagai media komunikasi seperti kampanye digital, media sosial, pameran pariwisata, kerja sama dengan agen perjalanan, serta penyelenggaraan berbagai event wisata yang mampu menarik perhatian wisatawan. Strategi pemasaran destinasi yang efektif membantu meningkatkan visibilitas destinasi, memperluas jangkauan

pasar wisata, serta mendorong peningkatan jumlah kunjungan wisatawan.

Pemasaran destinasi juga berperan dalam membangun identitas dan citra yang kuat bagi suatu daerah tujuan wisata sehingga mampu bersaing dengan destinasi lain yang memiliki karakteristik serupa. Proses ini melibatkan pengembangan strategi komunikasi yang menonjolkan keunikan daya tarik wisata seperti keindahan alam, kekayaan budaya, pengalaman wisata, serta kualitas fasilitas yang tersedia bagi pengunjung. Pike dan Page (2020) menyatakan bahwa pemasaran destinasi merupakan elemen penting dalam pengembangan pariwisata karena strategi pemasaran yang efektif mampu meningkatkan citra destinasi serta mempengaruhi keputusan wisatawan dalam memilih tujuan perjalanan.

4. Pengembangan Produk Wisata

Pengembangan produk wisata merupakan proses menciptakan, meningkatkan, dan memodifikasi berbagai atraksi serta pengalaman wisata yang dapat ditawarkan kepada wisatawan di suatu destinasi. Proses ini melibatkan pengelolaan berbagai komponen pariwisata seperti atraksi wisata, fasilitas pendukung, aksesibilitas, serta pelayanan yang dirancang untuk memberikan pengalaman yang menarik dan berkesan bagi wisatawan. Pengembangan produk wisata dilakukan agar destinasi mampu mengikuti perubahan tren wisatawan sekaligus meningkatkan nilai tambah dan daya saing destinasi di pasar pariwisata.

Pengembangan produk wisata juga berperan dalam memperkaya variasi aktivitas yang dapat dilakukan wisatawan selama berada di suatu destinasi. Produk wisata dapat dikembangkan dalam berbagai bentuk seperti wisata budaya, wisata alam, wisata kuliner, wisata edukasi, maupun wisata berbasis pengalaman yang memberikan interaksi langsung dengan lingkungan dan masyarakat lokal. Hjalager (2020) menjelaskan bahwa inovasi dan pengembangan produk wisata menjadi faktor penting dalam industri pariwisata karena mampu menciptakan pengalaman wisata yang unik serta meningkatkan daya saing destinasi di tengah persaingan global.

5. Peningkatan Kualitas Layanan Pariwisata

Peningkatan kualitas layanan pariwisata merupakan upaya strategis dalam memastikan bahwa wisatawan memperoleh pengalaman

perjalanan yang nyaman, aman, dan memuaskan selama berada di suatu destinasi wisata. Kualitas layanan dalam pariwisata mencakup berbagai aspek seperti keramahan pelayanan, ketersediaan fasilitas yang memadai, kemudahan akses informasi, serta profesionalitas sumber daya manusia yang terlibat dalam industri pariwisata. Upaya peningkatan kualitas layanan menjadi sangat penting karena kepuasan wisatawan sangat dipengaruhi oleh kualitas interaksi dan pelayanan yang diterima selama melakukan perjalanan wisata.

Peningkatan kualitas layanan pariwisata juga berkaitan erat dengan pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan, sertifikasi profesi, serta penerapan standar pelayanan yang konsisten di seluruh sektor industri pariwisata. Pelaku usaha pariwisata perlu memahami kebutuhan dan harapan wisatawan agar layanan yang diberikan dapat memenuhi standar kualitas yang diharapkan serta menciptakan pengalaman wisata yang berkesan. Kandampully, Zhang, dan Bilgihan (2020) menjelaskan bahwa kualitas layanan dalam industri pariwisata menjadi faktor utama yang mempengaruhi kepuasan wisatawan serta menentukan loyalitas untuk kembali mengunjungi suatu destinasi.

D. Good Tourism Governance

Good Tourism Governance merupakan konsep pengelolaan pariwisata yang menekankan pada penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan pariwisata. Konsep ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengembangan pariwisata dilakukan secara transparan, partisipatif, akuntabel, dan berkelanjutan sehingga mampu memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat, pelaku industri, serta lingkungan. Penerapan tata kelola yang baik dalam sektor pariwisata menjadi landasan penting untuk menciptakan sistem pengelolaan destinasi yang terstruktur, meningkatkan kualitas pelayanan pariwisata, serta memperkuat daya saing destinasi di tingkat nasional maupun internasional.

Good Tourism Governance menekankan pentingnya keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam proses pengelolaan pariwisata, termasuk pemerintah, sektor swasta, masyarakat lokal, serta organisasi non-pemerintah. Kolaborasi antar pihak tersebut diperlukan untuk

memastikan bahwa kebijakan pariwisata yang diterapkan mampu mengakomodasi berbagai kepentingan serta mendukung pembangunan pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui penerapan prinsip tata kelola yang baik, pengelolaan destinasi pariwisata dapat berjalan secara efektif, efisien, serta mampu menjaga kelestarian sumber daya alam dan budaya yang menjadi daya tarik utama suatu destinasi. Beberapa prinsip utama dalam *Good Tourism Governance* antara lain sebagai berikut.

1. Partisipasi Pemangku Kepentingan

Partisipasi pemangku kepentingan merupakan unsur penting dalam pengelolaan pariwisata yang menekankan keterlibatan berbagai pihak dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan program, hingga evaluasi kebijakan pariwisata. Keterlibatan tersebut mencakup pemerintah, pelaku industri pariwisata, masyarakat lokal, akademisi, serta organisasi masyarakat yang secara bersama-sama berkontribusi dalam menciptakan sistem pengelolaan pariwisata yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan mampu mengakomodasi kepentingan berbagai pihak.

Partisipasi yang efektif memungkinkan terciptanya komunikasi yang terbuka antara pemerintah dan masyarakat sehingga berbagai aspirasi, kebutuhan, serta potensi lokal dapat terintegrasi dalam kebijakan pembangunan pariwisata. Baggio (2020) menjelaskan bahwa keterlibatan aktif para pemangku kepentingan dalam jaringan pengelolaan pariwisata mampu meningkatkan kualitas pengambilan keputusan serta memperkuat koordinasi antar aktor dalam pengembangan destinasi wisata.

2. Transparansi

Transparansi merupakan prinsip penting dalam tata kelola pariwisata yang menekankan keterbukaan informasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan sektor pariwisata. Transparansi memungkinkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, pelaku usaha, dan wisatawan, memperoleh akses terhadap informasi yang berkaitan dengan program pembangunan destinasi, penggunaan sumber daya, serta arah kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah atau pengelola pariwisata.

Penerapan transparansi dalam pengelolaan pariwisata berperan penting dalam membangun kepercayaan publik serta mendorong terciptanya sistem pengelolaan yang lebih akuntabel dan partisipatif karena setiap proses pengambilan keputusan dapat diketahui dan diawasi oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Gupta (2020) menjelaskan bahwa transparansi dalam tata kelola berkaitan dengan keterbukaan informasi mengenai proses pengambilan keputusan dan aktivitas institusi sehingga memungkinkan publik untuk memahami, menilai, serta mengawasi kebijakan yang dijalankan oleh suatu organisasi atau pemerintah.

3. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan prinsip penting dalam tata kelola yang menekankan kewajiban setiap pihak yang memiliki kewenangan untuk mempertanggungjawabkan tindakan, keputusan, serta penggunaan sumber daya kepada pihak yang berkepentingan. Dalam konteks pengelolaan pariwisata, akuntabilitas berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah, pengelola destinasi, serta pelaku industri pariwisata dalam menjalankan program pembangunan, pengelolaan destinasi, dan pelayanan wisata secara transparan, profesional, serta sesuai dengan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

Akuntabilitas juga berkaitan dengan adanya mekanisme pelaporan, pengawasan, dan evaluasi yang memungkinkan masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya mengetahui bagaimana kebijakan dan program pariwisata dilaksanakan serta dampak yang dihasilkan dari kebijakan tersebut. Konsep ini menuntut agar setiap aktor dalam sistem tata kelola mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan keputusan serta tindakan yang dilakukan kepada pihak yang memiliki kepentingan atau otoritas untuk menilai kinerja tersebut (Bovens, 2020).

4. Efektivitas dan Efisiensi

Efektivitas dan efisiensi merupakan dua prinsip penting dalam tata kelola organisasi yang berkaitan dengan kemampuan suatu institusi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan pemanfaatan sumber daya secara optimal. Efektivitas merujuk pada tingkat keberhasilan suatu organisasi atau program dalam mencapai target dan sasaran yang telah direncanakan, sedangkan efisiensi berkaitan dengan kemampuan menggunakan sumber daya seperti waktu, biaya, tenaga

kerja, dan fasilitas secara tepat sehingga menghasilkan *output* yang maksimal dengan penggunaan *input* yang minimal.

Efektivitas dalam suatu organisasi menunjukkan sejauh mana kegiatan atau program yang dilaksanakan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara tepat dan sesuai dengan perencanaan yang dibuat sebelumnya. Purwanti (2022) menjelaskan bahwa efektivitas dapat dipahami sebagai sejauh mana suatu organisasi mampu merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya dan pelaksanaan kegiatan secara tepat dalam rangka mencapai hasil yang diharapkan.

5. Keberlanjutan (*Sustainability*)

Keberlanjutan (*sustainability*) merupakan konsep penting dalam pembangunan pariwisata yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, serta kesejahteraan sosial dan budaya masyarakat lokal. Konsep ini menuntut agar kegiatan pariwisata dikelola secara bertanggung jawab sehingga sumber daya alam, budaya, dan sosial yang menjadi daya tarik utama destinasi dapat tetap terjaga dan dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh generasi sekarang maupun generasi mendatang.

Keberlanjutan dalam sektor pariwisata tidak hanya berfokus pada perlindungan lingkungan, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan ekonomi yang dihasilkan dari aktivitas pariwisata terhadap masyarakat setempat. Yang (2023) menjelaskan bahwa pariwisata berkelanjutan merupakan bentuk pengelolaan pariwisata yang mampu memenuhi kebutuhan wisatawan dan masyarakat tuan rumah saat ini sekaligus melindungi serta meningkatkan peluang bagi generasi di masa depan melalui pengelolaan sumber daya ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang.

BAB VI
EKONOMI PARIWISATA BERKELANJUTAN

Ekonomi pariwisata berkelanjutan merupakan pendekatan pembangunan pariwisata yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, serta kesejahteraan sosial masyarakat lokal. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas pariwisata tidak hanya memberikan manfaat ekonomi jangka pendek, tetapi juga menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan budaya agar tetap dapat dimanfaatkan oleh generasi mendatang.

Pengembangan ekonomi pariwisata berkelanjutan menuntut adanya perencanaan, pengelolaan, serta kebijakan yang mampu mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara harmonis dalam setiap kegiatan pariwisata. Melalui penerapan prinsip keberlanjutan, sektor pariwisata diharapkan dapat menciptakan peluang kerja, meningkatkan pendapatan daerah, serta memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan dan nilai-nilai budaya setempat.

A. Kontribusi Pariwisata terhadap Perekonomian

Kontribusi pariwisata terhadap perekonomian terlihat dari kemampuannya dalam menghasilkan pendapatan, membuka peluang usaha, serta mendorong perkembangan berbagai sektor ekonomi yang saling berkaitan. Aktivitas pariwisata tidak hanya melibatkan wisatawan dan destinasi wisata, tetapi juga menciptakan rantai ekonomi yang melibatkan transportasi, akomodasi, kuliner, perdagangan, jasa kreatif, hingga sektor industri lokal yang mendukung kebutuhan wisatawan.

Pariwisata juga berperan sebagai salah satu sumber penerimaan daerah dan negara melalui berbagai bentuk pajak, retribusi, serta investasi yang masuk ke sektor pariwisata. Kehadiran wisatawan domestik maupun internasional meningkatkan perputaran uang di suatu wilayah sehingga dapat memperkuat perekonomian lokal, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperluas peluang kerja bagi berbagai

kelompok masyarakat. Beberapa kontribusi utama pariwisata terhadap perekonomian dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Meningkatkan Pendapatan Daerah dan Negara

Pariwisata merupakan salah satu sektor ekonomi yang memiliki kemampuan besar dalam meningkatkan pendapatan daerah dan negara melalui berbagai aktivitas ekonomi yang terjadi di destinasi wisata. Penerimaan tersebut dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti pajak hotel, pajak restoran, retribusi objek wisata, serta pengeluaran wisatawan yang secara langsung meningkatkan perputaran ekonomi di suatu wilayah sehingga memberikan kontribusi terhadap pendapatan pemerintah daerah maupun nasional.

Sektor pariwisata juga mendorong peningkatan pendapatan negara melalui penerimaan devisa dari wisatawan mancanegara serta berbagai jenis pajak yang berasal dari aktivitas industri pariwisata seperti transportasi, akomodasi, hiburan, dan perdagangan yang berkaitan dengan kegiatan wisata. Razzaq *et al*. (2021) menyatakan bahwa perkembangan pariwisata internasional dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan aktivitas ekonomi yang berkontribusi terhadap penerimaan negara dan daerah.

2. Menciptakan Lapangan Kerja

Pariwisata memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan kerja karena kegiatan wisata melibatkan berbagai jenis usaha dan layanan yang membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah besar. Aktivitas pariwisata seperti pengelolaan hotel, restoran, transportasi wisata, biro perjalanan, serta pengelolaan destinasi wisata secara langsung membuka peluang kerja bagi masyarakat di berbagai tingkat keterampilan dan pendidikan.

Perkembangan industri pariwisata juga menimbulkan efek tidak langsung terhadap penciptaan lapangan kerja di sektor pendukung seperti pertanian, perikanan, industri kerajinan, perdagangan, dan jasa kreatif yang menyediakan kebutuhan bagi wisatawan maupun pelaku industri pariwisata. Menurut Zhao (2023), perkembangan pariwisata internasional memiliki pengaruh signifikan dalam menciptakan lapangan kerja langsung di industri pariwisata serta mendorong peningkatan kesempatan kerja pada sektor terkait.

3. Mendorong Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Pariwisata memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) karena aktivitas wisata menciptakan permintaan yang tinggi terhadap berbagai produk dan layanan lokal yang dihasilkan oleh masyarakat. Kehadiran wisatawan di suatu destinasi meningkatkan kebutuhan terhadap produk kuliner khas daerah, kerajinan tangan, suvenir, jasa transportasi lokal, serta berbagai bentuk layanan yang dapat dikembangkan oleh pelaku usaha kecil. Perputaran ekonomi yang terjadi akibat aktivitas wisata tersebut memberikan peluang bagi UMKM untuk berkembang, memperluas pasar, serta meningkatkan pendapatan masyarakat lokal secara berkelanjutan.

Interaksi antara wisatawan dengan masyarakat lokal juga memberikan ruang bagi UMKM untuk memperkenalkan produk budaya dan kearifan lokal sebagai bagian dari pengalaman wisata yang autentik. Menurut Ningsih dan Widodo (2021), sektor pariwisata memiliki keterkaitan yang kuat dengan perkembangan UMKM karena kegiatan pariwisata dapat meningkatkan permintaan terhadap produk lokal serta memperluas peluang usaha bagi masyarakat di sekitar destinasi wisata. Kondisi ini menjadikan UMKM sebagai salah satu komponen penting dalam ekosistem ekonomi pariwisata yang mampu memperkuat struktur ekonomi lokal serta menciptakan nilai tambah bagi produk daerah.

4. Meningkatkan Devisa Negara

Pariwisata internasional memberikan kontribusi penting dalam meningkatkan devisa negara karena pengeluaran wisatawan mancanegara selama berada di suatu negara menjadi sumber pemasukan ekonomi yang berasal dari luar negeri. Aktivitas wisata yang melibatkan penggunaan layanan akomodasi, transportasi, kuliner, serta pembelian berbagai produk lokal oleh wisatawan asing menghasilkan aliran devisa yang dapat memperkuat neraca pembayaran suatu negara. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara secara langsung memperbesar potensi penerimaan devisa sehingga sektor pariwisata sering dipandang sebagai salah satu sumber pendapatan negara yang strategis.

Pemasukan devisa dari sektor pariwisata juga memiliki dampak luas terhadap pertumbuhan ekonomi nasional karena pengeluaran

wisatawan asing akan beredar di berbagai sektor ekonomi yang saling berkaitan. Menurut Dogru, Bulut, dan Sirakaya-Turk (2020), penerimaan dari pariwisata internasional berperan penting dalam meningkatkan devisa negara serta memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan aktivitas perdagangan jasa dan investasi di sektor pariwisata. Aliran devisa tersebut tidak hanya meningkatkan kapasitas ekonomi nasional tetapi juga membantu memperkuat stabilitas ekonomi melalui peningkatan pendapatan negara dari sektor jasa.

5. Mendorong Pembangunan Infrastruktur

Pariwisata memiliki peran penting dalam mendorong pembangunan infrastruktur karena perkembangan destinasi wisata memerlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang kenyamanan serta aksesibilitas wisatawan. Pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, bandara, pelabuhan, jaringan transportasi, fasilitas komunikasi, serta sarana publik lainnya menjadi bagian penting dalam pengembangan kawasan wisata yang mampu meningkatkan mobilitas wisatawan dan memperlancar aktivitas ekonomi di suatu wilayah. Infrastruktur yang berkembang tidak hanya berfungsi untuk mendukung kegiatan pariwisata tetapi juga memberikan manfaat luas bagi masyarakat lokal melalui peningkatan konektivitas antar wilayah dan akses terhadap berbagai layanan publik.

Pengembangan sektor pariwisata juga mendorong pemerintah dan pihak swasta untuk berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur guna meningkatkan daya tarik destinasi wisata serta memperkuat daya saing daerah di tingkat nasional maupun internasional. Menurut Zhang dan Zhang (2021), perkembangan industri pariwisata memiliki keterkaitan yang erat dengan pembangunan infrastruktur karena peningkatan aktivitas pariwisata mendorong investasi pada fasilitas transportasi, layanan publik, dan infrastruktur pendukung lainnya yang memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah. Pembangunan infrastruktur tersebut menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan wisata yang nyaman, aman, dan mudah diakses oleh wisatawan dari berbagai daerah maupun negara.

B. Analisis Dampak Ekonomi Lokal

Analisis dampak ekonomi lokal merupakan proses penilaian yang dilakukan untuk memahami sejauh mana aktivitas pariwisata memberikan pengaruh terhadap perekonomian masyarakat di suatu wilayah. Analisis ini membantu mengidentifikasi perubahan ekonomi yang terjadi akibat kegiatan pariwisata, baik dalam bentuk peningkatan pendapatan, peluang usaha baru, maupun pertumbuhan lapangan kerja bagi masyarakat setempat.

Kajian mengenai dampak ekonomi lokal sangat penting dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan karena dapat menunjukkan apakah manfaat ekonomi yang dihasilkan benar-benar dirasakan oleh masyarakat sekitar destinasi wisata. Melalui analisis ini, pemerintah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dapat merancang kebijakan yang lebih tepat dalam meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap pembangunan ekonomi daerah.

1. Peningkatan Pendapatan Masyarakat

Peningkatan pendapatan masyarakat merupakan salah satu dampak ekonomi yang paling nyata dari perkembangan sektor pariwisata di suatu daerah karena aktivitas wisata mampu menciptakan berbagai peluang ekonomi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat lokal melalui penyediaan produk dan jasa yang dibutuhkan oleh wisatawan. Kehadiran wisatawan mendorong masyarakat untuk terlibat dalam berbagai kegiatan ekonomi seperti usaha kuliner, penyediaan akomodasi, transportasi lokal, penjualan cendera mata, serta berbagai layanan wisata lainnya yang secara langsung memberikan tambahan sumber penghasilan bagi rumah tangga di sekitar destinasi wisata.

Pertumbuhan sektor pariwisata juga memicu peningkatan aktivitas ekonomi di tingkat lokal yang menghasilkan efek berganda terhadap perekonomian masyarakat, karena pendapatan yang diperoleh dari aktivitas wisata akan kembali beredar dalam bentuk konsumsi, investasi usaha kecil, serta pengembangan ekonomi kreatif di daerah tersebut. Menurut *World Tourism Organization* (UNWTO) (2021), sektor pariwisata memiliki kemampuan besar dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal melalui penciptaan peluang usaha dan peningkatan pendapatan yang berkelanjutan di berbagai sektor ekonomi yang terkait dengan aktivitas wisata.

2. Penciptaan Lapangan Kerja

Penciptaan lapangan kerja merupakan salah satu kontribusi penting dari perkembangan sektor pariwisata terhadap perekonomian lokal karena aktivitas wisata melibatkan berbagai jenis usaha yang membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah besar di berbagai bidang layanan. Industri pariwisata membuka kesempatan kerja pada sektor perhotelan, restoran, transportasi, biro perjalanan, pengelolaan objek wisata, serta berbagai usaha ekonomi kreatif yang berkembang di sekitar destinasi wisata sehingga mampu menyerap tenaga kerja dari masyarakat lokal dengan tingkat keterampilan yang beragam.

Perkembangan pariwisata juga menimbulkan efek ekonomi tidak langsung yang memperluas peluang kerja melalui pertumbuhan usaha pendukung seperti perdagangan, jasa, serta produksi barang lokal yang dibutuhkan oleh wisatawan. Menurut World Travel & Tourism Council (WTTC) (2024), sektor pariwisata secara global mendukung sekitar 357 juta lapangan kerja atau sekitar satu dari setiap sepuluh pekerjaan di dunia, yang menunjukkan bahwa industri ini memiliki peran yang sangat signifikan dalam menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui aktivitas ekonomi yang terkait dengan perjalanan dan pariwisata.

3. Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu dampak penting dari berkembangnya sektor pariwisata karena meningkatnya jumlah wisatawan akan mendorong permintaan terhadap berbagai produk dan jasa lokal yang disediakan oleh masyarakat. Aktivitas pariwisata membuka peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha seperti kuliner khas daerah, kerajinan tangan, penyediaan suvenir, homestay, jasa pemandu wisata, hingga berbagai produk ekonomi kreatif yang menjadi bagian dari pengalaman wisata.

Perkembangan UMKM di kawasan wisata juga berperan dalam memperkuat struktur ekonomi lokal karena usaha-usaha tersebut cenderung menggunakan sumber daya lokal, tenaga kerja setempat, serta bahan baku dari lingkungan sekitar sehingga manfaat ekonominya lebih banyak dirasakan oleh masyarakat daerah. Menurut *Organisation for Economic Co-operation and Development* (2020), sektor pariwisata memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan UMKM

melalui peningkatan permintaan pasar, penciptaan peluang kewirausahaan, serta integrasi produk lokal ke dalam rantai nilai industri pariwisata.

4. Peningkatan Perputaran Ekonomi Daerah

Peningkatan perputaran ekonomi daerah terjadi ketika aktivitas pariwisata mendorong terjadinya berbagai transaksi ekonomi antara wisatawan, pelaku usaha, dan masyarakat lokal yang terlibat dalam penyediaan layanan wisata. Pengeluaran wisatawan untuk akomodasi, makanan, transportasi, tiket objek wisata, serta pembelian produk lokal akan mengalir ke berbagai sektor ekonomi sehingga menciptakan arus peredaran uang yang lebih aktif dalam perekonomian daerah.

Perputaran ekonomi yang meningkat tersebut juga memunculkan efek pengganda ekonomi (*multiplier effect*) karena pendapatan yang diperoleh pelaku usaha pariwisata kemudian digunakan kembali untuk membeli bahan baku, membayar tenaga kerja, serta melakukan investasi usaha yang pada akhirnya memperkuat perekonomian lokal secara berkelanjutan. Menurut *World Tourism Organization* (2022), sektor pariwisata memiliki kemampuan kuat dalam mendorong perputaran ekonomi daerah melalui pengeluaran wisatawan yang menstimulasi aktivitas ekonomi lintas sektor seperti perdagangan, jasa, transportasi, dan industri kreatif di destinasi wisata.

5. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu manfaat ekonomi yang dapat diperoleh dari perkembangan sektor pariwisata karena aktivitas wisata menghasilkan berbagai sumber penerimaan bagi pemerintah daerah melalui pajak dan retribusi yang terkait dengan kegiatan pariwisata. Pendapatan tersebut dapat berasal dari pajak hotel, pajak restoran, retribusi objek wisata, pajak hiburan, serta berbagai izin usaha pariwisata yang secara langsung memberikan kontribusi terhadap keuangan daerah.

Pendapatan daerah yang meningkat dari sektor pariwisata memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk memperkuat pembangunan ekonomi melalui peningkatan kualitas infrastruktur, pengembangan destinasi wisata, serta penyediaan fasilitas publik yang lebih baik bagi masyarakat dan wisatawan. Menurut World Tourism Organization (2021), sektor pariwisata memiliki peran penting dalam

meningkatkan pendapatan pemerintah daerah melalui pajak dan berbagai bentuk penerimaan lainnya yang dihasilkan dari aktivitas ekonomi pariwisata di destinasi wisata.

C. Model Bisnis Pariwisata Berkelanjutan

Model bisnis pariwisata berkelanjutan merupakan pendekatan pengelolaan usaha pariwisata yang dirancang untuk menciptakan nilai ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan serta memberikan manfaat sosial bagi masyarakat lokal. Model ini menekankan keseimbangan antara keuntungan ekonomi, perlindungan sumber daya alam, dan kesejahteraan masyarakat sehingga kegiatan pariwisata dapat berlangsung secara berkelanjutan tanpa merusak potensi destinasi wisata di masa depan.

1. Konsep Dasar Model Bisnis Pariwisata Berkelanjutan

Konsep dasar model bisnis pariwisata berkelanjutan merujuk pada kerangka pengelolaan usaha pariwisata yang dirancang untuk menciptakan nilai ekonomi sekaligus menjaga keseimbangan antara aspek lingkungan, sosial, dan budaya sehingga aktivitas pariwisata dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi destinasi serta masyarakat lokal. Prinsip ini menekankan bahwa kegiatan bisnis pariwisata tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga pada upaya menjaga kelestarian sumber daya alam, mempertahankan identitas budaya, serta memastikan distribusi manfaat ekonomi yang adil bagi masyarakat di sekitar destinasi wisata (Dewi *et al*., 2025).

Model bisnis pariwisata berkelanjutan dibangun melalui integrasi berbagai komponen seperti pengelolaan sumber daya secara bertanggung jawab, keterlibatan masyarakat lokal dalam kegiatan ekonomi pariwisata, serta pengembangan produk wisata yang memperhatikan daya dukung lingkungan dan keberlanjutan destinasi. Pendekatan ini mendorong terciptanya sistem usaha pariwisata yang mampu mempertahankan keberlangsungan ekonomi industri wisata sekaligus melindungi lingkungan serta meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat sehingga kegiatan pariwisata dapat terus berkembang tanpa merusak potensi sumber daya yang menjadi daya tarik utama destinasi wisata.

2. Komponen Utama Model Bisnis Pariwisata Berkelanjutan

a. Proposisi Nilai Berkelanjutan (*Sustainable Value Proposition*)

Proposisi nilai berkelanjutan (*Sustainable Value Proposition*) dalam model bisnis pariwisata berkelanjutan merujuk pada kemampuan suatu destinasi atau pelaku usaha pariwisata untuk menawarkan pengalaman wisata yang tidak hanya menarik dan bernilai bagi wisatawan, tetapi juga mampu menjaga kelestarian lingkungan, melindungi budaya lokal, serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Konsep ini menekankan bahwa nilai utama yang ditawarkan kepada wisatawan tidak hanya berupa keindahan destinasi atau kualitas layanan, melainkan juga komitmen terhadap praktik pariwisata yang bertanggung jawab dan berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang (Font & McCabe, 2022).

Penerapan proposisi nilai berkelanjutan dalam pariwisata dilakukan melalui pengembangan produk wisata yang berbasis pada konservasi lingkungan, pemanfaatan sumber daya lokal secara bijak, serta penyediaan pengalaman wisata yang autentik dan edukatif bagi wisatawan. Pendekatan ini mendorong terciptanya hubungan yang saling menguntungkan antara wisatawan, pelaku usaha, dan masyarakat lokal sehingga aktivitas pariwisata dapat memberikan nilai tambah ekonomi sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlangsungan budaya di destinasi wisata.

b. Segmentasi Pasar Wisatawan Berkelanjutan

Segmentasi pasar wisatawan berkelanjutan dalam model bisnis pariwisata berkelanjutan merujuk pada proses pengelompokan wisatawan berdasarkan karakteristik, preferensi, serta tingkat kepedulian terhadap aspek lingkungan, sosial, dan budaya dalam aktivitas wisata. Pendekatan segmentasi ini penting karena wisatawan yang memiliki kesadaran terhadap keberlanjutan cenderung memilih destinasi yang menerapkan praktik ramah lingkungan, mendukung pelestarian budaya lokal, serta memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat setempat (Gössling, Scott, & Hall, 2021).

Penerapan segmentasi pasar wisatawan berkelanjutan membantu pelaku industri pariwisata dalam merancang produk, layanan, serta strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran dengan

menyesuaikan kebutuhan dan motivasi wisatawan yang peduli terhadap keberlanjutan. Strategi ini juga memungkinkan destinasi wisata untuk mengembangkan pengalaman wisata yang lebih bertanggung jawab seperti ekowisata, wisata berbasis komunitas, wisata edukasi lingkungan, dan wisata budaya yang tidak hanya memberikan pengalaman yang bermakna bagi wisatawan tetapi juga mendukung upaya pelestarian sumber daya alam dan sosial budaya di destinasi wisata.

c. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Budaya

Pengelolaan sumber daya alam dan budaya dalam model bisnis pariwisata berkelanjutan merujuk pada upaya sistematis untuk melindungi, memanfaatkan, dan melestarikan potensi lingkungan serta warisan budaya yang menjadi daya tarik utama destinasi wisata agar tetap dapat dinikmati oleh generasi sekarang maupun masa depan. Pendekatan ini menekankan bahwa aktivitas pariwisata harus dilakukan secara bertanggung jawab dengan mempertimbangkan keseimbangan antara pemanfaatan ekonomi, pelestarian ekosistem, serta perlindungan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat lokal sehingga keberlanjutan destinasi wisata dapat terjaga secara jangka panjang (Seraphin & Gowreesunkar, 2021).

Pengelolaan tersebut diwujudkan melalui berbagai strategi seperti konservasi lingkungan, pengaturan kapasitas kunjungan wisatawan, pelestarian tradisi dan kearifan lokal, serta keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan destinasi wisata secara partisipatif. Praktik ini tidak hanya bertujuan menjaga kualitas lingkungan dan identitas budaya suatu wilayah, tetapi juga menciptakan keseimbangan antara aktivitas pariwisata dan keberlangsungan kehidupan sosial masyarakat sehingga pariwisata dapat berkembang secara bertanggung jawab tanpa merusak sumber daya alam maupun warisan budaya yang menjadi fondasi utama daya tarik destinasi wisata.

d. Kemitraan dengan Masyarakat Lokal

Kemitraan dengan masyarakat lokal dalam model bisnis pariwisata berkelanjutan merupakan bentuk kerja sama antara pelaku industri pariwisata, pemerintah, dan komunitas setempat dalam pengelolaan serta pengembangan destinasi wisata sehingga masyarakat tidak hanya menjadi objek pariwisata tetapi

juga aktor utama dalam kegiatan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Keterlibatan masyarakat lokal dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengambilan keputusan pariwisata mampu memperkuat keberlanjutan destinasi karena masyarakat memiliki pengetahuan lokal, kepentingan langsung terhadap sumber daya yang dimiliki, serta motivasi untuk menjaga kelestarian lingkungan dan budaya yang menjadi identitas wilayah (Muda, 2025).

Kemitraan tersebut juga mendorong terciptanya distribusi manfaat ekonomi yang lebih merata melalui berbagai aktivitas seperti pengelolaan homestay, pemandu wisata lokal, penyediaan produk kerajinan dan kuliner tradisional, serta keterlibatan dalam kegiatan konservasi lingkungan dan pelestarian budaya. Pendekatan kolaboratif ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, tetapi juga memperkuat daya tarik destinasi wisata melalui pengalaman yang autentik dan berbasis komunitas sehingga pariwisata dapat berkembang secara berkelanjutan serta memberikan dampak sosial dan ekonomi yang positif bagi masyarakat di sekitar destinasi wisata.

e. Struktur Pendapatan yang Berkelanjutan

Struktur pendapatan yang berkelanjutan dalam model bisnis pariwisata berkelanjutan merujuk pada sistem pengelolaan sumber pendapatan yang dirancang agar mampu memberikan keuntungan ekonomi secara stabil sekaligus mendukung pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal. Pendekatan ini menekankan pentingnya diversifikasi sumber pendapatan dari berbagai aktivitas pariwisata seperti tiket destinasi, layanan wisata, produk ekonomi kreatif lokal, homestay, serta kegiatan edukasi dan konservasi sehingga sektor pariwisata tidak hanya menghasilkan keuntungan finansial tetapi juga memperkuat keberlanjutan ekonomi masyarakat di sekitar destinasi wisata (Priatmoko *et al*., 2021).

Pengelolaan struktur pendapatan yang berkelanjutan juga mendorong penggunaan sebagian pendapatan pariwisata untuk kegiatan konservasi lingkungan, pengembangan fasilitas wisata yang ramah lingkungan, serta pemberdayaan masyarakat lokal melalui pelatihan, pengembangan usaha mikro, dan peningkatan kualitas layanan wisata. Sistem ini memungkinkan terciptanya

keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata dengan pelestarian sumber daya alam dan budaya sehingga manfaat ekonomi yang dihasilkan dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh berbagai pemangku kepentingan dalam ekosistem pariwisata.

3. Prinsip-Prinsip Model Bisnis Pariwisata Berkelanjutan

Prinsip-prinsip model bisnis pariwisata berkelanjutan berlandaskan pada upaya untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi, lingkungan, dan sosial dalam setiap aktivitas pengembangan serta pengelolaan destinasi wisata sehingga kegiatan pariwisata dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi berbagai pihak yang terlibat. Pendekatan ini menekankan bahwa pengelolaan pariwisata harus mempertimbangkan keberlanjutan sumber daya alam, perlindungan budaya lokal, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat agar industri pariwisata dapat berkembang secara bertanggung jawab tanpa merusak potensi destinasi wisata di masa depan (Dowling, 2020).

Penerapan prinsip-prinsip tersebut tercermin melalui beberapa aspek penting seperti perlindungan lingkungan melalui konservasi sumber daya alam, penguatan kesejahteraan masyarakat lokal melalui distribusi manfaat ekonomi yang adil, serta pengembangan kegiatan pariwisata yang menghormati nilai-nilai budaya dan kearifan lokal. Implementasi prinsip ini juga menuntut adanya kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha pariwisata, dan masyarakat dalam menciptakan sistem pengelolaan destinasi yang bertanggung jawab sehingga aktivitas pariwisata tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi tetapi juga pada keberlanjutan sosial dan lingkungan.

4. Manfaat Penerapan Model Bisnis Pariwisata Berkelanjutan

Penerapan model bisnis pariwisata berkelanjutan memberikan berbagai manfaat penting bagi pengembangan destinasi wisata karena mampu menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat lokal. Model ini mendorong pengelolaan destinasi secara bertanggung jawab sehingga aktivitas pariwisata tidak hanya menghasilkan keuntungan ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian sumber daya alam serta memperkuat keberlanjutan sosial dan budaya masyarakat di sekitar destinasi wisata (Hall, 2021).

D. Pemberdayaan UMKM Pariwisata

Pemberdayaan UMKM pariwisata merupakan upaya sistematis untuk meningkatkan kapasitas usaha mikro, kecil, dan menengah yang terlibat dalam kegiatan pariwisata agar mampu berkembang secara mandiri, kompetitif, dan berkelanjutan. UMKM yang bergerak di sektor pariwisata meliputi berbagai bidang seperti usaha kuliner khas daerah, kerajinan tangan, homestay, jasa pemandu wisata, transportasi lokal, serta produk ekonomi kreatif yang mendukung aktivitas wisata di suatu destinasi.

Pemberdayaan ini bertujuan untuk memperkuat kemampuan pelaku UMKM dalam mengelola usaha, meningkatkan kualitas produk dan layanan, serta memperluas akses pasar sehingga dapat berkontribusi secara lebih optimal terhadap perkembangan destinasi wisata. Melalui pemberdayaan yang tepat, UMKM dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal sekaligus mendukung terciptanya pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan.

1. Tujuan Pemberdayaan UMKM Pariwisata

Pemberdayaan UMKM dalam sektor pariwisata memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal melalui penguatan kapasitas usaha dan peningkatan peluang ekonomi. Dengan adanya dukungan yang tepat, pelaku UMKM dapat memanfaatkan potensi pariwisata di daerahnya untuk mengembangkan usaha yang lebih produktif dan berdaya saing tinggi. Selain itu, pemberdayaan UMKM juga bertujuan untuk menciptakan pemerataan manfaat ekonomi dari sektor pariwisata sehingga tidak hanya dinikmati oleh pelaku usaha besar, tetapi juga oleh masyarakat lokal. Keberadaan UMKM yang kuat dapat memperkaya variasi produk wisata serta memberikan pengalaman autentik bagi wisatawan yang berkunjung ke suatu destinasi.

2. Bentuk-Bentuk Pemberdayaan UMKM Pariwisata

a. Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas

Pelatihan dan pengembangan kapasitas merupakan salah satu bentuk penting pemberdayaan UMKM pariwisata yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, pengetahuan bisnis, serta keterampilan teknis pelaku usaha agar mampu mengelola usaha secara profesional dan

berdaya saing. Program pelatihan biasanya mencakup berbagai aspek seperti manajemen usaha, pengelolaan keuangan, pelayanan wisatawan, inovasi produk lokal, serta pemanfaatan teknologi digital sehingga pelaku UMKM dapat meningkatkan kualitas produk dan layanan yang ditawarkan kepada wisatawan (Renaldi, 2025).

Pelatihan dan pengembangan kapasitas juga berperan dalam meningkatkan kemampuan adaptasi pelaku UMKM terhadap perubahan pasar pariwisata yang semakin kompetitif dan dinamis. Melalui peningkatan keterampilan dan pengetahuan tersebut, pelaku usaha dapat mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif, meningkatkan standar layanan wisata, serta menciptakan inovasi produk yang mampu menarik minat wisatawan baik domestik maupun mancanegara.

b. Akses Permodalan dan Dukungan Keuangan

Akses permodalan dan dukungan keuangan merupakan salah satu bentuk penting dalam pemberdayaan UMKM pariwisata karena memberikan kemampuan bagi pelaku usaha untuk mengembangkan kapasitas produksi, meningkatkan kualitas layanan, serta memperluas skala usaha yang dijalankan di destinasi wisata. Ketersediaan sumber pembiayaan seperti kredit usaha, bantuan modal pemerintah, program pembiayaan mikro, serta kemitraan dengan lembaga keuangan dapat membantu pelaku UMKM mengatasi keterbatasan modal yang sering menjadi hambatan utama dalam pengembangan usaha pariwisata (Hermawati, 2024).

Akses terhadap pembiayaan juga memungkinkan UMKM pariwisata melakukan investasi pada fasilitas usaha, inovasi produk wisata, serta pengembangan strategi pemasaran yang lebih efektif sehingga dapat meningkatkan daya saing di pasar pariwisata yang semakin kompetitif. Dukungan keuangan tersebut tidak hanya memperkuat keberlanjutan usaha secara ekonomi, tetapi juga mendorong terciptanya peluang kerja baru dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar destinasi wisata.

c. Pendampingan Usaha dan Inkubasi Bisnis

Pendampingan usaha dan inkubasi bisnis merupakan salah satu bentuk pemberdayaan UMKM pariwisata yang bertujuan

membantu pelaku usaha mengembangkan kapasitas manajerial, memperkuat strategi bisnis, serta meningkatkan daya saing usaha secara berkelanjutan dalam industri pariwisata. Program pendampingan biasanya dilakukan melalui bimbingan teknis, konsultasi bisnis, serta dukungan pengembangan usaha yang diberikan oleh pemerintah, lembaga pendidikan, maupun organisasi pendamping sehingga pelaku UMKM dapat memperoleh arahan dalam mengelola usaha secara lebih profesional (Dhiman & Arora, 2025).

Inkubasi bisnis dalam konteks UMKM pariwisata berfungsi sebagai proses pembinaan yang memberikan berbagai dukungan seperti pelatihan manajemen usaha, akses jaringan bisnis, pengembangan keterampilan kewirausahaan, serta pendampingan dalam perencanaan dan pengembangan produk wisata. Melalui proses inkubasi ini, pelaku UMKM memperoleh kesempatan untuk mengembangkan ide bisnis, memperbaiki model usaha, serta meningkatkan kualitas produk dan layanan wisata agar mampu bersaing di pasar pariwisata yang semakin kompetitif.

d. Digitalisasi dan Pemasaran Produk Wisata

Digitalisasi dan pemasaran produk wisata merupakan salah satu bentuk penting pemberdayaan UMKM pariwisata yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pelaku usaha dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi guna memperluas jangkauan pasar serta meningkatkan daya saing produk wisata. Pemanfaatan platform digital seperti media sosial, marketplace, situs web pariwisata, dan sistem reservasi online memungkinkan pelaku UMKM mempromosikan produk dan layanan wisata secara lebih efektif, menjangkau wisatawan secara luas, serta membangun komunikasi langsung dengan konsumen potensial (Veseli, 2025).

Digitalisasi juga memberikan peluang bagi UMKM pariwisata untuk meningkatkan kualitas pemasaran melalui strategi promosi yang lebih kreatif, interaktif, dan berbasis data sehingga dapat menyesuaikan produk wisata dengan preferensi wisatawan. Melalui penggunaan teknologi digital seperti media sosial, konten visual, ulasan daring, dan kampanye pemasaran digital, pelaku UMKM dapat memperkuat citra produk wisata,

meningkatkan kepercayaan konsumen, serta menciptakan pengalaman wisata yang lebih menarik dan informatif bagi wisatawan.

3. Peran UMKM dalam Pengembangan Pariwisata

Peran UMKM dalam pengembangan pariwisata sangat penting karena keberadaan usaha mikro, kecil, dan menengah mampu mendukung penyediaan berbagai produk dan layanan yang melengkapi pengalaman wisata di suatu destinasi, seperti kuliner khas daerah, kerajinan tradisional, penginapan berbasis masyarakat, serta berbagai jasa wisata lainnya. Produk-produk yang dihasilkan oleh UMKM tidak hanya memperkaya daya tarik destinasi wisata, tetapi juga menciptakan identitas lokal yang khas sehingga wisatawan memperoleh pengalaman yang lebih autentik dan berbeda dari destinasi lainnya (Febrianita *et al*., 2022).

UMKM juga berperan sebagai penggerak utama ekonomi lokal di kawasan wisata karena mampu menyerap tenaga kerja masyarakat sekitar serta meningkatkan perputaran ekonomi di daerah tujuan wisata. Aktivitas usaha yang dijalankan oleh masyarakat lokal melalui UMKM membantu menciptakan peluang kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif yang berkaitan dengan industri pariwisata seperti kerajinan tangan, kuliner tradisional, dan produk budaya lokal.

4. Dampak Pemberdayaan UMKM Pariwisata

Dampak pemberdayaan UMKM pariwisata dapat terlihat dari meningkatnya kapasitas ekonomi masyarakat lokal melalui terciptanya peluang usaha, perluasan lapangan kerja, serta meningkatnya pendapatan masyarakat yang terlibat langsung dalam aktivitas pariwisata. Pemberdayaan tersebut juga mampu memperkuat daya saing destinasi wisata karena keberadaan produk dan layanan UMKM seperti kuliner khas, kerajinan lokal, homestay, serta jasa wisata berbasis komunitas dapat memperkaya pengalaman wisatawan dan memperkuat identitas budaya suatu daerah (Priatmoko *et al*., 2021). Selain memberikan dampak ekonomi, pemberdayaan UMKM pariwisata turut mendorong keberlanjutan pembangunan destinasi melalui keterlibatan masyarakat dalam pelestarian budaya lokal, pemanfaatan sumber daya alam secara

bertanggung jawab, serta terciptanya sistem pariwisata yang lebih inklusif dan berkelanjutan bagi masyarakat sekitar destinasi wisata.

BAB VII
DIMENSI SOSIAL DAN BUDAYA

Dimensi sosial dan budaya merupakan aspek penting dalam memahami dinamika kehidupan masyarakat karena berkaitan dengan nilai, norma, tradisi, serta pola interaksi yang terbentuk dalam suatu komunitas. Perkembangan sosial dan perubahan budaya yang terjadi dalam masyarakat sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti globalisasi, kemajuan teknologi, serta interaksi antar kelompok yang terus berkembang dari waktu ke waktu.

Pemahaman terhadap dimensi sosial dan budaya juga berperan penting dalam menjaga keberagaman, memperkuat identitas masyarakat, serta membangun hubungan sosial yang harmonis di tengah perubahan zaman. Melalui pengelolaan dan pelestarian nilai-nilai budaya yang baik, masyarakat dapat mempertahankan warisan budaya sekaligus menyesuaikannya dengan perkembangan sosial yang terjadi secara berkelanjutan.

A. Dampak Sosial Pariwisata

Dampak sosial pariwisata merujuk pada segala perubahan yang terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat akibat aktivitas pariwisata, baik yang bersifat positif maupun negatif. Kehadiran wisatawan, investasi, dan berbagai kegiatan ekonomi di suatu destinasi akan memengaruhi pola interaksi sosial, struktur komunitas, nilai-nilai yang dianut, hingga cara masyarakat memandang dirinya dan lingkungannya. Dalam konteks pembangunan pariwisata, pemahaman terhadap dampak sosial ini menjadi penting agar manfaat yang muncul dapat dimaksimalkan, sementara potensi masalah sosial dapat diantisipasi dan diminimalkan. Secara umum, dampak sosial pariwisata dapat dilihat dari beberapa aspek berikut:

1. Dampak Sosial Positif Pariwisata

a. Peningkatan Lapangan Pekerjaan dan Kesejahteraan Sosial
Perkembangan sektor pariwisata mampu menciptakan berbagai peluang kerja baru bagi masyarakat lokal melalui pertumbuhan usaha di bidang jasa, perdagangan, transportasi, perhotelan, kuliner, serta industri kreatif yang secara langsung menyerap tenaga kerja dari komunitas sekitar destinasi wisata. Aktivitas ekonomi yang berkembang dari pariwisata juga berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga dan kesejahteraan sosial masyarakat karena sektor ini menjadi salah satu penggerak ekonomi yang mampu memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan pendapatan masyarakat di wilayah destinasi wisata (Hakim, 2025).

b. Penguatan Interaksi Sosial dan Jejaring
Pengembangan pariwisata mendorong terjadinya interaksi sosial yang lebih intens antara masyarakat lokal, wisatawan, serta berbagai pelaku industri pariwisata sehingga tercipta pertukaran budaya, pengalaman, dan pengetahuan yang memperluas wawasan sosial masyarakat di destinasi wisata. Hubungan yang terbentuk melalui aktivitas pariwisata juga memperkuat jaringan sosial dan modal sosial masyarakat karena interaksi yang berkelanjutan dapat menumbuhkan kepercayaan, kerja sama, serta solidaritas antar individu maupun kelompok dalam komunitas lokal (Wahyudi, 2022).

c. Peningkatan Kebanggaan dan Identitas Lokal
Pariwisata yang berkembang di suatu daerah dapat meningkatkan kebanggaan masyarakat terhadap budaya, tradisi, dan kearifan lokal yang dimiliki karena berbagai unsur budaya seperti seni, kuliner, adat istiadat, serta kerajinan tradisional menjadi daya tarik utama yang diperkenalkan kepada wisatawan. Proses pengenalan dan apresiasi dari wisatawan tersebut mendorong masyarakat untuk semakin menghargai warisan budaya sendiri serta memperkuat identitas lokal sebagai bagian penting dari kehidupan sosial dan pembangunan pariwisata berkelanjutan (Suryawan *et al*., 2025)

d. Mendorong Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat
Pariwisata mampu mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai kegiatan pengelolaan destinasi wisata seperti

perencanaan, pengelolaan usaha wisata, hingga pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengembangan wilayah, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi objek tetapi juga pelaku utama dalam pembangunan pariwisata. Keterlibatan tersebut secara bertahap memperkuat proses pemberdayaan masyarakat karena melalui partisipasi dalam kegiatan pariwisata, masyarakat memperoleh kesempatan meningkatkan kapasitas, keterampilan, serta kemandirian ekonomi dan sosial dalam mengelola potensi daerahnya sendiri (Ginanjar, 2023).

2. Dampak Sosial Negatif Pariwisata

a. Perubahan Nilai dan Gaya Hidup

Perkembangan pariwisata dapat memicu perubahan nilai dan gaya hidup masyarakat lokal karena meningkatnya interaksi dengan wisatawan serta masuknya pengaruh budaya luar yang memengaruhi pola konsumsi, cara berpakaian, perilaku sosial, hingga pandangan hidup masyarakat di destinasi wisata. Perubahan tersebut berpotensi menggeser nilai-nilai tradisional yang sebelumnya kuat dalam kehidupan masyarakat, sehingga dalam beberapa kasus dapat menyebabkan berkurangnya praktik budaya lokal dan perubahan perilaku sosial akibat pengaruh modernisasi yang dibawa oleh aktivitas pariwisata (Dinata, 2024).

b. Kesenjangan Sosial dan Konflik Kepentingan

Kesenjangan sosial dan konflik kepentingan dapat muncul sebagai dampak sosial negatif dari perkembangan pariwisata ketika manfaat ekonomi yang dihasilkan tidak terdistribusi secara merata di antara masyarakat lokal, sehingga sebagian kelompok memperoleh keuntungan yang lebih besar sementara kelompok lainnya justru mengalami keterbatasan akses terhadap peluang ekonomi dan sumber daya. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial, persaingan antar kelompok masyarakat, serta konflik kepentingan antara masyarakat lokal, pelaku usaha, dan pihak luar yang terlibat dalam pengelolaan pariwisata, terutama ketika pengembangan pariwisata tidak memperhatikan prinsip keadilan sosial dan partisipasi masyarakat secara merata (Zhang, 2021).

c. Komersialisasi Budaya dan Identitas Lokal
   Komersialisasi budaya dan identitas lokal merupakan salah satu dampak sosial negatif pariwisata yang terjadi ketika unsur-unsur budaya seperti tradisi, ritual, kesenian, maupun simbol budaya lokal dikemas dan dipasarkan sebagai produk wisata untuk memenuhi kebutuhan pasar wisatawan. Proses tersebut berpotensi mengubah makna asli budaya karena praktik budaya sering dimodifikasi agar lebih menarik secara komersial, sehingga nilai sakral, fungsi sosial, dan keaslian budaya dapat berkurang akibat penyesuaian terhadap permintaan pasar pariwisata (Erwen, 2025).
d. Tekanan terhadap Kehidupan Sehari-Hari Masyarakat
   Tekanan terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat merupakan salah satu dampak sosial negatif pariwisata yang muncul ketika jumlah wisatawan yang terus meningkat melebihi kapasitas suatu destinasi sehingga menimbulkan kepadatan, kemacetan lalu lintas, peningkatan harga kebutuhan hidup, serta berkurangnya akses masyarakat lokal terhadap ruang publik dan fasilitas umum. Kondisi tersebut dapat menurunkan kualitas hidup masyarakat karena aktivitas wisata yang padat sering kali mengganggu kenyamanan lingkungan tempat tinggal, meningkatkan kebisingan, serta menimbulkan berbagai tekanan sosial yang memengaruhi kesejahteraan masyarakat di kawasan destinasi wisata (Godovykh, Fyall, & Pizam, 2025)

B. Pelestarian Budaya Lokal

Pelestarian budaya lokal adalah upaya sadar, terencana, dan berkelanjutan untuk menjaga keberlangsungan nilai, tradisi, bahasa, kesenian, adat istiadat, serta warisan pengetahuan yang hidup dalam suatu komunitas. Upaya ini tidak hanya berfokus pada menjaga bentuk fisik seperti rumah adat, pakaian tradisional, atau alat musik, tetapi juga mencakup cara berpikir, pola interaksi, sistem kepercayaan, serta kearifan lokal yang mengatur kehidupan sosial masyarakat. Pelestarian menjadi penting karena budaya lokal adalah identitas kolektif yang membedakan satu kelompok masyarakat dengan kelompok lainnya dan menjadi sumber kebanggaan, jati diri, serta daya tahan sosial di tengah

arus globalisasi. Berikut beberapa bentuk dan upaya pelestarian budaya lokal beserta penjelasannya:

1. Pelestarian Nilai dan Norma Tradisional

Pelestarian nilai dan norma tradisional merupakan proses mempertahankan sistem etika, aturan sosial, serta pedoman perilaku yang telah diwariskan secara turun-temurun dalam kehidupan masyarakat. Nilai dan norma tersebut biasanya tercermin dalam adat istiadat, tradisi lisan, aturan adat, serta praktik kehidupan sehari-hari yang mengatur hubungan antarindividu, hubungan manusia dengan alam, dan tata kehidupan sosial yang harmonis. Sugara dan Perdana (2021) menjelaskan bahwa nilai moral dan sosial dalam tradisi lokal dapat menjadi pedoman perilaku masyarakat seperti sikap disiplin, kesopanan, serta kepedulian terhadap lingkungan yang diwariskan melalui praktik budaya tradisional.

Keberadaan nilai dan norma tradisional berperan penting dalam membentuk karakter masyarakat serta menjaga keteraturan sosial dalam komunitas lokal. Nilai-nilai tersebut biasanya ditanamkan melalui berbagai media budaya seperti cerita rakyat, ritual adat, tradisi lisan, serta kebiasaan sosial yang dilakukan secara berulang dalam kehidupan masyarakat. Proses internalisasi ini membuat anggota masyarakat memahami batasan perilaku yang dianggap baik atau tidak baik sehingga tercipta kehidupan sosial yang tertib, saling menghormati, dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap komunitasnya.

2. Pelestarian Bahasa Daerah

Pelestarian bahasa daerah merupakan upaya menjaga keberlangsungan penggunaan bahasa yang berkembang dalam suatu komunitas sebagai bagian penting dari identitas budaya masyarakat. Bahasa daerah tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi sehari-hari, tetapi juga menjadi media penyampaian nilai, tradisi, pengetahuan lokal, serta berbagai bentuk ekspresi budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Putra dkk. (2025) menyatakan bahwa bahasa daerah merupakan pilar penting identitas budaya masyarakat sehingga revitalisasi dan pemeliharaannya diperlukan untuk menjaga keberlanjutan warisan budaya di tengah tantangan globalisasi dan dominasi bahasa yang lebih luas.

Pelestarian bahasa daerah menjadi semakin penting karena banyak bahasa lokal mengalami penurunan jumlah penutur akibat perubahan sosial, urbanisasi, serta pergeseran penggunaan bahasa ke arah bahasa nasional atau bahasa global. Kondisi tersebut dapat menyebabkan berkurangnya transmisi bahasa dari generasi tua kepada generasi muda sehingga berpotensi menghilangkan berbagai pengetahuan tradisional yang tersimpan di dalam bahasa tersebut. Oleh karena itu, pelestarian bahasa daerah perlu dilakukan melalui berbagai pendekatan seperti penguatan penggunaan bahasa dalam lingkungan keluarga, integrasi bahasa daerah dalam pendidikan formal, serta pengembangan media pembelajaran berbasis budaya lokal.

3. Pelestarian Seni dan Tradisi (Tari, Musik, Teater Rakyat, dan Ritual Adat)

Pelestarian seni dan tradisi seperti tari, musik, teater rakyat, dan ritual adat merupakan upaya menjaga keberlanjutan warisan budaya takbenda yang menjadi bagian penting dari identitas dan kehidupan sosial masyarakat. Bentuk-bentuk seni tradisional tersebut tidak hanya berfungsi sebagai hiburan atau ekspresi estetika, tetapi juga mengandung nilai spiritual, simbolik, serta pengetahuan budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi melalui praktik pertunjukan dan kegiatan adat. Pradana (2021) menjelaskan bahwa keberlangsungan seni pertunjukan tradisional sangat bergantung pada proses regenerasi dan transmisi pengetahuan budaya kepada generasi muda agar praktik seni tersebut tetap hidup dan tidak mengalami kepunahan.

Pelestarian seni dan tradisi dilakukan melalui berbagai cara seperti pembinaan sanggar seni, penyelenggaraan festival budaya, pendidikan seni di sekolah, serta dokumentasi karya budaya dalam bentuk arsip audiovisual. Kegiatan pertunjukan tari tradisional, musik daerah, dan teater rakyat secara rutin menjadi sarana penting untuk menjaga eksistensi kesenian sekaligus memperkenalkan nilai-nilai budaya kepada masyarakat luas. Praktik ritual adat yang masih dijalankan dalam berbagai upacara tradisional juga berfungsi sebagai media pewarisan nilai spiritual, norma sosial, serta identitas kolektif yang memperkuat solidaritas komunitas.

4. Pelestarian Peninggalan Fisik dan Warisan Budaya Benda

Pelestarian peninggalan fisik dan warisan budaya benda merupakan upaya menjaga, melindungi, dan merawat berbagai bentuk peninggalan material yang memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, maupun kebudayaan masyarakat. Warisan budaya benda dapat berupa bangunan bersejarah, situs arkeologi, artefak, monumen, benda pusaka, maupun kawasan cagar budaya yang menjadi bukti nyata perjalanan peradaban manusia dari masa ke masa. Lubis (2024) menjelaskan bahwa warisan budaya material seperti bangunan, situs, dan benda bersejarah perlu dilindungi dan dilestarikan karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, serta penguatan identitas budaya suatu bangsa.

Pelestarian peninggalan fisik tidak hanya berfokus pada menjaga bentuk asli bangunan atau benda bersejarah, tetapi juga mencakup upaya dokumentasi, konservasi, restorasi, serta pengelolaan yang berkelanjutan agar warisan tersebut tetap dapat dimanfaatkan oleh generasi sekarang dan masa depan. Proses konservasi dilakukan melalui perawatan berkala, penguatan struktur bangunan, perlindungan terhadap kerusakan akibat faktor alam maupun aktivitas manusia, serta penataan kawasan cagar budaya secara terencana. Selain itu, keterlibatan masyarakat, akademisi, dan pemerintah menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan pelestarian karena pengelolaan warisan budaya memerlukan dukungan regulasi, sumber daya, serta kesadaran kolektif terhadap pentingnya menjaga peninggalan sejarah.

5. Pelestarian Pengetahuan Lokal dan Kearifan Lingkungan

Pelestarian pengetahuan lokal dan kearifan lingkungan merupakan upaya menjaga serta meneruskan berbagai bentuk pengetahuan tradisional yang berkembang dari pengalaman panjang masyarakat dalam berinteraksi dengan alam. Pengetahuan tersebut biasanya tercermin dalam praktik-praktik tradisional seperti sistem pertanian lokal, pengelolaan hutan adat, aturan pemanfaatan sumber daya alam, serta berbagai tradisi yang mengatur hubungan harmonis antara manusia dan lingkungannya. Nugroho (2023) menjelaskan bahwa pengetahuan lokal yang diwariskan secara turun-temurun memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan keberlanjutan sumber daya alam karena praktik tersebut terbentuk

melalui pengalaman ekologis yang panjang dalam kehidupan masyarakat tradisional.

Pengetahuan lokal dan kearifan lingkungan berkembang sebagai hasil adaptasi masyarakat terhadap kondisi alam, iklim, serta sumber daya yang tersedia di wilayah tempatnya hidup. Berbagai praktik seperti rotasi tanaman, pengelolaan sumber air tradisional, pemanfaatan tanaman obat, serta aturan adat mengenai larangan eksploitasi berlebihan terhadap alam merupakan contoh nyata dari sistem pengetahuan yang mendukung keberlanjutan lingkungan. Nilai-nilai tersebut biasanya diwariskan melalui tradisi lisan, praktik keseharian, ritual adat, maupun proses pembelajaran informal dalam keluarga dan komunitas sehingga menjadi bagian penting dari identitas budaya masyarakat.

C. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat

Pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu prinsip penting dalam pariwisata berkelanjutan yang menempatkan masyarakat lokal sebagai pelaku utama dalam pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata. Pendekatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas masyarakat agar mampu berpartisipasi aktif, memperoleh manfaat ekonomi, serta menjaga keberlanjutan sosial, budaya, dan lingkungan di wilayah destinasi.

Upaya pemberdayaan masyarakat dalam sektor pariwisata tidak hanya berfokus pada peningkatan pendapatan, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta terciptanya kemandirian ekonomi masyarakat lokal. Kesejahteraan masyarakat dapat tercapai apabila kegiatan pariwisata memberikan manfaat yang adil, membuka kesempatan kerja, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

1. Peningkatan Kapasitas dan Keterampilan Masyarakat

Peningkatan kapasitas dan keterampilan masyarakat merupakan upaya penting dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan karena masyarakat lokal perlu memiliki kemampuan yang memadai agar dapat terlibat secara aktif dalam kegiatan ekonomi, sosial, dan pengelolaan destinasi wisata. Penguatan kapasitas ini dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, serta pendampingan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai pelayanan wisata, manajemen usaha,

pengelolaan sumber daya lokal, serta pemanfaatan potensi budaya dan lingkungan secara bertanggung jawab. Menurut Scheyvens (2020), pemberdayaan masyarakat dalam pariwisata terjadi ketika masyarakat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kepercayaan diri untuk berpartisipasi serta mengendalikan proses pembangunan pariwisata di wilayahnya.

Peningkatan keterampilan masyarakat juga berperan dalam menciptakan peluang ekonomi yang lebih luas karena masyarakat yang memiliki kompetensi akan lebih mampu mengembangkan usaha pariwisata seperti homestay, kuliner lokal, kerajinan tangan, serta jasa pemandu wisata. Kemampuan tersebut mendorong masyarakat untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan sehingga mampu bersaing dalam industri pariwisata yang semakin berkembang. Penguatan kapasitas masyarakat pada akhirnya tidak hanya meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi, tetapi juga memperkuat keberlanjutan destinasi wisata karena masyarakat memiliki peran langsung dalam menjaga lingkungan, melestarikan budaya, serta mengelola potensi wisata secara berkelanjutan.

2. Penciptaan Kesempatan Kerja dan Usaha Lokal

Penciptaan kesempatan kerja dan usaha lokal merupakan salah satu manfaat utama dari pengembangan pariwisata berkelanjutan karena aktivitas wisata mendorong munculnya berbagai peluang ekonomi bagi masyarakat yang tinggal di sekitar destinasi. Kehadiran wisatawan meningkatkan kebutuhan terhadap berbagai layanan seperti akomodasi, transportasi, kuliner, pemandu wisata, serta penjualan produk kerajinan dan produk lokal lainnya yang dapat dikelola langsung oleh masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata mampu memperkuat ekonomi lokal melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar destinasi wisata (Prayoga *et al*., 2024).

Kesempatan kerja yang tercipta dari sektor pariwisata tidak hanya berasal dari pekerjaan formal seperti karyawan hotel atau pemandu wisata, tetapi juga dari berbagai usaha berbasis komunitas seperti homestay, usaha kuliner tradisional, jasa transportasi lokal, dan penjualan produk budaya. Kegiatan pariwisata yang melibatkan masyarakat lokal juga mendorong terbentuknya rantai ekonomi lokal yang lebih kuat karena pendapatan yang diperoleh dari wisatawan dapat

berputar di dalam masyarakat setempat dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Penciptaan usaha lokal berbasis pariwisata pada akhirnya membantu meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas peluang kewirausahaan, serta memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat di kawasan destinasi wisata.

3. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Pariwisata

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pariwisata merupakan elemen penting dalam mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan karena masyarakat lokal memiliki pengetahuan, pengalaman, serta kepentingan langsung terhadap keberlanjutan sumber daya yang menjadi daya tarik wisata. Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, serta pelaksanaan kegiatan pariwisata dapat meningkatkan rasa memiliki terhadap destinasi sehingga masyarakat terdorong untuk menjaga kelestarian lingkungan, budaya, dan nilai sosial yang ada di wilayahnya. Menurut Tosun (2020), partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata memungkinkan masyarakat lokal untuk memiliki peran dalam menentukan arah pembangunan pariwisata sehingga manfaat ekonomi, sosial, dan budaya dapat dirasakan secara lebih adil oleh komunitas setempat.

Partisipasi masyarakat juga dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk keterlibatan seperti pembentukan kelompok sadar wisata, pengelolaan atraksi wisata berbasis komunitas, serta keterlibatan dalam pengawasan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan pariwisata. Keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi dapat meningkatkan kualitas pengelolaan pariwisata karena keputusan yang diambil lebih sesuai dengan kebutuhan lokal dan mempertimbangkan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Partisipasi yang aktif dan inklusif pada akhirnya mampu memperkuat keberlanjutan destinasi wisata karena masyarakat tidak hanya menjadi penerima dampak pariwisata, tetapi juga menjadi aktor utama dalam menjaga, mengelola, dan mengembangkan potensi wisata secara bertanggung jawab.

4. Pemerataan Manfaat Ekonomi Pariwisata

Pemerataan manfaat ekonomi pariwisata merupakan prinsip penting dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan karena kegiatan pariwisata seharusnya memberikan keuntungan yang adil bagi berbagai kelompok masyarakat yang terlibat di dalamnya. Aktivitas wisata dapat

menghasilkan pendapatan melalui berbagai sektor seperti akomodasi, transportasi, kuliner, serta penjualan produk lokal sehingga peluang ekonomi tidak hanya dinikmati oleh investor atau pelaku usaha besar, tetapi juga oleh masyarakat lokal yang tinggal di sekitar destinasi wisata. Menurut Dorta-González dan González-Betancor (2021), sektor pariwisata memiliki kontribusi signifikan terhadap pendapatan ekonomi melalui berbagai subsektor industri wisata yang menciptakan peluang kerja dan distribusi pendapatan bagi masyarakat yang terlibat di dalamnya.

Pemerataan manfaat ekonomi juga berkaitan dengan upaya memastikan bahwa masyarakat lokal memiliki akses terhadap peluang usaha dan pekerjaan yang muncul dari perkembangan pariwisata. Strategi seperti pemberdayaan usaha mikro dan kecil, penggunaan tenaga kerja lokal, serta penguatan rantai ekonomi lokal dapat membantu meningkatkan distribusi pendapatan secara lebih merata di dalam masyarakat. Distribusi manfaat yang adil dari sektor pariwisata tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga memperkuat dukungan masyarakat terhadap pengembangan destinasi wisata serta mendorong keberlanjutan ekonomi dan sosial di kawasan pariwisata.

5. Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat

Peningkatan kualitas hidup masyarakat merupakan salah satu tujuan penting dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan karena kegiatan pariwisata dapat memberikan dampak positif terhadap kondisi ekonomi, sosial, dan lingkungan masyarakat lokal. Perkembangan destinasi wisata sering mendorong peningkatan infrastruktur seperti jalan, fasilitas umum, layanan transportasi, serta akses terhadap berbagai layanan sosial yang pada akhirnya dapat memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat di sekitar kawasan wisata. Penelitian menunjukkan bahwa pembangunan pariwisata berkelanjutan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat lokal melalui perbaikan fasilitas serta peningkatan aktivitas ekonomi di wilayah destinasi wisata (Sya'ban, 2025).

Peningkatan kualitas hidup masyarakat juga berkaitan dengan meningkatnya peluang pendapatan, kesempatan kerja, serta akses masyarakat terhadap pendidikan dan keterampilan yang mendukung aktivitas ekonomi lokal. Keberadaan sektor pariwisata mendorong masyarakat untuk terlibat dalam berbagai kegiatan usaha seperti

penyediaan akomodasi, usaha kuliner, jasa transportasi, maupun pengembangan produk budaya yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dampak tersebut tidak hanya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, tetapi juga memperkuat kebanggaan terhadap budaya lokal serta mendorong masyarakat untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan sumber daya wisata yang menjadi bagian dari kehidupan.

D. Pariwisata Inklusif dan Berkeadilan

Pariwisata inklusif dan berkeadilan merupakan pendekatan dalam pengembangan sektor pariwisata yang menekankan keterlibatan semua kelompok masyarakat serta distribusi manfaat yang adil dari kegiatan pariwisata. Konsep ini memastikan bahwa pengembangan destinasi wisata tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan sosial, penghormatan terhadap budaya lokal, serta akses yang setara bagi setiap individu untuk berpartisipasi dan menikmati kegiatan pariwisata. Pariwisata inklusif memberikan ruang bagi semua pihak, termasuk masyarakat lokal, kelompok rentan, penyandang disabilitas, perempuan, serta pelaku usaha kecil untuk terlibat dalam sistem pariwisata. Pendekatan ini juga menekankan bahwa manfaat ekonomi yang dihasilkan dari pariwisata harus dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat di sekitar destinasi wisata.

Pariwisata yang berkeadilan juga berkaitan dengan bagaimana kebijakan dan praktik pengelolaan pariwisata dilakukan secara transparan dan partisipatif. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya ketimpangan manfaat antara investor besar dan masyarakat lokal. Melalui konsep ini, pembangunan pariwisata diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan budaya. Selain itu, pendekatan ini juga mendorong terciptanya hubungan yang harmonis antara wisatawan, masyarakat lokal, dan pengelola destinasi wisata.

1. Karakteristik Pariwisata Inklusif dan Berkeadilan

Karakteristik pariwisata inklusif dan berkeadilan mencerminkan sistem pengelolaan pariwisata yang memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh kelompok masyarakat untuk berpartisipasi serta memperoleh manfaat dari aktivitas pariwisata. Pariwisata yang inklusif

menempatkan aksesibilitas sebagai salah satu unsur utama, yaitu menyediakan fasilitas, layanan, dan informasi wisata yang dapat digunakan oleh berbagai kelompok seperti penyandang disabilitas, lansia, maupun kelompok rentan sehingga semua individu dapat menikmati pengalaman wisata tanpa hambatan. Gillovic dan McIntosh menyatakan bahwa pariwisata inklusif merupakan bentuk pariwisata yang memastikan individu dari berbagai usia, jenis kelamin, dan kondisi fisik dapat berpartisipasi secara penuh dalam aktivitas pariwisata melalui penyediaan layanan dan fasilitas yang dapat diakses oleh semua orang (Gillovic & McIntosh, 2020).

Karakteristik lainnya terlihat pada keterlibatan aktif masyarakat lokal dalam proses pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata. Keterlibatan ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya menjadi objek pariwisata, tetapi juga berperan sebagai pelaku utama yang memiliki kesempatan untuk mengembangkan usaha, menyediakan jasa wisata, serta berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan destinasi. Kondisi tersebut mendorong terbentuknya hubungan yang lebih seimbang antara wisatawan, pengelola destinasi, dan masyarakat setempat sehingga kegiatan pariwisata dapat memberikan dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas bagi komunitas lokal.

2. Prinsip-prinsip Pariwisata Inklusif dan Berkeadilan

Pada praktiknya, pengembangan pariwisata inklusif dan berkeadilan didasarkan pada beberapa prinsip penting yang menjadi pedoman dalam pengelolaan destinasi wisata.

a. Prinsip Kesetaraan
   Setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat dalam aktivitas pariwisata dan memperoleh manfaat dari sektor tersebut.
b. Prinsip Pemberdayaan Masyarakat
   Masyarakat lokal diberikan kesempatan untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan sehingga mampu berperan aktif dalam industri pariwisata.
c. Prinsip Partisipasi
   Proses perencanaan dan pengambilan keputusan dalam pengembangan pariwisata melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal.

d. Prinsip Transparansi

Pengelolaan kegiatan pariwisata dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

3. Manfaat Pariwisata Inklusif dan Berkeadilan

Pariwisata inklusif dan berkeadilan memberikan manfaat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena membuka kesempatan yang lebih luas bagi berbagai kelompok untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi pariwisata. Scheyvens menjelaskan bahwa pendekatan pariwisata yang inklusif mampu memperluas distribusi manfaat ekonomi kepada masyarakat lokal, terutama kelompok yang sebelumnya kurang memiliki akses terhadap peluang ekonomi dalam sektor pariwisata (Scheyvens, 2021).

Manfaat lainnya terlihat pada penguatan kohesi sosial dan pelestarian budaya lokal karena pariwisata yang berkeadilan mendorong interaksi yang saling menghargai antara wisatawan dan masyarakat setempat serta memberikan ruang bagi komunitas untuk mempertahankan identitas budaya. Penerapan konsep ini juga berkontribusi terhadap pembangunan destinasi wisata yang berkelanjutan karena masyarakat lokal merasa memiliki peran dan tanggung jawab dalam menjaga kelestarian lingkungan, budaya, serta keberlangsungan aktivitas pariwisata di wilayahnya.

4. Upaya Implementasi Pariwisata Inklusif dan Berkeadilan

Upaya implementasi pariwisata inklusif dan berkeadilan dapat dilakukan melalui penyusunan kebijakan dan perencanaan pariwisata yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, pelaku usaha, masyarakat lokal, serta kelompok rentan agar setiap pihak memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pengembangan destinasi wisata. World Tourism Organization menjelaskan bahwa pengembangan pariwisata yang inklusif perlu didukung oleh kebijakan yang memastikan aksesibilitas destinasi, partisipasi masyarakat, serta distribusi manfaat ekonomi yang lebih merata bagi komunitas lokal (UNWTO, 2020).

Upaya implementasi lainnya dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia masyarakat lokal melalui program pelatihan, pendidikan pariwisata, serta pemberdayaan usaha mikro dan kecil agar mampu terlibat secara aktif dalam kegiatan

ekonomi pariwisata. Penyediaan fasilitas wisata yang ramah bagi semua kelompok masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, lansia, dan anak-anak, juga menjadi langkah penting dalam menciptakan destinasi wisata yang terbuka, adil, serta mampu memberikan pengalaman wisata yang setara bagi setiap pengunjung.

BAB VIII
MANAJEMEN LINGKUNGAN DALAM PARIWISATA

Manajemen lingkungan dalam pariwisata merupakan upaya yang dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara kegiatan pariwisata dengan kelestarian lingkungan alam maupun sosial di suatu destinasi. Pengelolaan ini menjadi penting karena perkembangan sektor pariwisata yang pesat dapat menimbulkan berbagai dampak terhadap ekosistem, sumber daya alam, serta kehidupan masyarakat lokal apabila tidak dikelola secara berkelanjutan.

Penerapan manajemen lingkungan dalam pariwisata bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas wisata tetap memberikan manfaat ekonomi tanpa merusak kualitas lingkungan dan daya tarik destinasi. Pendekatan ini menekankan pada pengelolaan sumber daya secara bijaksana, pengendalian dampak negatif, serta peningkatan kesadaran seluruh pemangku kepentingan terhadap pentingnya keberlanjutan lingkungan dalam pembangunan pariwisata.

A. Konservasi dan Keanekaragaman Hayati

Konservasi dan keanekaragaman hayati merupakan konsep penting dalam pengelolaan lingkungan yang bertujuan untuk menjaga keberlangsungan berbagai bentuk kehidupan di bumi. Keanekaragaman hayati merujuk pada variasi makhluk hidup yang meliputi keragaman genetik, keragaman spesies, dan keragaman ekosistem yang saling berinteraksi dalam suatu lingkungan tertentu. Keberadaan keanekaragaman hayati memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekosistem serta mendukung berbagai proses alami yang menopang kehidupan manusia. Dalam konteks pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam, keberagaman hayati juga memiliki nilai ekonomi, sosial, ilmiah, dan estetika yang sangat besar.

Konservasi sendiri merupakan upaya perlindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana agar tetap lestari dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Konservasi tidak hanya

berfokus pada perlindungan terhadap spesies yang terancam punah, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap habitat alami dan keseimbangan ekosistem secara keseluruhan. Pengelolaan yang tepat akan memastikan bahwa interaksi antara manusia dan lingkungan dapat berlangsung secara harmonis tanpa menyebabkan kerusakan yang berkelanjutan. Upaya konservasi juga bertujuan untuk mempertahankan fungsi ekologis lingkungan sehingga sumber daya alam tetap tersedia bagi generasi mendatang.

1. Tingkatan Keanekaragaman Hayati

Keanekaragaman hayati dapat dipahami melalui beberapa tingkatan yang menunjukkan kompleksitas kehidupan di alam.

a. Keanekaragaman Genetik

Keanekaragaman genetik merupakan salah satu tingkatan dalam keanekaragaman hayati yang menunjukkan variasi susunan gen yang terdapat pada individu-individu dalam satu spesies makhluk hidup. Variasi genetik ini menyebabkan adanya perbedaan karakteristik pada setiap individu, seperti perbedaan bentuk fisik, warna, ukuran, ketahanan terhadap penyakit, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan, sehingga keberagaman gen menjadi faktor penting yang menentukan kemampuan suatu populasi untuk bertahan dan berkembang dalam berbagai kondisi ekosistem yang berbeda.

Keberadaan keanekaragaman genetik juga memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga keberlangsungan suatu spesies karena variasi gen memberikan peluang bagi organisme untuk beradaptasi terhadap perubahan lingkungan, tekanan ekologis, maupun ancaman penyakit yang dapat mengganggu stabilitas populasi. Keanekaragaman genetik memungkinkan proses evolusi berlangsung secara alami sehingga spesies dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka panjang, karena menurut Primack (2020) keanekaragaman genetik merupakan variasi gen dalam suatu populasi yang menjadi dasar kemampuan organisme untuk beradaptasi dan berevolusi dalam menghadapi perubahan lingkungan.

b. Keanekaragaman Spesies

Keanekaragaman spesies merupakan salah satu tingkatan penting dalam keanekaragaman hayati yang menunjukkan variasi

jenis makhluk hidup yang terdapat dalam suatu wilayah atau ekosistem tertentu, baik berupa tumbuhan, hewan, maupun mikroorganisme yang hidup dan berinteraksi satu sama lain dalam suatu lingkungan alami. Tingkat keanekaragaman spesies biasanya dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi iklim, ketersediaan sumber daya alam, luas wilayah habitat, serta interaksi ekologis yang terjadi di dalam ekosistem sehingga semakin banyak jenis organisme yang hidup dalam suatu wilayah maka semakin tinggi pula tingkat keanekaragaman spesies yang dimiliki oleh ekosistem tersebut.

Keanekaragaman spesies memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga stabilitas dan keseimbangan ekosistem karena setiap spesies memiliki fungsi ekologis tertentu seperti sebagai produsen, konsumen, maupun pengurai yang saling mendukung dalam rantai makanan dan siklus energi di alam. Keberadaan berbagai jenis spesies dalam suatu ekosistem juga meningkatkan ketahanan lingkungan terhadap gangguan alam maupun aktivitas manusia, karena menurut Cardinale (2020) keanekaragaman spesies berkontribusi secara signifikan terhadap stabilitas ekosistem, produktivitas biologis, serta kemampuan ekosistem dalam mempertahankan fungsi ekologisnya ketika menghadapi perubahan lingkungan.

c. Keanekaragaman Ekosistem

Keanekaragaman ekosistem merupakan salah satu tingkatan dalam keanekaragaman hayati yang menggambarkan variasi berbagai jenis ekosistem yang terdapat di suatu wilayah, yang masing-masing memiliki karakteristik lingkungan, komposisi organisme, serta proses ekologis yang berbeda. Perbedaan kondisi fisik seperti iklim, topografi, jenis tanah, ketersediaan air, serta faktor lingkungan lainnya menyebabkan terbentuknya berbagai tipe ekosistem seperti hutan tropis, padang rumput, ekosistem pesisir, ekosistem laut, dan ekosistem pegunungan yang masing-masing mendukung kehidupan berbagai komunitas makhluk hidup dengan pola interaksi yang khas.

Keanekaragaman ekosistem memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan karena setiap ekosistem menyediakan berbagai fungsi ekologis seperti penyediaan habitat bagi organisme, pengaturan siklus air, penyimpanan karbon, serta

perlindungan terhadap berbagai gangguan lingkungan. Keberadaan berbagai jenis ekosistem juga meningkatkan ketahanan lingkungan terhadap perubahan alam maupun aktivitas manusia, karena menurut Chapin (2020) keanekaragaman ekosistem mencerminkan variasi sistem ekologi yang terbentuk dari interaksi antara organisme hidup dengan lingkungan fisiknya yang secara bersama-sama menentukan fungsi dan stabilitas lingkungan dalam jangka panjang.

2. Bentuk-bentuk Konservasi Keanekaragaman Hayati

Upaya konservasi keanekaragaman hayati dilakukan melalui berbagai pendekatan yang bertujuan untuk melindungi spesies dan habitatnya.

a. Konservasi In-Situ

Konservasi in-situ merupakan salah satu bentuk konservasi keanekaragaman hayati yang dilakukan dengan melindungi dan mengelola spesies makhluk hidup secara langsung di habitat alaminya sehingga proses ekologis, interaksi antarorganisme, serta dinamika lingkungan dapat berlangsung secara alami tanpa perubahan yang signifikan. Pendekatan ini bertujuan mempertahankan keberlangsungan populasi flora dan fauna beserta ekosistemnya melalui perlindungan kawasan alami seperti taman nasional, cagar alam, suaka margasatwa, kawasan konservasi laut, dan hutan lindung yang dikelola dengan berbagai kebijakan perlindungan lingkungan.

Pelaksanaan konservasi in-situ juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem karena perlindungan habitat memungkinkan berbagai spesies untuk tetap menjalankan fungsi ekologisnya seperti penyerbukan, penyebaran biji, serta hubungan dalam rantai makanan yang mendukung stabilitas lingkungan. Metode ini dianggap sebagai strategi konservasi yang paling efektif karena mempertahankan kondisi lingkungan yang mendukung keberlangsungan hidup spesies secara alami, karena menurut Primack (2020) konservasi in-situ merupakan upaya pelestarian spesies yang dilakukan di dalam habitat alaminya dengan tujuan menjaga populasi organisme sekaligus mempertahankan proses ekologis yang terjadi di dalam ekosistem tersebut.

b. Konservasi Ex-Situ

Konservasi ex-situ merupakan salah satu bentuk konservasi keanekaragaman hayati yang dilakukan dengan cara melindungi dan memelihara spesies makhluk hidup di luar habitat alaminya dengan tujuan menjaga kelangsungan hidup organisme yang populasinya terancam atau mengalami kerusakan habitat di alam. Upaya ini biasanya dilakukan melalui berbagai fasilitas konservasi seperti kebun botani, kebun binatang, taman safari, pusat penangkaran satwa, bank benih, serta bank genetik yang memungkinkan spesies tertentu untuk tetap dipelihara, dikembangbiakkan, dan diteliti dalam lingkungan yang terkontrol.

Pelaksanaan konservasi ex-situ juga berfungsi sebagai langkah penyelamatan bagi spesies yang berada dalam kondisi kritis sekaligus sebagai sarana penelitian, pendidikan, dan pengembangan ilmu pengetahuan terkait pelestarian keanekaragaman hayati. Pendekatan ini memungkinkan para peneliti dan pengelola konservasi untuk mempelajari karakteristik biologis, teknik reproduksi, serta strategi pemulihan populasi suatu spesies secara lebih intensif sebelum dilakukan upaya pelepasliaran kembali ke habitat alaminya, karena menurut Primack (2020) konservasi ex-situ merupakan metode pelestarian spesies yang dilakukan di luar habitat alami organisme dengan tujuan menjaga keberlangsungan populasi serta mendukung upaya pemulihan spesies yang terancam punah.

3. Tujuan Konservasi Keanekaragaman Hayati

Tujuan konservasi keanekaragaman hayati berkaitan dengan upaya melindungi berbagai bentuk kehidupan di bumi agar keberadaan spesies, keragaman genetik, serta ekosistem alami tetap terjaga dan mampu menjalankan fungsi ekologisnya secara berkelanjutan. Perlindungan tersebut sangat penting karena keanekaragaman hayati berperan dalam menjaga keseimbangan lingkungan, menyediakan sumber daya alam bagi kehidupan manusia, serta mendukung berbagai proses ekologis seperti siklus nutrien, kestabilan iklim, dan produktivitas ekosistem yang menjadi dasar keberlangsungan kehidupan di planet ini.

Konservasi keanekaragaman hayati juga bertujuan untuk mencegah terjadinya penurunan populasi spesies dan kerusakan ekosistem akibat aktivitas manusia seperti eksploitasi sumber daya alam, perubahan tata guna lahan, serta dampak perubahan iklim yang semakin meningkat. Pentingnya tujuan tersebut ditegaskan oleh Van Dyke (2020) yang menyatakan bahwa konservasi keanekaragaman hayati bertujuan untuk mencegah hilangnya biodiversitas melalui perlindungan spesies, pemeliharaan ekosistem, serta pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan agar fungsi ekologis bumi tetap dapat dipertahankan bagi generasi sekarang dan masa depan.

4. Strategi Pelestarian Keanekaragaman Hayati

Strategi pelestarian keanekaragaman hayati merupakan serangkaian langkah terencana yang dilakukan untuk melindungi, mempertahankan, serta memulihkan berbagai bentuk kehidupan di bumi agar tetap dapat menjalankan fungsi ekologisnya secara optimal dalam suatu ekosistem. Strategi ini mencakup upaya perlindungan habitat alami, pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, pengendalian aktivitas manusia yang merusak lingkungan, serta penguatan kebijakan dan regulasi yang mendukung keberlanjutan sumber daya hayati sehingga keberadaan flora dan fauna dapat terus dipertahankan dalam jangka panjang.

Pelaksanaan strategi pelestarian keanekaragaman hayati juga melibatkan berbagai pendekatan yang saling terintegrasi seperti konservasi kawasan lindung, rehabilitasi ekosistem yang mengalami kerusakan, pengembangan penelitian ilmiah, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan hidup. Strategi tersebut menjadi sangat penting karena meningkatnya tekanan terhadap lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam, perubahan iklim, serta alih fungsi lahan yang dapat mengancam keberlangsungan spesies dan keseimbangan ekosistem.

5. Pentingnya Konservasi Keanekaragaman Hayati dalam Pariwisata

Pentingnya konservasi keanekaragaman hayati dalam pariwisata berkaitan erat dengan keberadaan sumber daya alam yang menjadi daya tarik utama dalam pengembangan destinasi wisata berbasis alam, seperti hutan tropis, kawasan pesisir, taman nasional, serta ekosistem laut yang

kaya akan flora dan fauna. Keberagaman hayati yang terjaga dengan baik mampu meningkatkan kualitas lingkungan destinasi wisata, menciptakan pengalaman wisata yang lebih menarik bagi wisatawan, serta memberikan nilai ekonomi yang berkelanjutan melalui pengembangan pariwisata alam, ekowisata, dan wisata konservasi yang tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Konservasi keanekaragaman hayati juga berperan penting dalam memastikan bahwa aktivitas pariwisata tidak merusak ekosistem yang menjadi dasar keberlanjutan sektor tersebut, karena kerusakan lingkungan seperti hilangnya habitat, pencemaran, atau eksploitasi sumber daya alam dapat mengurangi daya tarik destinasi wisata dan menurunkan kualitas lingkungan secara keseluruhan. Pentingnya hubungan antara konservasi biodiversitas dan pariwisata dijelaskan oleh Duarte *et al*. (2024) yang menyatakan bahwa pariwisata berbasis alam memiliki potensi besar untuk mendukung perlindungan keanekaragaman hayati melalui pengelolaan destinasi yang berkelanjutan serta melalui kontribusi ekonomi yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan konservasi dan pemeliharaan ekosistem alami.

B. Pengelolaan Limbah dan Energi

Pengelolaan limbah dan energi merupakan bagian penting dalam manajemen lingkungan yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif aktivitas manusia terhadap lingkungan serta meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya alam. Dalam sektor pembangunan dan pariwisata, aktivitas operasional seperti penggunaan energi listrik, air, bahan bakar, serta produksi limbah padat dan cair dapat menimbulkan tekanan terhadap lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, pengelolaan limbah dan energi menjadi langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan lingkungan, mengurangi pencemaran, serta meningkatkan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya. Penerapan pengelolaan yang efektif tidak hanya berfokus pada pengurangan limbah, tetapi juga pada penggunaan energi yang lebih efisien dan ramah lingkungan.

1. Pengelolaan Limbah

Pengelolaan limbah merupakan proses pengendalian, pengurangan, pengolahan, dan pemanfaatan kembali limbah yang

dihasilkan dari aktivitas manusia agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Limbah dapat berasal dari berbagai sumber seperti aktivitas rumah tangga, industri, pariwisata, maupun kegiatan komersial lainnya. Pengelolaan limbah yang baik bertujuan untuk meminimalkan volume limbah yang dibuang ke lingkungan serta memaksimalkan pemanfaatan kembali bahan yang masih memiliki nilai guna.

a. Jenis-jenis Limbah

1) Limbah Padat

Limbah padat merupakan salah satu jenis limbah yang dihasilkan dari berbagai aktivitas manusia maupun proses alam yang berbentuk fisik padat dan biasanya sudah tidak digunakan lagi sehingga dibuang ke lingkungan. Limbah ini dapat berasal dari berbagai sumber seperti kegiatan rumah tangga, industri, perdagangan, pertanian, maupun sektor pariwisata yang menghasilkan sisa bahan seperti plastik, kertas, logam, kaca, kayu, sisa makanan, serta berbagai material lainnya yang apabila tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan pencemaran lingkungan dan gangguan terhadap kesehatan manusia.

Keberadaan limbah padat menjadi perhatian penting dalam pengelolaan lingkungan karena volumenya terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk, perkembangan ekonomi, serta meningkatnya pola konsumsi masyarakat modern yang cenderung menghasilkan lebih banyak sampah. Limbah padat juga memiliki karakteristik yang beragam, mulai dari bahan organik yang mudah terurai secara alami hingga bahan anorganik yang sulit terurai seperti plastik dan logam, sehingga memerlukan sistem pengelolaan yang tepat agar tidak menimbulkan penumpukan limbah dan kerusakan lingkungan yang lebih luas, karena menurut Tchobanoglous (2020) limbah padat merupakan material sisa dari aktivitas manusia atau hewan yang dibuang karena tidak lagi diinginkan atau tidak dapat dimanfaatkan kembali sehingga memerlukan pengelolaan yang tepat agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

2) Limbah Cair

Limbah cair merupakan sisa buangan dari berbagai aktivitas manusia yang berbentuk cair dan biasanya mengandung berbagai zat pencemar baik yang bersifat organik maupun anorganik yang

dapat mempengaruhi kualitas lingkungan apabila dibuang secara langsung tanpa melalui proses pengolahan terlebih dahulu. Limbah ini umumnya berasal dari kegiatan rumah tangga, industri, perkantoran, pertanian, maupun sektor jasa seperti hotel dan restoran, sehingga kandungan di dalamnya sering mengandung bahan kimia, mikroorganisme, minyak, deterjen, serta berbagai zat terlarut maupun tersuspensi yang berpotensi mencemari perairan dan mengganggu keseimbangan ekosistem.

Keberadaan limbah cair menjadi perhatian penting dalam pengelolaan lingkungan karena dapat menyebabkan berbagai dampak negatif seperti pencemaran sungai, danau, dan laut yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kesehatan manusia, organisme air, serta kualitas sumber daya air yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Limbah cair juga sering mengandung zat berbahaya seperti logam berat, bahan kimia industri, serta senyawa organik yang sulit terurai sehingga memerlukan sistem pengolahan yang tepat sebelum dibuang ke lingkungan, karena menurut Metcalf & Eddy (2020) air limbah merupakan kombinasi cairan buangan yang berasal dari rumah tangga, kegiatan komersial, dan industri yang sering bercampur dengan air tanah, air permukaan, serta air hujan sehingga mengandung berbagai bahan pencemar yang perlu diolah sebelum dilepaskan ke lingkungan.

3) Limbah Organik

Limbah organik merupakan jenis limbah yang berasal dari sisa makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, maupun aktivitas manusia yang secara alami dapat terurai melalui proses biologis oleh mikroorganisme di lingkungan. Limbah ini umumnya dihasilkan dari berbagai kegiatan seperti rumah tangga, pertanian, pasar tradisional, industri makanan, serta sektor pariwisata yang menghasilkan sisa makanan, dedaunan, ranting, kulit buah, serta bahan-bahan alami lainnya yang mudah mengalami pembusukan dan penguraian secara alami.

Karakteristik utama limbah organik adalah kemampuannya untuk terurai secara alami melalui proses dekomposisi sehingga dapat kembali menjadi bagian dari siklus ekologi dan bahkan dimanfaatkan kembali menjadi produk yang berguna seperti kompos, pupuk organik, maupun energi biogas apabila dikelola

dengan baik. Limbah organik juga memiliki kandungan bahan organik yang tinggi sehingga jika tidak dikelola dengan benar dapat menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan seperti bau tidak sedap, berkembangnya mikroorganisme patogen, serta pencemaran lingkungan, karena limbah organik pada dasarnya merupakan limbah yang berasal dari sisa organisme hidup yang mudah terurai secara biologis oleh mikroorganisme dalam proses alami di lingkungan (Amir, Kasmawati, & Majid, 2021).

4) Limbah Anorganik

Limbah anorganik merupakan jenis limbah yang berasal dari bahan-bahan non-hayati atau material yang telah mengalami proses kimia maupun industri sehingga memiliki sifat yang sangat sulit terurai secara alami oleh mikroorganisme di lingkungan. Limbah ini umumnya dihasilkan dari berbagai aktivitas manusia seperti kegiatan rumah tangga, industri, perdagangan, maupun sektor pariwisata yang menghasilkan berbagai bahan seperti plastik, kaca, logam, kaleng, karet, serta material sintetis lainnya yang memiliki daya tahan tinggi dan dapat bertahan di lingkungan dalam waktu yang sangat lama.

Karakteristik utama limbah anorganik adalah sifatnya yang tidak mudah membusuk atau terurai secara biologis sehingga apabila tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan penumpukan sampah yang berdampak pada pencemaran tanah, air, dan udara serta mengganggu keseimbangan ekosistem lingkungan. Limbah anorganik juga sering memerlukan proses pengelolaan khusus seperti pemilahan, daur ulang, atau pemanfaatan kembali melalui berbagai teknologi pengolahan karena bahan-bahan tersebut tidak dapat terdegradasi secara alami oleh organisme pengurai, sehingga menurut Arifin, Habiburrahman, dan Gusti (2023) limbah anorganik merupakan sisa aktivitas manusia yang berasal dari bahan non-biodegradable yang sulit terurai secara alami dan oleh karena itu memerlukan sistem pengelolaan yang tepat agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

b. Strategi Pengelolaan Limbah

Pengelolaan limbah dapat dilakukan melalui beberapa strategi utama, antara lain:

1) *Reduce* (Mengurangi)
   Mengurangi penggunaan bahan yang berpotensi menghasilkan limbah, seperti penggunaan plastik sekali pakai atau kemasan yang berlebihan.
2) *Reuse* (Menggunakan kembali)
   Menggunakan kembali barang atau bahan yang masih dapat dimanfaatkan tanpa melalui proses pengolahan yang kompleks.
3) *Recycle* (Daur ulang)
   Mengolah kembali limbah menjadi produk baru yang memiliki nilai guna, seperti daur ulang kertas, plastik, atau logam.
4) *Recovery* (Pemulihan energi atau bahan)
   Memanfaatkan limbah untuk menghasilkan energi atau bahan lain yang dapat digunakan kembali, misalnya melalui proses biogas atau pembakaran terkendali.

2. Pengelolaan Energi

Pengelolaan energi merupakan upaya untuk mengatur penggunaan energi secara efisien dan berkelanjutan guna mengurangi pemborosan serta meminimalkan dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh konsumsi energi yang tinggi. Energi digunakan dalam berbagai aktivitas seperti penerangan, transportasi, operasional bangunan, serta kegiatan industri dan pariwisata. Pengelolaan energi yang efektif bertujuan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan energi sekaligus mengurangi emisi karbon yang berkontribusi terhadap perubahan iklim global.

a. Jenis Sumber Energi
   1) Energi Fosil
      Energi fosil merupakan sumber energi yang terbentuk dari sisa-sisa organisme hidup seperti tumbuhan dan hewan purba yang mengalami proses pengendapan, tekanan, serta perubahan kimia selama jutaan tahun di dalam lapisan bumi hingga akhirnya berubah menjadi bahan bakar seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Energi ini menjadi salah satu sumber energi utama yang digunakan oleh manusia dalam berbagai sektor kehidupan seperti pembangkit listrik, transportasi, industri, serta kegiatan ekonomi lainnya karena

memiliki kandungan energi yang tinggi dan relatif mudah dimanfaatkan dalam skala besar.

Energi fosil juga termasuk dalam kategori sumber daya energi yang tidak dapat diperbarui karena proses pembentukannya memerlukan waktu yang sangat lama sehingga ketersediaannya di alam bersifat terbatas dan dapat habis apabila digunakan secara terus-menerus tanpa pengelolaan yang bijaksana. Pemanfaatan energi fosil secara luas memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan ekonomi dan pemenuhan kebutuhan energi global, namun di sisi lain pembakarannya menghasilkan emisi karbon dioksida serta berbagai polutan yang dapat mempengaruhi kualitas lingkungan dan mempercepat perubahan iklim, karena energi fosil pada dasarnya merupakan sumber energi yang berasal dari sisa makhluk hidup purba yang terkubur di dalam bumi selama jutaan tahun dan mengalami proses perubahan kimia hingga menjadi bahan bakar seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam (International Energy Agency, 2021).

2) Energi Terbarukan

Energi terbarukan merupakan sumber energi yang berasal dari proses alam yang dapat diperbarui secara terus-menerus dan tidak habis dalam jangka waktu penggunaan manusia, seperti energi matahari, angin, air, panas bumi, dan biomassa, sehingga menjadi alternatif penting untuk menggantikan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil yang terbatas serta menimbulkan dampak lingkungan yang besar. Pemanfaatan energi ini berkembang pesat karena mampu mendukung sistem pembangunan berkelanjutan melalui pengurangan emisi karbon, peningkatan ketahanan energi, serta penciptaan sistem produksi energi yang lebih ramah lingkungan dan efisien di berbagai sektor ekonomi dan sosial.

Energi terbarukan juga berperan strategis dalam transformasi sistem energi global karena teknologi yang digunakan memungkinkan produksi energi yang lebih bersih, terdesentralisasi, dan berkelanjutan, sehingga dapat mendukung pencapaian target mitigasi perubahan iklim

sekaligus meningkatkan akses energi bagi masyarakat di berbagai wilayah. Menurut Sovacool (2020), energi terbarukan merupakan bagian penting dari transisi energi modern karena mampu menyediakan sumber energi yang berkelanjutan, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, serta mendukung upaya global dalam menurunkan emisi gas rumah kaca dan menjaga keberlanjutan lingkungan.

3) Energi Biomassa

Energi biomassa merupakan salah satu bentuk energi terbarukan yang berasal dari bahan organik seperti limbah pertanian, sisa kehutanan, kotoran ternak, serta limbah organik rumah tangga yang dapat diolah menjadi sumber energi melalui berbagai proses konversi seperti pembakaran langsung, fermentasi, gasifikasi, maupun pirolisis, sehingga mampu menghasilkan energi dalam bentuk panas, listrik, biogas, maupun bahan bakar cair yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan industri, rumah tangga, dan sektor energi. Pemanfaatan biomassa juga memiliki nilai strategis dalam sistem energi berkelanjutan karena tidak hanya memanfaatkan limbah yang sebelumnya tidak digunakan secara optimal, tetapi juga mampu mengurangi pencemaran lingkungan sekaligus meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam melalui pendekatan ekonomi sirkular.

Energi biomassa memiliki potensi besar dalam mendukung diversifikasi energi terutama di negara yang memiliki sumber daya pertanian dan kehutanan yang melimpah, karena bahan bakunya relatif mudah diperoleh serta dapat diproduksi secara lokal sehingga mampu meningkatkan ketahanan energi dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat di tingkat lokal. Menurut Darren McCauley (2021), biomassa merupakan sumber energi terbarukan yang berasal dari material biologis yang dapat diperbarui dan memiliki potensi signifikan untuk menggantikan bahan bakar fosil sekaligus mendukung sistem energi rendah karbon melalui pemanfaatan limbah organik dan sumber daya hayati secara berkelanjutan.

b. Strategi Pengelolaan Energi

Strategi pengelolaan energi merupakan pendekatan sistematis yang dirancang untuk mengatur pemanfaatan sumber daya energi secara efisien, efektif, dan berkelanjutan melalui perencanaan, pengendalian, serta optimalisasi penggunaan energi pada berbagai sektor seperti industri, transportasi, rumah tangga, dan pembangunan infrastruktur, sehingga mampu mengurangi pemborosan energi sekaligus meningkatkan kinerja ekonomi dan keberlanjutan lingkungan dalam jangka panjang. Penerapan strategi ini umumnya melibatkan upaya peningkatan efisiensi energi, diversifikasi sumber energi, penerapan teknologi hemat energi, serta penguatan kebijakan dan regulasi yang mendukung pemanfaatan energi secara lebih bijaksana dan bertanggung jawab.

Pengelolaan energi yang terencana juga menjadi elemen penting dalam menghadapi tantangan krisis energi global, perubahan iklim, serta meningkatnya kebutuhan energi akibat pertumbuhan populasi dan aktivitas ekonomi, sehingga strategi yang diterapkan harus mampu mengintegrasikan aspek teknis, ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pengembangan energi terbarukan, peningkatan efisiensi sistem produksi dan distribusi energi, serta penerapan manajemen energi berbasis teknologi dan inovasi yang mampu mengurangi ketergantungan terhadap sumber energi fosil dan menekan emisi gas rumah kaca.

C. Sertifikasi dan Standar Lingkungan

Sertifikasi dan standar lingkungan merupakan instrumen penting dalam pengelolaan lingkungan yang bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan organisasi, perusahaan, maupun produk yang dihasilkan telah memenuhi kriteria keberlanjutan, perlindungan lingkungan, serta penggunaan sumber daya secara bertanggung jawab sesuai dengan regulasi dan prinsip pembangunan berkelanjutan. Sertifikasi lingkungan umumnya diberikan oleh lembaga independen yang menilai kepatuhan suatu organisasi terhadap standar tertentu, sedangkan standar lingkungan merupakan seperangkat pedoman, kriteria, atau aturan yang dirancang

untuk mengendalikan dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan melalui penerapan sistem manajemen yang terukur dan berkelanjutan.

Penerapan sertifikasi dan standar lingkungan juga menjadi bukti komitmen suatu organisasi dalam menjaga kualitas lingkungan hidup, mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam kegiatan operasional. Banyak standar lingkungan yang diakui secara internasional, seperti sistem manajemen lingkungan yang membantu organisasi mengidentifikasi, mengelola, dan memantau dampak lingkungan dari aktivitasnya secara sistematis sehingga penggunaan sumber daya dapat lebih efisien dan kerusakan lingkungan dapat diminimalkan.

1. Tujuan Sertifikasi dan Standar Lingkungan

Tujuan sertifikasi dan standar lingkungan berkaitan dengan upaya memastikan bahwa kegiatan organisasi, perusahaan, maupun institusi dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip perlindungan lingkungan serta penggunaan sumber daya alam secara bertanggung jawab. Penerapan sertifikasi dan standar lingkungan membantu organisasi dalam mengendalikan dampak lingkungan dari aktivitas operasional melalui penerapan sistem manajemen yang terstruktur, terukur, dan berkelanjutan sehingga dapat meminimalkan pencemaran, meningkatkan efisiensi penggunaan energi dan bahan baku, serta mendukung praktik pembangunan yang lebih ramah lingkungan.

Sertifikasi dan standar lingkungan juga bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kepercayaan masyarakat terhadap komitmen organisasi dalam menjaga kelestarian lingkungan melalui penerapan kebijakan dan praktik operasional yang sesuai dengan regulasi serta standar internasional. Pentingnya tujuan tersebut dijelaskan oleh Delmas dan Pekovic (2020) yang menyatakan bahwa standar dan sertifikasi lingkungan dirancang untuk mendorong organisasi meningkatkan kinerja lingkungan melalui penerapan sistem manajemen yang mampu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan sekaligus meningkatkan efisiensi operasional dan reputasi perusahaan.

2. Jenis Sertifikasi dan Standar Lingkungan

Berbagai bentuk sertifikasi dan standar lingkungan telah dikembangkan secara internasional maupun nasional, antara lain:

a. ISO 14001 (Sistem Manajemen Lingkungan)

ISO 14001 merupakan standar internasional yang digunakan sebagai kerangka kerja dalam penerapan Sistem Manajemen Lingkungan yang membantu organisasi mengelola dampak lingkungan dari aktivitas, produk, maupun layanan yang dihasilkan secara sistematis dan terstruktur. Standar ini memberikan pedoman bagi organisasi untuk mengidentifikasi aspek lingkungan yang signifikan, menetapkan kebijakan dan tujuan lingkungan, serta menerapkan proses pengendalian yang mampu mengurangi pencemaran, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan yang berlaku. Penerapan ISO 14001 juga mendorong organisasi untuk melakukan evaluasi dan peningkatan berkelanjutan terhadap kinerja lingkungan melalui pendekatan manajemen yang terintegrasi dengan kegiatan operasional dan strategi organisasi.

ISO 14001 tidak hanya berfokus pada pengendalian dampak lingkungan, tetapi juga menekankan pentingnya integrasi antara kebijakan lingkungan, perencanaan strategis, implementasi program, pemantauan kinerja, serta evaluasi berkelanjutan yang dilakukan oleh organisasi. Melalui penerapan standar ini, organisasi diharapkan mampu mengelola tanggung jawab lingkungannya secara lebih sistematis sehingga dapat meningkatkan efisiensi operasional sekaligus mendukung praktik pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Bajpai (2020) menjelaskan bahwa ISO 14001 merupakan standar yang menetapkan persyaratan bagi sistem manajemen lingkungan yang digunakan organisasi untuk meningkatkan kinerja lingkungan serta mengelola tanggung jawab lingkungan secara sistematis sebagai bagian dari pilar keberlanjutan.

b. Eco Label (Label Ramah Lingkungan)

Eco label atau label ramah lingkungan merupakan suatu tanda, simbol, atau pernyataan pada produk yang menunjukkan bahwa produk tersebut telah memenuhi kriteria tertentu terkait perlindungan lingkungan selama proses produksi, distribusi, penggunaan, hingga pembuangannya. Label ini berfungsi sebagai alat informasi yang membantu konsumen mengenali produk yang

memiliki dampak lingkungan lebih rendah dibandingkan produk konvensional sehingga dapat mendorong pola konsumsi yang lebih berkelanjutan. Guo *et al*. (2020) menjelaskan bahwa eco label adalah simbol atau pernyataan yang menunjukkan bahwa suatu produk telah memenuhi standar lingkungan tertentu dan membantu konsumen mengidentifikasi produk yang lebih ramah lingkungan dibandingkan alternatif lainnya.

Eco label juga memiliki peran penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas produsen terhadap dampak lingkungan dari produk yang dihasilkan, karena keberadaan label tersebut menunjukkan bahwa produk telah melalui proses evaluasi berdasarkan kriteria lingkungan tertentu yang biasanya mencakup penggunaan bahan baku, efisiensi energi, pengelolaan limbah, serta dampak terhadap ekosistem. Dalam praktiknya, label ramah lingkungan dapat diterapkan pada berbagai sektor industri seperti produk makanan, tekstil, elektronik, pariwisata, dan produk rumah tangga yang berupaya mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan melalui penerapan prinsip produksi berkelanjutan. Penerapan eco label juga menjadi instrumen penting dalam kebijakan lingkungan modern karena mampu menghubungkan kepentingan produsen, konsumen, dan pemerintah dalam upaya mendorong praktik produksi dan konsumsi yang lebih bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan.

c. ISO 14024 (*Environmental Labelling Type I*)

ISO 14024 merupakan standar internasional yang mengatur tentang *Environmental Labelling Type I,* yaitu sistem pelabelan lingkungan yang diberikan kepada produk atau jasa yang telah memenuhi kriteria lingkungan tertentu berdasarkan penilaian siklus hidup produk serta diverifikasi oleh pihak ketiga yang independen. Standar ini dikembangkan oleh *International Organization for Standardization* sebagai bagian dari seri ISO 14000 yang berfokus pada manajemen lingkungan dan bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penyelenggaraan program eco label yang kredibel, transparan, serta dapat dipercaya oleh konsumen dan pelaku industri. Menurut Delmas dan Lessem (2020), environmental labelling tipe I merupakan sistem pelabelan lingkungan berbasis sertifikasi pihak ketiga yang

menilai kinerja lingkungan suatu produk secara komprehensif berdasarkan berbagai kriteria yang telah ditetapkan untuk mendorong produksi dan konsumsi yang lebih berkelanjutan.

ISO 14024 menekankan bahwa proses pemberian label ramah lingkungan harus dilakukan melalui mekanisme evaluasi yang objektif dan berbasis kriteria yang jelas sehingga produk yang memperoleh label benar-benar memiliki dampak lingkungan yang lebih rendah dibandingkan produk lain dalam kategori yang sama. Proses penilaian biasanya mempertimbangkan berbagai aspek penting seperti penggunaan bahan baku, efisiensi energi, tingkat emisi, pengelolaan limbah, serta dampak terhadap ekosistem sepanjang siklus hidup produk mulai dari tahap produksi hingga pembuangan. Pendekatan ini menjadikan ISO 14024 tidak hanya berfungsi sebagai alat informasi bagi konsumen, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan lingkungan yang mendorong produsen untuk meningkatkan kinerja lingkungan melalui inovasi teknologi, efisiensi sumber daya, serta penerapan praktik produksi yang lebih ramah lingkungan.

d. Sertifikasi *Green Industry* atau *Green Product*

Sertifikasi *Green Industry* atau *Green Product* merupakan sistem penilaian dan pengakuan resmi yang diberikan kepada industri atau produk yang telah memenuhi kriteria tertentu terkait kinerja lingkungan, efisiensi penggunaan sumber daya, serta penerapan proses produksi yang ramah lingkungan sepanjang siklus hidupnya. Sertifikasi ini biasanya menilai berbagai aspek penting seperti penggunaan energi, pengelolaan limbah, efisiensi bahan baku, pengendalian emisi, serta dampak lingkungan dari proses produksi hingga penggunaan produk oleh konsumen. Penelitian Wang, Zhang, dan Hao (2025) menunjukkan bahwa penerapan sertifikasi industri hijau dapat meningkatkan kinerja pembangunan berkelanjutan perusahaan karena mendorong inovasi hijau serta menarik perhatian investor yang peduli terhadap isu lingkungan.

Sertifikasi *Green Industry* atau *Green Product* juga berfungsi sebagai instrumen penting dalam mendorong transformasi industri menuju praktik produksi yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan.

Melalui mekanisme evaluasi yang sistematis dan terstandar, perusahaan yang memperoleh sertifikasi ini diwajibkan menerapkan prinsip efisiensi energi, penggunaan bahan baku yang lebih ramah lingkungan, serta pengurangan limbah dan emisi yang dapat merusak lingkungan. Proses sertifikasi biasanya melibatkan audit lingkungan, verifikasi kinerja produksi, serta penilaian terhadap sistem manajemen lingkungan perusahaan sehingga dapat memastikan bahwa kegiatan industri telah memenuhi standar keberlanjutan yang ditetapkan.

3. Prinsip-Prinsip Standar Lingkungan

Prinsip-prinsip standar lingkungan merupakan seperangkat pedoman dasar yang digunakan untuk memastikan bahwa aktivitas pembangunan, produksi, maupun pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara bertanggung jawab dan tidak menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan. Prinsip-prinsip ini menekankan pentingnya keseimbangan antara kegiatan ekonomi, perlindungan lingkungan, serta kesejahteraan sosial sehingga pemanfaatan sumber daya alam dapat berlangsung secara berkelanjutan dan tidak mengorbankan kualitas lingkungan bagi generasi mendatang. Menurut Bull *et al*. (2020), salah satu prinsip utama dalam standar lingkungan adalah prinsip no harm to nature yang menekankan bahwa setiap aktivitas manusia seharusnya dirancang untuk mencegah kerusakan lingkungan sejak awal serta meminimalkan dampak negatif terhadap ekosistem.

Prinsip-prinsip standar lingkungan juga mencakup berbagai pendekatan penting seperti prinsip pencegahan kerusakan lingkungan, prinsip efisiensi penggunaan sumber daya, serta prinsip tanggung jawab terhadap dampak ekologis dari suatu kegiatan. Prinsip pencegahan menekankan bahwa upaya perlindungan lingkungan harus dilakukan sebelum kerusakan terjadi melalui perencanaan yang matang, pengelolaan risiko lingkungan, serta penerapan teknologi ramah lingkungan dalam proses produksi maupun pembangunan. Selain itu, prinsip efisiensi sumber daya mendorong penggunaan energi, air, dan bahan baku secara hemat serta meminimalkan timbulan limbah sehingga aktivitas manusia dapat berjalan secara produktif tanpa menyebabkan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan.

4. Manfaat Sertifikasi dan Standar Lingkungan

Manfaat sertifikasi dan standar lingkungan dapat dilihat dari kemampuannya dalam mendorong organisasi, perusahaan, maupun institusi untuk menjalankan aktivitas operasional yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan melalui penerapan sistem pengelolaan yang terukur, transparan, serta sesuai dengan regulasi yang berlaku. Penerapan sertifikasi lingkungan membantu meningkatkan kinerja lingkungan suatu organisasi karena proses sertifikasi menuntut adanya pengendalian terhadap pencemaran, pengurangan limbah, efisiensi penggunaan energi, serta pengelolaan sumber daya alam secara lebih berkelanjutan sehingga dampak negatif terhadap lingkungan dapat diminimalkan secara sistematis. Selain itu, standar lingkungan juga memperkuat akuntabilitas organisasi karena melalui proses audit, evaluasi, dan verifikasi yang dilakukan oleh lembaga independen, organisasi dituntut untuk menunjukkan bukti nyata bahwa aktivitas operasionalnya telah memenuhi kriteria keberlanjutan yang telah ditetapkan (Paeleman *et al*., 2024).

Manfaat lain dari penerapan sertifikasi dan standar lingkungan adalah meningkatnya kepercayaan publik, reputasi perusahaan, serta daya saing organisasi di pasar global yang semakin menuntut praktik bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Sertifikasi lingkungan memberikan sinyal kepada konsumen, investor, serta pemangku kepentingan lainnya bahwa suatu organisasi telah menerapkan praktik pengelolaan lingkungan yang baik sehingga dapat meningkatkan kredibilitas produk atau jasa yang dihasilkan di pasar. Di samping itu, penerapan standar lingkungan juga berkontribusi dalam meningkatkan efisiensi operasional perusahaan karena melalui pengelolaan sumber daya yang lebih baik, organisasi dapat menekan biaya produksi, mengurangi pemborosan energi dan bahan baku, serta menciptakan sistem produksi yang lebih efisien dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

D. Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim merupakan dua pendekatan penting dalam upaya mengatasi dampak perubahan iklim yang semakin meningkat akibat aktivitas manusia, khususnya yang berkaitan dengan emisi gas rumah kaca, perubahan penggunaan lahan,

serta eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan. Kedua pendekatan ini memiliki tujuan yang saling melengkapi, yaitu mengurangi penyebab perubahan iklim sekaligus menyesuaikan sistem sosial, ekonomi, dan lingkungan agar mampu menghadapi dampak perubahan iklim yang sudah terjadi maupun yang akan datang.

1. Pengertian Mitigasi Perubahan Iklim

Mitigasi perubahan iklim merupakan upaya yang dilakukan untuk mengurangi atau menekan sumber penyebab perubahan iklim, terutama melalui pengurangan emisi gas rumah kaca ke atmosfer. Pendekatan mitigasi berfokus pada tindakan yang dapat memperlambat laju pemanasan global dengan mengendalikan aktivitas manusia yang menghasilkan emisi karbon. Beberapa bentuk mitigasi perubahan iklim antara lain:

a. Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca

Pengurangan emisi gas rumah kaca merupakan salah satu bentuk utama mitigasi perubahan iklim yang bertujuan untuk menekan jumlah gas penyebab pemanasan global yang dilepaskan ke atmosfer melalui berbagai aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, proses industri, transportasi, pertanian, serta perubahan penggunaan lahan. Upaya ini dilakukan untuk memperlambat peningkatan suhu rata-rata global dan mengurangi dampak negatif perubahan iklim terhadap lingkungan, kesehatan manusia, serta stabilitas ekonomi dan sosial, sehingga diperlukan strategi terintegrasi yang melibatkan sektor energi, industri, transportasi, dan tata guna lahan.

Pengurangan emisi dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan sistematis seperti peningkatan efisiensi energi, transisi menuju energi terbarukan, pengembangan teknologi rendah karbon, serta penerapan praktik produksi dan konsumsi yang lebih berkelanjutan. Selain itu, kebijakan pengendalian emisi seperti penetapan batas emisi, pajak karbon, perdagangan karbon, dan standar lingkungan juga menjadi instrumen penting dalam mendorong perubahan perilaku dan inovasi teknologi yang mendukung penurunan emisi secara signifikan.

b. Penggunaan Energi Terbarukan

Penggunaan energi terbarukan merupakan salah satu bentuk mitigasi perubahan iklim yang berfokus pada penggantian

sumber energi berbasis bahan bakar fosil dengan sumber energi yang berasal dari proses alam yang dapat diperbarui secara berkelanjutan seperti energi surya, angin, air, panas bumi, dan biomassa. Strategi ini bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari pembakaran energi fosil sehingga dapat menekan laju pemanasan global serta memperbaiki kualitas udara dan lingkungan secara keseluruhan. Selain itu, transisi menuju energi terbarukan juga mendukung sistem energi yang lebih bersih, efisien, dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Penerapan energi terbarukan dalam berbagai sektor seperti pembangkit listrik, transportasi, industri, dan bangunan dapat secara signifikan mengurangi ketergantungan terhadap batu bara, minyak bumi, dan gas alam yang merupakan sumber utama emisi karbon dioksida. Pengembangan teknologi energi terbarukan juga mendorong inovasi, peningkatan efisiensi sistem energi, serta penciptaan lapangan kerja baru dalam sektor ekonomi hijau yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan. Upaya ini menjadi bagian penting dari strategi global dalam mencapai target pengurangan emisi dan menjaga stabilitas iklim bumi.

c. Efisiensi Energi

Efisiensi energi merupakan salah satu bentuk mitigasi perubahan iklim yang berfokus pada pengurangan jumlah energi yang digunakan untuk menghasilkan tingkat layanan atau *output* yang sama, sehingga mampu menekan konsumsi energi secara keseluruhan tanpa mengurangi kualitas aktivitas ekonomi maupun sosial. Penerapan efisiensi energi dilakukan melalui optimalisasi teknologi, perbaikan sistem operasional, serta perubahan perilaku penggunaan energi pada sektor rumah tangga, industri, transportasi, dan bangunan agar penggunaan sumber daya menjadi lebih hemat dan terukur. Upaya ini berperan penting dalam mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil serta menurunkan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari proses pembakaran energi.

Strategi efisiensi energi dapat diwujudkan melalui penggunaan peralatan hemat energi, penerapan standar kinerja energi pada bangunan, modernisasi sistem industri, serta peningkatan manajemen energi yang terstruktur dan berbasis

data. Selain itu, efisiensi energi juga mendorong inovasi teknologi rendah karbon yang mampu meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi intensitas energi dalam kegiatan produksi dan konsumsi. Pendekatan ini tidak hanya memberikan manfaat lingkungan, tetapi juga membantu menurunkan biaya operasional serta meningkatkan ketahanan energi suatu negara dalam jangka panjang.

d. Reboisasi dan Konservasi Hutan

Reboisasi dan konservasi hutan merupakan bentuk mitigasi perubahan iklim yang berfokus pada peningkatan dan perlindungan tutupan hutan sebagai salah satu penyerap karbon alami (*carbon sink*) yang mampu menyerap karbon dioksida dari atmosfer melalui proses fotosintesis dan menyimpannya dalam biomassa serta tanah. Reboisasi dilakukan dengan menanam kembali pohon pada lahan yang telah mengalami deforestasi atau degradasi, sedangkan konservasi hutan bertujuan untuk melindungi hutan yang masih utuh agar tidak mengalami alih fungsi lahan, penebangan liar, atau kerusakan ekosistem yang dapat mengurangi kemampuan penyerapan karbon. Kedua pendekatan ini sangat penting dalam strategi mitigasi karena hutan memiliki peran ekologis yang signifikan dalam mengatur iklim global, menjaga keseimbangan hidrologi, serta mempertahankan keanekaragaman hayati.

Pelaksanaan reboisasi dan konservasi hutan juga berkontribusi dalam mengurangi konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer melalui peningkatan kapasitas penyerapan karbon sekaligus mencegah pelepasan karbon yang tersimpan dalam ekosistem hutan akibat deforestasi dan degradasi lahan. Upaya ini tidak hanya berdampak pada pengurangan emisi, tetapi juga mendukung pemulihan fungsi ekologis seperti stabilitas tanah, pengendalian erosi, perlindungan sumber air, serta peningkatan ketahanan ekosistem terhadap perubahan iklim dan bencana alam. Implementasi strategi ini memerlukan dukungan kebijakan yang kuat, pengelolaan berbasis masyarakat, serta kerja sama lintas sektor agar keberlanjutan hutan dapat terjaga dalam jangka panjang.

e. Pengelolaan Limbah Berkelanjutan

Pengelolaan limbah berkelanjutan merupakan bentuk mitigasi perubahan iklim yang bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari proses pengumpulan, pengolahan, dan pembuangan limbah melalui penerapan sistem yang lebih efisien, terintegrasi, dan ramah lingkungan. Pendekatan ini menekankan pada pengurangan timbulan limbah sejak sumbernya, peningkatan praktik daur ulang, pemanfaatan kembali material, serta pengolahan limbah organik menjadi kompos atau energi terbarukan seperti biogas agar dapat menekan emisi metana dari tempat pembuangan akhir. Dengan mengelola limbah secara berkelanjutan, dampak negatif terhadap lingkungan dapat diminimalkan sekaligus mendukung transisi menuju ekonomi sirkular yang lebih rendah karbon.

Strategi pengelolaan limbah berkelanjutan juga mencakup penerapan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*), pengembangan teknologi pengolahan limbah yang efisien, serta peningkatan sistem pemilahan limbah di tingkat rumah tangga maupun industri untuk mengurangi volume limbah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Upaya ini penting karena tempat pembuangan akhir merupakan salah satu sumber utama emisi metana yang memiliki potensi pemanasan global lebih tinggi dibandingkan karbon dioksida, sehingga pengurangan limbah organik yang masuk ke TPA dapat secara langsung menurunkan kontribusi terhadap perubahan iklim. Selain itu, pengelolaan limbah yang baik juga membantu meningkatkan efisiensi sumber daya dan mengurangi kebutuhan ekstraksi bahan baku baru yang dapat memperbesar jejak karbon.

2. Pengertian Adaptasi Perubahan Iklim

Adaptasi perubahan iklim merupakan upaya penyesuaian terhadap kondisi lingkungan yang berubah akibat perubahan iklim sehingga masyarakat, ekosistem, dan sistem ekonomi tetap mampu bertahan dan berfungsi secara optimal. Pendekatan adaptasi tidak berfokus pada pengurangan penyebab perubahan iklim, melainkan pada pengurangan kerentanan dan peningkatan kemampuan menghadapi dampaknya. Beberapa bentuk adaptasi perubahan iklim meliputi:

a. Penyesuaian Sistem Pertanian

Penyesuaian sistem pertanian sebagai bentuk adaptasi perubahan iklim melibatkan serangkaian perubahan dan penyesuaian praktik, teknologi, serta manajemen produksi untuk menghadapi dampak nyata dan potensial dari perubahan iklim seperti fluktuasi curah hujan, peningkatan suhu, serta kejadian cuaca ekstrem yang mengancam produktivitas dan ketahanan pangan. Penyesuaian ini dapat mencakup modifikasi pola tanam seperti mengubah tanggal tanam atau rotasi tanaman, penggunaan varietas tanaman yang lebih tahan terhadap kondisi iklim ekstrem, serta pengelolaan sumber daya air yang lebih efisien agar tanaman dapat tumbuh secara optimal meskipun kondisi iklim tidak stabil. Upaya tersebut bertujuan untuk menurunkan kerentanan sistem pertanian terhadap perubahan iklim sekaligus menjaga produktivitas pertanian agar tetap stabil dalam jangka panjang.

Penyesuaian sistem pertanian juga mencakup integrasi praktik pertanian yang lebih adaptif seperti diversifikasi tanaman, penggunaan teknik konservasi tanah dan air, serta implementasi sistem pertanian cerdas iklim (*climate-smart agriculture*) yang membantu meningkatkan ketahanan dan fleksibilitas produksi di tengah perubahan kondisi iklim. Penyesuaian ini tidak hanya mendorong produktivitas tanaman yang lebih baik tetapi juga membantu petani mengurangi risiko gagal panen akibat kondisi cuaca yang tidak menentu serta meningkatkan kapasitas komunitas pertanian dalam merespons berbagai tantangan iklim.

b. Pengelolaan Sumber Daya Air

Pengelolaan sumber daya air sebagai bentuk adaptasi perubahan iklim merupakan upaya sistematis untuk mengatur, melindungi, serta memanfaatkan sumber air secara berkelanjutan guna menghadapi dampak nyata perubahan iklim seperti perubahan pola curah hujan, kekeringan, banjir, serta ketidakpastian ketersediaan air yang semakin meningkat. Dalam praktiknya, pengelolaan tersebut mencakup integrasi antara perencanaan teknis, kebijakan publik, konservasi ekosistem air, serta pengaturan sistem distribusi dan penggunaan air agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, pertanian, industri, serta kelestarian lingkungan sekaligus mengurangi kerentanan

terhadap gejala perubahan iklim. Pendekatan ini juga mendorong peningkatan kapasitas kelembagaan, kebijakan adaptif, serta perencanaan berbasis data ilmiah untuk mengantisipasi dan merespon fluktuasi ketersediaan air serta tantangan terkait kualitas dan kuantitas sumber daya air (Lindner *et al*., 2025).

Pengelolaan sumber daya air yang adaptif terhadap perubahan iklim juga mencakup upaya perlindungan dan restorasi ekosistem penting seperti daerah tangkapan air, lahan basah, sungai, dan resapan air tanah untuk meningkatkan kapasitas alam dalam menyimpan dan menyediakan air secara alami. Implementasi strategi adaptasi ini memungkinkan sistem air lebih tahan terhadap dampak ekstrem seperti banjir dan kekeringan, sekaligus menjaga fungsi ekosistem yang mendukung ketahanan pangan, sanitasi, serta kesehatan masyarakat di berbagai sektor. Pendekatan ini menempatkan air tidak hanya sebagai sumber daya teknis semata, tetapi juga sebagai bagian integral dari strategi adaptasi perubahan iklim yang memerlukan kolaborasi lintas sektor serta kebijakan jangka panjang yang responsif terhadap dinamika iklim global.

c. Perencanaan Tata Ruang Berbasis Risiko Iklim

Perencanaan tata ruang berbasis risiko iklim merupakan bentuk adaptasi perubahan iklim yang mengintegrasikan data ilmiah mengenai potensi bahaya iklim seperti banjir, kenaikan muka air laut, kekeringan, gelombang panas, dan longsor ke dalam proses penyusunan kebijakan serta pengembangan wilayah agar pembangunan tidak memperbesar kerentanan masyarakat dan lingkungan. Pendekatan ini menekankan pentingnya analisis risiko iklim dalam penentuan zona pemanfaatan lahan, penempatan infrastruktur, serta pengendalian pertumbuhan kawasan perkotaan maupun pedesaan sehingga setiap keputusan tata ruang mempertimbangkan proyeksi perubahan iklim jangka panjang. Dengan demikian, tata ruang tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi dan pertumbuhan fisik, tetapi juga pada ketahanan wilayah terhadap dampak iklim yang semakin ekstrem dan tidak menentu.

Implementasi perencanaan berbasis risiko iklim melibatkan pemetaan wilayah rawan bencana, penguatan sistem drainase dan infrastruktur tahan iklim, perlindungan kawasan lindung seperti

daerah resapan air dan pesisir, serta pembatasan pembangunan di area dengan tingkat kerentanan tinggi untuk mengurangi potensi kerugian sosial dan ekonomi di masa depan. Pendekatan ini juga mendorong kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta, serta masyarakat dalam menyusun kebijakan tata ruang yang adaptif, partisipatif, dan berbasis bukti ilmiah agar pembangunan tetap berkelanjutan meskipun menghadapi tekanan perubahan iklim. Integrasi prinsip ketahanan iklim dalam perencanaan wilayah menjadi strategi penting untuk memastikan bahwa ruang yang dibangun mampu bertahan terhadap risiko jangka panjang sekaligus melindungi aset lingkungan dan sosial.

d. Peningkatan Infrastruktur Tahan Iklim

Peningkatan infrastruktur tahan iklim merupakan bentuk adaptasi perubahan iklim yang berfokus pada perancangan, pembangunan, dan peningkatan kualitas infrastruktur agar mampu bertahan terhadap dampak perubahan iklim seperti banjir, kenaikan muka air laut, gelombang panas, badai, serta kejadian cuaca ekstrem lainnya yang semakin sering terjadi. Infrastruktur yang dimaksud mencakup bangunan publik, jalan, jembatan, sistem drainase, fasilitas air bersih, jaringan listrik, serta sarana transportasi yang dirancang dengan mempertimbangkan proyeksi risiko iklim jangka panjang sehingga tetap berfungsi secara optimal meskipun menghadapi tekanan lingkungan yang meningkat. Pendekatan ini menekankan pentingnya integrasi data iklim, standar teknis yang lebih tinggi, serta prinsip ketahanan dalam setiap tahap perencanaan dan konstruksi agar kerusakan dan kerugian akibat bencana iklim dapat diminimalkan.

Penerapan infrastruktur tahan iklim juga mencakup penggunaan material konstruksi yang lebih kuat dan ramah lingkungan, peningkatan kapasitas sistem drainase untuk mengurangi risiko banjir, penguatan fondasi bangunan di wilayah rawan gempa atau penurunan tanah, serta pengembangan desain bangunan yang mampu mengurangi dampak suhu ekstrem. Selain itu, strategi ini melibatkan pendekatan berbasis risiko yang mempertimbangkan kondisi geografis, sosial, dan ekonomi suatu wilayah sehingga pembangunan tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini tetapi juga mampu beradaptasi terhadap

perubahan kondisi iklim di masa depan. Investasi pada infrastruktur tahan iklim dinilai penting karena dapat mengurangi biaya perbaikan akibat kerusakan bencana serta meningkatkan keamanan dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

e. Penguatan Ketahanan Masyarakat

Penguatan ketahanan masyarakat merupakan bentuk adaptasi perubahan iklim yang bertujuan meningkatkan kemampuan individu, kelompok, dan komunitas dalam menghadapi, merespons, serta pulih dari dampak perubahan iklim seperti banjir, kekeringan, gelombang panas, kenaikan muka air laut, dan bencana hidrometeorologi lainnya yang semakin sering terjadi. Upaya ini mencakup peningkatan kapasitas sosial, ekonomi, dan kelembagaan masyarakat agar mampu mengurangi kerentanan terhadap risiko iklim melalui perencanaan yang partisipatif, penguatan jaringan sosial, serta akses terhadap informasi dan sumber daya yang mendukung kesiapsiagaan bencana. Ketahanan masyarakat juga menekankan pentingnya pendidikan, pelatihan, dan pemberdayaan komunitas agar mampu mengembangkan strategi adaptif yang sesuai dengan kondisi lokal dan karakteristik wilayah masing-masing.

Pada praktiknya, penguatan ketahanan masyarakat dapat dilakukan melalui pembangunan sistem peringatan dini, peningkatan literasi iklim, diversifikasi mata pencaharian, serta penguatan layanan dasar seperti kesehatan, air bersih, dan sanitasi agar masyarakat memiliki kapasitas lebih baik dalam menghadapi tekanan iklim. Pendekatan ini juga melibatkan kolaborasi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, dan komunitas lokal untuk memastikan bahwa kebijakan adaptasi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim. Selain itu, ketahanan masyarakat tidak hanya berfokus pada respons terhadap bencana, tetapi juga pada upaya pencegahan dan pengurangan risiko secara berkelanjutan melalui penguatan sistem sosial dan ekonomi yang inklusif.

3. Perbedaan Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

Perbedaan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim terletak pada fokus utama serta tujuan strategis masing-masing pendekatan dalam

menghadapi tantangan iklim global yang semakin kompleks dan berdampak luas terhadap lingkungan, ekonomi, dan kehidupan sosial. Mitigasi berorientasi pada upaya mengurangi atau menekan penyebab perubahan iklim, terutama dengan menurunkan emisi gas rumah kaca melalui penggunaan energi terbarukan, efisiensi energi, perlindungan hutan, serta perubahan sistem produksi dan konsumsi agar laju pemanasan global dapat diperlambat. Sementara itu, adaptasi lebih menekankan pada penyesuaian sistem alam dan manusia terhadap dampak perubahan iklim yang sudah terjadi atau tidak dapat dihindari, seperti peningkatan ketahanan infrastruktur, pengelolaan sumber daya air, serta penguatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi risiko iklim.

Mitigasi memiliki dampak yang bersifat jangka panjang dan berkontribusi pada penurunan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer sehingga bertujuan untuk membatasi besarnya perubahan iklim di masa depan, sedangkan adaptasi berfokus pada pengurangan kerentanan dan peningkatan kemampuan bertahan terhadap dampak yang sudah muncul. Keduanya memiliki karakteristik waktu dan pendekatan yang berbeda, di mana mitigasi lebih bersifat pencegahan terhadap penyebab perubahan iklim, sedangkan adaptasi lebih bersifat responsif terhadap konsekuensi perubahan iklim yang terjadi pada tingkat lokal maupun global. Oleh karena itu, strategi iklim yang efektif memerlukan integrasi antara mitigasi dan adaptasi agar dampak perubahan iklim dapat dikendalikan sekaligus masyarakat dan sistem lingkungan mampu berfungsi secara berkelanjutan.

BAB IX
INOVASI DAN DIGITALISASI PARIWISATA

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi besar dalam berbagai sektor, termasuk pariwisata, sehingga inovasi dan digitalisasi menjadi kebutuhan strategis dalam meningkatkan daya saing destinasi. Integrasi teknologi digital dalam pengelolaan dan pemasaran pariwisata memungkinkan peningkatan efisiensi layanan, kemudahan akses informasi, serta pengalaman wisata yang lebih personal dan interaktif bagi wisatawan.

Inovasi dalam pariwisata tidak hanya terbatas pada pengembangan produk dan layanan baru, tetapi juga mencakup perubahan model bisnis, sistem operasional, serta pola interaksi antara pelaku usaha dan wisatawan. Digitalisasi mempercepat proses adaptasi sektor pariwisata terhadap perubahan perilaku konsumen, perkembangan pasar global, dan tuntutan keberlanjutan melalui pemanfaatan platform digital, data, serta teknologi berbasis internet.

A. Smart Tourism dan Digital Marketing

Smart Tourism dan *Digital Marketing* merupakan dua konsep strategis dalam pengembangan pariwisata modern yang memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas layanan, efisiensi pengelolaan destinasi, serta efektivitas promosi. Keduanya saling berkaitan karena *Smart Tourism* berfokus pada integrasi teknologi dalam sistem pariwisata secara menyeluruh, sementara *Digital Marketing* berperan dalam strategi komunikasi dan pemasaran berbasis platform digital untuk menjangkau pasar secara lebih luas dan terukur. Implementasi keduanya mendukung transformasi sektor pariwisata menuju sistem yang lebih inovatif, responsif, dan berbasis data.

1. *Smart Tourism*

Smart Tourism adalah pendekatan pengembangan pariwisata yang mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), data

digital, serta sistem cerdas untuk meningkatkan pengalaman wisatawan, efektivitas pengelolaan destinasi, dan keberlanjutan sektor pariwisata. Konsep ini menekankan pemanfaatan teknologi seperti internet, aplikasi mobile, *big data*, *artificial intelligence*, *Internet of Things* (IoT), dan sistem informasi terpadu dalam mendukung pengambilan keputusan serta pelayanan wisata.

a. Karakteristik *Smart Tourism*

Karakteristik *Smart Tourism* ditandai oleh integrasi teknologi digital secara menyeluruh dalam pengelolaan destinasi, pelayanan wisata, dan interaksi antara pemangku kepentingan sehingga sistem pariwisata menjadi lebih terhubung, responsif, dan berbasis data. Pendekatan ini memanfaatkan teknologi seperti internet, perangkat seluler, *big data*, kecerdasan buatan, dan *Internet of Things* untuk mendukung pengambilan keputusan yang cepat serta meningkatkan pengalaman wisatawan melalui layanan yang lebih personal dan real-time. *Smart tourism* juga menekankan pentingnya kolaborasi ekosistem digital antara pemerintah, pelaku usaha, masyarakat lokal, dan wisatawan dalam satu platform terintegrasi yang memungkinkan pertukaran informasi secara efisien, sebagaimana dikemukakan oleh Gretzel *et al*. (2020) yang menegaskan bahwa *smart tourism* berlandaskan pada pemanfaatan teknologi digital dan data untuk menciptakan sistem pariwisata yang lebih cerdas dan adaptif.

Karakteristik berikutnya adalah orientasi pada pengelolaan berbasis data (*data-driven management*) yang memungkinkan destinasi memahami pola kunjungan, preferensi wisatawan, serta tren pasar secara akurat untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pelayanan. Sistem *smart tourism* mendukung transparansi informasi melalui aplikasi digital, platform daring, dan dashboard pemantauan yang membantu pengelola destinasi dalam mengontrol kapasitas kunjungan, mengoptimalkan distribusi wisatawan, serta menjaga keberlanjutan lingkungan dan sosial. Selain itu, pemanfaatan teknologi memungkinkan otomatisasi layanan seperti reservasi online, pembayaran digital, peta interaktif, dan sistem informasi wisata yang terintegrasi sehingga meningkatkan efisiensi operasional serta mengurangi hambatan dalam akses layanan pariwisata.

b. Komponen *Smart Tourism*

1) *Smart Destination*

Smart Destination merupakan salah satu komponen utama dari *Smart Tourism* yang menekankan pemanfaatan teknologi digital untuk mengelola destinasi secara cerdas, termasuk dalam hal infrastruktur, atraksi, transportasi, akomodasi, dan layanan wisata, sehingga seluruh ekosistem destinasi menjadi lebih terintegrasi dan efisien. Konsep ini memungkinkan pengumpulan dan analisis data real-time mengenai perilaku wisatawan, kepadatan kunjungan, serta tren pasar, sehingga pengelola destinasi dapat membuat keputusan strategis yang berbasis bukti untuk meningkatkan kualitas pengalaman wisata dan keberlanjutan lingkungan. Selain itu, Smart Destination memanfaatkan platform digital, aplikasi mobile, dan sistem informasi terpadu untuk menyediakan informasi yang akurat dan layanan yang responsif bagi wisatawan, menciptakan pengalaman yang lebih personal dan nyaman selama berada di destinasi (Li *et al*., 2021).

Smart Destination juga berperan dalam meningkatkan efisiensi operasional dan pengelolaan sumber daya melalui otomatisasi layanan, pemantauan berbasis sensor, serta koordinasi antar pemangku kepentingan seperti pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat lokal. Pendekatan ini mendukung integrasi ekosistem pariwisata yang lebih cerdas, memungkinkan respons cepat terhadap perubahan kondisi, serta mendorong inovasi dalam pengembangan produk wisata yang berkelanjutan. Dengan demikian, *Smart Destination* menjadi fondasi penting dalam mewujudkan destinasi pariwisata yang modern, adaptif, dan berorientasi pada kualitas layanan serta pengalaman wisatawan secara menyeluruh.

2) *Smart Experience*

Smart Experience merupakan komponen penting dalam *Smart Tourism* yang fokus pada peningkatan kualitas pengalaman wisatawan melalui pemanfaatan teknologi digital secara interaktif dan personal sehingga setiap tahap perjalanan wisata menjadi lebih informatif, efisien, dan

menyenangkan. Komponen ini tidak hanya menyediakan informasi real-time atau layanan digital seperti panduan rute dan rekomendasi atraksi, tetapi juga memungkinkan wisatawan untuk terlibat secara aktif dalam proses perjalanan dengan teknologi seperti aplikasi mobile, *augmented reality*, media sosial, dan sistem *co-creation* sehingga pengalaman wisata menjadi dinamis dan berkesan (Yin *et al*., 2024). *Smart Experience* mendukung efektivitas pariwisata dengan memberikan pengalaman yang dipersonalisasi berdasarkan data, preferensi, dan perilaku wisatawan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepuasan, loyalitas, serta keputusan kunjungan ulang karena wisatawan merasa terlibat secara langsung dalam keseluruhan proses wisata.

Smart Experience menggabungkan berbagai elemen teknologi dan logic interaksi digital yang mampu mempengaruhi persepsi emosional, kognitif, dan perilaku wisatawan selama perjalanan, sehingga destinasi tidak hanya dilihat dari objek fisiknya tetapi juga dari kualitas pengalaman yang dirasakan secara keseluruhan. Melalui integrasi sistem digital yang memperhatikan kemudahan penggunaan, interaktivitas, dan ketersediaan informasi berbasis konteks, wisatawan dapat membahas destinasi dengan cara yang lebih memuaskan, misalnya melalui rekomendasi yang relevan, navigasi berbasis lokasi, dan konten multimedia yang memperkaya pengalaman. Dengan adanya pendekatan *Smart Experience*, pengelola destinasi dapat menciptakan hubungan yang lebih kuat antara wisatawan dan destinasi, serta meningkatkan nilai tambah layanan pariwisata secara menyeluruh melalui inovasi digital yang berkelanjutan.

3) *Smart Management*

Smart Management merupakan komponen penting dalam *Smart Tourism* yang mengacu pada penerapan praktik manajerial berbasis teknologi digital untuk mengatur, mengkoordinasikan, dan mengoptimalkan sumber daya serta layanan di dalam suatu destinasi wisata sehingga proses operasional menjadi lebih efisien dan responsif terhadap

dinamika kebutuhan wisatawan serta perubahan pasar. Dalam konteks ini, Smart Management melibatkan pemanfaatan sistem informasi, platform digital, alat analitik data, dan teknologi digital lainnya untuk mengintegrasikan berbagai fungsi manajemen seperti perencanaan, organisasi layanan, pengendalian operasional, serta monitoring real-time terhadap tren kunjungan dan preferensi wisatawan sehingga pengelola dapat mengambil keputusan yang cepat dan akurat berdasarkan data yang diperoleh secara kontinu (Muniz *et al*., 2020). Pendekatan *Smart Management* dalam *Smart Tourism* tidak hanya meningkatkan produktivitas dan kualitas layanan tetapi juga mengoptimalkan koordinasi antar pemangku kepentingan destinasi termasuk pengelola, pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat lokal sehingga tercipta ekosistem pariwisata yang lebih adaptif, tanggap terhadap masalah operasional, serta mampu memberikan pengalaman wisata yang lebih lancar dan bernilai tambah.

Implementasi *Smart Management* memungkinkan destinasi wisata memanfaatkan teknologi digital untuk melakukan monitoring kunjungan secara real-time, prediksi pola kepadatan wisatawan, otomatisasi layanan seperti reservasi dan pembayaran digital, serta pemantauan kepuasan pelanggan melalui umpan balik digital yang terintegrasi. Hal ini membuat proses manajemen tidak lagi bersifat manual dan terfragmentasi, melainkan sistematis dan terkoordinasi melalui dashboard digital yang menyediakan informasi komprehensif untuk perencanaan strategi jangka pendek maupun jangka panjang. Selain itu, *Smart Management* juga meningkatkan kemampuan destinasi dalam merespons perubahan mendadak seperti fluktuasi permintaan kunjungan, gangguan layanan, atau situasi darurat sehingga destinasi dapat mempertahankan kualitas operasional serta citra positif di mata wisatawan dan pasar global.

4) *Smart Governance*

Smart Governance merupakan komponen kunci dalam *Smart Tourism* yang mengacu pada kerangka tata kelola destinasi yang memanfaatkan teknologi digital untuk

memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan, meningkatkan keterbukaan informasi, serta memperbaiki proses pengambilan keputusan sehingga kebijakan pariwisata menjadi lebih responsif, transparan, dan akuntabel. Bentuk implementasinya mencakup penggunaan platform digital untuk berbagi data antara pemerintah, pelaku usaha, masyarakat lokal, dan wisatawan demi menciptakan koordinasi yang lebih baik dalam pengelolaan layanan, perizinan, keamanan, dan strategi pemasaran yang terintegrasi, sehingga semua pihak dapat berkontribusi secara efektif dalam pembangunan pariwisata cerdas (Rosihan Anwar *et al*., 2025) *Smart Governance* tidak hanya mempercepat proses administrasi tetapi juga meningkatkan partisipasi publik melalui sistem digital yang memungkinkan masukan *stakeholder* secara real-time sehingga keputusan strategis lebih tepat sasaran dan mendukung daya saing destinasi di era digital. Pendekatan ini juga menjembatani kesenjangan antara kebijakan dan praktik di lapangan karena informasi yang terpusat dan dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan membantu mengidentifikasi permasalahan secara cepat, mengurangi birokrasi, serta mengoptimalkan alokasi sumber daya sehingga pelayanan pariwisata menjadi lebih efisien dan berkualitas sepanjang waktu.

Efektivitas *Smart Governance* dalam *Smart Tourism* juga terlihat pada kemampuannya untuk mendukung integrasi data besar (*big data*) dan analitik untuk merumuskan strategi jangka panjang yang berbasis bukti serta menciptakan kebijakan adaptif terhadap perubahan perilaku wisatawan, tren pasar global, dan tantangan keberlanjutan. Sistem tata kelola yang didukung teknologi ini memperkuat keterkaitan antara tujuan sosial, ekonomi, serta lingkungan dalam pengembangan destinasi sehingga tercipta keseimbangan antara pertumbuhan sektor pariwisata dan pelestarian sumber daya lokal. Dengan penerapan *Smart Governance* yang baik, destinasi wisata dapat menjadi lebih resilien, inklusif, dan inovatif dalam menghadapi dinamika industri pariwisata yang semakin kompetitif dan digital.

c. Manfaat *Smart Tourism*

Manfaat *Smart Tourism* terlihat pada peningkatan efisiensi pengelolaan destinasi melalui integrasi teknologi digital yang memungkinkan pengumpulan, analisis, dan pemanfaatan data secara real-time sehingga proses perencanaan, pengambilan keputusan, serta pengendalian operasional dapat dilakukan secara lebih cepat dan berbasis bukti. Pemanfaatan sistem digital seperti *big data*, kecerdasan buatan, *Internet of Things*, dan platform terintegrasi membantu destinasi dalam mengelola arus kunjungan, mengoptimalkan distribusi wisatawan, serta meningkatkan kualitas layanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan pasar. Selain itu, *Smart Tourism* memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan melalui ekosistem digital yang terhubung sehingga kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, masyarakat lokal, dan wisatawan menjadi lebih efektif dan transparan dalam mendukung pengembangan pariwisata yang berkelanjutan, sebagaimana ditegaskan bahwa *smart tourism* berfokus pada pemanfaatan teknologi digital dan data untuk menciptakan sistem pariwisata yang lebih cerdas dan adaptif (Gretzel *et al*., 2020).

Manfaat lainnya adalah peningkatan pengalaman wisatawan melalui layanan yang lebih personal, interaktif, dan berbasis konteks, di mana wisatawan dapat memperoleh informasi yang relevan, rekomendasi yang sesuai preferensi, serta kemudahan akses layanan melalui aplikasi digital dan platform daring. *Smart Tourism* juga mendukung peningkatan daya saing destinasi karena inovasi teknologi memungkinkan promosi yang lebih efektif, manajemen reputasi yang lebih baik, serta respons cepat terhadap perubahan tren dan tantangan global dalam industri pariwisata. Pada saat yang sama, pendekatan ini berkontribusi terhadap keberlanjutan lingkungan dan sosial karena penggunaan data dan sistem pemantauan digital membantu mengendalikan dampak kunjungan, menjaga keseimbangan kapasitas destinasi, serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya secara lebih bertanggung jawab.

2. *Digital Marketing* dalam Pariwisata

Digital Marketing adalah strategi pemasaran yang memanfaatkan media dan platform digital untuk mempromosikan produk atau jasa pariwisata kepada target pasar. Dalam konteks pariwisata, digital marketing digunakan untuk membangun citra destinasi, meningkatkan awareness, serta mendorong keputusan kunjungan melalui berbagai kanal online.

a. Karakteristik *Digital Marketing*

Karakteristik *Digital Marketing* mencerminkan perpaduan antara teknologi digital dan strategi pemasaran yang bertujuan untuk menjangkau, melibatkan, serta mempengaruhi target audiens melalui kanal digital seperti internet, media sosial, mesin pencari, aplikasi seluler, serta platform daring lainnya sehingga kampanye pemasaran menjadi lebih dinamis dan disesuaikan dengan perilaku konsumen di era digital (Sharabati *et al*., 2024). Karakteristik ini mencakup kemampuan untuk melakukan segmentasi pasar yang lebih tepat berdasarkan data perilaku pengguna, interaksi dua arah antara merek dan konsumen melalui konten digital yang responsif, serta keterukuran hasil pemasaran yang memungkinkan analisis kinerja kampanye secara real-time dan adaptasi strategi secara cepat untuk mengoptimalkan hasil. Selain itu, *Digital Marketing* juga bersifat multikanal, di mana berbagai platform digital seperti SEO, SEM, media sosial, email, dan mobile marketing bekerja secara terpadu untuk memperluas jangkauan audiens serta meningkatkan engagement dan konversi karena pendekatan ini tidak hanya mengikuti perkembangan teknologi tetapi juga mendukung interaksi personal dan pengalaman pengguna yang lebih relevan dan menarik dalam konteks pemasaran modern.

Karakteristik lainnya adalah fleksibilitas biaya dan skalabilitas, di mana pemasaran digital memungkinkan bisnis baik besar maupun kecil untuk merancang kampanye yang efisien dan terukur sesuai anggaran dan tujuan pemasaran tanpa harus bergantung pada metode tradisional yang lebih mahal dan kurang terukur. Pemasaran digital memberikan kemampuan analitik yang kuat untuk menilai efektivitas setiap kampanye dengan metrik seperti klik, interaksi, konversi, serta pengukuran ROI, sehingga pelaku usaha dapat mengevaluasi strategi secara

sistematis serta meningkatkan performa secara berkelanjutan. Perpaduan karakteristik ini menjadikan *Digital Marketing* sebagai strategi penting dalam menghadapi persaingan global, karena kemampuannya untuk menciptakan hubungan yang lebih dekat antara merek dan audiens secara digital, memaksimalkan visibilitas online, serta meningkatkan pertumbuhan bisnis melalui pendekatan berbasis data dan teknologi.

b. Strategi *Digital Marketing* dalam Pariwisata

Strategi *digital marketing* dalam pariwisata melibatkan perencanaan dan implementasi teknik pemasaran berbasis teknologi digital untuk memperkuat visibilitas destinasi, menarik perhatian wisatawan, serta mempengaruhi keputusan kunjungan melalui kanal digital seperti media sosial, situs web, mesin pencari, konten online, dan periklanan digital yang disesuaikan dengan perilaku audiens target (Hussein *et al*., 2025). Strategi ini mencakup penggunaan media sosial marketing untuk membangun merek destinasi dan engagement dengan audiens, *Search Engine Optimization* (SEO) untuk meningkatkan peringkat pencarian informasi destinasi, serta digital advertising untuk mencapai segmentasi pasar yang lebih tepat sehingga kampanye promosi dapat lebih efektif dan terukur dalam mendorong kunjungan wisatawan. Pendekatan ini juga melibatkan pembuatan dan distribusi konten digital berkualitas tinggi serta penggunaan alat analitik untuk mengevaluasi kinerja setiap kampanye sehingga pengelola destinasi dapat melakukan penyesuaian strategi secara dinamis serta meningkatkan hasil promosi yang relevan dengan tren pasar dan preferensi wisatawan global.

Kolaborasi dengan influencer dan kreator konten menjadi bagian dari strategi digital marketing yang mampu memperluas jangkauan pesan promosi dan menciptakan kredibilitas sosial yang kuat dalam menarik minat audiens baru terhadap destinasi wisata. Kemampuan untuk memanfaatkan data digital seperti preferensi pengguna, pola interaksi, serta respons audiens terhadap konten promosi membantu pengelola pariwisata dalam merancang kampanye yang lebih personal dan efektif dalam mempengaruhi perilaku calon wisatawan. Strategi digital marketing yang terintegrasi dan berbasis data ini menjadi faktor

penting dalam meningkatkan daya saing destinasi di era digital karena mampu mengoptimalkan sumber daya promosi, meningkatkan awareness, serta memperkuat hubungan antara destinasi dan target pasar secara terus-menerus melalui platform digital.

c. Manfaat *Digital Marketing* bagi Pariwisata

Manfaat *Digital Marketing* bagi pariwisata terlihat pada kemampuannya dalam meningkatkan visibilitas destinasi melalui kanal digital seperti media sosial, mesin pencari, situs web resmi, dan platform periklanan daring sehingga informasi mengenai atraksi, akomodasi, serta layanan wisata dapat menjangkau audiens yang lebih luas secara global dengan biaya yang relatif lebih efisien dibandingkan pemasaran konvensional. *Digital marketing* juga memungkinkan segmentasi pasar yang lebih spesifik berdasarkan data demografis, minat, dan perilaku pengguna, sehingga promosi destinasi dapat disesuaikan dengan karakteristik calon wisatawan dan menghasilkan tingkat konversi yang lebih tinggi melalui pendekatan yang terukur dan berbasis analitik. Pemanfaatan teknologi digital dalam strategi pemasaran mendukung proses interaksi dua arah antara pengelola destinasi dan wisatawan, menciptakan komunikasi yang responsif, membangun citra destinasi secara berkelanjutan, serta memperkuat kepercayaan dan loyalitas wisatawan terhadap destinasi yang dipromosikan (Dwivedi *et al*., 2021).

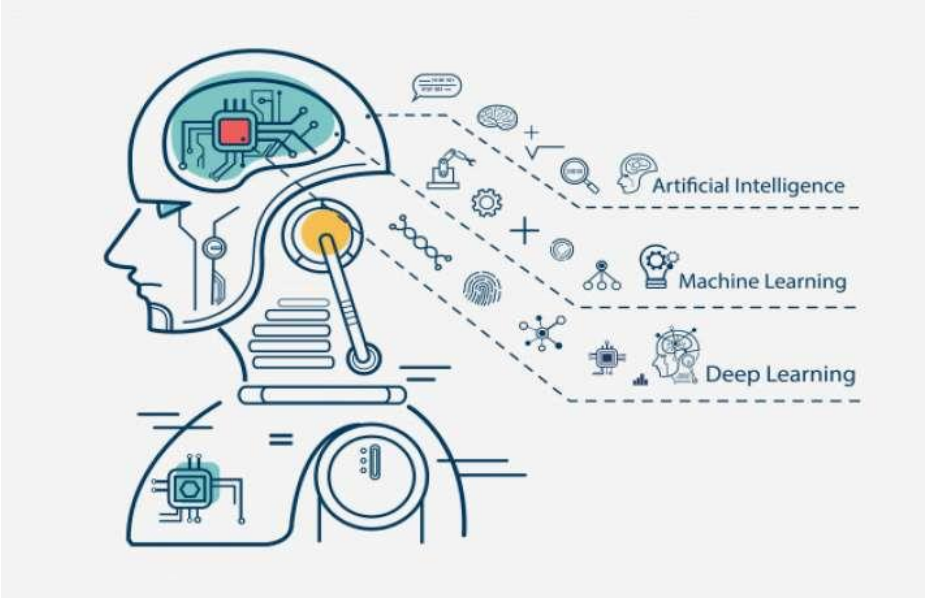
Digital marketing memberikan manfaat dalam hal pengukuran kinerja kampanye secara real-time melalui berbagai metrik seperti jumlah tayangan, klik, interaksi, dan tingkat konversi sehingga pengelola pariwisata dapat mengevaluasi strategi secara sistematis dan melakukan penyesuaian berdasarkan data yang diperoleh. Pendekatan berbasis data ini membantu destinasi dalam memahami preferensi wisatawan, mengidentifikasi tren perjalanan, serta merancang konten promosi yang relevan dan menarik sehingga mampu meningkatkan minat kunjungan dan pengalaman wisata secara keseluruhan. Integrasi alat analitik digital juga mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat dalam perencanaan pemasaran jangka pendek maupun jangka panjang, sehingga

sumber daya promosi dapat dialokasikan secara lebih optimal dan efektif.

3. Hubungan *Smart Tourism* dan *Digital Marketing*

Hubungan *Smart Tourism* dan *Digital Marketing* terletak pada integrasi teknologi digital sebagai fondasi utama dalam pengelolaan destinasi sekaligus strategi promosi yang saling mendukung untuk menciptakan sistem pariwisata yang lebih terhubung, berbasis data, dan responsif terhadap kebutuhan wisatawan. *Smart Tourism* menyediakan infrastruktur digital seperti *big data*, *Internet of Things*, kecerdasan buatan, dan platform terintegrasi yang memungkinkan pengumpulan serta analisis informasi secara real-time, sementara *Digital Marketing* memanfaatkan infrastruktur tersebut untuk menyampaikan pesan promosi yang lebih tepat sasaran, personal, dan terukur. Keterkaitan keduanya membentuk ekosistem pariwisata cerdas di mana pengambilan keputusan, manajemen destinasi, serta strategi komunikasi pemasaran berjalan secara sinergis berbasis data dan teknologi, sebagaimana ditegaskan bahwa *smart tourism* berfokus pada pemanfaatan teknologi digital dan data untuk menciptakan sistem pariwisata yang lebih adaptif dan inovatif (Gretzel *et al*., 2020).

Gambar 1. Kecerdasan Buatan



Sumber: Code Politan

Pada praktiknya, *Smart Tourism* mendukung *Digital Marketing* melalui ketersediaan data perilaku wisatawan, preferensi pencarian, pola kunjungan, serta interaksi digital yang dapat digunakan untuk merancang kampanye promosi yang lebih efektif dan relevan dengan kebutuhan pasar. Digital Marketing kemudian berperan dalam mengomunikasikan keunggulan destinasi smart melalui media sosial, mesin pencari, konten digital, dan platform daring lainnya sehingga informasi yang dihasilkan oleh sistem *Smart Tourism* dapat disebarluaskan secara luas dan strategis kepada target audiens yang tepat. Sinergi ini memperkuat *branding* destinasi, meningkatkan pengalaman wisata sebelum, selama, dan setelah kunjungan, serta menciptakan siklus umpan balik digital yang membantu pengelola destinasi terus menyempurnakan layanan dan strategi pemasaran secara berkelanjutan.

B. Teknologi dalam Pengelolaan Destinasi

Teknologi dalam pengelolaan destinasi berperan penting dalam meningkatkan efisiensi operasional, pengalaman wisatawan, serta keberlanjutan destinasi melalui pemanfaatan berbagai alat digital dan sistem informasi yang terintegrasi. Teknologi memungkinkan pengelola destinasi untuk mengumpulkan, memantau, dan menganalisis data secara real-time mengenai jumlah pengunjung, pola kunjungan, kepuasan wisatawan, serta kondisi lingkungan, sehingga keputusan manajerial dapat dilakukan secara cepat dan berbasis bukti. Selain itu, penggunaan teknologi mendukung koordinasi antar pemangku kepentingan, mempermudah perencanaan strategis, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan destinasi. Beberapa teknologi yang sering digunakan dalam pengelolaan destinasi antara lain:

1. Sistem Informasi Geografis (GIS)

Sistem Informasi Geografis (GIS) merupakan sistem berbasis komputer yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, menganalisis, dan memvisualisasikan data yang memiliki referensi geografis sehingga informasi dapat dipahami dalam konteks spasial untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat dan terarah. GIS mengintegrasikan data peta dengan atribut non-spasial seperti data demografis, lingkungan, infrastruktur, dan aktivitas ekonomi sehingga mampu menghasilkan analisis hubungan antar variabel

berdasarkan lokasi dan pola persebaran tertentu. Dalam perkembangannya, GIS menjadi alat strategis dalam berbagai sektor termasuk perencanaan wilayah, manajemen sumber daya alam, transportasi, dan pariwisata karena kemampuannya menyajikan informasi dalam bentuk peta digital interaktif yang memudahkan identifikasi masalah dan perumusan kebijakan berbasis data spasial (Longley *et al*., 2021).

Komponen utama GIS meliputi perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), data geografis, sumber daya manusia, serta metode analisis yang saling terintegrasi untuk menghasilkan informasi spasial yang valid dan dapat digunakan dalam proses perencanaan maupun evaluasi. Data dalam GIS dapat berupa data vektor yang merepresentasikan titik, garis, dan poligon, serta data raster yang berbentuk grid atau citra, sehingga memungkinkan analisis yang fleksibel sesuai kebutuhan penelitian atau pengelolaan wilayah tertentu. Melalui proses seperti overlay analysis, buffer analysis, dan spatial query, GIS mampu mengidentifikasi hubungan spasial antar objek, menentukan zona dampak, serta membantu dalam simulasi dan pemodelan untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif dan berbasis bukti.

2. *Big Data* dan Analitik

Big Data dan Analitik merupakan konsep yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemrosesan kumpulan data berukuran sangat besar, beragam, dan bergerak cepat (*volume, variety, velocity*) yang tidak dapat ditangani secara efektif menggunakan metode tradisional, sehingga memerlukan teknologi komputasi dan algoritma analisis yang canggih untuk menghasilkan informasi yang bernilai bagi pengambilan keputusan. *Big Data* mencakup data terstruktur maupun tidak terstruktur yang berasal dari berbagai sumber seperti media sosial, transaksi digital, sensor IoT, sistem informasi, serta interaksi online, sementara analitik berperan dalam mengolah data tersebut melalui teknik statistik, pembelajaran mesin, dan visualisasi data untuk menemukan pola, tren, serta hubungan yang relevan. Pendekatan ini memungkinkan organisasi di berbagai sektor untuk mengubah data mentah menjadi insight strategis yang dapat meningkatkan efisiensi operasional, inovasi layanan, serta keunggulan kompetitif, sebagaimana dijelaskan bahwa *Big Data* tidak hanya berkaitan dengan ukuran data, tetapi juga nilai dan kemampuan

analisisnya untuk mendukung proses pengambilan keputusan berbasis data (Khan *et al*., 2021).

Gambar 2. *Big Data*



Sumber: Medium

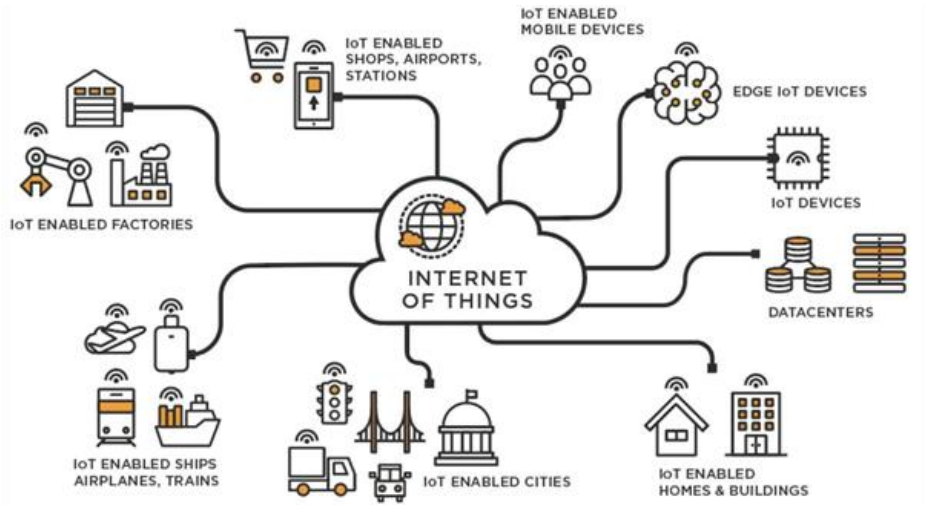
Pada praktiknya, *Big Data* dan Analitik digunakan untuk mendukung proses prediksi, personalisasi layanan, optimalisasi sumber daya, serta pemantauan kinerja secara real-time melalui dashboard interaktif dan sistem analitik terintegrasi. Teknik analitik yang umum digunakan meliputi descriptive analytics untuk memahami kondisi masa lalu, *predictive analytics* untuk memperkirakan tren di masa depan, dan *prescriptive analytics* untuk merekomendasikan tindakan terbaik berdasarkan hasil analisis data. Kombinasi antara infrastruktur *Big Data* dan kemampuan analitik yang tepat memungkinkan organisasi merespons perubahan pasar secara cepat, meningkatkan akurasi perencanaan strategis, serta mengurangi risiko dalam proses pengambilan keputusan.

3. *Internet of Things* (IoT)

Internet of Things (IoT) merupakan konsep teknologi yang menghubungkan berbagai perangkat fisik ke jaringan internet sehingga memungkinkan perangkat tersebut untuk mengumpulkan, bertukar, dan menganalisis data secara otomatis tanpa intervensi manusia secara langsung, guna mendukung proses monitoring dan pengambilan

keputusan yang lebih efisien. IoT bekerja melalui integrasi sensor, perangkat pintar, sistem komunikasi, serta platform komputasi yang saling terhubung sehingga mampu menghasilkan data real-time dari lingkungan fisik seperti gedung, kendaraan, infrastruktur publik, maupun area destinasi wisata. Dalam perkembangannya, IoT menjadi fondasi penting dalam transformasi digital karena kemampuannya menciptakan ekosistem yang terintegrasi antara dunia fisik dan digital untuk meningkatkan efektivitas operasional dan kualitas layanan, sebagaimana dijelaskan bahwa IoT merepresentasikan jaringan objek fisik yang tertanam dengan sensor dan perangkat lunak untuk saling terhubung dan bertukar data melalui internet (Madakam *et al*., 2020).

Gambar 3. *Internet of Things*



Sumber: Btech

Penerapan IoT mencakup berbagai fungsi seperti pemantauan kondisi lingkungan, manajemen energi, sistem keamanan cerdas, pelacakan aset, serta pengendalian otomatis terhadap perangkat yang terhubung, sehingga meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan mengurangi kesalahan manual dalam proses operasional. Teknologi ini juga mendukung analitik berbasis data karena informasi yang dikumpulkan oleh sensor dapat diolah untuk mengidentifikasi pola, memprediksi kebutuhan, serta mengoptimalkan kinerja sistem secara berkelanjutan. Dengan kemampuan konektivitas dan otomatisasi yang tinggi, IoT memungkinkan organisasi untuk merespons perubahan secara cepat, meningkatkan transparansi operasional, serta menciptakan sistem yang lebih adaptif terhadap kebutuhan pengguna.

4. Aplikasi Mobile dan Digital Platform

Aplikasi mobile dan digital platform merupakan bagian penting dari ekosistem transformasi digital yang memungkinkan layanan, informasi, dan interaksi dilakukan secara cepat, fleksibel, serta terintegrasi melalui perangkat berbasis internet seperti smartphone, tablet, dan komputer. Aplikasi mobile berfungsi sebagai antarmuka utama yang memudahkan pengguna mengakses berbagai layanan secara real-time, termasuk komunikasi, transaksi, pemesanan, navigasi, serta pengelolaan data pribadi, sementara digital platform menjadi sistem yang menghubungkan berbagai aktor dalam satu lingkungan digital untuk mendukung pertukaran informasi dan transaksi secara efisien. Perkembangan aplikasi mobile dan digital platform didorong oleh kemajuan teknologi jaringan, komputasi awan, serta integrasi data yang memungkinkan terciptanya ekosistem digital yang adaptif dan berorientasi pada pengalaman pengguna, sebagaimana dijelaskan bahwa platform digital berperan sebagai infrastruktur teknologi yang menghubungkan pengguna dan penyedia layanan dalam satu sistem terintegrasi untuk menciptakan nilai melalui interaksi digital (Cusumano *et al*., 2021).

Pada praktiknya, aplikasi mobile mendukung personalisasi layanan melalui pemanfaatan data pengguna untuk memberikan rekomendasi yang relevan, notifikasi berbasis lokasi, serta fitur interaktif yang meningkatkan kenyamanan dan keterlibatan pengguna dalam berbagai aktivitas digital. Digital platform memungkinkan integrasi berbagai layanan dalam satu sistem, seperti pembayaran digital, pemesanan online, manajemen konten, serta komunikasi dua arah, sehingga meningkatkan efisiensi operasional dan mempercepat proses layanan. Kombinasi keduanya menciptakan lingkungan digital yang saling terhubung, di mana data dapat mengalir secara sistematis untuk mendukung analitik, inovasi layanan, dan pengambilan keputusan berbasis informasi yang lebih akurat.

5. Sistem Pemantauan Lingkungan

Sistem Pemantauan Lingkungan merupakan pendekatan berbasis teknologi yang digunakan untuk mengamati, mengukur, dan menganalisis kondisi lingkungan secara berkelanjutan melalui penggunaan sensor, perangkat digital, serta sistem pengolahan data sehingga perubahan parameter lingkungan dapat dideteksi secara akurat

dan tepat waktu. Sistem ini biasanya memanfaatkan teknologi seperti *Internet of Things* (IoT), citra satelit, sensor kualitas udara dan air, serta platform analitik untuk mengumpulkan data real-time terkait faktor-faktor lingkungan seperti suhu, kelembapan, polusi, kebisingan, kualitas air, dan perubahan tutupan lahan. Dalam perkembangannya, sistem ini menjadi bagian penting dari strategi pengelolaan berbasis data karena memungkinkan proses monitoring yang lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap dinamika lingkungan, sebagaimana dijelaskan bahwa environmental monitoring systems berfungsi untuk menyediakan data yang konsisten dan andal guna mendukung pengambilan keputusan dalam pengelolaan lingkungan (UNEP, 2021).

Penerapan Sistem Pemantauan Lingkungan membantu lembaga pemerintah maupun organisasi dalam mengidentifikasi potensi risiko lingkungan, seperti pencemaran, degradasi ekosistem, serta dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan alam, sehingga langkah mitigasi dapat dilakukan lebih cepat dan terarah. Sistem ini juga mendukung evaluasi kebijakan dan program pembangunan dengan menyediakan indikator lingkungan yang terukur, memungkinkan analisis tren jangka panjang, serta meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam. Melalui integrasi data spasial dan analitik digital, sistem pemantauan lingkungan dapat menghasilkan visualisasi informasi yang memudahkan pemangku kepentingan memahami kondisi aktual dan merumuskan strategi keberlanjutan secara lebih efektif.

C. *Big Data* dan Analisis Pengunjung

1. Pengertian *Big Data*

Big Data merujuk pada kumpulan data dalam jumlah sangat besar, beragam, dan dihasilkan dengan kecepatan tinggi dari berbagai sumber digital yang tidak dapat diolah secara efektif menggunakan metode konvensional. Dalam sektor pariwisata, *Big Data* berasal dari transaksi online, media sosial, aplikasi pemesanan, sistem tiket, sensor, serta jejak digital wisatawan selama berinteraksi dengan destinasi. Data tersebut dapat dianalisis untuk menemukan pola perilaku, tren kunjungan, preferensi wisatawan, serta efektivitas strategi promosi.

2. Sumber Data dalam *Big Data* Pariwisata

Big Data dalam analisis pengunjung umumnya bersumber dari:

a. Platform pemesanan online (reservasi hotel, tiket transportasi, paket wisata).
b. Media sosial (ulasan, komentar, foto, dan interaksi wisatawan).
c. Website destinasi (data kunjungan, durasi akses, halaman yang sering dilihat).
d. Aplikasi mobile (lokasi pengguna, preferensi pencarian, dan riwayat perjalanan).
e. Sensor dan teknologi IoT (jumlah pengunjung real-time, kepadatan area, arus pergerakan).

3. Analisis Pengunjung (*Visitor Analytics*)

Analisis pengunjung (*visitor analytics*) merupakan proses pengumpulan, pengolahan, dan interpretasi data yang berkaitan dengan perilaku, preferensi, dan interaksi wisatawan terhadap suatu destinasi atau layanan pariwisata, yang memungkinkan pengelola untuk memahami pola kunjungan secara mendalam, mengidentifikasi tren, serta merancang strategi pengelolaan yang lebih efektif dan berbasis data (Li *et al*., 2021). Melalui analisis ini, pengelola destinasi dapat menilai durasi kunjungan, jalur pergerakan wisatawan, tingkat kepuasan, serta jenis aktivitas yang diminati, sehingga setiap keputusan pengembangan produk dan layanan wisata dapat dilakukan dengan presisi tinggi dan sesuai kebutuhan pasar. Selain itu, pemanfaatan teknologi seperti sensor, GPS, media sosial, dan sistem reservasi digital memperkuat akurasi data yang dikumpulkan, memungkinkan visualisasi tren real-time dan prediksi perilaku pengunjung di masa mendatang.

Visitor analytics juga berperan penting dalam pengelolaan kapasitas destinasi, termasuk pemetaan kepadatan area untuk mencegah *over-tourism* dan dampak negatif terhadap lingkungan serta pengalaman wisatawan, serta membantu merancang sistem reservasi atau jalur kunjungan yang lebih efisien. Informasi yang diperoleh dari analisis pengunjung dapat digunakan untuk mengoptimalkan strategi pemasaran digital, misalnya melalui segmentasi pasar berdasarkan demografi, preferensi aktivitas, dan sumber asal wisatawan, sehingga promosi dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran dan meningkatkan konversi kunjungan. Selain itu, insight dari data pengunjung membantu pengembangan inovasi layanan dan fasilitas, mulai dari penyediaan

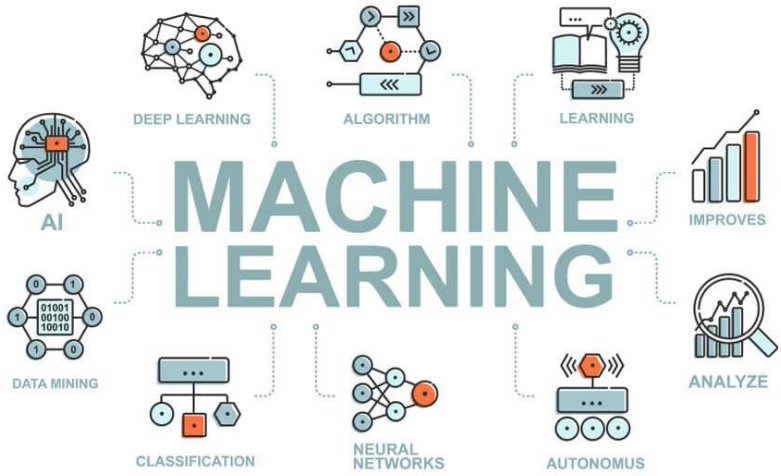
konten digital interaktif hingga pengalaman personalisasi yang meningkatkan engagement dan loyalitas wisatawan.

4. Tujuan *Big Data* dan Analisis Pengunjung

Big Data dan analisis pengunjung berfungsi untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai pola kunjungan dan preferensi wisatawan sehingga pengelola destinasi dapat merancang strategi pemasaran dan layanan yang lebih tepat sasaran serta meningkatkan pengalaman pengunjung secara keseluruhan, yang membantu meningkatkan retensi dan loyalitas wisatawan melalui pemahaman terhadap perilakunya yang kompleks (Li *et al*., 2021). Melalui tujuan ini, data yang dihasilkan dari berbagai sumber digital seperti sistem reservasi, media sosial, dan sensor lapangan memungkinkan identifikasi segmen pasar yang berbeda, kebutuhan khusus, serta waktu kunjungan puncak, sehingga upaya promosi dan pengembangan produk wisata dapat disesuaikan untuk setiap segmen. Analisis pengunjung juga membantu menilai efektivitas program dan inisiatif yang telah dijalankan sehingga setiap kebijakan atau perubahan operasional dapat dievaluasi dan dioptimalkan berdasarkan bukti nyata, bukan asumsi semata.

Penggunaan *Big Data* dalam konteks ini memungkinkan prediksi tren kunjungan di masa mendatang dengan memanfaatkan teknik analitik canggih seperti *machine learning* dan algoritma prediktif, yang berarti pengelola destinasi bisa merencanakan kapasitas, sumber daya, dan fasilitas secara lebih efisien untuk mengantisipasi lonjakan atau penurunan kunjungan. Tujuan analisis pengunjung bukan hanya sekadar memahami apa yang telah terjadi, tetapi juga menyediakan landasan untuk pengambilan keputusan strategis yang proaktif, seperti menentukan waktu peluncuran kampanye promosi atau pengembangan atraksi baru. Hal ini pada akhirnya membantu menciptakan sistem pariwisata yang responsif, berkelanjutan, dan adaptif terhadap perubahan kebutuhan pasar serta dinamika global.

Gambar 4. *Machine Learning*



Sumber: Code Politan

Fokus utama dari tujuan *Big Data* dan analisis pengunjung adalah memaksimalkan nilai ekonomi dari pariwisata tanpa mengorbankan kualitas pengalaman maupun keseimbangan ekologis di destinasi yang bersangkutan. Dengan menggunakan data sebagai dasar, pengelola dapat meminimalkan risiko operasional dan finansial serta mengalokasikan anggaran dan sumber daya secara lebih efektif berdasarkan prioritas yang muncul dari hasil analisis. Pendekatan ini mendukung kebutuhan untuk menjadi lebih kompetitif di era digital, karena pemahaman yang akurat tentang pengunjung membantu destinasi berinovasi lebih cepat dan responsif dibandingkan dengan kompetitor yang masih mengandalkan pendekatan tradisional.

D. Tantangan Digitalisasi Pariwisata

Digitalisasi pariwisata membawa banyak peluang dalam meningkatkan efisiensi, kualitas layanan, dan daya saing destinasi, namun proses implementasinya juga menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Tantangan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek teknologi, tetapi juga sumber daya manusia, regulasi, keamanan data, hingga kesiapan infrastruktur di tingkat destinasi. Pemahaman yang komprehensif terhadap tantangan ini penting agar transformasi digital dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

1. Keterbatasan Infrastruktur Teknologi

Keterbatasan infrastruktur teknologi menjadi salah satu hambatan paling nyata dalam proses digitalisasi pariwisata, karena tanpa ketersediaan jaringan internet yang cepat dan stabil, perangkat keras yang memadai, serta sistem digital yang terintegrasi dengan baik, banyak destinasi tidak mampu memaksimalkan implementasi layanan digital seperti pemesanan daring, aplikasi panduan wisata, maupun sistem analisis data pengunjung (Khaeriah, 2026). Kondisi ini seringkali diperparah oleh disparitas akses teknologi antara kawasan perkotaan dan pedesaan atau area terpencil, sehingga destinasi wisata yang berada di luar pusat-pusat urban cenderung tertinggal dalam hal adopsi teknologi, membatasi kemampuan dalam bersaing di era digital yang serba cepat ini. Dampaknya tidak hanya menghambat pengalaman wisatawan secara langsung, tetapi juga mengurangi efektivitas promosi digital, pengelolaan data, serta inovasi layanan yang dapat meningkatkan daya tarik dan kualitas destinasi secara keseluruhan.

Perangkat teknologi seperti server, sensor IoT, platform reservasi, dan infrastruktur penyimpanan data memerlukan investasi besar dan pemeliharaan berkelanjutan, sementara banyak pengelola pariwisata skala kecil dan menengah masih menghadapi keterbatasan dana untuk mengadopsi atau memperbarui teknologi tersebut. Ketergantungan pada infrastruktur dasar seperti listrik yang stabil dan konektivitas broadband yang memadai juga menjadi tantangan di banyak kawasan wisata, terutama yang berada di luar pusat ekonomi utama di negara berkembang. Keterbatasan ini berpotensi menciptakan jurang digital antara destinasi yang maju secara teknologi dan yang belum siap, sehingga kemampuan destinasi untuk menarik wisatawan modern yang mengharapkan layanan digital yang mulus menjadi terbatas.

2. Kesiapan Sumber Daya Manusia

Kesiapan sumber daya manusia menjadi tantangan utama dalam digitalisasi pariwisata karena transformasi teknologi menuntut tenaga kerja memiliki kompetensi digital yang relevan, mampu mengoperasikan perangkat dan sistem digital, serta cepat beradaptasi dengan perubahan peran kerja yang terus berkembang di sektor ini (Stylianou & Pericleous, 2025). Kesenjangan kemampuan yang ada sering kali terlihat dari kurangnya pengalaman praktis dengan perangkat lunak industri, keterampilan pemasaran digital, manajemen data, dan kemampuan

berkomunikasi melalui platform teknologi modern, sehingga pelaku pariwisata perlu program pelatihan yang berkelanjutan untuk menutup gap tersebut dan memperkuat daya saing tenaga kerjanya. Hambatan ini semakin kompleks ketika adanya resistensi terhadap perubahan dari metode tradisional, kurangnya kesempatan pendidikan dan pelatihan formal yang sesuai, serta perbedaan tingkat kesiapan antar generasi pekerja, sehingga kesiapan SDM menjadi faktor penentu dalam keberhasilan penerapan digitalisasi di destinasi wisata modern.

Perubahan cepat dalam teknologi seperti sistem reservasi otomatis, aplikasi mobile wisata, analitik data besar, dan pemasaran berbasis AI mengharuskan pekerja tidak hanya memahami fungsi dasar, tetapi juga memiliki keterampilan lanjutan untuk menafsirkan data, merancang pengalaman digital, serta mengoptimalkan interaksi dengan wisatawan secara real-time. Sementara itu, sektor pariwisata yang mengandalkan keunggulan layanan personal masih harus memperkuat aspek kultural dan interpersonal dalam pelatihan digital agar tidak kehilangan nilai layanan tradisionalnya, sekaligus memanfaatkan teknologi untuk memperkaya pengalaman wisatawan. Kesiapan SDM yang rendah dapat memperlambat adopsi teknologi, memunculkan kesalahan operasional, serta menghambat inovasi layanan, sehingga investasi dalam pelatihan, *re-skilling*, dan *up-skilling* menjadi strategi krusial untuk membangun *workforce* yang adaptif dan produktif di era digital.

3. Keamanan dan Perlindungan Data

Keamanan dan perlindungan data merupakan aspek krusial dalam digitalisasi pariwisata karena berbagai sistem digital seperti platform pemesanan, aplikasi mobile, dan analitik pengunjung mengumpulkan serta memproses data pribadi wisatawan yang harus dijaga kerahasiaannya, integritasnya, dan ketersediaannya agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang. Risiko kebocoran data, peretasan sistem, dan penyalahgunaan informasi dapat menimbulkan dampak serius seperti kerugian finansial, hilangnya kepercayaan wisatawan, serta rusaknya reputasi destinasi wisata yang bergantung pada citra keamanan dan profesionalisme layanan. Isu keamanan siber juga menjadi perhatian global karena meningkatnya ketergantungan pada teknologi digital dalam berbagai sektor, termasuk pariwisata, yang menuntut penerapan sistem perlindungan data yang

kuat, kebijakan keamanan yang jelas, serta pengawasan yang berkelanjutan untuk meminimalkan risiko siber (World Economic Forum, 2020).

Perlindungan data dalam konteks pariwisata mencakup penerapan enkripsi, autentikasi berlapis, pengelolaan akses berbasis peran, serta sistem backup data untuk memastikan bahwa informasi sensitif wisatawan tetap aman selama proses pengumpulan, penyimpanan, dan distribusi data. Selain aspek teknis, diperlukan pula regulasi yang mendukung tata kelola data yang transparan dan akuntabel agar setiap pelaku industri memahami tanggung jawabnya dalam menjaga keamanan informasi pelanggan. Tantangan yang sering muncul adalah kurangnya standar keamanan yang terintegrasi antar platform digital, sehingga diperlukan koordinasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan penyedia teknologi untuk membangun sistem perlindungan data yang konsisten dan terpercaya.

4. Integrasi Sistem dan Interoperabilitas

Integrasi sistem dan interoperabilitas dalam digitalisasi pariwisata merujuk pada kemampuan berbagai platform, aplikasi, dan basis data untuk saling terhubung serta bertukar informasi secara lancar dan aman, sehingga seluruh proses operasional mulai dari reservasi, manajemen destinasi, layanan pelanggan, hingga analisis data dapat berjalan secara terpadu tanpa terhambat oleh perbedaan sistem teknologi yang digunakan oleh masing-masing pemangku kepentingan. Konsep ini menjadi penting karena sektor pariwisata melibatkan banyak aktor seperti pemerintah, pelaku usaha, operator transportasi, dan penyedia layanan digital yang masing-masing memiliki sistem informasi berbeda, sehingga tanpa interoperabilitas yang baik, data akan terfragmentasi dan mengurangi efektivitas pengambilan keputusan berbasis bukti. Standar interoperabilitas menekankan pentingnya kerangka kerja bersama agar pertukaran data dapat dilakukan secara konsisten, aman, dan efisien lintas platform dan lintas institusi untuk mendukung transformasi digital yang terkoordinasi (European Commission, 2021).

Tujuan utama integrasi sistem adalah menciptakan ekosistem digital yang saling terhubung, di mana data pengunjung, informasi destinasi, sistem pembayaran, dan layanan pendukung lainnya dapat diakses secara real-time oleh pihak yang berwenang untuk meningkatkan kualitas layanan dan efisiensi operasional. Dengan interoperabilitas yang

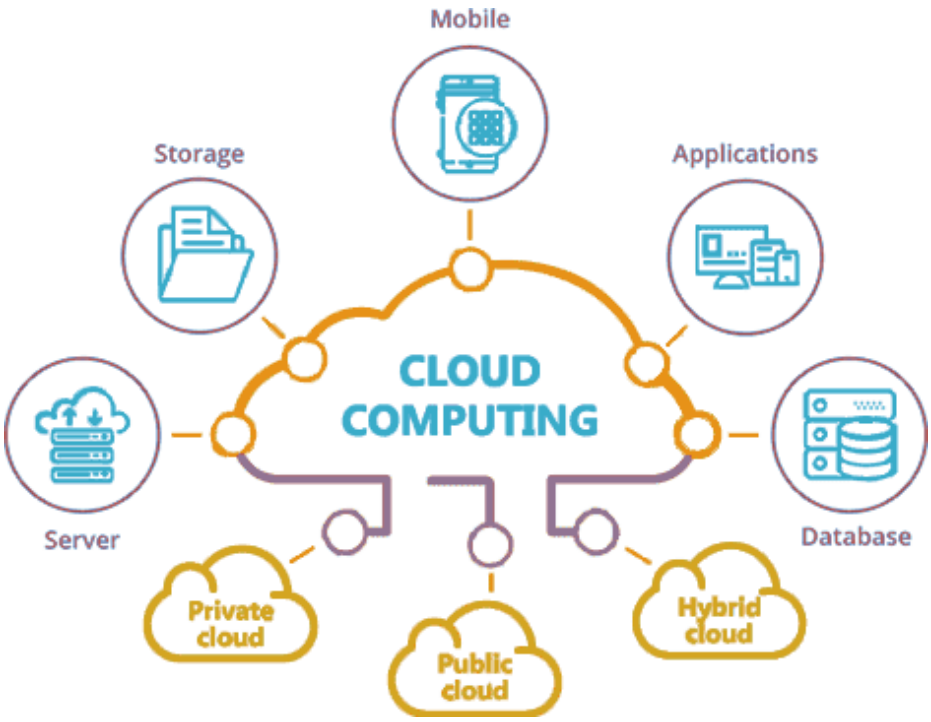
baik, destinasi wisata dapat menghindari duplikasi data, mengurangi kesalahan administratif, serta mempercepat proses pelayanan kepada wisatawan karena seluruh komponen sistem bekerja dalam satu alur informasi yang terstandarisasi. Selain itu, integrasi sistem memungkinkan analisis data yang lebih komprehensif karena informasi yang berasal dari berbagai sumber dapat digabungkan dan diolah secara menyeluruh untuk mendukung perencanaan strategis dan inovasi layanan.

5. Biaya Implementasi dan Pemeliharaan

Biaya implementasi dan pemeliharaan dalam digitalisasi pariwisata merupakan salah satu faktor krusial yang memengaruhi keberhasilan transformasi teknologi, karena proses adopsi sistem digital memerlukan investasi awal yang mencakup pengadaan perangkat keras, perangkat lunak, infrastruktur jaringan, pelatihan sumber daya manusia, serta integrasi sistem yang terhubung dengan berbagai platform layanan wisata. Selain biaya awal, organisasi juga harus memperhitungkan pengeluaran berkelanjutan seperti pembaruan sistem, perawatan perangkat, lisensi perangkat lunak, peningkatan keamanan siber, serta dukungan teknis untuk memastikan sistem tetap berfungsi optimal dan relevan dengan perkembangan teknologi yang terus berubah. Transformasi digital di sektor pariwisata menuntut pendekatan strategis dalam perencanaan anggaran agar investasi teknologi tidak hanya bersifat sementara, tetapi mampu mendukung efisiensi operasional dan peningkatan kualitas layanan dalam jangka panjang (UNWTO, 2021).

Tingginya biaya implementasi sering menjadi hambatan utama bagi destinasi wisata skala kecil dan menengah yang memiliki keterbatasan anggaran, sehingga perlu mempertimbangkan prioritas kebutuhan teknologi serta memilih solusi digital yang sesuai dengan kapasitas finansial dan operasional yang dimiliki. Selain itu, biaya pemeliharaan yang berkelanjutan dapat meningkat seiring bertambahnya kompleksitas sistem, terutama ketika destinasi mengadopsi teknologi canggih seperti *big data*, sistem berbasis cloud, sensor IoT, dan platform analitik yang memerlukan dukungan teknis khusus serta keamanan tingkat tinggi. Ketidaksiapan dalam mengelola biaya jangka panjang dapat menyebabkan sistem tidak diperbarui secara optimal, yang pada akhirnya menurunkan kinerja teknologi dan mengurangi manfaat digitalisasi bagi pengelolaan destinasi.

Gambar 5. Cloud Computing



Sumber: Vention

Pengelolaan biaya implementasi dan pemeliharaan memerlukan perencanaan strategis berbasis analisis kebutuhan, studi kelayakan, serta evaluasi manfaat ekonomi yang dihasilkan dari investasi teknologi agar pengeluaran yang dilakukan memberikan nilai tambah yang sepadan. Kolaborasi antara sektor publik dan swasta juga dapat menjadi solusi untuk membagi beban biaya melalui skema kemitraan, pendanaan bersama, atau dukungan kebijakan yang mendorong efisiensi pengembangan infrastruktur digital. Pendekatan yang terstruktur dalam pengelolaan biaya tidak hanya membantu menjaga stabilitas operasional sistem digital, tetapi juga memastikan bahwa transformasi teknologi dalam pariwisata dapat berlangsung secara berkelanjutan dan memberikan dampak positif terhadap daya saing destinasi.

BAB X
MONITORING DAN EVALUASI PARIWISATA BERKELANJUTAN

Monitoring dan evaluasi pariwisata berkelanjutan merupakan proses penting dalam memastikan bahwa pengembangan sektor pariwisata berjalan sesuai dengan prinsip keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi. Melalui kegiatan ini, dampak dari berbagai kebijakan dan program pariwisata dapat diukur secara sistematis sehingga dapat diketahui apakah tujuan pembangunan telah tercapai secara efektif dan bertanggung jawab.

Proses monitoring dan evaluasi juga berperan dalam mengidentifikasi tantangan, risiko, serta peluang perbaikan dalam pengelolaan destinasi wisata agar tetap seimbang dan berdaya saing. Dengan penerapan yang konsisten, monitoring dan evaluasi membantu pengambil kebijakan dalam merumuskan strategi yang lebih adaptif, transparan, dan berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang.

A. Indikator Kinerja Keberlanjutan

Indikator Kinerja Keberlanjutan merupakan ukuran terukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu destinasi atau kegiatan pariwisata telah menerapkan prinsip keberlanjutan secara konsisten pada aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Indikator ini berfungsi sebagai alat pemantauan untuk mengevaluasi dampak pembangunan pariwisata, mengidentifikasi potensi masalah, serta memastikan bahwa pertumbuhan sektor pariwisata tidak merusak sumber daya alam maupun kesejahteraan masyarakat lokal.

1. Indikator Lingkungan

Indikator lingkungan merupakan ukuran yang penting untuk menilai dampak dan kinerja aspek lingkungan dalam penerapan pariwisata berkelanjutan, mencakup berbagai elemen alamiah yang berkaitan dengan kualitas ekosistem dan sumber daya alam di sekitar destinasi wisata. Salah satu fokus utama dari indikator ini adalah

memantau kondisi fisik dan biotik lingkungan serta tekanan dari aktivitas pariwisata yang dapat menyebabkan perubahan lingkungan yang tidak diinginkan, seperti polusi, kerusakan habitat, dan degradasi sumber daya alam. Menurut Javed (2025), indikator lingkungan dalam pariwisata berkelanjutan termasuk pengukuran polusi yang dihasilkan wisatawan pada air, udara, dan tanah yang dapat memberikan gambaran seberapa besar aktivitas wisata berdampak pada kualitas lingkungan natural suatu destinasi.

Secara rinci, indikator lingkungan mencakup pengukuran kualitas udara yang menggambarkan tingkat partikel dan emisi di udara yang dipengaruhi oleh transportasi dan aktivitas wisata, serta kualitas air yang menunjukkan kesegaran dan kebersihan sumber daya air di sekitar destinasi yang penting untuk kesehatan ekosistem dan manusia. Indikator lainnya meliputi konsumsi energi dan sumber daya alam yang dipakai oleh fasilitas pariwisata, jumlah dan pengelolaan limbah termasuk sampah padat dan limbah cair, serta status flora dan fauna yang menjadi penanda kesehatan biodiversitas di kawasan wisata. Selain itu, indikator ini juga mencakup pengukuran tingkat kebisingan, perubahan lanskap alami, serta luas ruang terbuka hijau yang menunjukkan keseimbangan antara pembangunan infrastruktur wisata dan pelestarian lingkungan alam.

2. Indikator Sosial dan Budaya

Indikator sosial dan budaya adalah ukuran yang digunakan untuk menilai dampak sosial-budaya dari aktivitas pariwisata terhadap masyarakat lokal serta interaksi antara wisatawan dan komunitas host, termasuk bagaimana kegiatan wisata memengaruhi struktur sosial, nilai-nilai budaya, tradisi, serta kesejahteraan komunitas di area destinasi. Fokusnya mencakup variabel-variabel seperti pelestarian budaya lokal, penghormatan terhadap tradisi masyarakat, partisipasi penduduk dalam aktivitas pariwisata, serta persepsi masyarakat terhadap manfaat yang diperoleh dari pariwisata, sehingga indikator ini menjadi alat penting untuk memastikan bahwa perkembangan pariwisata tidak merusak tatanan sosial dan nilai budaya setempat. Penelitian oleh Gaonkar (2025) menunjukkan bahwa indikator keberlanjutan budaya termasuk elemen seperti keaslian budaya, kesadaran budaya, pemberdayaan komunitas lokal, serta praktik keberlanjutan budaya yang secara signifikan memengaruhi kemajuan pengembangan pariwisata budaya

berkelanjutan, sehingga pengukuran indikator-indikator ini dapat menjadi dasar evaluasi sosial-budaya pariwisata di suatu destinasi.

Secara lebih rinci, indikator sosial dan budaya dapat mencakup tingkat kepuasan masyarakat terhadap aktivitas pariwisata yang berlangsung di wilayahnya, ukuran partisipasi penduduk lokal dalam pengambilan keputusan dan keuntungan ekonomi, serta adanya perlindungan terhadap praktik budaya tradisional agar tidak terkikis oleh komersialisasi wisata. Aspek lainnya antara lain pengukuran persepsi masyarakat terhadap perubahan nilai sosial akibat interaksi dengan wisatawan, serta evaluasi pelestarian warisan budaya, ritual, dan bahasa lokal sebagai bagian dari daya tarik wisata yang memiliki nilai autentik.

3. Indikator Ekonomi

Indikator ekonomi dalam pariwisata berkelanjutan adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai kontribusi dan dampak aktivitas pariwisata terhadap perekonomian suatu destinasi, sekaligus memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan sejalan dengan prinsip keberlanjutan jangka panjang. Indikator ini mencakup variabel-variabel seperti kontribusi pariwisata terhadap produk domestik bruto (GDP), penciptaan lapangan kerja, pendapatan dari sektor pariwisata, serta distribusi manfaat ekonomi kepada masyarakat lokal, yang semuanya membantu menggambarkan seberapa efektif sektor pariwisata mendorong kemajuan ekonomi tanpa mengorbankan aspek sosial dan lingkungan di sekitarnya, serta melihat hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan aspek keberlanjutan lainnya dalam jangka panjang. Penelitian dalam bidang ini menunjukkan bahwa indikator ekonomi seperti pendapatan dari sektor pariwisata, pertumbuhan GDP yang dihasilkan dari aktivitas pariwisata, jumlah pekerjaan yang diciptakan, dan tingkat investasi dalam sektor itu sendiri merupakan parameter penting untuk mengevaluasi dampak ekonomi pariwisata sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan yang mendorong pembangunan pariwisata yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Secara operasional, indikator ekonomi sering mencakup rasio kontribusi pariwisata terhadap GDP total, pertumbuhan tahunan dari penerimaan pariwisata, tingkat penyerapan tenaga kerja lokal oleh sektor pariwisata, serta ukuran alokasi investasi yang mengalir ke destinasi wisata. Indikator-indikator ini memberikan data penting yang membantu pengambil keputusan, pelaku usaha, dan masyarakat setempat dalam

memahami bagaimana pariwisata berdampak pada struktur ekonomi lokal dan nasional serta menentukan strategi yang dapat memperkuat manfaat ekonomi sembari meminimalkan risiko kerugian ekonomi, seperti ketergantungan yang tidak sehat terhadap satu segmen pasar atau fenomena leakage dimana sebagian besar pendapatan pariwisata tidak tinggal atau berputar di dalam ekonomi lokal.

4. Indikator Tata Kelola (*Governance*)

Indikator tata kelola (*governance*) dalam pariwisata berkelanjutan merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai kualitas proses pengambilan keputusan, transparansi, akuntabilitas, partisipasi pemangku kepentingan, serta efektivitas kebijakan dalam pengelolaan destinasi wisata agar selaras dengan prinsip keberlanjutan. Indikator ini membantu memastikan bahwa seluruh kebijakan, program, dan regulasi yang diterapkan memiliki landasan hukum yang jelas, mekanisme koordinasi yang efektif antar lembaga, serta sistem pengawasan yang mampu mencegah penyimpangan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan pariwisata. Dalam konteks pengukuran global, tata kelola yang baik diidentifikasi melalui dimensi seperti efektivitas pemerintah, kualitas regulasi, supremasi hukum, pengendalian korupsi, dan stabilitas kelembagaan sebagai komponen penting dalam menciptakan sistem pembangunan yang berkelanjutan (World Bank, 2021).

Secara rinci, indikator tata kelola mencakup tingkat transparansi informasi kepada masyarakat dan wisatawan, keterlibatan komunitas lokal dalam proses perencanaan destinasi, serta adanya mekanisme konsultasi publik yang memastikan aspirasi berbagai pihak terakomodasi dalam kebijakan pariwisata. Selain itu, indikator ini juga meliputi kapasitas kelembagaan dalam mengimplementasikan regulasi lingkungan dan sosial, efektivitas koordinasi antar sektor pemerintah dan swasta, serta keberadaan sistem monitoring dan evaluasi yang terstruktur untuk menilai kinerja program secara berkala. Aspek integritas dan pencegahan korupsi juga menjadi bagian penting karena tata kelola yang lemah dapat menghambat distribusi manfaat pariwisata secara adil dan mengurangi keberlanjutan jangka panjang destinasi.

B. Sistem Monitoring dan Pelaporan

Sistem Monitoring dan Pelaporan merupakan mekanisme terstruktur yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data terkait pelaksanaan program atau kebijakan pariwisata agar kinerjanya dapat dievaluasi secara berkala dan objektif. Sistem ini berfungsi sebagai alat pengawasan berkelanjutan untuk memastikan bahwa indikator kinerja yang telah ditetapkan baik aspek lingkungan, sosial, ekonomi, maupun tata kelola dapat diukur secara konsisten dan transparan. Dalam konteks pariwisata berkelanjutan, sistem ini menjadi fondasi penting untuk mendeteksi perubahan, mengidentifikasi masalah sejak dini, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data (*evidence-based decision making*).

1. Tujuan Sistem Monitoring dan Pelaporan

Tujuan sistem monitoring dan pelaporan dalam konteks pariwisata berkelanjutan adalah untuk mengumpulkan data secara sistematis tentang kinerja pariwisata, menilai kemajuan terhadap indikator keberlanjutan yang telah ditetapkan, dan menyediakan informasi yang dapat dipercaya untuk pengambilan keputusan yang berbasis bukti (*evidence-based decision-making*) serta perumusan kebijakan yang responsif terhadap dinamika lingkungan, sosial dan ekonomi. Informasi yang dihasilkan melalui sistem ini membantu pemangku kepentingan dan pengelola destinasi memahami dampak pariwisata terhadap masyarakat lokal dan sumber daya alam, serta mengidentifikasi area yang memerlukan intervensi atau perbaikan agar tujuan pembangunan berkelanjutan dapat tercapai secara efektif (Font *et al*., 2021). Selain itu, sistem pelaporan memastikan bahwa hasil monitoring dapat dikomunikasikan secara transparan kepada publik dan pemangku kepentingan lainnya sehingga akuntabilitas pengelolaan pariwisata berkelanjutan dapat terjaga dan mendukung kolaborasi antar berbagai pihak dalam merancang strategi perbaikan dan adaptasi jangka panjang.

Dengan penerapan tujuan-tujuan tersebut, sistem monitoring dan pelaporan juga berfungsi sebagai alat feedback loop yang memungkinkan pengelola dan pembuat kebijakan mengevaluasi efektivitas program, merumuskan rencana aksi yang lebih tepat, serta menyesuaikan strategi pengelolaan destinasi berdasarkan bukti empiris

terkini. Dengan demikian, keberlanjutan pariwisata tidak hanya menjadi konsep kebijakan semata tetapi juga tercermin dalam praktik pengelolaan yang nyata dan terukur melalui data yang dikumpulkan dan dilaporkan secara berkala.

2. Komponen Utama Sistem Monitoring

Komponen utama dari sistem monitoring dalam pariwisata berkelanjutan mencakup serangkaian elemen yang saling berkaitan dan mendukung pengumpulan, pengolahan, analisis, dan pelaporan data secara efektif untuk menilai kinerja indikator keberlanjutan destinasi wisata. Komponen ini meliputi penetapan indikator yang relevan dan terukur untuk aspek lingkungan, sosial, ekonomi, dan tata kelola; mekanisme pengumpulan data yang akurat melalui survei, pengamatan lapangan, sistem digital atau sensor; serta prosedur standar bagi pengolahan dan verifikasi data agar hasil yang diperoleh sahih dan dapat dibandingkan dari waktu ke waktu. Menurut Gössling *et al*. (2021), dalam praktiknya sistem monitoring yang komprehensif juga mensyaratkan keberadaan basis data management yang terintegrasi, dashboard informasi yang mudah dibaca, serta protokol evaluasi berkala yang mampu mengubah data mentah menjadi informasi strategis bagi pengambilan keputusan di tingkat pengelolaan destinasi.

Proses pengolahan data dalam komponen sistem monitoring ini tidak hanya mencakup entri dan penyimpanan, tetapi juga analisis statistik dan interpretatif untuk mengetahui tren, pola perubahan, serta dampak yang terjadi akibat aktivitas pariwisata, sehingga dapat memberikan wawasan penting bagi manajer destinasi. Selain itu, komponen komunikasi dan pelaporan menjadi bagian integral yang menjamin bahwa hasil monitoring disusun dalam bentuk laporan berkala—baik naratif maupun grafis—yang mudah dipahami oleh pihak internal maupun pemangku kepentingan eksternal. Komponen pelaporan ini memungkinkan transparansi dalam pengelolaan pariwisata serta memfasilitasi tindak lanjut berupa rekomendasi aksi strategis berbasis bukti untuk meningkatkan kinerja keberlanjutan destinasi.

3. Proses Pelaporan

Proses pelaporan dalam sistem monitoring pariwisata berkelanjutan merupakan tahapan yang krusial untuk menyampaikan hasil pengamatan, analisis, dan interpretasi data kepada para pemangku

kepentingan secara terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan destinasi wisata dapat terjaga. Proses ini mencakup penyusunan laporan yang menyajikan temuan-temuan dari kegiatan monitoring, interpretasi capaian indikator keberlanjutan, serta rekomendasi kebijakan atau tindakan perbaikan yang diperlukan untuk pengembangan pariwisata yang lebih berkelanjutan, di mana laporan tersebut harus disusun secara periodik dan konsisten sesuai dengan standar pelaporan yang berlaku agar informasi yang disampaikan relevan dan dapat dibandingkan dari waktu ke waktu. Menurut Rusu (2024), sustainability reporting adalah praktik pelaporan yang dilakukan untuk menyampaikan bagaimana sebuah organisasi, program, atau kebijakan mempertimbangkan isu-isu keberlanjutan dalam operasionalnya serta dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi yang dihasilkan, sekaligus menjadi alat akuntabilitas dan manajemen hasil bagi pemangku kepentingan.

Pelaporan yang efektif harus mencakup elemen-elemen seperti konteks tujuan pelaporan, metodologi pengumpulan data, ringkasan hasil monitoring berdasarkan indikator yang ditetapkan, serta analisis tren yang terjadi dari periode sebelumnya sehingga pembaca dapat memahami secara mendalam perkembangan kinerja destinasi. Selain itu, laporan ini sering menyertakan visualisasi data (misalnya grafik, tabel) yang memperjelas temuan, narasi naratif yang menghubungkan angka dengan konteks kebijakan, dan catatan tentang keterbatasan data untuk memberikan gambaran yang realistis tentang pengelolaan yang sedang berlangsung.

4. Manfaat Sistem Monitoring dan Pelaporan

Manfaat sistem monitoring dan pelaporan dalam pariwisata berkelanjutan mencakup peningkatan kemampuan pengelola destinasi untuk mengidentifikasi tren, perubahan, maupun risiko yang muncul dari aktivitas pariwisata sehingga keputusan strategis dapat diambil berdasarkan data yang akurat dan relevan, bukan hanya asumsi semata. Melalui pelaporan berkala yang menyajikan temuan-temuan pengukuran indikator kinerja, pemangku kepentingan dapat mengevaluasi efektivitas kebijakan yang diterapkan, mengetahui area yang membutuhkan perbaikan, serta merancang intervensi yang responsif terhadap dinamika lingkungan dan masyarakat setempat, sehingga perencanaan dan pengelolaan pariwisata menjadi lebih adaptif dan berkelanjutan.

Menurut Gürtürk (2022), sistem monitoring dan pelaporan yang tersusun dengan baik juga mendukung transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program serta memperkuat kepercayaan publik terhadap komitmen pengelolaan pariwisata berkelanjutan, yang pada akhirnya mendorong partisipasi aktif pemangku kepentingan dalam mencapai tujuan pembangunan jangka panjang. (Taylor & Francis Online)

Implementasi sistem tersebut memungkinkan pengelola destinasi mengukur dampak positif dan negatif terhadap aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial sehingga strategi mitigasi dapat dirancang secara tepat waktu dan tidak reaktif, yang pada gilirannya membantu mengurangi kerugian serta memaksimalkan manfaat bagi masyarakat lokal dan lingkungan. Manfaat lainnya adalah terciptanya informasi yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi antar lembaga pemerintah, sektor swasta, komunitas lokal, dan wisatawan agar semua pihak memiliki pemahaman bersama mengenai kondisi dan arah pengembangan pariwisata.

C. Audit dan Evaluasi Dampak

1. Pengertian Audit dan Evaluasi Dampak

Audit dan evaluasi dampak merupakan proses sistematis untuk menilai sejauh mana kegiatan, program, atau kebijakan pariwisata memberikan pengaruh terhadap aspek lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi. Proses ini bertujuan untuk mengukur kesesuaian antara rencana pengembangan dengan implementasi di lapangan serta mengidentifikasi konsekuensi positif maupun negatif yang ditimbulkan. Audit lebih berfokus pada pemeriksaan kepatuhan terhadap standar, regulasi, dan indikator yang telah ditetapkan, sedangkan evaluasi dampak menitikberatkan pada analisis perubahan yang terjadi akibat suatu intervensi atau aktivitas pariwisata. Keduanya saling melengkapi dalam memastikan pengelolaan destinasi berjalan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada keberlanjutan.

2. Tujuan Audit dan Evaluasi Dampak

Tujuan audit dan evaluasi dampak dalam pariwisata berkelanjutan adalah untuk memastikan bahwa setiap aktivitas dan kebijakan pengembangan destinasi telah berjalan sesuai dengan standar, regulasi, serta prinsip keberlanjutan yang ditetapkan, sehingga potensi

risiko terhadap lingkungan, masyarakat, dan ekonomi dapat diidentifikasi sejak dini dan dikendalikan secara efektif. Proses ini juga bertujuan untuk menyediakan data dan informasi yang akurat sebagai dasar pengambilan keputusan strategis, agar perencanaan pengembangan destinasi tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan kunjungan, tetapi juga pada keseimbangan antara daya dukung lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal. Selain itu, audit dan evaluasi dampak berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas yang memungkinkan adanya penilaian objektif terhadap kinerja program pariwisata serta mendorong perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola destinasi.

Tujuan lainnya adalah mengukur sejauh mana dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan pariwisata terhadap aspek sosial, budaya, dan ekonomi, sehingga manfaat yang dihasilkan dapat terdistribusi secara adil dan tidak menimbulkan ketimpangan atau konflik di masyarakat setempat. Melalui evaluasi dampak yang sistematis, pengelola destinasi dapat menilai efektivitas kebijakan yang telah diterapkan, mengidentifikasi kelemahan dalam implementasi, serta merancang strategi mitigasi untuk mengurangi dampak negatif yang mungkin muncul. Pendekatan ini selaras dengan pandangan bahwa pengelolaan pariwisata harus mempertimbangkan hubungan erat antara sistem sosial-ekologis dan dinamika perubahan global agar keberlanjutan dapat tercapai secara menyeluruh (Gössling *et al*., 2020).

3. Ruang Lingkup Audit dan Evaluasi Dampak

Audit dan evaluasi dampak mencakup berbagai dimensi yang saling terkait, antara lain:

a. Dimensi Lingkungan
b. Dimensi Sosial dan Budaya
c. Dimensi Ekonomi

4. Tahapan Pelaksanaan Audit dan Evaluasi Dampak

Pelaksanaan audit dan evaluasi dampak dalam pariwisata berkelanjutan melibatkan serangkaian langkah yang sistematis mulai dari perencanaan awal hingga tindak lanjut hasil kajian untuk memastikan kualitas, relevansi, dan efektivitas dari proses evaluasinya. Tahapan ini pertama-tama dimulai dengan perencanaan dan penetapan ruang lingkup di mana tujuan evaluasi ditentukan, indikator yang relevan dipilih, serta sumber data dan metode pengumpulan ditetapkan untuk

mengukur kondisi dasar (*baseline*) terhadap variabel lingkungan, sosial, dan ekonomi. Selanjutnya proses pengumpulan data dilakukan melalui teknik seperti survei, observasi lapangan, wawancara dengan pemangku kepentingan, dan pengambilan data sekunder dari dokumen, sehingga semua informasi yang diperlukan tersedia secara komprehensif untuk analisis dampak.

Langkah berikutnya adalah analisis dan penilaian dampak, di mana data yang terkumpul dibandingkan dengan standar, indikator, atau target keberlanjutan yang telah ditetapkan untuk mengevaluasi perubahan yang terjadi akibat kegiatan pariwisata serta menilai signifikansi dampaknya terhadap aspek yang dianalisis, termasuk potensi risiko dan peluang perbaikan. Tahapan ini bisa mencakup identifikasi dampak positif maupun negatif serta pemodelan atau prediksi terhadap efek jangka panjang dari intervensi pariwisata yang dievaluasi. Kemudian dihasilkan laporan evaluasi yang berisi hasil temuan, interpretasi data, serta rekomendasi strategis untuk perbaikan kebijakan atau praktik pengelolaan destinasi agar lebih berkelanjutan dan efektif.

Tahapan akhir dari proses ini adalah tindak lanjut atau implementasi rekomendasi yang mencakup penerapan strategi mitigasi terhadap dampak negatif, peningkatan program yang efektif, serta monitoring berkelanjutan untuk memastikan bahwa rekomendasi yang diberikan dalam laporan evaluasi benar-benar dilaksanakan dan memberikan hasil yang diharapkan di lapangan, sehingga siklus perbaikan kualitas terus berjalan dalam pengelolaan destinasi pariwisata. Proses evaluasi dampak merupakan bagian penting dari manajemen yang adaptif dan berbasis bukti, di mana setiap tahapan saling berkaitan dan memperkuat akurasi serta akuntabilitas dalam pengambilan keputusan pengembangan pariwisata berkelanjutan (IAIA, 2025).

5. Manfaat Audit dan Evaluasi Dampak

Audit dan evaluasi dampak memberikan manfaat utama dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pariwisata karena proses ini memungkinkan setiap kebijakan, program, dan aktivitas destinasi dinilai berdasarkan indikator yang terukur serta bukti empiris yang dapat diverifikasi secara objektif. Melalui mekanisme penilaian yang sistematis, pengelola destinasi dapat memastikan bahwa praktik operasional telah sesuai dengan standar keberlanjutan serta

regulasi yang berlaku, sehingga risiko penyimpangan dan ketidaksesuaian dapat diminimalkan sejak tahap awal implementasi. Pendekatan evaluatif ini juga membantu membangun sistem tata kelola yang lebih responsif dan berbasis data sehingga keputusan strategis dapat diambil secara lebih tepat dan terarah.

Manfaat lainnya terletak pada kemampuannya dalam mengidentifikasi dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi secara komprehensif sehingga potensi kerusakan ekosistem, tekanan terhadap sumber daya alam, serta ketimpangan distribusi manfaat dapat diketahui dan ditangani melalui strategi mitigasi yang sesuai. Proses audit dan evaluasi dampak juga mendukung peningkatan kualitas perencanaan karena hasil temuan dapat digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki kebijakan, menyempurnakan program pengembangan, dan menyesuaikan strategi pengelolaan dengan kondisi aktual di lapangan. Selain itu, evaluasi yang dilakukan secara berkala memperkuat prinsip kehati-hatian dalam pembangunan pariwisata dengan menekankan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan sistem sosial-ekologis yang saling terhubung (Gössling *et al*., 2020).

D. Continuous Improvement dalam Destinasi

Continuous Improvement dalam destinasi pariwisata merupakan pendekatan pengelolaan yang berfokus pada perbaikan berkelanjutan terhadap kualitas layanan, kinerja operasional, keberlanjutan lingkungan, serta kepuasan pemangku kepentingan melalui proses evaluasi yang sistematis dan berulang. Konsep ini menekankan bahwa pengembangan destinasi tidak dilakukan secara sekali jadi, melainkan melalui siklus perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan perbaikan yang terus menerus agar destinasi mampu beradaptasi terhadap perubahan internal maupun eksternal. Pendekatan ini relevan dalam konteks pariwisata berkelanjutan karena membantu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat lokal.

1. Pengertian dan Prinsip Dasar

Pengertian *Continuous Improvement* (perbaikan berkelanjutan) merujuk pada pendekatan sistematis yang berfokus pada upaya

peningkatan kinerja secara terus-menerus melalui evaluasi, pembelajaran, dan penyesuaian berbasis data dalam suatu organisasi atau sistem pengelolaan. Konsep ini menekankan bahwa kualitas, efektivitas, dan efisiensi tidak dicapai melalui satu kali intervensi, melainkan melalui proses berulang yang terstruktur untuk mengidentifikasi kelemahan, mengoptimalkan proses, serta meningkatkan hasil secara konsisten. Dalam konteks pengelolaan destinasi, *continuous improvement* menjadi fondasi penting untuk memastikan bahwa pengembangan pariwisata tetap adaptif terhadap perubahan lingkungan, kebutuhan wisatawan, serta dinamika sosial-ekonomi yang berkembang, sejalan dengan prinsip peningkatan kualitas yang berkesinambungan dalam manajemen modern (Dahlgaard *et al*., 2020).

Prinsip dasar *continuous improvement* mencakup komitmen terhadap peningkatan bertahap, penggunaan data sebagai dasar pengambilan keputusan, serta keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan dalam proses perbaikan. Pendekatan ini juga mengedepankan siklus manajemen yang berulang seperti perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindakan korektif, sehingga setiap hasil evaluasi menjadi dasar untuk perbaikan berikutnya. Selain itu, prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pembelajaran organisasi menjadi elemen kunci agar proses perbaikan tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dalam mengantisipasi potensi risiko dan peluang pengembangan.

2. Tujuan *Continuous Improvement* dalam Destinasi

Tujuan *Continuous Improvement* dalam destinasi pariwisata adalah untuk memastikan bahwa seluruh aspek pengelolaan, mulai dari pelayanan wisata, tata kelola kelembagaan, hingga kualitas pengalaman pengunjung, mengalami peningkatan secara bertahap dan berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi yang terukur dan sistematis. Pendekatan ini bertujuan menciptakan mekanisme perbaikan yang konsisten agar destinasi mampu beradaptasi terhadap perubahan tren wisata, dinamika pasar, serta tantangan lingkungan dan sosial yang terus berkembang, sehingga kinerja destinasi tetap relevan dan kompetitif dalam jangka panjang. Dalam perspektif manajemen mutu modern, continuous improvement dipandang sebagai strategi strategis untuk meningkatkan efektivitas proses dan kualitas hasil secara berkesinambungan melalui

siklus evaluasi dan tindakan perbaikan yang terstruktur (Dahlgaard *et al*., 2020).

Tujuan berikutnya adalah meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya destinasi, baik sumber daya alam, manusia, maupun finansial, agar pemanfaatannya dapat dilakukan secara optimal tanpa menimbulkan pemborosan atau dampak negatif yang tidak terkendali. *Continuous improvement* juga bertujuan memperkuat sistem monitoring dan evaluasi sehingga setiap kebijakan atau program pengembangan dapat diukur tingkat keberhasilannya dan disesuaikan apabila ditemukan ketidaksesuaian dengan target yang telah ditetapkan. Selain itu, pendekatan ini mendorong pengambilan keputusan berbasis data (*data-driven decision making*) agar perencanaan pengembangan destinasi tidak bersifat spekulatif, melainkan didukung oleh informasi empiris yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Tahapan *Continuous Improvement*

Implementasi perbaikan berkelanjutan umumnya dilakukan melalui tahapan berikut:

a. Perencanaan (*Plan*)

Tahap Perencanaan (*Plan*) dalam *continuous improvement* merupakan langkah awal yang berfungsi untuk mengidentifikasi permasalahan, menetapkan tujuan perbaikan, serta merumuskan strategi dan indikator kinerja yang terukur sebagai dasar pelaksanaan tindakan berikutnya. Pada tahap ini dilakukan analisis kondisi aktual, penentuan prioritas perbaikan, penyusunan rencana kerja, serta penetapan metode evaluasi agar proses peningkatan kualitas dapat berjalan secara sistematis, terarah, dan berbasis data, sehingga setiap intervensi memiliki sasaran yang jelas dan dapat diukur keberhasilannya. Dalam pendekatan manajemen mutu modern, perencanaan dipahami sebagai fondasi utama siklus perbaikan berkelanjutan karena kualitas hasil sangat ditentukan oleh ketepatan identifikasi masalah dan kejelasan tujuan yang dirancang sejak awal proses (Dahlgaard *et al*., 2020).

Tahap perencanaan juga mencakup penetapan sumber daya yang dibutuhkan, pembagian tanggung jawab, serta penyusunan jadwal implementasi agar strategi yang dirancang dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan kapasitas

organisasi atau destinasi. Perencanaan yang baik harus mempertimbangkan risiko potensial, peluang pengembangan, serta masukan dari pemangku kepentingan agar solusi yang dirumuskan bersifat realistis, aplikatif, dan selaras dengan prinsip keberlanjutan serta kebutuhan peningkatan kinerja jangka panjang. Dengan demikian, kualitas tahap Plan akan sangat menentukan keberhasilan tahapan berikutnya dalam siklus *continuous improvement* karena seluruh proses evaluasi dan tindakan perbaikan berangkat dari fondasi perencanaan yang matang dan terstruktur.

b. Pelaksanaan (*Do*)

Tahap Pelaksanaan (*Do*) dalam *continuous improvement* merupakan fase implementasi dari rencana yang telah disusun pada tahap sebelumnya, di mana strategi perbaikan diterapkan secara nyata dalam operasional organisasi atau destinasi sesuai dengan tujuan, indikator, serta jadwal yang telah ditetapkan. Pada tahap ini dilakukan uji coba atau penerapan program perbaikan dalam skala yang telah direncanakan, disertai dengan dokumentasi proses dan pengumpulan data awal untuk memastikan bahwa setiap langkah berjalan sesuai prosedur serta menghasilkan informasi yang dapat digunakan untuk evaluasi selanjutnya. Dalam kerangka manajemen mutu modern, pelaksanaan dipandang sebagai tahap penting karena efektivitas perbaikan sangat bergantung pada konsistensi implementasi rencana serta keterlibatan aktif seluruh pihak yang bertanggung jawab (Dahlgaard *et al*., 2020).

Tahap *Do* menekankan pentingnya koordinasi, komunikasi yang jelas, serta pengawasan operasional agar setiap kegiatan berjalan sesuai standar dan menghindari penyimpangan dari rencana yang telah disusun. Implementasi juga harus dilakukan secara terukur dan terdokumentasi dengan baik sehingga hasilnya dapat dibandingkan pada tahap evaluasi berikutnya untuk menilai tingkat keberhasilan maupun area yang memerlukan penyesuaian. Dengan pelaksanaan yang disiplin, terstruktur, dan berbasis rencana yang matang, tahap ini menjadi jembatan utama yang menghubungkan perencanaan dengan proses evaluasi dalam siklus continuous improvement.

c. Evaluasi (*Check*)

Tahap Evaluasi (*Check*) dalam *continuous improvement* merupakan proses sistematis untuk menilai dan membandingkan hasil pelaksanaan (*Do*) dengan rencana (*Plan*) yang telah ditetapkan sebelumnya guna mengidentifikasi tingkat kesesuaian, efektivitas, serta capaian indikator kinerja yang digunakan sebagai dasar perbaikan. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan analisis data secara objektif untuk mengetahui apakah strategi yang diimplementasikan telah menghasilkan perubahan yang diharapkan, sekaligus mengidentifikasi penyimpangan, kendala, dan peluang peningkatan yang perlu ditindaklanjuti pada siklus berikutnya. Dalam pendekatan manajemen mutu modern, evaluasi diposisikan sebagai komponen kunci karena proses verifikasi berbasis data memungkinkan organisasi memastikan bahwa perbaikan yang dilakukan benar-benar memberikan dampak yang terukur dan selaras dengan tujuan peningkatan kualitas (Dahlgaard *et al*., 2020).

Tahap *Check* juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses *continuous improvement*, sehingga setiap keputusan perbaikan didasarkan pada bukti empiris yang dapat dipertanggungjawabkan. Hasil evaluasi pada tahap ini menjadi dasar untuk menentukan apakah diperlukan tindakan korektif, penyesuaian strategi, atau standarisasi praktik yang telah terbukti efektif sebelum memasuki tahap tindakan (*Act*) dalam siklus perbaikan berkelanjutan. Melalui evaluasi yang terstruktur, organisasi atau destinasi dapat menjaga konsistensi peningkatan kinerja sekaligus memperkuat budaya pembelajaran berbasis data dalam pengelolaan jangka panjang.

d. Tindakan Perbaikan (*Act*)

Tahap Tindakan Perbaikan (*Act*) dalam continuous improvement merupakan fase lanjutan dari proses evaluasi yang berfokus pada penerapan keputusan berdasarkan hasil analisis pada tahap sebelumnya untuk memperbaiki kekurangan, menghilangkan penyebab masalah, serta meningkatkan efektivitas sistem atau program yang dijalankan. Pada tahap ini dilakukan tindakan korektif maupun preventif yang bertujuan

menstandarkan praktik yang telah terbukti berhasil, merevisi prosedur yang belum optimal, serta memastikan bahwa hasil evaluasi benar-benar diimplementasikan ke dalam kebijakan atau operasional agar siklus perbaikan dapat berjalan secara berkelanjutan dan konsisten. Dalam perspektif manajemen mutu modern, tahap tindakan dipahami sebagai komponen penting karena keberhasilan *continuous improvement* ditentukan oleh kemampuan organisasi dalam mengubah hasil evaluasi menjadi perubahan nyata yang meningkatkan kinerja secara sistematis (Dahlgaard *et al*., 2020).

Tahap *Act* juga berfungsi untuk memastikan bahwa pembelajaran yang diperoleh dari proses evaluasi terdokumentasi dan terintegrasi ke dalam standar operasional sehingga perbaikan tidak bersifat sementara, melainkan menjadi bagian dari sistem kerja yang permanen. Apabila hasil evaluasi menunjukkan keberhasilan, maka praktik tersebut perlu distandarisasi dan disebarluaskan; sebaliknya, jika ditemukan ketidaksesuaian, maka dilakukan penyesuaian strategi sebelum memulai siklus perbaikan berikutnya agar proses *continuous improvement* tetap berjalan secara dinamis dan adaptif. Melalui penerapan tindakan perbaikan yang tepat dan terstruktur, organisasi atau destinasi dapat memperkuat kualitas pengelolaan serta memastikan peningkatan kinerja yang berkesinambungan dalam jangka panjang.

4. Penerapan *Continuous Improvement* dalam Destinasi

Penerapan *Continuous Improvement* dalam destinasi pariwisata melibatkan integrasi siklus perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindakan perbaikan secara berulang untuk meningkatkan kualitas layanan, efektivitas pengelolaan, serta keberlanjutan lingkungan dan sosial secara konsisten. Proses ini menekankan penggunaan data yang akurat, partisipasi pemangku kepentingan, serta monitoring berkala agar setiap intervensi dapat disesuaikan dengan kondisi aktual destinasi dan mampu memberikan manfaat optimal bagi wisatawan, masyarakat lokal, dan pengelola destinasi (Dahlgaard *et al*., 2020).

Implementasi *continuous improvement* juga mendorong penguatan kapasitas organisasi melalui pelatihan SDM, pembaruan prosedur operasional, dan penerapan inovasi berbasis teknologi digital

untuk mendukung pengelolaan destinasi secara efisien dan transparan. Penerapan ini memungkinkan pengelola destinasi untuk mengidentifikasi hambatan atau kelemahan dalam praktik operasional secara dini dan menyesuaikan strategi perbaikan sehingga proses pengembangan destinasi tetap adaptif terhadap perubahan kondisi pasar maupun regulasi.

5. Manfaat *Continuous Improvement*

Manfaat *Continuous Improvement* terletak pada kemampuannya dalam meningkatkan kualitas kinerja organisasi secara berkelanjutan melalui proses evaluasi sistematis, perbaikan berbasis data, serta penerapan tindakan korektif yang konsisten sehingga efisiensi operasional dan efektivitas pencapaian tujuan dapat terus ditingkatkan dari waktu ke waktu. Pendekatan ini membantu organisasi atau destinasi dalam mengurangi kesalahan proses, meningkatkan kepuasan pemangku kepentingan, memperkuat inovasi, serta membangun budaya kerja yang adaptif dan responsif terhadap perubahan lingkungan internal maupun eksternal, sebagaimana ditekankan dalam perspektif manajemen mutu modern yang menempatkan perbaikan berkelanjutan sebagai strategi utama peningkatan daya saing dan keberlanjutan (Dahlgaard *et al*., 2020).

BAB XI
PENUTUP

Pariwisata berkelanjutan merupakan paradigma penting dalam pembangunan sektor pariwisata modern yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menekankan keseimbangan antara aspek lingkungan, sosial, dan budaya. Melalui pembahasan yang telah diuraikan dalam buku ini, dapat dipahami bahwa pengelolaan pariwisata memerlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi agar mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan. Konsep keberlanjutan menjadi landasan utama dalam memastikan bahwa aktivitas pariwisata tidak merusak sumber daya yang menjadi daya tarik utama, melainkan justru melestarikannya untuk generasi mendatang.

Berbagai konsep teoretis yang telah dibahas, seperti pendekatan pembangunan berkelanjutan, peran stakeholder, serta prinsip-prinsip tata kelola yang baik, menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan pariwisata tidak dapat dicapai secara parsial. Diperlukan sinergi antara pemerintah, pelaku industri, masyarakat lokal, dan wisatawan itu sendiri. Pemerintah berperan dalam menyusun kebijakan dan regulasi yang mendukung keberlanjutan, sementara pelaku industri dituntut untuk menerapkan praktik bisnis yang bertanggung jawab. Di sisi lain, masyarakat lokal memiliki peran strategis sebagai penjaga nilai-nilai budaya dan lingkungan, sedangkan wisatawan diharapkan memiliki kesadaran untuk berperilaku bijak selama melakukan aktivitas wisata.

Aspek perencanaan dan pengelolaan destinasi menjadi faktor kunci dalam mewujudkan pariwisata berkelanjutan. Perencanaan yang matang harus mempertimbangkan daya dukung lingkungan, potensi ekonomi, serta kondisi sosial budaya setempat. Pengelolaan yang baik juga mencakup pengembangan infrastruktur yang ramah lingkungan, pengelolaan limbah yang efektif, serta upaya konservasi sumber daya alam. Tanpa perencanaan yang tepat, perkembangan pariwisata justru dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti kerusakan lingkungan, konflik sosial, dan penurunan kualitas destinasi.

Di era digital saat ini, inovasi teknologi juga menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung keberlanjutan pariwisata. Pemanfaatan teknologi informasi, seperti sistem manajemen destinasi, promosi digital, serta penggunaan data untuk pengambilan keputusan, dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pariwisata. Selain itu, teknologi juga dapat digunakan untuk meningkatkan pengalaman wisatawan sekaligus meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Oleh karena itu, integrasi antara teknologi dan prinsip keberlanjutan menjadi langkah strategis yang perlu terus dikembangkan.

Implementasi pariwisata berkelanjutan tidak terlepas dari berbagai tantangan. Keterbatasan sumber daya, kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat, serta lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan seringkali menjadi hambatan dalam penerapan konsep ini. Di samping itu, tekanan terhadap lingkungan akibat meningkatnya jumlah wisatawan juga menjadi isu yang perlu diantisipasi dengan kebijakan yang tepat. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh pihak untuk terus meningkatkan kapasitas, memperkuat kolaborasi, serta mengembangkan inovasi dalam pengelolaan pariwisata.

Pariwisata berkelanjutan bukan hanya sebuah konsep, tetapi merupakan kebutuhan yang harus diwujudkan dalam praktik nyata. Melalui pemahaman yang komprehensif dan penerapan strategi yang tepat, sektor pariwisata diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan dan nilai-nilai sosial budaya. Buku ini diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi pembaca dalam memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan, serta menjadi inspirasi untuk menciptakan masa depan pariwisata yang lebih inklusif, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Ajuhari, Z., Aziz, A., Yaakob, S. S. N., Abu Bakar, S., & Mariapan, M. (2023). Systematic Literature Review on Methods of Assessing *Carrying Capacity* in Recreation and Tourism Destinations. Sustainability, 15(4), 3474.

Amir, R., Kasmawati, & Majid, M. (2021). Pengelolaan Limbah Organik Produk Komposter dan Kondisi Sarana Sanitasi Dasar di Rumah Makan Padang. Journal of Health Educational Science and Technology, 4(1), 37–42.

Arifin, F., Habiburrahman, M., & Gusti, W. R. (2023). Classification of Organic and Inorganic Waste Types Based on Neural Networks. Elinvo (Electronics, Informatics, and Vocational Education), 8(1).

Arnstein, S. R. (2021). A Ladder of Citizen Participation Revisited. Journal of Urban Affairs, 43(5), 702-716.

Baggio, R. (2020). Network science and tourism: The state of the art. Tourism Review, 75(1), 163–173.

Bajpai, A. (2020). Environmental Management System: Framework of ISO 14001:2015. National Journal of Environmental Law, 3(1).

Barbier, E. B. (2021). Economics for a Fragile Planet: Pathways to Sustainability. Cambridge: Cambridge University Press.

Bhatia, S., Roy, M., Dhal, S., & Thakur, R. (2025). Mitigating Over-tourism Strategies for Sustainable Destination Management and Visitor Dispersion. International Journal of Environmental Sciences, 11(5s), 1005–1011.

Bianchi, R. V., & de Man, F. (2021). Tourism, inclusive growth and decent work: A political economy critique. Journal of Sustainable Tourism, 29(2–3), 353–371.

Bovens, M. (2020). Public Accountability. In The Oxford Handbook of Public Accountability. Oxford University Press.

Bramwell, B., & Lane, B. (2021). Tourism, Sustainability and Development: International Perspectives and Interdisciplinary Approaches. Wallingford: CABI.

Buckley, R. (2020). Ecotourism: Principles and Practices (2nd ed.). Wallingford: CABI.

Buhalis, D., & Amaranggana, A. (2020). Smart Tourism and Smart Governance: Challenges and Opportunities. Journal of Travel Research, 59(3), 356–372.

Bull, J. W., Baker, J., Griffiths, V. F., Jones, J. P. G., & Milner-Gulland, E. J. (2020). The environmental impact mitigation hierarchy: From principle to practice. Sustainability Science.

Butler, R. W. (1980). Tourism Area Life Cycle Theory stages including development.

Cardinale, B. J. (2020). Biodiversity and the functioning of ecosystems. Nature, 486(7401), 59–67.

Chams-Anturi, O. (2025). Methodology for the Identification and Evaluation of Tourism Resources. Sustainability Journal.

Chapin, F. S., Matson, P. A., & Vitousek, P. M. (2020). Principles of Terrestrial Ecosystem Ecology (3rd ed.). New York: Springer.

Chen, F., Xu, H., & Lew, A. A. (2020). Livelihood resilience in tourism communities: The role of human agency. Journal of Sustainable Tourism, 28(4), 606–624.

Chernega, O. (2021). Assessment of the Competitiveness of the Tourist Destination. Kyiv National University of Trade and Economics, EEM, 8(2): 8–16.

Cusumano, M. A., Gawer, A., & Yoffie, D. B. (2021). The Business of Platforms: Strategy in the Age of Digital Competition, Innovation, and Power. Harper Business.

Dahlgaard, J. J., Chen, C. K., Jang, J. Y., & Banegas, L. (2020). Quality and continuous improvement: Core principles and contemporary applications. Total Quality Management & Business Excellence, 31(3–4), 1–15.

Dasgupta, P. (2021). The Economics of Biodiversity: The Dasgupta Review. London: HM Treasury.

Davidson, R., & Cope, B. (2022). Business Travel: Conferences, Incentive Travel, Exhibitions, Corporate Hospitality and Corporate Travel (3rd ed.). London: Routledge.

Delmas, M. A., & Lessem, N. (2020). Eco-labeling and sustainability: The role of third-party certification in promoting environmentally responsible consumption. Business & Society.

Dessler, G. (2020). Human Resource Management (16th ed.). New York: Pearson Education.

Dewi, N. K. C., *et al*. (2025). Sustainable Tourism: Concept and Implementation for Sustainable Tourism Development.

Dhiman, V., & Arora, M. (2025). What Lies in "Business Incubation and SMEs" Research? A Literature Review and Roadmap for Future Research. Journal of Innovation and Management.

Díaz, S., *et al*. (2020). Biodiversity and Ecosystem Services: Interconnections for Sustainable Development. Nature Sustainability.

Dinata, K. S. (2024). Dampak Pengembangan Pariwisata terhadap Kondisi Ekonomi dan Sosial Budaya Masyarakat Lokal di Kawasan Pariwisata Sanur. ResearchGate Publication.

Dogru, T., Bulut, U., & Sirakaya-Turk, E. (2020). Modelling tourism demand and its impact on economic growth and tourism receipts. Tourism Economics, 26(3), 1–17.

Dorta-González, P., & González-Betancor, S. M. (2021). Employment in Tourism Industries: Are there Subsectors with a Potentially Higher Level of Income? Tourism Economics Research.

Dowling, R. (2020). Sustainable Tourism: Principles, Contexts and Practices. Journal of Sustainable Tourism.

Dredge, D., & Jamal, T. (2020). Tourism Policy, Planning and Governance. Routledge.

Duarte, C. M., Cousins, R., Ficociello, M. A., Williams, I. D., & Khowala, A. (2024). Advancing Global Climate and Biodiversity Goals Through Regenerative Tourism. Sustainability, 16(20), 9133.

Dwivedi, Y. K., *et al*. (2021). Setting the future of digital and social media marketing research: Perspectives and research propositions. International Journal of Information Management, 59, 102168.

Eagles, P. F. J., McCool, S. F., & Haynes, C. D. (2021). Sustainable Tourism in Protected Areas: Guidelines for Planning and Management. Gland: International Union for Conservation of Nature (IUCN).

Eddyono, F., Darusman, D., Sumarwan, U., & Sunarminto, T. (2021). Tourism competitiveness on the utilization zone of National Park in Indonesia. Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacea, 10(2), 145–164.

Fatkhullah, M. (2024). Analisis Potensi Pengembangan Pariwisata di Kota Dumai, Riau. Jurnal Arrehla.

Fayos-Solà, E. (2020). Tourism Policy and Planning: Current Issues and Future Directions. Emerald Publishing.

Febrianita, R., Pratama, R. S., Budiasih, J. D., & Musa, F. B. (2022). Peran UMKM sebagai penunjang peningkatan pariwisata di daerah pesisir. KARYA: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 2(2)

Font, X., & McCabe, S. (2022). Sustainability and marketing in tourism: Its contexts, paradoxes, approaches, challenges and potential. Journal of Sustainable Tourism.

Fyall, A., Garrod, B., & Wang, Y. (2022). Destination Management: Concepts and Cases (3rd ed.). Bristol: Channel View Publications.

Gaonkar, S. (2025). Measuring and evaluating the influence of cultural sustainability indicators and sustainable cultural tourism development (SCTD).

Geçikli, R. M. (2024). Cultural heritage tourism and sustainability: The role of cultural identity in sustainable development of tourism. Sustainability, 16(15), 6424.

Giampiccoli, A., & Mtapuri, O. (2020). Community-based tourism: Critical success factors. African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure, 9(5), 1–15.

Gillovic, B., & McIntosh, A. (2020). Accessible tourism and inclusive tourism development. Dalam kajian pariwisata inklusif dan aksesibilitas destinasi wisata.

Ginanjar, R. (2023). Community Empowerment in Tourism Development. European Scientific Journal.

Godovykh, M., Fyall, A., & Pizam, A. (2025). Exploring the Impacts of Tourism on the Well-Being of Local Communities. Sustainability, 17(13), 5849.

Gössling, S. (2021). Tourism, Tourist Learning and Sustainability: An Exploratory Discussion of Complexity and Change. Journal of Sustainable Tourism.

Gretzel, U. (2022). Smart tourism and digital marketing in tourism destinations. Journal of Tourism Futures, 8(1), 3–8.

Guo, X., Zhang, Y., & Li, H. (2020). The role of eco-labels in promoting green consumption behavior. Journal of Environmental Management.

Gupta, A. (2020). Transparency in global sustainability governance. Journal of Environmental Policy & Planning.

Gürtürk, D. (2022). Monitoring and Reporting Practices for Sustainable Tourism Governance. Taylor & Francis Online.

Haid, M., *et al*. (2021). Sustainable Tourism Product Development: An Application of Product Design Concepts. Sustainability, 13(14), 7957.

Hakim, M. A. A. (2025). The tourism sector as a driver of regional economic growth and employment creation. Efficient: Journal of Economics and Management, Universitas Negeri Semarang.

Hall, C. M. (2020). Tourism and sustainable development: Governance, transformation and the role of institutions. Routledge Handbook of Tourism and Sustainability. London: Routledge.

Haris, S. (2025). Integrating Tourism Policy with Socio-Economic Development. Pusaka Journal of Polytechnic of Makassar.

Heizer, J., Render, B., & Munson, C. (2020). Operations Management: Sustainability and Supply Chain Management (13th ed.). Harlow: Pearson Education Limited.

Hermawati, A. (2024). Enhancing growth in tourism SMEs. Jurnal Aplikasi Manajemen.

Higgins-Desbiolles, F. (2020). Socialising tourism for social and ecological justice after COVID-19. Tourism Geographies, 22(3), 610–623.

Hjalager, A. M. (2020). A Review of Innovation Research in Tourism. Tourism Management.

Hussein, A. N., Alshaibani, M. A. J., & Awdaa, A. A. (2025). Digital Marketing Strategies and Their Impact on Attracting Tourists to Emerging Tourist Destinations. Peerian Journal.

International Energy Agency. (2021). World Energy Outlook 2021. Paris: International Energy Agency.

Islami, M. E. N., Sogen, K. F. N. B., Sarin, K. D., & Trisnice, Y. M. (2025). Pariwisata Inklusif: Tantangan dalam Mewujudkan Destinasi Wisata Ramah Difabel di Yogyakarta. Jurnal Pariwisata.

Jackson, L. A., *et al*. (2025). *Community-Based Tourism*: A Catalyst for Achieving the United Nations Sustainable Development Goals.

Javed, M. (2025). Development and Validation of Sustainable Tourism Indicators. Sage Journals.

Johnson, G., Scholes, R., & Whittington, R. (2020). Exploring Strategy: Text and Cases (12th ed.). Harlow: Pearson Education Limited.

Kandampully, J., Zhang, T., & Bilgihan, A. (2020). Customer Loyalty: A Review and Future Directions with a Special Focus on the Hospitality Industry. International Journal of Contemporary Hospitality Management

Kareiva, P., & Marvier, M. (2021). Conservation Science: Balancing the Needs of People and Nature (2nd ed.). Greenwood Village: Roberts and Company Publishers.

Kaza, S., Yao, L., Bhada-Tata, P., & Van Woerden, F. (2020). What a Waste 2.0: A Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050. World Bank Publications.

Khan, M., Uddin, M., & Gupta, N. (2021). *Big data* analytics: A survey of architecture, tools and challenges. Journal of Big Data, 8(1), 1–33.

Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2020). Intermediate Accounting (17th ed.). Hoboken, NJ: Wiley.

Kotler, P., & Keller, K. L. (2022). Marketing Management (16th ed.). Harlow: Pearson Education Limited.

Le Blanc, D. (2020). Integrating the Sustainable Development Goals into Development Co-operation: A Contribution to Policy Coherence. OECD Development Policy Papers, No. 15.

Leiper, N. (2021). Tourism Management (Revised Edition). Frenchs Forest: Pearson Education Australia.

Li, X., Wang, Y., & Fesenmaier, D. R. (2021). Big Data and Visitor Analytics in Tourism Management: Trends, Applications, and Implications. Journal of Travel Research, 60(6), 1250–1267.

Logan, W., Langfield, M., & Craith, M. N. (2020). Cultural Heritage and Sustainable Development. Routledge.

Longley, P. A., Goodchild, M. F., Maguire, D. J., & Rhind, D. W. (2021). Geographic Information Science and Systems (5th ed.). Wiley.

López-Bonilla, G., & López-Bonilla, L. (2022). Sustainable spatial planning in tourism destinations: Strategies and impacts. Journal of Sustainable Tourism, 30(7), 1523–1541.

Lubis, L. (2024). Heritage Conservation in Indonesia: Policy Review. Perspektif Hukum Journal.

Mauliyanti, A., Sujianto, A. E., & Nurrohman, D. (2024). Local community-based sustainable tourism development towards community welfare. Proceeding of International Conference on Education, Society and Humanity, Vol. 2 No. 2.

McCauley, D. (2021). Energy Justice and Renewable Energy Systems. Palgrave Macmillan.

Metcalf & Eddy. (2020). Wastewater Engineering: Treatment and Resource Recovery (5th ed.). New York: McGraw-Hill Education.

Mihalic, T., & Kuščer, K. (2021). Tourism *Carrying Capacity* and Sustainable Tourism Development. Journal of Sustainable Tourism.

Milano, C., Cheer, J. M., & Novelli, M. (2021). Overtourism: Excesses, Discontents and Measures in Travel and Tourism. Wallingford: CABI.

Morrison, A. M. (2022). Marketing and Managing Tourism Destinations (3rd ed.). New York: Routledge.

Muda, F. (2025). Community participation in Indonesian sustainable tourism. PSSJ: Policy, Society, and Sustainability Journal.

Muniz, E. C. L., Dandolini, G. A., Biz, A. A., & Ribeiro, A. C. (2020). Customer knowledge management and smart tourism destinations: a framework for the smart management of the tourist *experience* – SMARTUR. Journal of Knowledge Management, 25(5), 1336–1361.

Murti, N. (2025). Analysis of the Tourism Attractiveness of ITERA Reservoir and Sustainability Implications. International Journal of Applied Science and Tourism Engineering.

Nguyen, T., Johnson, P., & Young, T. (2020). Tourism Planning and Sustainable Destination Development. Journal of Sustainable Tourism Studies.

Ningsih, C., & Widodo, T. (2021). The role of tourism sector in improving MSMEs development and regional economy. Journal of Asian Finance, Economics and Business, 8(3), 911–918.

Nugroho, Y. (2023). The Role of Local Knowledge in Natural Resources Conservation: An Environmental Anthropological Perspective in Traditional Agriculture. Global International Journal of Innovative Research, 97–106.

OECD. (2020). Green Growth Indicators 2020. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development.

Oklevik, O., Gössling, S., Hall, C. M., Jacobsen, J. K. S., Grøtte, I. P., & McCabe, S. (2019). Overtourism, optimisation, and destination performance indicators: A case study of tourism in Norway. Journal of Sustainable Tourism, 27(12), 1807–1824.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). 2020. OECD Tourism Trends and Policies 2020. Paris: OECD Publishing.

Paeleman, I., Shahid, S., & Darnall, N. (2024). Sustainability certification and organizational credibility: The role of third-party verification in strengthening *stakeholder* trust. Journal of Business Ethics.

Phillips, R., & Pittman, R. H. (2020). An Introduction to Community Development (2nd ed.). New York: Routledge.

Pike, S., & Page, S. J. (2020). Destination Marketing Organizations and Destination Marketing: A Narrative Analysis of the Literature. Tourism Management.

Pradana, G. Y. K. (2021). Problematika regenerasi seni pertunjukan ritual Bali. Mudra: Jurnal Seni Budaya, 36(2), 170–181.

Prayoga, T. Z., Rahmiati, F., Amin, G., Goenadhi, F., & Hariri, M. (2024). Boosting Local Economy through Tourism: *Community-Based Tourism* on Cultural Tourism Activities. Ilomata International Journal of Social Science, 5(2), 499–511.

Priatmoko, S., Kabil, M., Purwoko, Y., & Dávid, L. (2021). Rethinking sustainable *community-based tourism*: A case of tourism SMEs development. Journal of Tourism and Sustainable Development.

Primack, R. B. (2020). Essentials of Conservation Biology (7th ed.). Sunderland: Sinauer Associates.

Purwanti. (2022). Analisis Efektivitas Sistem Informasi dalam Pelayanan Publik. Jurnal Administrasi Publik.

Putra, I. B. R., Sudiarthi, D. N. A., Widarsini, N. P. N., Teguh, I. W., Nama, I. K., & Temaja, I. G. B. W. B. (2025). Revitalization of Regional Language as Cultural Identity in the Digital Era. Eastasouth Journal of Social Sciences and Humanities.

Rahmadina, R. (2025). Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) sebagai upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan terhadap lingkungan. E-Jurnal Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan, 14(1), 49–58.

Rahmafitria, F. (2020). Tourism Planning and Planning Theory: Historical Roots and Contemporary Alignment. Journal of Outdoor Recreation and Tourism.

Razzaq, A., *et al*. (2021). The impact of tourism on economic growth and environmental outcomes in top GDP countries. Journal of Economic Studies.

Reed, M. S. (2020). Participatory methods for sustainable development. London: Routledge.

Reed, M. S., Vella, S., Challies, E., de Vente, J., Frewer, L., Hohenwallner-Ries, D., Huber, T., Neumann, R. K., Oughton, E. A., Del Ceno, J. S., & van Delden, H. (2020). A theory of participation: what makes *stakeholder* and public engagement in environmental management work? Restoration Ecology, 28(S1), S7–S17.

REN21. (2023). Renewables 2023 Global Status Report. Paris: REN21 Secretariat.

Renaldi, F. (2025). Peningkatan Kapasitas Pengetahuan UMKM dalam Pengembangan Usaha. Journal of Community Knowledge and Welfare.

Richards, G. (2021). Rethinking Cultural Tourism. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.

Ridwan, R., & Putri, I. M. (2022). Partisipasi masyarakat dalam proses perumusan perencanaan pembangunan desa. Jurnal Pembangunan dan Pemerintahan Daerah.

Ritchie, B. W. (2021). Managing Educational Tourism. Bristol: Channel View Publications.

Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2022). Organizational Behavior (18th ed.). Harlow: Pearson Education Limited.

Rockström, J., Gaffney, O., Rogelj, J., Meinshausen, M., Nakicenovic, N., & Schellnhuber, H. J. (2021). Planetary Boundaries: Guiding Human Development on a Changing Planet. Science, 347(6223), 1259855.

Rosihan Anwar, A. N., Rindu Garvera, R., Eet Saeful Hidayat, D. S. Sidik, S. K. Oktarimayunda, M. N. Azhar, & A. R. Putri. (2025). Desain Pengembangan Smart Governance Tourism dalam Mendukung Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Pangandaran. Jurnal Dinamika Ilmu Administrasi.

Rothaermel, F. T. (2021). Strategic Management: Concepts (4th ed.). New York: McGraw-Hill Education.

Ruban, D. A. (2021). Natural resources of tourism: Towards sustainable exploitation on a regional scale. Sustainability.

Rusu, T. M. (2024). Sustainability Performance Reporting. MDPI Sustainability.

Sachs, J. D. (2021). The Age of Sustainable Development. Columbia University Press.

Saputra, I. P. D. A. (2024). Pentingnya pariwisata berkelanjutan dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Al Mikraj – Jurnal Studi Islam dan Humaniora.

Scheyvens, R. (2020). Empowerment and sustainable tourism development. Tourism Geographies, 22(3), 456–458.

Scheyvens, R., & Biddulph, R. (2021). Inclusive tourism development. Tourism Geographies, 23(1–2), 1–21.

Seraphin, H., & Gowreesunkar, V. (2021). Sustainable Tourism: Managing Resources, Communities and the Environment. Routledge.

Setiawan, R. (2025). Digital marketing strategy for sustainable performance of MSMEs. Research Horizon Journal.

Sharabati, A. A. A., *et al*. (2024). The Impact of Digital Marketing on the Performance of SMEs and Digital Transformation. Sustainability, 16(19).

Sigala, M. (2020). Tourism and COVID-19: Impacts and implications for advancing and resetting industry and research. Journal of Business Research, 117, 312–321.

Smith, M., & Xiao, H. (2021). Cultural impacts of tourism: Explorations in identity, authenticity and commodification. Journal of Tourism and Cultural Change, 19(3), 289–309.

Sovacool, B. K. (2020). Decarbonizing the energy system: The role of renewable energy in energy transitions. Energy Research & Social Science.

Sovacool, B. K. (2021). Energy Policy and Global Energy Transition. Cambridge University Press.

Stiglitz, J. E., Fitoussi, J. P., & Durand, M. (2022). Measuring What Counts for Economic and Social Performance. Oxford University Press.

Su, M. M., & Wall, G. (2022). Community Participation in Tourism and Cultural Heritage Management. Journal of Sustainable Tourism.

Suansri, P. (2020). *Community-Based Tourism* Handbook. Bangkok: Responsible Ecological Social Tours (REST).

Sugara, H., & Perdana, T. I. (2021). Nilai moral dan sosial tradisi pamali di Kampung Adat Kuta sebagai pendidikan karakter. Edukasi: Jurnal Pendidikan, 19(1), 1–15.

Suryawan, M. A., Artino, A., Rosid, A., Putra, R. K., & Yeni, A. (2025). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Kearifan Lokal dan Ekonomi Kreatif. Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan, 4(2).

Sustainable Development Goal 8.9.1: Tourism direct GDP as a proportion of total GDP and in growth rate. United Nations Sustainable Development Goals.

Sya'ban, M. (2025). Model Pariwisata Berkelanjutan (Sustainable Tourism) dalam Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat. Jurnal Mutawasith.

Tchobanoglous, G., & Kreith, F. (2022). Handbook of Solid Waste Management (3rd ed.). New York: McGraw-Hill Education.

Tosun, C. (2020). Community Participation in Tourism Development. Tourism Planning and Development Journal.

Tse, A. C. B., & So, S. (2022). Collaborative partnerships in *community-based tourism*: Enhancing sustainable development through *stakeholder* cooperation. Journal of Sustainable Tourism, 30(8), 1445–1462.

UNEP (2022). Global Resources Outlook 2022: Resource Efficiency and Sustainable Development. United Nations Environment Programme.

UNEP. (2021). Making Peace with Nature: A Scientific Blueprint to Tackle the Climate, Biodiversity and Pollution Emergencies. Nairobi: United Nations Environment Programme.

UNESCO. (2021). Biosphere Reserves: The Seville Strategy and the Statutory Framework of the World Network of Biosphere Reserves. Paris: UNESCO Publishing.

UNESCO. (2021). Intangible Cultural Heritage and Sustainable Development. Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.

UN-Habitat. (2020). World Cities Report 2020: The Value of Sustainable Urbanization. Nairobi: United Nations Human Settlements Programme.

United Nations Environment Programme (UNEP). (2021). Environmental Monitoring and Assessment for Sustainable Development. United Nations Environment Programme.

UNWTO. (2020). International Recommendations for Tourism Statistics 2008 (IRTS 2008) – 2020 Edition. Madrid: World Tourism Organization.

UNWTO. (2021). International Tourism Highlights 2021 Edition. World Tourism Organization.

UNWTO. (2021). Sustainable Tourism for Development Guidebook. Madrid: United Nations World Tourism Organization.

UNWTO. (2022). Global Guidelines for Sustainable Tourism Development. Madrid: World Tourism Organization.

UNWTO. (2022). Tourism *Carrying Capacity* and Visitor Management: A Guide for Sustainable Destination Management. Madrid: World Tourism Organization.

UNWTO. 2021. Tourism and Rural Development: A Policy Perspective. Madrid: World Tourism Organization.

Van Dyke, F. (2020). Conservation Biology: Foundations, Concepts, Applications (3rd ed.). Dordrecht: Springer.

Veseli, A. (2025). The impact of digital marketing on promotion and sustainable tourism development. Tourism and Hospitality Journal.

Wahyudi, F. E. (2022). The Role of Social Capital in Community-Based Ecotourism. Journal of Regional and Hospitality Studies.

Wang, S., & Cheablam, O. (2025). Sustainable Tourism and Its Environmental and Economic Impacts: Fresh Evidence from Major Tourism Hubs. Sustainability, 17(11), 5058.

Wang, W., Zhang, Q., & Hao, J. (2025). How Does Green Factory Certification Affect Corporate Sustainability Performance: Evidence from China. Sustainability, 17(1), 61.

Weaver, D., & Lawton, L. (2021). Tourism Management (6th ed.). Milton, QLD: John Wiley & Sons Australia.

Wibowo, T. A. (2025). Strategy for the Development of Independent Tourism Village through Inventory of Tourism Potential. TourSci Journal.

Widianingsih, I. (2020). Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah. Dalam: Perencanaan pembangunan partisipatif dan tata kelola pemerintahan daerah. Bandung: Universitas Padjadjaran Press.

Widiati, I. A. P., & Permatasari, N. L. G. (2022). Strategi pengembangan pariwisata berkelanjutan berbasis lingkungan pada fasilitas penunjang pariwisata di Kabupaten Badung. Jurnal Kajian Pariwisata.

World Bank. (2021). Worldwide Governance Indicators. Washington, DC: The World Bank.

World Tourism Organization. (2020). Inclusive Tourism Development: Promoting Accessible and Inclusive Tourism for All. Madrid: UNWTO.

World Travel & Tourism Council (WTTC). (2021). Economic Impact Report 2021. London: WTTC.

Yang, Y. (2023). Progress in sustainable tourism research: An analysis of global literature. Sustainability, 15(3), 2755.

Yin, Y., Gao, J., & Pan, Y. (2024). What Impacts Tourists' Co-Creation Experiences in Smart Tourism Destinations? A Mixed Methods Research from Four Chinese Smart Tourism Destinations. Tourism and Hospitality, 5(4), 1327–1343.

Zhang, J., & Zhang, Y. (2021). Tourism development and infrastructure investment: Evidence from regional economic growth. Sustainability, 13(21), 11832.

Zhao, J. (2023). Tourism industry and employment generation in emerging economies. Economic Research–Ekonomska Istraživanja.

GLOSARIUM

Akomodasi	Fasilitas tempat tinggal sementara yang disediakan bagi wisatawan selama melakukan perjalanan wisata.
Atraksi	Segala bentuk daya tarik alam, budaya, atau buatan yang mampu menarik minat wisatawan untuk mengunjungi suatu destinasi.
Budaya	Nilai, tradisi, adat istiadat, serta praktik sosial yang berkembang dalam masyarakat dan berpotensi menjadi daya tarik wisata.
Destinasi	Wilayah atau tempat yang memiliki daya tarik wisata, fasilitas pendukung, serta aksesibilitas yang memungkinkan wisatawan berkunjung dan memperoleh pengalaman wisata.
Ekonomi	Sistem aktivitas yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi barang serta jasa yang mendukung perkembangan sektor pariwisata.
Ekowisata	Bentuk kegiatan pariwisata yang berorientasi pada pelestarian lingkungan alam, pendidikan konservasi, serta pemberdayaan masyarakat lokal secara bertanggung jawab.
Implementasi	Proses penerapan kebijakan, rencana, atau strategi pariwisata dalam praktik nyata di lapangan.
Infrastruktur	Berbagai fasilitas dasar seperti jalan, listrik, air, serta telekomunikasi yang mendukung kelancaran aktivitas pariwisata.
Inovasi	Proses pengembangan ide, metode, atau produk baru yang mampu meningkatkan kualitas serta daya tarik sektor pariwisata.
Kapasitas	Kemampuan suatu destinasi wisata dalam menampung jumlah wisatawan tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan atau gangguan sosial.

Keberlanjutan	Prinsip pengelolaan sumber daya yang menekankan pemenuhan kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya.
Kebijakan	Keputusan atau pedoman yang ditetapkan oleh pihak berwenang sebagai dasar dalam pengelolaan dan pengembangan sektor pariwisata.
Kolaborasi	Kerja sama antara berbagai pihak seperti pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, dan akademisi dalam pengembangan pariwisata.
Komunitas	Kelompok masyarakat yang hidup dalam suatu wilayah tertentu dengan kepentingan bersama dalam pengelolaan serta pemanfaatan sumber daya pariwisata.
Konservasi	Berbagai upaya perlindungan, pelestarian, dan pengelolaan sumber daya alam maupun budaya guna menjaga keberadaannya secara berkelanjutan.
Lingkungan	Keseluruhan kondisi alam, ekosistem, serta unsur biotik dan abiotik yang memengaruhi keberlangsungan kegiatan pariwisata.
Manajemen	Proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan pengelolaan pariwisata secara efektif dan efisien.
Pariwisata	Kegiatan perjalanan yang dilakukan seseorang atau kelompok ke suatu tempat di luar lingkungan tempat tinggal dengan tujuan rekreasi, pendidikan, bisnis, atau kepentingan lain yang didukung oleh berbagai fasilitas dan layanan wisata.

INDEKS

A

akademik · 8, 21
aksesibilitas · 4, 10, 11, 51, 52, 53, 58, 59, 62, 65, 72, 82, 83, 97, 104, 112, 139, 140, 222, 231
audit · 32, 38, 161, 162, 206, 207, 209

B

behavior · 222
big data · 174, 178, 179, 183, 196

C

cloud · 196

D

diferensiasi · 3, 25, 27, 52, 54, 59
digitalisasi · 92, 173, 193, 194, 195, 196
disparitas · 193
distribusi · 5, 13, 19, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 48, 55, 56, 58, 60, 62, 63, 66, 67, 116, 119, 120, 137, 138, 140, 156, 158, 167, 174, 179, 181, 195, 201, 202, 209, 231
domestik · 12, 57, 58, 60, 98, 103, 109, 122, 201

E

ekonomi · 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 80, 81, 82, 84, 85, 86,91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 101, 103, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 124, 127, 128, 129, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 143, 149, 150, 153, 154, 155, 156, 158, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 170, 171,178, 184, 192, 193, 197, 199, 201, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 240
ekspansi · 24
emisi · 31, 32, 61, 86, 88, 89, 153, 154, 155, 156, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 171, 200
empiris · 8, 36, 203, 208, 211, 213
entitas · 24

F

finansial · 23, 24, 25, 26, 35, 43, 116, 119, 192, 194, 196, 211
fiskal · 16, 58
fleksibilitas · 100, 167, 180

fluktuasi · 20, 24, 59, 167, 168, 177
fundamental · 1, 3, 38, 45, 51, 56

G

geografis · 48, 52, 82, 169, 184, 185
globalisasi · 20, 127, 131

I

inflasi · 24
infrastruktur · 4, 7, 10, 11, 13, 20, 32, 34, 46, 48, 51, 52, 53, 56, 58, 62, 64, 65, 66, 73, 87, 92, 95, 97, 102, 112, 115, 137, 156, 168, 169, 171, 175, 183, 184, 186, 187, 188, 192, 193, 196, 197, 200
inklusif · 1, 16, 17, 18, 35, 37, 40, 42, 44, 53, 57, 61, 68, 84, 106, 121, 125, 136, 138, 139, 140, 170, 178, 201, 222, 240
inovatif · 12, 73, 89, 101, 173, 178, 183
integrasi · 16, 17, 18, 23, 39, 51, 52, 55, 58, 66, 83, 115, 116, 132, 158, 167, 169, 171, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 183, 187, 188, 189, 195, 196, 214
integritas · 42, 202
interaktif · 73, 123, 173, 174, 175, 179, 185, 186, 188, 191
investasi · 5, 11, 24, 25, 32, 34, 37, 43, 55, 58, 62, 96, 99, 102, 109, 112, 113, 115, 122, 127, 193, 194, 196, 197, 201
investor · 10, 11, 40, 44, 60, 92, 137, 138, 160, 162

K

kolaborasi · 5, 13, 17, 21, 33, 35, 36, 40, 43, 54, 73, 95, 102, 120, 168, 169, 170, 174, 178, 179, 181, 203
komparatif · 52
komprehensif · 9, 36, 37, 55, 72, 82, 83, 85, 86, 160, 177, 192, 196, 204, 208, 209, 240
komputasi · 185, 187, 188
konsistensi · 52, 54, 212, 213
kredit · 122

M

manajerial · 13, 49, 102, 123, 176, 184
metodologi · 205
mikroorganisme · 145, 151, 152

N

negosiasi · 7, 39
neraca · 111

O

otoritas · 94, 107

P

politik · 35, 41
proyeksi · 52, 53, 168, 169

R

rasional · 46, 77
real-time · 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 182, 183, 184, 186, 187, 188, 189, 190, 194, 195
regulasi · 10, 32, 33, 34, 45, 48, 54, 55, 62, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 102, 133, 148, 156, 157, 158, 162, 192, 195, 202, 206, 209, 215
relevansi · 207

S

siber · 194, 196
stabilitas · 16, 20, 24, 26, 27, 31, 33, 47, 60, 112, 143, 144, 145, 146, 163, 164, 165, 197, 202
stakeholder · 34, 35, 36, 38, 39, 40, 178, 225, 226, 228
sustainability · 24, 42, 108, 205, 220, 222

T

tarif · 13
teoretis · 23
transformasi · 1, 39, 52, 54, 60, 154, 160, 173, 187, 188, 192, 193, 195, 196, 197
transparansi · 16, 37, 38, 68, 70, 107, 140, 157, 159, 174, 184, 187, 202, 204, 205, 206, 208, 210, 213

V

varietas · 167

W

workshop · 8

BIOGRAFI PENULIS



Dr. Ir. Agustina Nurul Hidayati, M.T.

Lahir di Jakarta, 3 Agustus 1966. Lulus S1 Jurusan Teknik Planologi ITB Bandung tahun, Lulus S2 Program Magister Perencanaan Kota dan Daerah UGM Yogyakarta tahun, dan Lulus S3 Program Doktor Ilmu Arsitektur Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Saat ini sebagai Dosen di Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang pada Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota dan Program Pascasarjana Magister Teknik Sipil. Anggota Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP): Ahli Utama. Beberapa Mata Kuliah yang diampuh antara lain: Perencanaan Kota, Perencanaan Transportasi, Metodologi Penelitian dan Mata Kuliah Lainnya di Bidang Perencanaan Wilayah dan Kota dan Magister Teknik Sipil. Terlibat aktif dalam riset di bidang Perencanaan dan Perancangan Kota, Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Pariwisata



Bukhari Muslim, S.E., M.M., M.Si., C.TL., C.BC., C.SM., C.ME., C.LI.

Lahir di Dompu, 30 Mei 1976. Lulus S1 Ilmu Manajemen pada STIE Kalpataru, Lulus S2 pada STIE IPWIJA dan Lulus S2 berikutnya pada Universita Krisnadwipayana di Program Studi Ilmu Administrasi tahun 2020. Saat ini mengajar pada KBS : Kalpataru Business School.



Dr. Ir. Ardiyanto Maksimilianus Gai, ST., M.Si., M.M

Lahir di Nangapanda, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 16 Januari 1988. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Teknik Planologi/Perencanaan Wilayah dan Kota ITN Malang dan melanjutkan S2 pada Magister Pengelolaan Sumberdaya Lingkungan dan Pembangunan Universitas Brawijaya Malang. Selain itu penulis juga lulus pendidikan S 2 Magister Manajemen di Universitas Merdeka Malang, dan Menlanjutkan pendidikan Magister Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Sebelas Maret (UNS). Penulis pernah menempuh pendidikan non-gelar pada Credit Earning Program (CEP) di Universitas Indonesia pada Program Kajian Pengembangan Perkotaan. Dan Penulis menyelesaikan program profesi Insinyur (Ir) di Universiras Kristen Petra. Penulis menyelesaikan Program Doktoral (S3) pada Program Studi Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan, pada IPB University. Penulis merupakan anggota dan pengurus Ikatan Ahli Perencana (IAP) Jawa Timur dan merupakan tenaga ahli tersertifikasi ahli utama. Beberapa Mata Kuliah yang diampuh adalah Ekonomi Wilayah dan Kota, Teori Perencanaan Wilayah, Perencanaan dan Pembiayaan Pembangunan, Analisis Sumberdaya dan Lingkungan, Perencanaan Desa, dan Perencanaan Transportasi.



I Nyoman Tri Sutaguna, S.ST.Par., M.Par.

Lahir di Surabaya pada tahun 1980. Pria ini menekuni dunia kuliner sejak duduk di bangku kuliah Diploma III Politeknik Negeri Bali (PNB) jurusan Pariwisata Akomodasi Perhotelan. Ia lalu melanjutkan studi Diploma IV di Fakultas Pariwisata Universitas Udayana (UNUD) Program Studi D4 Pariwisata dan S2 Program Studi Kajian Pariwisata Universitas Udayana (UN UD).Pengalaman kerja diberbagai hotel, pabrik r oti, restoran, katering, hingga mendalami kuliner di kapal pesiar. Aktivitas sehari-harinya adalah sebagai dosen tetap yang mengajar di Prodi Pengelolaan Perhotelan Fakultas Pariwisata Universitas Udayana dan juga menjadi konsultan kuliner. Berbekal pengetahuan dan kepeduliannya pada bidang yang ditekuni, penulis dipercayai Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pariwisata untuk menjadi asesor dan menguji kompetensi (assessment) terhadap pekerja ataupun mahasiswa yang ingin mendapatkan sertifikat uji kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
Sinta ID 6199496.

MANAJEMEN PARIWISATA BERKELANJUTAN

KONSEP, STRATEGI, DAN IMPLEMENTASI

Buku referensi "Manajemen Pariwisata Berkelanjutan: Konsep, Strategi, dan Implementasi" ini membahas secara komprehensif bagaimana sektor pariwisata dapat dikelola secara bertanggung jawab dengan memperhatikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan keberlanjutan sosial budaya. Buku referensi ini membahas konsep dasar pariwisata berkelanjutan, prinsip-prinsip pengelolaan destinasi wisata yang berorientasi pada keberlanjutan, serta peran berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, pelaku industri pariwisata, masyarakat lokal, dan akademisi dalam menciptakan sistem pariwisata yang inklusif dan berdaya saing. Selain membahas landasan teoritis, buku referensi ini juga membahas berbagai strategi perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan destinasi wisata yang adaptif terhadap tantangan global seperti perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan dinamika sosial ekonomi masyarakat. Melalui pendekatan konseptual dan aplikatif, buku referensi ini memberikan gambaran mengenai praktik implementasi pariwisata berkelanjutan yang dapat diterapkan di berbagai daerah, sehingga diharapkan mampu menjadi referensi bagi mahasiswa, peneliti, praktisi pariwisata, serta pengambil kebijakan dalam merancang dan mengelola pariwisata yang berkelanjutan dan memberikan manfaat jangka panjang.

PT MEDIA PENERBIT INDONESIA

mediapenerbitindonesia.com
+6281362150605
Penerbit Idn
@pt.mediapenerbitidn

ISBN 978-634-316-087-8
9 786343 160878